



244/FT.01/TESIS/07/2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PENYERAPAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
MILIK (RUSUNAMI) OLEH MASYARAKAT
BERPENGHASILAN MENENGAH KEBAWAH (MBM) DAN
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
DI PERKOTAAN**

TESIS


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik

**RAHMAT YUSMAL ANDI
0906580073**

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
KEKHUSUSAN MANAJEMEN PROYEK
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rahmat Yusmal Andi
NPM : 0906580073
Tanda Tangan : 
Tanggal : 22 Juni 2011

THE PAGE OF RETIFICATION

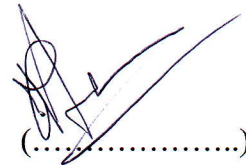
This Thesis had proposed by :

Name : Rahmat Yusmal Andi
NPM : 0906580073
Study Program : Civil Engineering
Subject : Absorption Analysis of Low Income Apartment
(Rusunami) by Middle down Income Community (MBM)
and Low Income Community (MBR) in Urban Areas

Had presented successfully to the lectures and approved as a prerequisite to get
The Degree of Master Engineering on Civil Engineering, Project Management
Postgraduate Program, Engineering Faculty, University of Indonesia.

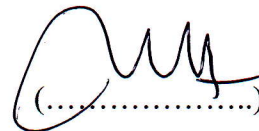
The Lectures

Guide's Lecturer I : Dr. Ir. Ismeth Abidin



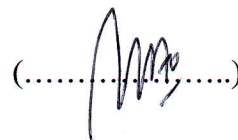
(.....)

Guide's Lecturer II : Prof. Dr. Ir. Yusuf Latief, MT



(.....)

Lecturer I : M. Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D



(.....)

Lecturer II : Ir. Eddy Subiyanto, MM. MT



(.....)

Lecturer III : Juanto Sitorus, S,si, MT, PMP



(.....)

Stated to : Salemba

Date : 22 June 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Teknik Program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Bidang Kekhususan Manajemen Proyek pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ismeth S. Abidin, selaku dosen pembimbing I dan orang tua bagi penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Yusuf Latief, MT, selaku dosen pembimbing II dan orang tua bagi penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Didik Sunardi, Ibu Aisah Dewi, Bapak Ervin, Ibu Rum, dan Ibu Frila dari Pihak Kementerian Perumahan Rakyat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak Heru, Bapak Chaeril Azwar, Ibu Melda, dan Ibu Tita dari Pihak Bank Tabungan Negara yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Askolani dari Pihak Kementerian Keuangan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini;
6. Karyawan/karyawati Program Magister Manajemen Proyek, terutama Mbak Dian, yang selama ini telah membantu kelancaran semua prosedur administrasi;

7. Kedua Orang tua kami yang sangat kami cintai, Papa H. Albernis, SE. dan Mama Hj. Yusmaryeti, yang tiada henti memberikan dukungan moral dan bantuan doa selama perkuliahan sampai selesainya penyusunan tesis ini;
8. Abang tercinta Muhammad Yusmal Niko, ST, ME. dan istri yang selalu memberikan arahan dan dukungan moral sampai selesainya penyusunan tesis ini;
9. Selvi Eliza, yang selalu setia mendampingi dan menyayangi dalam penyusunan tesis ini;
10. Sahabat-sahabat di Program Magister Manajemen Proyek yang saling mendukung selama masa perkuliahan;
11. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari pula bahwasanya adalah sifat dasar manusia yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan termasuk halnya dengan saya dalam menyusun tesis ini. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan masukan membangun dari segenap pembaca terhadap kekurangan-kekurangan tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT, berkenan meridhoi penyusunan tesis ini dan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini.

Depok, 22 Juni 2011

Rahmat Yusmal Andi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Yusmal Andi
NPM : 0906580073
Program Studi : Teknik Sipil
Departemen : Teknik Sipil
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisa Penyerapan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Oleh Masyarakat Berpenghasilan Menengah Kebawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perkotaan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 22 Juni 2011

Yang menyatakan



(Rahmat Yusmal Andi)

ABSTRAK

Nama : Rahmat Yusmal Andi
Program Studi : Teknik Sipil
Judul : Analisa Penyerapan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Oleh Masyarakat Berpenghasilan Menengah Kebawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perkotaan

Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: *Housing Finance System* yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di *landed house* walaupun di pinggiran kota.

Kata Kunci :

Rusunami, KPR Sarasuna Bersubsidi, Perkotaan, *Housing Finance System*, *Landed house*

Name : Rahmat Yusmal Andi
Study Program : Civil Engineering
Title : Absorption Analysis of Low Income Apartment (Rusunami) by Middle down Income Community (MBM) and Low Income Community (MBR) in Urban Areas

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument. Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban.

Key word :

Rusunami, KPR Sarasuna Bersubsidi, Urban Area, Housing Finance System, Landed House.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.2.1 Identifikasi Masalah	2
1.2.2 Signifikansi Masalah	4
1.2.3 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Keaslian Penelitian	7
2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pendahuluan	8
2.2 Pembangunan Rusunami	8
2.2.1 Pengertian Rusunami	8
2.2.2 Rusunami Sebagai Infrastruktur	10
2.2.3 Pendanaan Proyek Rusunami	11
2.3 Fasilitas Pemilikan Pembiayaan Pemilikan Rusunami Untuk Masyarakat Sasaran MBM dan MBR di Perkotaan	12
2.3.1 Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Uang Muka	12
2.3.2 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	18
2.3.2.1 Proporsi Dana FLPP Untuk KPR Sejahtera Susun	19
2.3.2.2 Besaran Suku Bunga Subsidi Skema FLPP	19
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pendanaan Perumahan di Perkotaan	20
2.4.1 Sudut Pandang <i>Borrower</i>	21
2.4.1.1 Karakteristik Kredit yang tersedia (<i>Supply of Credit</i>)	21
2.4.1.2 Keterjangkauan Kredit (<i>Credit Affordability</i>)	22
2.4.2 Sudut Pandang <i>Lender</i>	22
2.4.2.1 Daya Tarik Investasi (<i>Investment Attractiveness</i>)	22

2.4.2.2	Keamanan Dana (<i>security of Fund</i>)	23
2.4.2.3	Keuntungan Untuk Pemegang Saham (<i>Profitability for Shareholder</i>)	23
2.4.3	Sudut Pandang Pemerintah (<i>Government</i>)	23
2.4.3.1	Penentuan Pencapaian Target Kebutuhan	24
2.4.3.2	Pembentukan Kondisi Ekonomi yang Kondusif	24
2.4.3.3	Pembentukan Kondisi Institusi yang Kondusif... ..	24
2.4.3.4	Pembentukan Kondisi Finansial yang Kondusif.. ..	24
2.4.3.5	Pembentukan Sektor Perumahan yang Kondusif	25
2.5	Beberapa Skema Pembiayaan Perumahan di Negara Lain	29
2.5.1	Singapura	29
2.5.2	Jerman	33
2.5.3	Denmark	36
2.5.4	Cina	39
2.6	<i>Housing Affordability dan Willingnes to Pay</i>	41
2.6.1	Indikator-Indikator <i>Housing Affordability and Willingnes to Pay</i>	42
2.6.1.1	Unit Pengeluaran (<i>Spending Unit</i>)	43
2.6.1.2	Pengeluaran Untuk Tempat Tinggal (<i>Shelter Expenditure</i>).....	43
2.6.1.3	Pendapatan (<i>Income</i>)	45
2.6.1.3	Keadaan-keadaan Khusus Pada Unit Pengeluaran	46
2.6.2	Pendekatan Terhadap Tingkat <i>Affordability</i>	46
2.6.2.1	<i>Minimum Budget</i>	47
2.6.2.2	<i>The Low Income Cut-Off</i>	48
2.6.2.3	<i>Shelter Cost to Income Ratio</i>	48
2.6.2.4	<i>Core Need</i>	48
2.6.2.5	<i>Residual Measure</i>	49
2.7	Kerangka Berfikir dan Hipotesa Penelitian	50
3.	METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1	Pendahuluan	52
3.2	Pemilihan Strategi Penelitian	52
3.3	Proses Penelitian	53
3.4	Variabel Penelitian	57
3.5	Pengumpulan Data	58
3.6	Analisis Data	64
4.	GAMBARAN PERATURAN PROYEK RUSUNAMI	65
4.1	Pendahuluan	65
4.2	Lahan Untuk Pembangunan Proyek Rusunami	67
4.3	Perizinan Pembangunan Proyek Rusunami	70
4.4	Kemudahan yang Diberikan Pemerintah Terhadap Pembangunan Proyek Rusunami	72
4.5	Lokasi Proyek Rusunami	74
4.6	Pedoman Teknis Pembangunan Proyek Rusunami	75
4.6.1	Ketentuan Umum	76

4.6.1.1	Kriteria Umum	76
4.6.1.2	Kriteria Khusus	76
4.6.2	Ketentuan Administratif	78
4.6.3	Ketentuan Teknis Tata Bangunan	79
4.6.4	Ketentuan Teknis Keandalan Bangunan	80
4.6.5	Ketentuan Biaya Bangunan Rusuna Bertingkat Tinggi ...	81
4.7	Kelayakan Hunian Rusunami	83
4.8	Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pembangunan Proyek Rusunami	91
4.9	Tanda Pemilikan Rusunami	93
4.10	Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS)	95
4.11	Pembelian Rusunami Secara Pesan	97
5.	PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA	104
5.1	Pendahuluan	104
5.2	Hasil Survey Kuesioner Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Masyarakat Sasaran Mendapatkan KPR Sarasuna Bersubsidi	104
5.3	Hasil Pengumpulan Data Sekunder Untuk Mengetahui Gambaran Masyarakat Sasaran yang Mendapatkan KPR Sarasuna Bersubsidi	107
5.4	Hasil Wawancara Terstruktur Untuk Mengetahui Penyebab Rendahnya Realisasi KPR Sarasuna Bersubsidi Oleh Masyarakat Sasaran	132
6.	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	137
6.1	Pendahuluan	137
6.2	Temuan	137
6.2.1	Progres Proyek Pembangunan Rusunami 2007-2010 ...	137
6.2.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berhasil atau Tidaknya MBM dan MBR untuk Mendapatkan kredit Subsidi Kepemilikan Rusunami di Perkotaan	137
6.2.3	Gambaran Masyarakat Sasaran yang Terserap KPR Sarasuna Bersubsidi	139
6.2.3.1	Harga Rusunami Vs Penghasilan Kelompok Sasaran	139
6.2.3.2	Kondisi %Cicilan ,Tenor dan Uang Muka KPR Sarasuna Bersubsidi Untuk Membeli Rusunami..	140
6.2.3.3	Umur, Tingkat Pendidikan, Status Perkawinan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pekerjaan Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami....	142
6.2.4	Penyerapan KPR Sarasuna Bersubsidi	143
6.3	Pembahasan	143
6.3.1	Progres Proyek Pembangunan Rusunami 2007-2010	143
6.3.2	Gambaran Masyarakat Sasaran yang Terserap KPR Sarasuna Bersubsidi	145
6.3.2.1	Harga Rusunami Vs Penghasilan Kelompok Sasaran	145

6.3.2.2	Kondisi %Cicilan ,Tenor dan Uang Muka KPR Sarasuna Bersubsidi Untuk Membeli Rusunami ...	148
6.3.2.3	Umur, Tingkat Pendidikan, Status Perkawinan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pekerjaan Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami	149
6.3.3	Penyerapan KPR Sarusuna Bersubsidi	149
6.3.4	Manfaat Temuan Penelitian Bagi Para Stakeholder	152
6.3.4.1	Masyarakat Sasaran	152
6.3.4.2	Pihak Perbankan	152
6.3.4.3	Pengembang	152
6.3.4.4	Pemerintah	153
6.3.5	Kaitan Hasil Penelitian dengan Manajemen Proyek	153
6.4	Pembuktian Hipotesa Penelitian	155
7.	KESIMPULAN DAN SARAN	156
7.1	Kesimpulan	156
7.2	Saran	159
	DAFTAR ACUAN	161
	DAFTAR REFERENSI	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pencapaian Pembangunan di Sektor Perumahan 2005-2009 ...	2
Tabel 2.1	Pencapaian Jumlah Tower Rusunami (November 2010)	11
Tabel 2.2	Aturan Subsidi Uang Muka Kepemilikan Rusunami	12
Tabel 2.3	Aturan Skema Subsidi Selisih Bunga Kepemilikan Rusunami ..	12
Tabel 2.4	Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran	13
Tabel 2.5	Batasan Harga Rusunami	14
Tabel 2.6	Batasan Nilai uang Muka dan KPR	14
Tabel 2.7	Nilai KPR Subsidi Pemilikan Rusunami dengan Skema FLPP .	19
Tabel 2.8	Porsi Pinjaman Perumahan Terhadap GNP Singapura Tahun 1990	33
Tabel 2.9	Standar Kontrak yang Ditawarkan Bauspar	36
Tabel 2.10	Porsi Pinjaman Kepemilikan Rumah terhadap Pinjaman Lain di Denmark (1999-2001)	38
Tabel 2.11	Tabel Istilah yang Berhubungan dengan <i>Housing Affordability Problem</i>	41
Tabel 2.12	<i>Guide for Family Budgeting</i>	47
Tabel 3.1	Strategi Penelitian menurut Yin (2006)	53
Tabel 3.2	Variabel Penelitian	57
Tabel 3.3	Format Kuesioner Penelitian ke Pakar	59
Tabel 5.1	Profil Pakar Pada Tahap Pengisian Kuesioner	104
Tabel 5.2	Jawaban Kuesioner Pakar	105
Tabel 5.3	Variabel Penelitian	107
Tabel 5.4	Data Penelitian (Data 1) yang Didapat / Data Total Penyerapan	108
Tabel 5.5	Penghasilan Golongan Kelompok Sasaran Vs Harga Rusunami	109
Tabel 5.6	Golongan Kelompok Sasaran Vs Umur & Tenor	111
Tabel 5.7	Golongan Kelompok Sasaran Vs % Cicilan & % Uang Muka	113
Tabel 5.8	Golongan Kelompok Sasaran Vs Tipe Rusunami	115
Tabel 5.9	Penghasilan Pembeli Vs Tipe Rusunami	117
Tabel 5.10	Harga Rusunami Vs Tipe Rusunami	119
Tabel 5.11	Persentase Uang Muka Vs Tipe Rusunami	121
Tabel 5.12	Tenor KPR Vs Tipe Rusunami	123
Tabel 5.13	% Cicilan KPR Vs Tipe Rusunami	125
Tabel 5.14	Gambaran Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Usia, Status pernikahan, Status Duda/Janda, Jumlah Anggota Keluarga, Penghasilan Suami/Istri Debitur, dan Tipe Rusun yang Dibeli	129
Tabel 5.15	Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran	133
Tabel 5.16	Suku Bunga KPR Sarasuna Bersubsidi	133
Tabel 5.17	Batasan Harga Rusunami	134
Tabel 5.18	Batasan Bantuan Uang Muka Kepemilikan Rusunami	134
Tabel 5.19	Kondisi Penyerapan KPR Saruna Bsrsubsidi oleh MBM dan MBR tahun 2007-2010	134
Tabel 5.20	Penyebab Rendahnya Jumlah Realisasi Kredit Subsidi Kepemilikan Rusunami oleh Masyarakat Sasaran MBM dan MBR di Perkotaan	136

Tabel 6.1	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berhasil atau Tidaknya MBM dan MBR untuk Mendapatkan kredit Subsidi Kepemilikan Rusunami di Perkotaan	138
Tabel 6.2	Kondisi Harga Rusunami yang Dibeli Setiap Golongan Masyarakat Sasaran	139
Tabel 6.3	Kondisi %Cicilan Setiap Kelompok Masyarakat Sasaran	140
Tabel 6.4	Kondisi Tenor dan Uang Muka Setiap Kelompok Masyarakat Sasaran	141
Tabel 6.5	Kondisi Umur, Tingkat Pendidikan, Status Perkawinan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pekerjaan Masyarakat Sasaran	142
Tabel 6.6	Kondisi Penyerapan KPR Saruna Bsrsubsidi oleh MBM dan MBR Tahun 2007-2010	143
Tabel 6.7	Batasan Harga Rusunami Setiap Kelompok Sasaran	145



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPR Sarusuna Bersubsidi	15
Gambar 2.2	Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan ...	16
Gambar 2.3	Bagan Alir Pengawasan dan Pengendalian KPR Sarasuna Bersubsidi	17
Gambar 2.4	Mekanisme Penentuan Suku Bunga FLPP (Rusunami)	19
Gambar 2.5	Skema Pendanaan FLPP Untuk Pemilikan Rusunami di Indonesia	20
Gambar 2.6	Skema Pendanaan Perumahan di Singapura	32
Gambar 2.7	Skema Pendanaan Perumahan Bauspar di Jerman	34
Gambar 2.8	Porsi Pinjaman Sistem Bauspar Terhadap Sumber Pinjaman Lain di Jerman Tahun 2002	35
Gambar 2.9	Skema Pendanaan <i>Mortgage Bank</i> di Denmark	37
Gambar 2.10	Segita Residual Measure	50
Gambar 2.11	Kerangka Berpikir Penelitian	51
Gambar 3.1	Proses Penelitian	56
Gambar 5.1	Golongan Kelompok Sasaran Vs Harga Rusunami	110
Gambar 5.2	Golongan Kelompok Sasaran Vs Umur & Tenor	112
Gambar 5.3	Golongan Kelompok Sasaran Vs % Cicilan & % Uang Muka	114
Gambar 5.4	Golongan Kelompok Sasaran Vs Tipe Rusunami	116
Gambar 5.5	Penghasilan Pembeli (Juta Rupiah) Vs Tipe Rusunami	118
Gambar 5.6	Harga Rusunami (Juta Rupiah) Vs Tipe Rusunami	120
Gambar 5.7	Persentase Uang Muka (%) Vs Tipe Rusunami	122
Gambar 5.8	Tenor KPR (Tahun) Vs Tipe Rusunami	124
Gambar 5.9	% Cicilan KPR Gol 3 Vs Tipe Rusunami	126
Gambar 5.10	% Cicilan KPR Gol 2 Vs Tipe Rusunami	127
Gambar 5.11	% Cicilan KPR Gol 3 Vs Tipe Rusunami	128
Gambar 5.12	Gambaran Pekerjaan Debitur	129
Gambar 5.13	Gambaran Tingkat Pendidikan Debitur	131
Gambar 5.14	Gambaran Jenis Kelamin Debitur	131
Gambar 5.15	Gambaran Jumlah Anggota Keluarga Debitur	131
Gambar 5.16	Gambaran Usia Debitur	132

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner ke Pakar
- Lampiran 2 : Data 1 Debitur KPR Sarasuna Bersubsidi
- Lampiran 3 : Data 2 Debitur KPR Sarasuna Bersubsidi
- Lampiran 4 : Jawaban Wawancara Terstruktur
- Lampiran 5 : Berita Acara Perbaikan Tesis



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan pendukung terciptanya keluarga yang berkualitas serta generasi mendatang yang lebih baik [1]. Kebutuhan akan rumah akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu kawasan. Hal ini sangat terasa di daerah-daerah perkotaan, dimana pertumbuhan jumlah penduduk tidak hanya berasal dari tingkat kelahiran yang ada, tapi juga berasal dari tingginya jumlah pendatang dari luar daerah dengan berbagai alasan. Sepanjang tahun 2005-2009, penambahan rumah tangga baru di Indonesia mencapai 3,6 juta rumah tangga. Hal ini tidak mampu diikuti dengan pembangunan rumah baru yang hanya mencapai 2,5 juta unit. Kondisi tersebut ditambah dengan 555.000 unit rumah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dihuni, kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kekurangan rumah (*backlog*) diperkirakan meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,455 juta unit pada akhir tahun 2009 dan keadaan tersebut 50% berada di perkotaan [2]. Selain itu sesuai data BPS tahun 2007, sebanyak 98% rumah tangga di Indonesia merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal yang memiliki keterbatasan daya beli dan penghasilan yang tidak tetap. Hal-hal ini menyebabkan munculnya pemukiman kumuh yang terus mengalami peningkatan sebesar 1,37 persen per tahunnya di Indonesia[3].

Untuk menanggulangi permasalahan perumahan di perkotaan dengan penduduk padat dan luas tanah yang terbatas, pemerintah melakukan pembangunan perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai, hal ini kemudian dikenal dengan sebutan rumah susun. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah mengacu kepada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 dan Peraturan Presiden RI nomor 4 tahun 1988 tentang rumah susun. Rumah susun yang dibangun terdiri dari rumah susun sederhana milik (Rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Rusunawa merupakan rumah susun yang hanya dijadikan tempat tinggal sementara dengan sistem sewa yang dibatasi dengan

jangka waktu tinggal pertama selama 2 tahun, sedangkan Rusunami merupakan rumah susun yang dapat dimiliki secara tetap oleh masyarakat khususnya MBM dan MBR di perkotaan. Selama periode tahun 2005-2009 pemerintah telah membangun Rusunawa sebanyak 37.709 unit dan Rusunami sebanyak 6.716 unit yang pada dasarnya diperuntukkan kepada 2 golongan masyarakat tersebut.

Tabel 1.1 Pencapaian Pembangunan di Sektor Perumahan 2005-2009

No	Pembangunan Perumahan	Jumlah
1	Pembangunan rumah baru layak huni	1.331.580 unit
2	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa	37.709 unit
3	Fasilitas pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik	6.716 unit
4	Fasilitas pembangunan / perbaikan perumahan rakyat	3.659.037 unit

Sumber : Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

Pembangunan Rusunami merupakan proyek yang penting dan strategis. Proyek ini bukan saja merupakan satu pilihan yang harus diambil dengan kondisi keterbatasan lahan dan jumlah penduduk yang semakin padat di perkotaan saat ini, namun juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, hal tersebut dikarenakan memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja [4]. Untuk menjamin keberlanjutan proyek Rusunami, skema pendanaan yang baik merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah dengan kelembagaan penyelenggara perumahan dan pemukiman yang ada telah berupaya agar penyerapan Rusunami tepat sasaran. Namun pada skema yang ada saat ini hasil yang dicapai masih belum maksimal.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek Rusunami di perkotaan adalah semakin terbatasnya lahan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal khusus bagi masyarakat sasaran MBM dan MBR, masih sulitnya perizinan, masih adanya ketidakterpaduan infrastruktur di masyarakat, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, dan kebijakan pembiayaan pemilikan satuan rumah susun yang belum mendukung [5]. Pada penelitian ini akan lebih dikhususkan terhadap kebijakan pembiayaan pemilikan satuan rumah susun yang belum mendukung. Hal ini sangat menghalangi upaya agar masyarakat sasaran dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Diperlukan kerja sama

setiap stakeholder yang terlibat untuk meminimalkan masalah-masalah tersebut. Pada proyek Rusunami terdapat beberapa stakeholder utama yang terlibat, diantaranya adalah pemerintah, perbankan, developer, kontraktor dan konsumen. Setiap stakeholder memiliki peran masing-masing untuk berjalannya proyek ini. Pemerintah sebagai regulator harus dapat memberikan regulasi yang jelas dan memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat menarik minat developer dan menjadikan masyarakat sasaran MBM dan MBR mampu menjangkau harga rumah susun di perkotaan, developer hendaknya memiliki komitmen untuk menyukseskan proyek dengan mengutamakan sasaran konsumen adalah masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perbankan dan lembaga pemerintah terkait harus lebih efisien dan cepat dalam melakukan verifikasi terhadap calon penerima subsidi KPR sehingga pembayaran dana kepada developer tidak tersendat-sendat.

Selanjutnya untuk mempercepat berjalannya proyek Rusunami, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. Keppres ini menyebutkan adanya insentif bagi konsumen berupa pemotongan pajak penjualan, subsidi uang muka, dan subsidi selisih bunga. Fasilitas subsidi kepemilikan yang diberikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008. Namun dengan berjalannya waktu skema ini sepertinya perlu dilakukan perbaikan, hal ini dirasakan karena subsidi ini hanya berjalan 4-8 tahun setelah itu masyarakat terpaksa membayar bunga normal mengikuti bunga pasar.

Dalam perkembangannya, pemerintah sedang merumuskan skema pendanaan yang lebih baik, hal tersebut untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya *default* dalam kredit pemilikan tempat tinggal oleh masyarakat sasaran MBM dan MBR. Perkembangan terbaru muncullah Keputusan Menteri Keuangan No.290/KMK.05/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang mengatur kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dijalankan oleh badan layanan umum pusat pembiayaan perumahan (BLU-PPP) [6]. Melalui FLPP suku bunga kredit tetap diharapkan dapat berlangsung sebesar 8,15%-9,95% selama 15 tahun. Namun pelaksanaan FLPP masih dalam tahap

penyempurnaan sehingga cara subsidi sebelumnya yang dikenal dengan sebutan KPR Sarusuna Bersubsidi masih akan dilakukan hingga akhir 2011 [7].

1.2.2 Signifikansi Masalah

Pelaksanaan program Rusunami untuk mengatasi masalah perumahan di perkotaan, khususnya untuk sasaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih belum optimal, temuan awal yang didapat pada pertengahan 2010 dari Kementerian Perumahan Rakyat bahwasanya dari tahun 2007- pertengahan 2010 memperlihatkan penyerapan subsidi kredit pemilikan Rusunami yang sangat rendah, dari total 14.485 unit dan 1.318 unit Rusunami yang terdata telah melakukan serah kunci di daerah Jakarta dan Bodetabek, jumlah unit yang telah berhasil mengalami pencairan dana untuk kepemilikan Rusunami dengan fasilitas subsidi selisih bunga dan uang muka hanya berjumlah 38 unit di Jakarta dan 24 unit di Tangerang [8]. Selain itu data dari Kemenpera (2010) memperlihatkan, bahwasanya di seluruh Indonesia mulai tahun 2007- 2010 dari 66.325 unit rencana Rusunami yang akan dibangun hanya, 15.803 unit yang telah mengalami serah kunci ke masyarakat.

Mengingat pentingnya keberhasilan penyerapan fasilitas pemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah-bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, maka penulis akan melakukan penelitian Analisa Penyerapan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Oleh Masyarakat Berpenghasilan Menengah-bawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perkotaan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini adapun permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan?

- b. Bagaimana gambaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhasil terserap oleh fasilitas kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan?
- c. Apa penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan.
- b. Mengidentifikasi gambaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhasil terserap oleh fasilitas kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan.
- c. Mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.

1.4 Batasan Masalah

Dari uraian di atas, adapun batasan masalah penelitian ini adalah .:

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian dan data primer yang berasal dari kuesioner dan wawancara terstruktur oleh para pakar (dari Kementrian Perumahan Rakyat dan Bank BTN) yang berhubungan dengan proyek Rusunami.
- b. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis deskriptif.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada, adapun sistematika penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
Bab ini menguraikan teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan dan analisa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN**
Bab ini menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan metode analisis pengolahan data yang digunakan di dalam penelitian.
- BAB IV GAMBARAN PERATURAN PTOYEK RUSUNAMI**
Bab ini menguraikan hal-hal yang telah diatur pemerintah menyangkut pelaksanaan proyek Rusunami di perkotaan.
- BAB V PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA**
Bab ini berisikan data sekunder dan data primer yang didapat dan analisis data tersebut untuk mencapai tujuan penelitian
- BAB VI TEMUAN DAN PEMBAHASAN**
Bab ini berisikan temuan dan pembahsan hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- BAB VII KESIMPULAN/ REKOMENDASI DAN SARAN**
Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pengolahan data, serta saran/rekomendasi mengenai temuan-temuan penting untuk dijadikan masukan dan pertimbangan terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

- a. Universitas Indonesia, khususnya PPSBIT (Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik)
- b. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Perumahan Rakyat.

1.7 Keaslian Penelitian

Analisa Penyerapan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Oleh Masyarakat Berpenghasilan Menengah kebawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perkotaan, sepanjang sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Adapun penelitian yang relevan dengan tesis ini yang pernah dilakukan adalah :

- a. Sugandhi, D.W., Tindakan strategis untuk meningkatkan produktivitas developer rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI) di DKI Jakarta, Tesis UI, 2008.
- b. Kasuma, P.S., Identifikasi kriteria pemilihan lahan rusunami yang menjadi daya tarik konsumen, Tesis UI, 2008.
- c. Amaryadi, Model Project Financing Pada Sistem Pasar di DKI Jakarta Dengan Simulasi Monte Carlo, Tesis UI, 2003
- d. Ibrahim, B., Project Financing Driven Feasibility Study Bangunan Gedung Komersial Dalam Rangka Optimasi Pemanfaatan Lahan Melalui Kerja Sama Investasi, Tesis UI, 2004

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Rumah Susun sederhana milik (Rusunami) muncul sebagai suatu upaya Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar yakni tempat tinggal yang layak huni dengan harga yang terjangkau. Upaya ini lebih detailnya merupakan suatu program pembangunan jangka menengah di bidang perumahan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional untuk tahun 2004-2009. Program ini sangat penting untuk menyeimbangkan penggunaan lahan di perkotaan, antara penggunaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman terhadap penggunaan lahan untuk pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi [9].

Penyeimbangan ini sangat penting untuk mengatasi pertumbuhan pemukiman kumuh yang merupakan kawasan di perkotaan, yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan, baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak dan cenderung membahayakan bagi masyarakat di perkotaan.

2.2 Pembangunan Rusunami

2.2.1 Pengertian Rusunami

Rumah Susun Sederhana Milik (rusunami) adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang digunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi yang memenuhi ketentuan [10]:

- a. Luas untuk hunian lebih dari 21m² dan tidak melebihi 36m²;
- b. Harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,-;
- c. Diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,- per bulan dan telah memiliki NPWP;

- d. Pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana;
- e. Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.
- f. Selain itu rusunami merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selanjutnya rusunami merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam melakukan penataan perumahan dan pemukiman yang harus berlandaskan kepada beberapa asas antara lain : asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan kepada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Adapun penjelasan setiap asas sebagai berikut [11]:

- a. Asas manfaat memiliki maksud pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman yang menggunakan berbagai sumber yang terbatas dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. Asas adil dan merata memiliki maksud bahwasanya hasil-hasil pembangunan perumahan dan pemukiman dapat dinikmati dengan adil dan merata oleh seluruh rakyat;
- c. Asas kebersamaan dan kekeluargaan memiliki maksud bahwasanya adanya suatu keadaan agar golongan masyarakat yang kuat membantu golongan masyarakat yang lemah dan mencegah terjadinya lingkungan pemukiman yang eksklusif;
- d. Asas kepercayaan kepada diri sendiri memiliki maksud segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan perumahan dan pemukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya dan peran serta masyarakat sehingga mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri;
- e. Asas keterjangkauan memiliki maksud bahwasanya hasil pembangunan perumahan dan pemukiman dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. Asas kelestarian lingkungan hidup memiliki maksud bahwasanya pembangunan perumahan dan pemukiman harus menunjang pembangunan

berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Selanjutnya dalam rangka membantu golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli secara tunai, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan yang bersifat langsung dengan memberikan kredit pemilikan jangka panjang dengan bunga rendah, maupun dengan cara tidak langsung dalam bentuk subsidi silang, keringanan dibidang perpajakan, pembangunan prasarana oleh pemerintah dan usaha-usaha lain yang dapat mengakibatkan harga rumah menjadi lebih rendah. Dalam hal rumah susun untuk hunian dibangun di atas tanah yang sebelumnya merupakan daerah pemukiman kumuh, maka pada masyarakat penghuni semula diberikan prioritas untuk menghuni rumah susun tersebut dan diberikan kemudahan-kemudahan sehingga harga rumah susun dapat terjangkau [12].

2.2.2 Rusunami Sebagai Infrastruktur

Dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan pada RPJM 2010-2014 pemerintah telah menyusun prioritas-prioritas pembangunan yang salah satunya adalah bidang infrastruktur. Pada bidang infrastruktur yang terdiri dari 7 substansi inti program yang ada, perumahan rakyat merupakan substansi inti program ke-4 yang mencakup pembangunan rumah sederhana sehat dan Rusunami.

Khusus untuk program Rusunami, Program ini dicanangkan oleh pemerintah untuk daerah-daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan yang dianggap cukup tinggi. Program pemerintah ini awalnya dijalankan dengan target waktu selama 5 tahun dari 2007 hingga 2011. Pemerintah memprioritaskan pembangunan rusun di 10 daerah, yaitu : Jakarta, Medan, Batam, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Makasar [13]. Berdasarkan Rencana Strategis Kementrian Perumahan Rakyat 2010-2014, jumlah Rusunami baru yang akan dibangun hingga 2014 berjumlah 150.000 unit dengan total rencana pembiayaan 21,6 trilyun rupiah. Khusus untuk daerah DKI Jakarta sampai dengan November 2010 jumlah Rusunami yang telah

serah terima kunci sebanyak 14.485 unit dan jumlah Rusunami yang telah *toping off* sebanyak 13.694 unit [14].

Tabel 2.1 Pencapaian Jumlah Unit Rusunami (November 2010)

No	Lokasi	Jumlah Unit					Total
		DKI Jakarta	Bodetabek	Bandung	Surabaya	Batam	
1	Serah Terima Kunci (STK)	14.485	1.318	-	-	-	15.803
2	Topping Off (TO)	13.694	817	1.184	750	147	16.592
3	Konstruksi (KON)	7.943	3.105	2.174	750	-	13.972
4	Penyerapan KPR Sarasana Bersubsidi	1.767	133	-	-	-	1900

Sumber : (Kemenpera, 2010)

2.2.3 Pendanaan Proyek Rusunami

Pembiayaan pembangunan Rusunami ini berbeda dari konsep pembiayaan rumah susun terdahulu, Saat ini pembiayaannya melibatkan pihak swasta (badan usaha dan masyarakat). Berdasarkan rencana awal yang dibuat bahwa proyek pembangunan Rusunami untuk tahun 2007 hingga tahun 2011 membutuhkan dana sebesar Rp 56,889 trilyun selama 5 tahun. sumber dana yang di dapat berasal dari APBN serta APBD sebesar 6,154 trilyun dan dari badan usaha serta masyarakat sebesar Rp 50,735 trilyun. Dari rencanan dana yang dibuat, porsi terbesar dana APBN dipergunakan untuk dukungan fasilitas subsidi kredit pemilikan Rusunami yang direncanakan mencapai Rp 4,300 trilyun, serta dengan dana APBD, yang direncanakankan sebesar Rp 1,700 triliun dipergunakan untuk kegiatan fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perkotaan dan lingkungan rusun. Sisanya sebesar Rp 0,154 trilyun, digunakan untuk mendukung penciptaan iklim yang kondusif terhadap percepatan pembangunan Rusunami [15]. Selanjutnya Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014, jumlah Rusunami baru yang akan dibangun hingga 2014 berjumlah 150.000 unit dengan total rencana pembiayaan 21,6 trilyun rupiah. Namun pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar 2,7 trilyun rupiah untuk membiayai subsidi kredit kepemilikan Rusunami. Kebutuhan dana 21,6 trilyun rupiah tersebut murni berasal dari sektor swasta dan masyarakat.

2.3 Fasilitas Pemilikan Pembiayaan Pemilikan Rusunami Untuk Masyarakat Sasaran MBM dan MBR di Perkotaan

2.3.1 Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Uang Muka

Khusus bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan berpenghasilan rendah (MBR), pemilikan Rusunami dilengkapi fasilitas subsidi selisih bunga dan uang muka. Fasilitas ini diperuntukkan hanya bagi masyarakat sasaran yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008, adapun skema pendanaan subsidi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Aturan Subsidi Uang Muka Kepemilikan Rusunami

Kelompok Sasaran	Nilai Subsidi/ Rumah Tangga	
	Subsidi Selisih Bunga (Rp)	Bantuan Uang Muka Paling Banyak (Rp)
I	12.300.000	5.000.000
II	15.850.000	6.000.000
III	20.100.000	7.000.000

Sumber : Peraturan Menti Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008

Tabel 2.3 Aturan Skema Subsidi Selisih Bunga Kepemilikan Rusunami

Kelompok Sasaran	Suku Bunga Bersubsidi (%/Tahun)										
	Tahun										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	9,85	9,85	9,85	9,85	Bunga Pasar						
II	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	Bunga Pasar				
III	7	7	7	7	7	7	7	7	Bunga Pasar		

Sumber : Peraturan Menti Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008

Subsidi perumahan ini diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan baru pertama kali menerima subsidi perumahan, memiliki NPWP dan termasuk ke dalam kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan batasan penghasilan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran	Batas Penghasilan Paling Banyak (Rp/Bulan)
I	4.500.000
II	3.500.000
III	2.500.000

Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2007

Suku bunga subsidi sesuai tabel 2.3 berlaku tetap selama masa subsidi. Kelompok sasaran adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap. Fasilitas subsidi selisih bunga dan uang muka atau yang disebut dengan KPR Sarusuna Bersubsidi adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit (LPK) kepada kelompok sasaran. KPR Sarusuna Bersubsidi merupakan bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk :

- a. Subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayar oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam waktu tertentu yang selanjutnya disebut subsidi selisih bunga.
- b. Subsidi untuk membantu meringankan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk menyediakan uang muka KPR Sarusun.

Lembaga penerbit kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pemilikan sarusun sederhana sebagaimana dituangkan di dalam Memorandum Kesepakatan (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Jenis Saruna yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis saruna dengan batas harga sebagai berikut:

Tabel 2.5 Batasan Harga Rusunami

Kelompok Sasaran	Batas Harga Saruna Paling Banyak
I	144.000.000
II	110.000.000
III	75.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2007

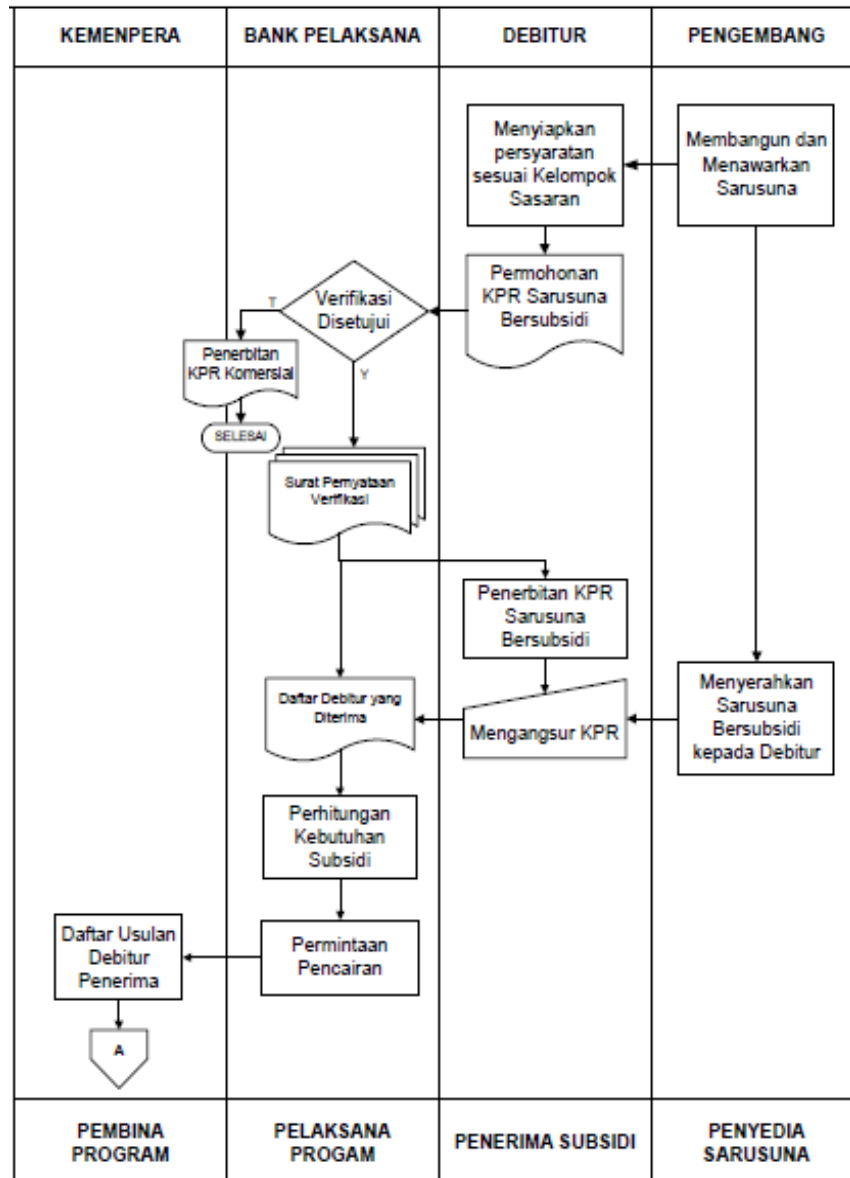
Kelompok sasaran dapat memiliki sarusun sederhana dengan batas harga mengikuti kelompok sasaran lebih rendah sepanjang tetap menggunakan skim dan batasan subsidi mengikuti kelompok sasaran asal, sebaliknya kelompok sasaran dapat memiliki sarusun sederhana dengan batas harga mengikuti kelompok sasaran lebih tinggi sepanjang tetap menggunakan skim dan batasan subsidi mengikuti kelompok sasaran yang dipilih. Selain batasan harga Rusunami, fasilitas subsidi ini juga mengatur batasan uang muka paling sedikit dan nilai KPR paling banyak, sebagai berikut :

Tabel 2.6 Batasan Nilai uang Muka dan KPR

Kelompok Sasaran	Uang Muka Paling Sedikit (%)	Batas Nilai KPR Paling Banyak
I	12.5	126.000.000
II	12.5	96.2500.000
III	10	67.500.000

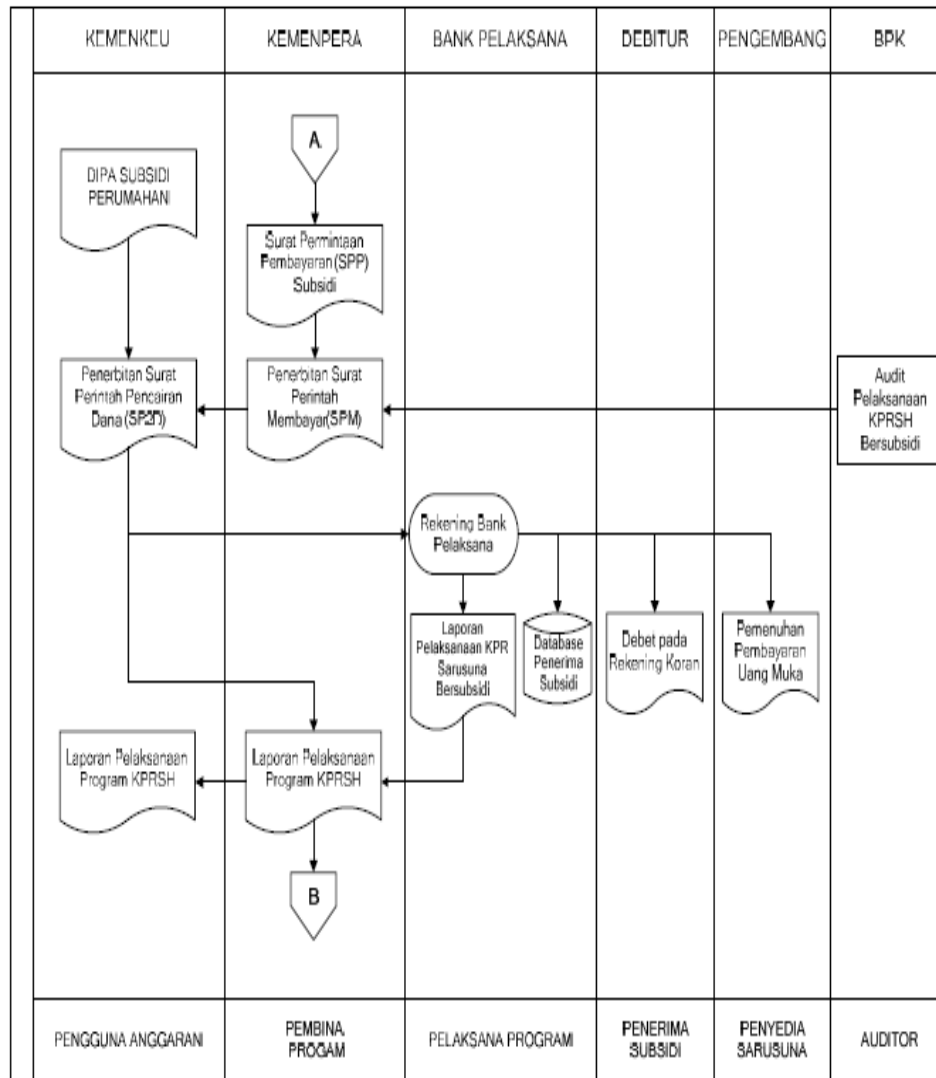
Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008

Sarusuna yang dibeli menggunakan fasilitas ini tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan kecuali untuk kepentingan LPK dalam rangka penyelamatan kredit atau sudah melampui jangka waktu 5 tahun. Untuk mengetahui proses pelaksanaan KPR Sarusunan Bersubsidi akan ditampilkan bagan alir yang berhubungan dengan KPR Sarusuna Bersubsidi sebagai berikut:



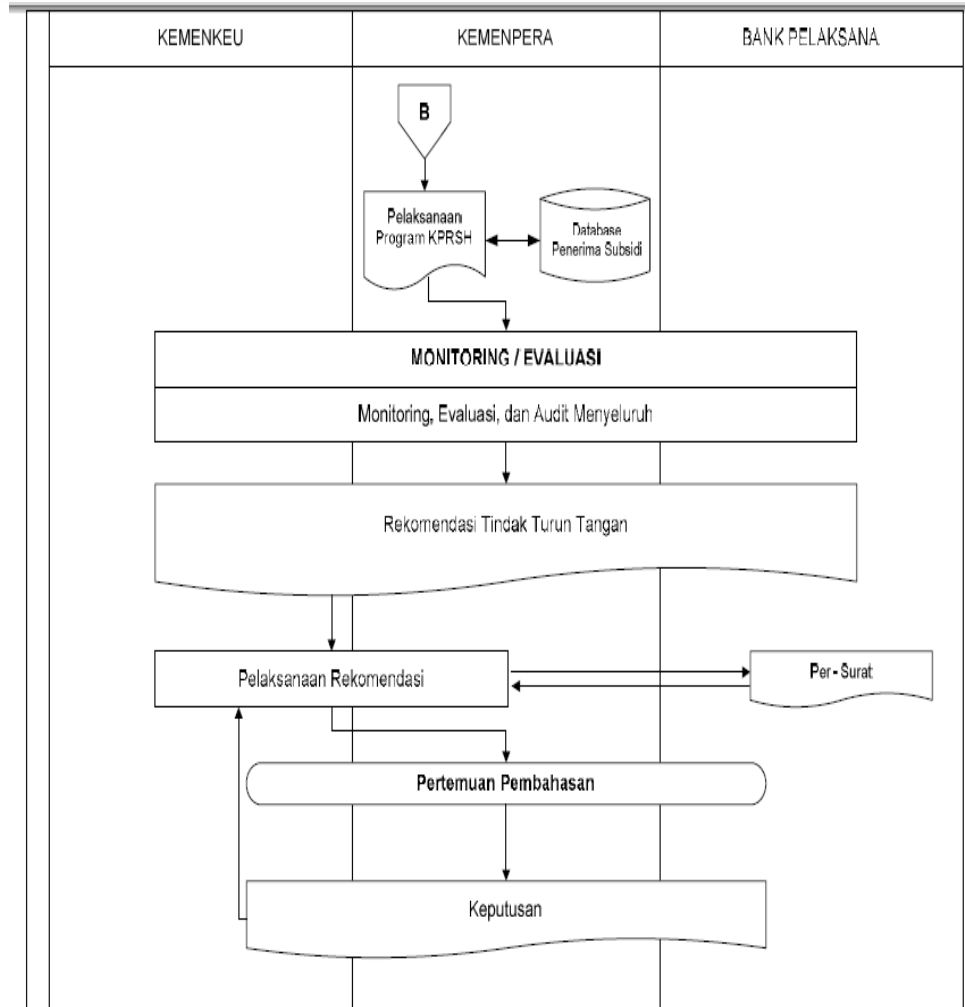
Gambar 2.1 Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPR Sarusuna Bersubsidi

Sumber : Lampiran Kepmenpera Nomor 13 Tahun 2010



Gambar 2.2 Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan

Sumber : Lampiran Kepmenpera Nomor 13 Tahun 2010



Gambar 2.3 Bagan Alir Pengawasan dan Pengendalian KPR Sarasuna Bersubsidi

Sumber : Lampiran Kepmenpera Nomor 13 Tahun 2010

2.3.2 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Sampai saat ini pemerintah masih mencari skema pendanaan yang lebih baik agar masa suku bunga rendah cicilan dapat berjalan tetap selama masa tenor dan bernilai dibawah 10%, perkembangan terbaru muncullah Keputusan Menteri Keuangan No290/KMK.05/2010 tanggal 15 Juli 2010. Kepmen ini mengatur kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dilaksanakan Pusat Pembiayaan Perumahan, yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) [16]. Melalui FLPP suku bunga kredit tetap diharapkan dapat berlangsung sebesar 8,15%-9,95% selama 15 tahun. Namun pelaksanaan FLPP masih dalam tahap sosialisasi sehingga cara subsidi sebelumnya masih akan dilakukan hingga akhir 2011 [17].

Skema FLPP merupakan skema baru subsidi kepemilikan Rusunami yang menggantikan skema subsidi selisih bunga dan uang muka. Pada skema ini pemerintah membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang berada dibawah Kementerian Perumahan Rakyat yang bertugas mengelola sumber dana murah yang saat ini berasal dari APBN murni untuk bantuan pemilikan Rusunami. Khusus untuk Rusunami diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Perumahan.

Masyarakat sasaran dalam skema ini adalah masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dengan penghasilan Rp 2.500.000,- hingga Rp 4.500.000,- dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan paling banyak Rp 2.500.000,-. Dalam pelaksanaannya, dana yang dimiliki BLU dengan skema FLPP merupakan dana investasi pemerintah yang diharapkan dapat diputar kembali dan dengan harapan suatu saat diharapkan BLU tersebut dapat mandiri membiayai kebutuhan bantuan perumahan secara *sustainable*. Dalam fasilitas subsidi khusus untuk Rusunami dengan skema FLPP memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut :

2.3.2.1 Proporsi Dana FLPP Untuk KPR Sejahtera Susun

Terdapat 6 kondisi nilai KPR paling banyak, proporsi dana BLU, dan suku bunga *fixed* dengan jangka waktu paling lama 15 tahun.

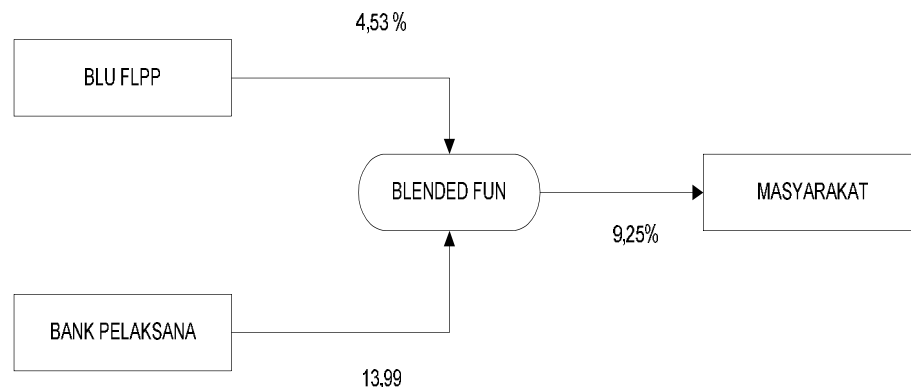
Tabel 2.7 Nilai KPR Subsidi Pemilikan Rusunami dengan Skema FLPP

NILAI KPR PALING BANYAK	PROPORSI DANA		BUNGA KPR PALING BANYAK	UANG MUKA PALING SEDIKIT	UANG MUKA PALING SEDIKIT
	FLPP	BANK			
(Rp)	%	%	%	%	(Rp)
90.000.000	50,11	49,89	9,25	12,5	11.250.000
100.000.000	49,10	50,90	9,35	12,5	12.500.000
110.000.000	47,45	52,55	9,50	12,5	13.750.000
120.000.000	45,92	54,08	9,65	12,5	15.000.000
130.000.000	44,27	55,73	9,80	12,5	16.250.000
135.000.000	42,67	57,33	9,95	12,5	16.875.000

Sumber : Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010

2.3.2.2 Besaran Suku Bunga Subsidi Skema FLPP

Dalam pelaksanaannya alur penentuan suku bunga Subsidi Pemilikan Rusunami dengan Skema FLPP yang sampai ke tangan masyarakat adalah sebagai berikut :

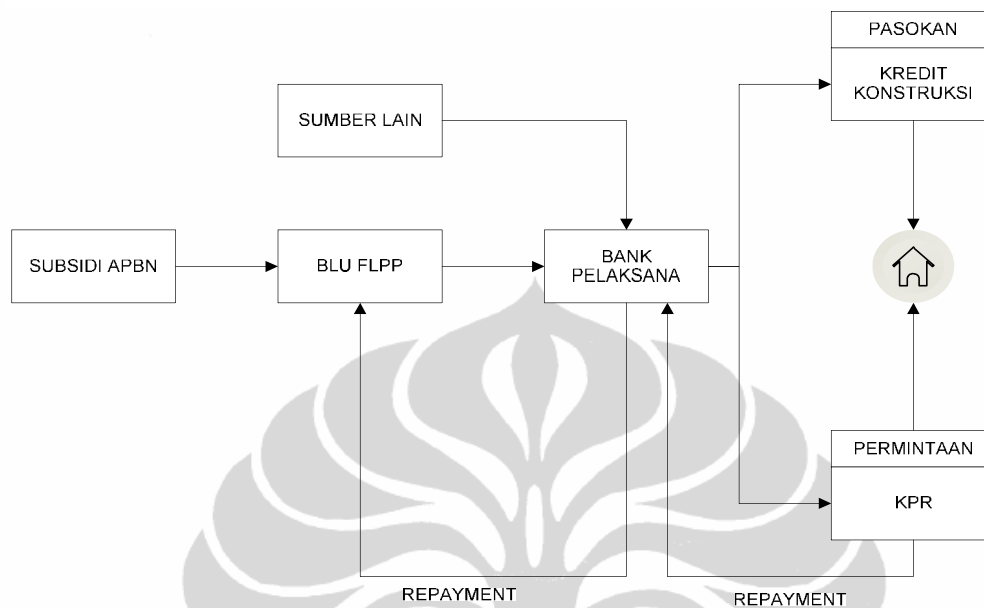


Gambar 2.4 Mekanisme Penentuan Suku Bunga FLPP (Rusunami)

Sumber : (Kemenpera, 2010)

Bank pelaksana merupakan bank umum yang memiliki kewajiban sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010 Tentang Tarif yang harus dipenuhi terhadap dana yang berasal dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 0,5%

pertahun dan nilai bunga maksimum yang digunakan bank kepada masyarakat dengan menggunakan dana dari FLPP adalah 4,03% pertahun.



Gambar 2.5 Skema Pendanaan FLPP Untuk Pemilikan Rusunami di Indonesia

Sumber : (Kemenpera, 2010)

Skema di atas merupakan bagian dari alur keseluruhan pembangunan proyek Rusunami di Indonesia yang sumber dana pembangunannya, merupakan murni dari pihak swasta (developer), dan pemerintah berperan hanya sebatas penyedia fasilitas subsidi pendanaan pemilikan Rusunami yang terbangun dengan sasaran masyarakat berpenghasilan menengah-bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pendanaan Perumahan di Perkotaan

Proyek Rusunami merupakan proyek penyediaan perumahan dengan sistem bertingkat. Hal ini memerlukan suatu sistem pendanaan untuk mencapai penyerapan subsidi pendanaan yang baik. Sistem pendanaan perumahan (*housing finance system*) yang dilakukan di suatu negara sangat berhubungan erat dengan penyerapan subsidi pendanaan perumahan yang akan terjadi di negara tersebut. Selanjutnya dalam menjalankan sistem pendanaan perumahan dibutuhkan kemampuan peningkatan dana untuk perumahan yang melibatkan 3 stakeholder

utama yaitu : peminjam dana (*borrower*), pemilik dana (*lender*), dan pemerintah sebagai regulator. Dengan demikian hal-hal yang berhubungan dengan keterlibatan peminjam dana (*borrower*), pemilik dana (*lender*), dan pemerintah dalam suatu sistem pendanaan perumahan merupakan bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan subsidi pendanaan perumahan [18]. *United Nation* (2005) telah menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu sistem pembiayaan perumahan yang terbagi dalam tiga bagian utama, antara lain dari sudut pandang *borrower, lender, dan government*. Adapun penjelasan dari setiap bagian adalah sebagai berikut :

2.4.1 Sudut Pandang *Borrower*

Borrower merupakan pihak peminjam dana untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pengadaan perumahan. Pengadaan dapat berupa pembangunan perumahan oleh developer atau untuk pembelian perumahan oleh masyarakat. Faktor dari sudut pandang *borrower* terbagi menjadi dua sub-faktor dan setiap sub-bagian terbagi menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pendanaan perumahan sebagai berikut :

2.4.1.1 Karakteristik Kredit yang Tersedia (*Supply of Credit*)

Pada sub-faktor karakteristik kredit yang tersedia memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Persentase volume pinjaman untuk perumahan dari total pinjaman yang disepakati (*Housing credit portfolio*).
- b. Kestabilan aliran kredit perumahan (*Continuity of new lending*).
- c. Tingkat shares yang dapat diperoleh masyarakat pada kredit perumahan (*Market shares*).
- d. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan (*Loan amounts*)
- e. Lama masa cicilan kredit perumahan (*periods of redemption*).
- f. Persyaratan jaminan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit perumahan (*Collateral requirements*).
- g. Persyaratan persentase penghasilan untuk pembayaran pinjaman (*payment to income (PTI)*).

- h. Kemampuan fasilitas lender secara sendiri untuk mendapatkan calon kreditor kredit perumahan (*Number of customers*).
- i. Kemampuan fasilitas lender secara partner untuk mendapatkan calon kreditor kredit perumahan (*Third-party lending*).

2.4.1.2 Keterjangkauan Kredit (*credit affordability*)

Pada sub-faktor keterjangkauan kredit memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Besarnya tingkat suku bunga pinjaman (*Mortgage rates*)
- b. Biaya awal transaksi kredit perumahan (*fee*).
- c. Tingkat inflasi yang terjadi terhadap tingkat suku bunga (*Spreads and real interest rates*).
- d. Resiko likuiditas yang ada pada kredit perumahan (*Liquidity risk*).
- e. Resiko tingkat suku bunga yang ada pada kredit perumahan (*Interest rate risk*).

2.4.2 Sudut Pandang *Lender*

Lender merupakan pihak penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pengadaan perumahan. Pengadaan dapat berupa pembangunan perumahan oleh developer atau pinjaman untuk pembelian perumahan oleh masyarakat. Faktor dari sudut pandang *lender* terbagi menjadi tiga sub-faktor dan setiap sub-faktor terbagi menjadi beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pendanaan perumahan sebagai berikut :

2.4.2.1 Daya Tarik Investasi (*Investment Attractiveness*)

Pada sub-faktor daya tarik investasi memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Sumber dana investasi untuk sektor perumahan (*Maturity of investments*).
- b. Tingkat *share* yang dapat diperoleh oleh investor pada sektor perumahan (*Share of institutional investors*).
- c. Tingkat suku bunga yang ditawarkan *lender* pada sektor perumahan (*Yields*).

- d. Perbedaan tingkat suku bunga yang ditawarkan *lender* dengan yang ditawarkan pemerintah (*Spreads and real interest rates*).
- e. Tingkat inflasi yang terkendali.

2.4.2.2 Keamanan Dana (*Security of Fund*)

Pada sub-faktor keamanan dana memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Kemampuan mengatasi resiko investasi tambahan (*reinvestment risk*).
- b. Kemampuan investor untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran jangka panjang dan pertumbuhan investasi (*Solvency*).
- c. Adanya informasi kredit yang lengkap dan transparan (*Credit risks*).
- d. Kelayakan equity yang dimiliki investor dan pihak perantara (*intermediary*) di sektor perumahan (*Capital adequacy*).

2.4.2.3 Keuntungan Untuk Pemegang Saham (*Profitability for Shareholder*)

Pada sub-faktor keuntungan untuk pemegang saham memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Tingkat biaya administrasi kredit (*Cost efficiency*).
- b. Batas tingkat suku bunga bersih investasi di sektor perumahan (*Net income and margins*).
- c. Penghasilan dari *Fee* pengadaan kredit di sektor perumahan.
- d. Besarnya nilai *Return on Equity (ROE)* dan *Return on Asset (ROA)* investasi sektor perumahan.
- e. Besarnya nilai *Cost-income ratios* investasi di sektor perumahan.

2.4.3 Sudut Pandang Pemerintah (*Government*)

Pemerintah merupakan pihak regulator penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pengadaan perumahan. Pengadaan dapat berupa pembangunan perumahan oleh developer atau pinjaman untuk pembelian perumahan oleh masyarakat. Faktor dari sudut pandang *government* terbagi menjadi lima sub-faktor dan setiap sub-faktor terbagi menjadi beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pendanaan perumahan sebagai berikut :

2.4.3.1 Penentuan Pencapaian Target Kebutuhan

Pada sub-faktor penentuan pencapaian target kebutuhan memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Penentuan output sektor perumahan baik kuantitas dan kualitas yang diperlukan (*Housing outcomes*).
- b. Pendapatan nasional (*national income*).
- c. Perbandingan jumlah investasi di bidang perumahan terhadap GNP (*Financial depth*).

2.4.3.2 Pembentukan Kondisi Ekonomi yang Kondusif

Pada sub-faktor pembentukan kondisi ekonomi yang kondusif memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Makroekonomi yang stabil.
- b. Peningkatan pendapatan, kemauan dan kemampuan menabung masyarakat (*Savings ability and willingness*).
- c. Evaluasi situasi financial investor yang potensial.

2.4.3.3 Pembentukan Kondisi Institusi yang Kondusif

Pada sub-faktor pembentukan kondisi institusi yang kondusif memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Kebijakan yang menjamin hak properti.
- b. Kemudahan proses penyitaan.
- c. Informasi kreditor yang terdata secara baik.
- d. Penjaminan kompetisi yang adil.
- e. Pengawasan yang memadai terhadap aktifitas bank.

2.4.3.4 Pembentukan Kondisi Finansial yang Kondusif

Pada sub-faktor pembentukan kondisi finansial yang kondusif memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Pembentukan mortgage bank.
- b. Pembentukan *Intermediaries* yang memadai.
- c. Penggunaan *appraisal* yang ahli.

- d. Penggunaan sistem manajemen resiko.
- e. Penggunaan peranan asuransi dalam mencegah *default*.
- f. Terbentuknya sistem capital market yang aktif.
- g. Penggunaan dana pensiun sebagai sumber dana jangka panjang.
- h. Penggunaan dana asuransi jiwa sebagai sumber dana jangka panjang.
- i. Penggunaan sistem IT yang canggih dalam transaksi.

2.4.3.5 Pembentukan Sektor Perumahan yang Kondusif

Pada sub-faktor pembentukan sektor perumahan yang kondusif memiliki beberapa hal penting, yaitu :

- a. Penyediaan sarana air bersih yang baik.
- b. Penyediaan sarana listrik dan telekomunikasi yang memadai.
- c. Penyediaan transportasi umum yang memadai.
- d. Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
- e. Penyediaan lahan siap bangun yang memadai.
- f. Tataruang yang terencana.
- g. Harga konstruksi yang wajar.
- h. Kontrol ketergantungan terhadap barang impor.
- i. Pengontrolan harga sewa perumahan.
- j. Subsidi yang memadai sebagai penyokong pemenuhan perumahan.

Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendanaan suatu *Project Finance* secara umum yang masih berhubungan dengan *Housing Finance System* yaitu [19] :

a. *Credit enhancement*

Adanya Jaminan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara finansial bahwa apabila terjadi gangguan dalam operasional proyek dan dana dibutuhkan untuk mengembalikan proyek ke dalam kondisi operasional, maka dana yang dibutuhkan akan disediakan dalam pertanggungan asuransi, atau dalam bentuk lain.

b. *Technical Feasibility*

Pemilik dana harus yakin bahwasanya teknologi yang ada pada proyek dapat dilakukan untuk tujuan komersil pada skala yang diinginkan. Singkatnya penyedia dana membutuhkan jaminan bahwasanya proyek akan menghasilkan hasil sesuai kapasitas yang direncanakan.

c. *Economic Viability*

Proyek harus mampu menghasilkan pada suatu biaya yang direncanakan pada harga pasar yang ada, sehingga dapat menghasilkan dana yang cukup untuk menutupi semua biaya operasional dan kewajiban hutang yang ada serta mencapai keuntungan yang direncanakan.

d. *Availability of Raw Materials and Capable Management*

Hal ini berhubungan dengan sumber daya alam, bahan baku, dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk menyukseskan operasional proyek. Material tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup untuk menghasilkan *cash flow* sesuai kapasitas yang direncanakan sepanjang usia proyek yang diharapkan.

- e. Keanggotaan proyek harus terdiri dari orang-orang yang dapat diandalkan dan berpengalaman dalam hal manajemen.
- f. Pajak yang ditanggung pihak-pihak yang terlibat dalam proyek harus saling menguntungkan.
- g. Persyaratan peraturan terhadap proyek harus jelas dan meyakinkan.
- h. *Cash flow* dan pendapatan dari proyek tersebut dapat dijadikan sumber dana dari pembayaran pinjaman dan aset dari proyek tersebut dijadikan sebagai *collateral* terhadap pinjaman.
- i. Tersedianya rasio yang tinggi antara hutang dan *equity*, dimana hutang dapat mencapai 70-90% dari biaya proyek, sehingga dapat menambah sumber dana yang ada.
- j. Melakukan pembagian resiko, khususnya dalam pendanaan dan pelaksanaan suatu proyek yang sangat mahal dan berskala besar.
- k. Adanya *Bridge loan* apabila diperlukan, fasilitas ini menutupi gap yang ada antara *timing of expenditures* dan waktu *drawdowns of long-term funds*.

1. Tersedianya *Loann Guarantees*, hal ini berhubungan dengan adanya penjaminan oleh pemerintah pada proyek-proyek yang strategis.

Selanjutnya bentuk-bentuk *housing finance tools* untuk meningkatkan kinerja pendanaan perumahan di asia [20], antara lain :

- a. *Housing Bank*

Bank ini digunakan pemerintah sebagai bank khusus untuk pemberian kredit perumahan.

- b. *Mortgage Institution*

Merupakan institusi yang memberikan kredit perumahan yang dananya berasal dari *capital market*.

- c. *Mortgage Insurance*

Pengembangan sumber dana kredit yang berasal dari perusahaan asuransi.

- d. *Specialised Housing Fund*

Merupakan alat pengumpul dana, yang khusus digunakan untuk sektor perumahan, yang sumber dananya berasal sesuai kebijakan pemerintah suatu negara.

- e. *Contractual Saving and Loans Programs*

Merupakan sumber dana di sektor perumahan yang berasal dari skema tabungan tertentu yang harus dibayarkan melalui pemotongan gaji, dan hanya dapat digunakan untuk sektor perumahan.

- f. *Securitisation*

Merupakan salah satu cara meningkatkan modal untuk perumahan. Cara ini dilakukan dengan pengeluaran *mortgage-backed securities* (MBS) oleh institusi pendanaan perumahan.

- g. *Mortgage Loan by Government*

Pemberian pinjaman khusus dari pemerintah untuk kredit perumahan. Sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah, pinjaman dijalankan melalui institusi pemerintah khusus untuk perumahan.

Selanjutnya dari hasil *Nigeria Housing Finance Conference (2007)*, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendanaan perumahan antara lain :

- a. Biaya konstruksi dan pendapatan masyarakat

Biaya yang terjadi dalam pembangunan perumahan harus dapat diminimalkan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pendapatan masyarakat harus dapat ditingkatkan secara bertahap. Besarnya biaya konstruksi diakibatkan oleh beberapa faktor :

- a) Peningkatan biaya material bangunan dan tingkat inflasi
- b) Ruang yang besar dan standar kualitas yang digunakan
- c) *Fee* profesional yang terlibat
- d) Keuntungan kontraktor yang berlebihan
- b. Tata ruang yang teratur dan terencana.
- c. Biaya-biaya pengurusan perizinan
- d. Harga lahan di perkotaan
- e. Tinggi tidaknya minat developer yang memiliki kemampuan teknologi dan dana yang memadai untuk mengembangkan perumahan murah.
- f. Kualitas kontraktor pelaksana.
- g. Kesatuan visi para pelaku *housing finance system* yang terlibat
- h. Adanya pengawasan perumahan yang dibangun oleh developer agar sesuai dengan standar yang ada dan memberikan 20% untuk pembangunan perumahan murah.

Selanjutnya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendukung terbentuknya dana jangka panjang yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pendanaan di sektor perumahan [21], hal-hal tersebut antara lain :

- a. Informasi yang lengkap mengenai *borrower* harus tersedia.
Hal ini sangat penting untuk memprediksi kemungkinan *default* yang dapat terjadi. *Track record* mengenai *borrower* baik hal positif dan negatif sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mendapatkan jumlah pinjaman dari para lender.
- b. Akses informasi mengenai nilai properti yang memadai.
Data ini berupa informasi harga penjualan yang ada dan gambaran informasi perkembangan perumahan yang akan terjadi baik lokasi maupun ukuran dan peluang preoyek di sektor perumahan.
- c. Kemampuan pengamanan terhadap *collateral*.

Lender harus memiliki kemudahan untuk mengambil jaminan yang dijaminakan apabila terjadi *default*. Hal ini memerlukan kejelasan standar penyitaan dan sistem hukum yang mendukung.

d. Kesetabilan makroekonomi.

Kondisi makroekonomi yang tidak stabil yang berhubungan dengan inflasi yang tak terkendali, hal ini menghadirkan keengganan lender untuk menyalurkan dananya di sektor perumahan. Pada kondisi ini apabila lender bersedia maka para *lender* akan mengupayakan meningkatkan *interest risk* dalam perhitungan mereka, selanjutnya nilai ini akan diteruskan kepada para *borrower* yang menanggung bunga yang tinggi.

2.5 Beberapa Skema Pembiayaan Pemilikan Perumahan di Negara Lain

2.5.1 Singapura [22]

Singapura adalah suatu negara dengan luas 648 km², dengan penduduk 3,9 juta orang. Sejak tahun 1960 singapura telah membuat kebijakan dan lembaga pembangunan perumahan secara sistimatis untuk menunjang perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan kondisi perumahan yang sangat tidak layak akibat cepatnya pertumbuhan penduduk pada tahun 1959. Sejak itu pemerintah Singapura memandang perumahan merupakan suatu hal yang penting dan prioritas di Singapura. Pemerintah mendirikan *Housing and Development Board (HDB)* pada tahun 1960 sebagai pelaksana tujuan pemerintah untuk melengkapi kebutuhan rumah yang layak kepada seluruh rakyat Singapura. HDB berhasil membangun perumahan yang layak dan memenuhi kebutuhan rumah sebanyak 84% penduduk Singapura pada tahun 1990.

Pemerintah mendominasi pemenuhan perumahan di Singapura dengan ketentuan hak pakai selama 99 tahun terhadap suatu rumah tangga yang menggunakan tanah negara. Pada tahun 1997 dari 920.000 unit perumahan, 82% dibangun oleh developer pemerintah. Pemerintah membangun flat sebagai tempat tinggal dengan kebijakan 10% dari flat yang dibangun dijadikan tempat tinggal dengan system sewa. Dominasi pemerintah dalam pasar perumahan dapat terjadi akibat kebijakan tentang tanah yang ada di Singapura. Pada tahun 2001 pemerintah menguasai tanah seluas 80% dari luas total Singapura yang meningkat

dibandingkan pada tahun 1960 yang hanya 40%. Tanah-tanah ini banyak di ambil dengan harga di bawah harga pasar berdasarkan *Land Acquisition Act of 1966*. Dengan dikuasainya tanah oleh negara menyebabkan kemudahan pemerintah untuk mengatur lokasi-lokasi perumahan, industri, ataupun proyek lainnya.

Tingkat kepemilikan rumah meningkat dari 29% pada tahun 1970 menjadi 90% pada tahun 2001. Peningkatan ini diakibatkan penggunaan *Central Provident Fund (CPF)* sebagai instrumen untuk pembiayaan perumahan. Dana yang digunakan secara keseluruhan dibiayai dengan mengikuti suatu skema jaminan sosial *pay-as-you-go* sebagai sumber dana CPF. Skema ini mewajibkan kepada pekerja dan majikan untuk memberikan kontribusi wajib 20% gaji dan 10% gaji kepada skema ini. Kontribusi ini akan mengalami penyesuaian tergantung pada kondisi ekonomi. CPF menyediakan bunga kepada orang yang mengikuti skema ini dan disesuaikan setiap 3 bulan didasarkan pada bobot rata-rata dana tetap 1 tahun dan bunga tabungan dari empat bank utama yang ada di Singapura, namun nilai minimum bunga yang ditawarkan adalah 2,5%. Uang yang disetor pada skema ini hanya dapat ditarik pada usia 55 tahun atau lebih cepat untuk keperluan tertentu. Antara tahun 1968 dan 1981, dana ini hanya dapat ditarik untuk keperluan uang muka, biaya materai, jaminan, dan pembayaran bunga pinjaman yang terjadi akibat pembelian perumahan dari pemerintah. Namun pada tahun 1978 dana ini sebagian dapat ditarik untuk membeli saham di dalam *Singapore Bus Services*. Pada tahun 1981 skema ini mengalami perluasan, dimana dana dapat ditarik untuk pembayaran pinjaman untuk pembelian perumahan dari sektor swasta. Selama masa sepuluh tahun yang lalu, aturan pengaturan penggunaan dana tabungan yang ada di CPF secara bertahap dapat ditarik untuk pengeluaran dengan tujuan pengobatan, pendidikan, asuransi, dan investasi di berbagai aset keuangan. HDB menyediakan kredit bersubsidi untuk pembelian flat. Kekuatan kredit adalah 80-90% dari harga flat baru dengan jangka waktu kredit **25 tahun**. Bunga kredit HDB dipatok 0,1% di atas bunga CPF atau 2% dibawah tingkat bunga bank komersial. Sejak juli 1999 tingkat bunga CPF dan HDB disesuaikan setiap 3 bulan.

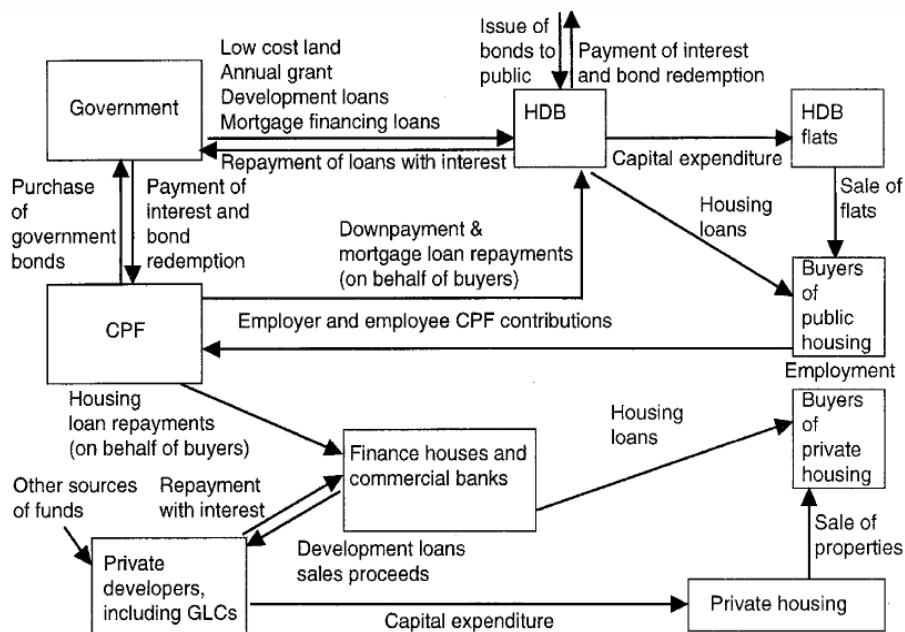
Kepemilikan rumah yang dibangun pemerintah adalah sektor terbesar dari sub-sektor perumahan. Ada antrian untuk kepemilikan rumah (sebesar 122.000

keluarga pada maret 1998) untuk flat baru yang diberikan oleh HDB. Kebutuhan diatur oleh pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya berdasarkan pendapatan, status, dan kesedian menunggu 6 bulan sampai 2 tahun untuk mendapatkan satu flat baru. Penjualan kembali flat yang telah digunakan ditentukan oleh mekanisme pasar, Berbagai aturan dilakukan untuk mencegah kegiatan spekulasi. Sejak 1999, CPF memberikan dana bantuan (hingga S\$ 50.000 per flat) apabila keluarga yang memenuhi syarat mau membeli penjualan kembali flat yang ada, flat dapat dijual kembali setelah lima tahun kepemilikan.

Harga flat-flat di Singapura yang dibangun oleh HDB beraneka ragam tergantung lokasi dan jenis desain bangunan. Harga yang menjadi acuan jenis flat yang banyak dibangun adalah harga yang sesuai dengan rata-rata tingkat penghasilan masyarakat dengan target 90% masyarakat dapat membeli flat-flat tersebut, dalam hal ini dicontohkan dengan harga flat 3 kamar dipatok dengan perencanaan dapat dibeli oleh 90% masyarakat dan flat 4 kamar dipatok dengan perencanaan dapat dibeli oleh 70% masyarakat.

Khusus pekerja asing yang ada di Singapura dan keluarga yang memiliki penghasilan rendah, HDB menyediakan fasilitas penyewaan perumahan. Fasilitas ini juga digunakan oleh keluarga yang dalam status menunggu untuk mendapatkan kepemilikan flat baru.

Perkembangan aset perumahan sektor swasta umumnya dipusatkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan kelompok masyarakat yang mampu di Singapura. Dengan berjalannya waktu, suplai lahan yang dimiliki swasta meningkat, hal ini disebabkan permintaan yang meningkat akan tempat tinggal komunitas yang lebih baik akibat meningkatnya penghasilan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah memiliki beberapa batasan kebijakan, misalnya orang asing dilarang untuk memiliki lahan untuk properti dan flat-flat swasta tanpa izin dari pemerintah. Kebutuhan perumahan orang asing di Singapura secara efektif dilakukan dengan karakteristik apartemen bertingkat tinggi dan sektor *condominium*. Dalam perkembangannya untuk memacu sektor swasta dana CPF juga dapat digunakan untuk membeli aset perumahan swasta. Kekuatan pinjaman yang diatur oleh bank sentral di Singapura membolehkan pemberian pinjaman sampai dengan 80% harga rumah yang diperjual belikan.



Gambar 2.6 Skema Pendanaan Perumahan di Singapura

Sumber : (Phang, 2001)

Dari uraian di atas terlihat bahwasanya sumber dana yang berkesinambungan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan terbentuknya suatu mekanisme pendanaan yang terjangkau dalam jangka panjang dan suku bunga yang lebih rendah untuk sasaran masyarakat dengan penghasilan rendah. Kredit HDB yang diberikan kepada konsumen selalu berada dibawah suku bunga bank komersial, hal ini terjadi dikarenakan HDB sendiri salah satu sumber dananya berasal dari pinjaman lunak yang berasal dari pemerintah yang berawal dari tingkat bunga skema CPF yang rendah dan dana ini dijadikan dana untuk membeli *bond* pemerintah, dana ini akhirnya dialirkan ke HDB sebagai pelaksana pembangunan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Skema CPF-HDB ini merupakan skema yang awalnya dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar dalam pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat penghasilan masyarakat dana CPF-HDB sangat memainkan peranan dalam perekonomian secara luas. Pada tahun 1997 pinjaman perumahan merupakan 49% dari GNP Singapura dan menggunakan skema CPF-HDB sebanyak 58%.

Tabel 2.8 Porsi Pinjaman Perumahan Terhadap GNP Singapura

Year	GNP	HDB Home ownership rate	Total housing loans (HL)	A Finance Companies	B Commercial banks	C Credit POSB*	D HDB HL/GNP
1970	5861.1	21%	215.2	42%	0%	0%	58% 4%
1975	13 216.2	46%	959.1	37%	6%	2%	54% 7%
1980	24 188.5	64%	2421.3	26%	8%	6%	60% 10%
1986	39 612.5	78%	11 976.6	12%	13%	10%	66% 30%
1990	64 467.4	87%	19 150.9	8%	30%	8%	54% 30%
1995	121 887.4	90%	47 527.5	6%	37%	9%	48% 39%
1997	146 890.9	91%	71 909.0	5%	32%	9%	54% 49%

Notes: Figures for GNP and housing loans are in nominal S\$millions.

A + B + C + D = 100%

*Credit POSB's share of the housing loans market for 1980 to 1997 are based on author's estimates.

Sources: Compiled from Yearbook of Statistics: Annual Reports of the Monetary Authority of Singapore, Housing and Development Board and POSBank; Schulze (1990).

Sumber : (Phang, 2001)

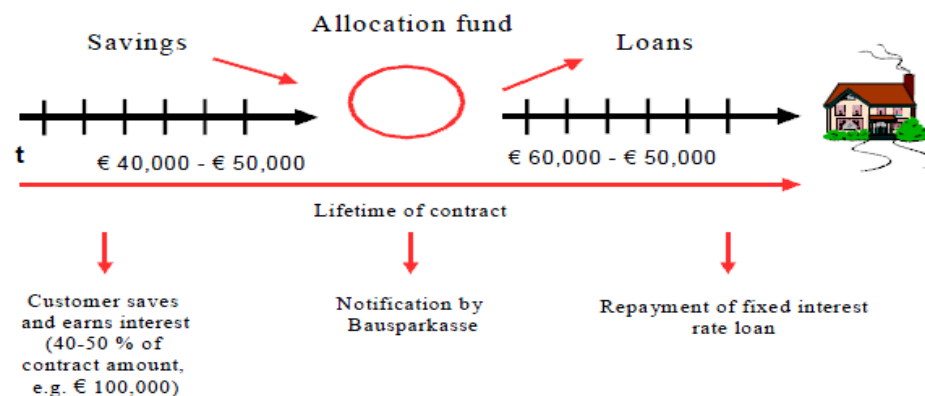
2.5.2 Jerman [23]

Pemenuhan perumahan merupakan masalah yang dihadapi Jerman, khususnya setelah perang dunia ke-dua. Pemerintah menggunakan suatu skema pendanaan yang disebut *Bauspar System*. Sistem ini digunakan pemerintah secara luas untuk merangsang pembangunan perumahan akibat kekurangan lebih dari 6 juta unit tempat tinggal akibat perang. Pemerintah melakukan dukungan penuh dengan tujuan menggalakkan sejumlah dana yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan, menjamin terbentuknya suatu struktur pembiayaan yang aman dan terjangkau. Pada tahun 2005 *Bauspar* memiliki kontrak dengan nilai €670 miliar.

Bauspar dijalankan oleh suatu bank yang disebut *Bausparkassen*. Karena *Bausparkassen* berspesialisasi di dalam pembiayaan perumahan secara individual maka *Bausparkassen* harus mematuhi Undang-Undang tentang tabungan bank di Jerman (*Bauparkassengesetz*). Prinsip utama yang ada pada kontrak *Bauspar* yang menghubungkan antara bank dan konsumen terdiri dari empat elemen :

- a. Persetujuan kontrak disepakati antar bank dan konsumen mengenai jumlah kontrak dengan sistem tingkat tetap untuk tingkat cicilan, dan tingkat suku bunga untuk pinjaman yang diberikan.

- b. Masa menabung, dimana konsumen harus memiliki dana dari tabungan tersebut bernilai 40-50% dari jumlah kontrak yang telah disepakati.
- c. Periode alokasi, karena *Bauspar System* diatur sebagai suatu sistem yang tertutup, bank hanya dapat mengalokasikan dana yang berasal dari dana tabungan yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam bentuk pinjaman kepada konsumen. Oleh karena itu konsumen harus mematuhi periode tunggu yang lamanya tergantung pada ketersediaan dana.
- d. Lamanya periode pinjaman, konsumen melakukan pembayaran kembali pinjamannya berdasarkan persetujuan tingkat bunga.



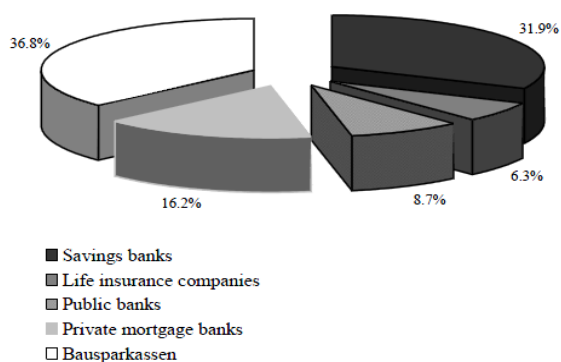
Gambar 2.7 Skema Pendanaan Perumahan Bauspar di Jerman

Sumber : (United Nation, 2005)

Act on Contractual Savings Banks (CSB) di Jerman menetapkan peran *Bausparkassen* di dalam pasar pembiayaan perumahan : menerima tabungan Bauspar dan memberikan pinjaman Bauspar. Hanya *Bausparkassen* yang dapat menjalankan bisnis ini. Pinjaman yang diberikan oleh *Bausparkassen* hanya harus digunakan untuk tujuan pembiayaan perumahan. *Act on Contractual Savings Banks (CSB)* menetapkan setiap *Bausparkassen* harus melaksanakan operasionalnya sesuai dengan *General Business Principles (GBP)* and *Standard Terms and Conditions for Bauspar Contracts (STCB)*. GBP mengatur tentang periode tunggu, komposisi dari dana alokasi, kegiatan pendanaan, kesepakatan taksiran properti, dan prosedur yang mengatur tentang pembayaran tabungan. STCB menetapkan hubungan formal antara *Bausparkassen* dan konsumen. STCB

terdiri dari peraturan yang mengatur tingkat suku bunga untuk tabungan Bauspar dan pinjaman Bauspar, tingkat tuntutan terhadap pinjaman Bauspar, sekuritas yang diperlukan untuk pinjaman dan garansi, dan juga spesifikasi yang mempertimbangkan volume kredit, serah terima dan penyelesaian kontrak Bauspar.

Pengawasan terhadap Bauspar dilakukan oleh *German Federal Financial Supervisory Agency (BAFIN)* dan Bank Sentral. BAFIN mengeluarkan lisensi ijin sebuah *Bausparkessen* untuk menjalankan bisnis. BAFIN juga menyetujui tarif kontrak. Bank Sentral memonitor posisi liquiditas setiap *Bausparkessen*. Secara umum pengawasan aktifitas oleh Bank Sentral dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Jerman tentang pengawasan dan monitoring bank. Dengan pengawasan ini diharapkan terjadinya penggunaan alokasi dana yang benar. *Bausparkessen* diharapkan mengatur waktu tunggu yang ada untuk mencegah fluktuasi didalam aktifitas peminjaman uang, selain itu *Bausparkessen* diwajibkan untuk mencegah resiko perubahan nilai mata uang. Dalam hal *Bausparkessen* menggunakan mata uang asing dalam kontraknya, maka mereka harus mengalokasikan dana untuk memastikan kontrak dapat berjalan aman. Kredit Bauspar memiliki nilai yang dominan didalam nilai kredit yang ada di Jerman, pada tahun 2002, Bauspar memiliki bagian sebesar 36,8% diikuti tabungan bank lain (31,9%), bank swasta (16,2%) bank pemerintah (8,7%), dan asuransi jiwa (6,3%).



Gambar 2.8 Porsi Pinjaman Sistem Bauspar Terhadap Sumber Pinjaman Lain di Jerman Tahun 2002

Sumber : (United Nation, 2005)

Bauspar memberikan pinjaman dengan rasio LTV (80%) dan tingkat bunga pinjaman sekitar 6% untuk para penabung yang telah memenuhi syarat, hal ini melebihi bank umum yang ada di Jerman dengan bunga yang lebih tinggi dengan LTV rasio hanya 60%.

Tabel 2.9 Standar Kontrak yang Ditawarkan Bauspar

Up front fee	1 per cent of contract sum
Monthly instalments in the saving period	0.4 per cent or 0.5 per cent of contract sum
Minimum saving period	18 month
Minimum saving amount	40 per cent of contract sum
Monthly redemption payment	0.6 per cent of contract sum
Average redemption periode	Up to 11 years

Sumber : (United Nation, 2005)

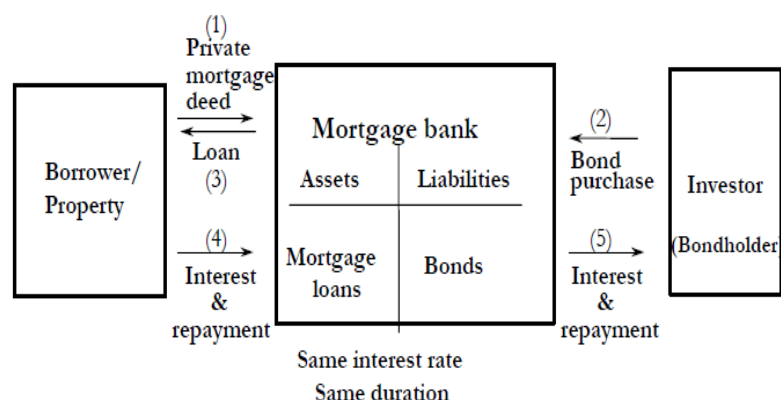
Pinjaman Bauspar selalu dijamin oleh *subordinated mortgage* dan akan didanai dari cicilan rutin yang terdiri dari pembayaran cicilan dan bunga pinjaman. Konsumen dapat melakukan *pre-payment* kapanpun tanpa dikenai biaya. Untuk menjembatani periode alokasi (waktu sampai pinjaman akan di alokasikan ke konsumen) Bauspar menawarkan *bridging loan* yang tergantung dari kondisi pasar. Jumlah dan masa *bridging loan* tergantung kondisi jumlah tabungan dan waktu alokasi yang diinginkan, *bridging loan* akan dibayar melalui pinjaman Bauspar. Dana *bridging loan* diperoleh dari hasil bentuk-bentuk investasi Bauspar yang sangat dibatasi, Bauspar dapat menginvestasikan dana *in-going fund* dengan meletakkannya di tabungan bank lain, *bank bonds* atau *treasury bonds* juga *treasury bills* pemerintah. Masa *bridging loan* dibatasi paling lama 48 bulan, dan masa *bridging loan* yang melebihi 36 bulan tidak boleh lebih dari 25% dana *in-going fund*. Selain Jerman *Bauspar System* juga dipakai di Austria, India, dan Cina.

2.5.3 Denmark [24]

Sistem jaminan kredit diperkenalkan di Denmark setelah perang dunia kedua sebagai usaha untuk mengatasi kekurangan modal untuk pinjaman jangka panjang guna pembiayaan perumahan. Jaminan kredit terjadi antara peminjam (pemilik properti) dengan kreditor (Investor). Sebelumnya di Denmark dalam hal jaminan kredit dikenal suatu perantara yang merupakan sebuah asosiasi para

peminjam. Selanjutnya asosiasi ini mengeluarkan *bond* kepada investor untuk pembiayaan. *Bond* yang dikeluarkan di-*cover* oleh jaminan setiap individu peminjam dengan ikatan persaudaraan yang tinggi dari seluruh peminjam di dalam asosiasi. Dalam perkembangannya akhirnya asosiasi ini mampu mengumpulkan dana tersendiri, yang meng-*cover* semua *bond* yang mereka keluarkan, akhirnya asosiasi ini berubah bentuk menjadi sebuah bank jaminan di Denmark. Secara legalitas penggunaan fasilitas jaminan bank di Denmark diatur di dalam *Mortgage Credit Act*, sebagai berikut :

- a. Jaminan yang diberikan oleh peminjam kepada bank jaminan harus terdaftar di dalam daftar publik yang ada. Hal ini memastikan difinisi secara jelas setiap properti dan sangat transparan mengenai ikatan lain yang ada pada properti tersebut. Bank jaminan akan menerima jaminan yang diberikan hanya jika tingkat jaminan tersebut cukup untuk menutup klaim yang ada.
- b. *Bond* jaminan memiliki status yang tinggi di Denmark, dan hanya dapat dikeluarkan oleh bank jaminan yang ada. Bank jaminan di-*cover* oleh undang-undang dan pengawasan khusus. Undang-undang membatasi aktifitas dan batas ukuran pinjaman terhadap nilai properti. Untuk pinjaman perumahan rasio LTV adalah 80%.
- c. Evaluasi dari properti didasarkan oleh aturan yang ketat, yang merupakan bagian peraturan yang dikeluarkan oleh pengawas yang berwenang yang memonitor aktifitas bank jaminan (*Finanstilsynet*).



Gambar 2.9 Skema Pendanaan Mortgage Bank di Denmark

Sumber : (United Nation, 2005)

Untuk membiayai pembelian atau pembangunan sebuah rumah, pemilik properti melengkapi standar akte yang ditetapkan bank jaminan dan menyerahkan akte tersebut kepada bank jaminan (1). Akte jaminan ini akan dinilai dan menghasilkan nilai jumlah pinjaman, durasi, besaran pembayaran kembali dan tingkat bunga yang akan dibayar peminjam kepada bank jaminan. Bank jaminan akan menyesuaikan karakteristik pinjaman berupa tingkat bunga dan masa pinjaman sesuai permintaan peminjam dengan *bond* yang akan dikeluarkan terhadap investor atas nama bank jaminan (2). Dan selanjutnya hasil pembelian *bond* akan di alirkan kepada peminjam (3).

Peminjam melakukan pembayaran kembali sesuai dengan interval yang telah ditetapkan (misalnya setiap 3 bulan), setiap bulan angsuran akan dikenakan berupa bunga, *principal*, dan *fee* terhadap bank jaminan untuk menutupi biaya administrasi yang diperlukan (4). Selanjutnya bank jaminan mentransfer bunga dan pembayaran kembali kepada pembeli *bond* (5). Secara ringkas sistem ini berdasarkan prinsip keseimbangan kas. Setiap pinjaman dari bank jaminan sesuai dengan *bond* dengan besaran yang sama baik jumlah, masa pinjaman, tingkat suku bunga, dan kesamaan mata uang yang digunakan. Bank jaminan meng-*cover* lebih dari 90% semua kredit perumahan di Denmark, dan memainkan peran yang sangat signifikan terhadap jumlah yang ada di Denmark.

Tabel 2.10 Porsi Pinjaman Kepemilikan Rumah terhadap Pinjaman Lain di Denmark (1999-2001)

Category	1999		2000		2001	
	New loand	Outstanding	New loand	Outstanding	New loand	Outstanding
Dwelling						
Owner occupied	189	614	111	647	215	705
Rented accommodation	29	218	30	228	34	237
Commercial						
Agriculture	48	130	24	134	46	134
Manufacturing, crafts	15	38	5	38	10	39
Office, Shop	33	76	12	77	24	82
Other category	5	18	2	18	5	21
Total	319	1,094	184	1,142	334	1,218

Sumber : (United Nation, 2005)

Adapun produk pinjaman yang ditawarkan oleh bank jaminan adalah :

- Pinjaman tradisional dengan masa pinjaman 30 tahun dengan suku bunga tetap, dengan hak membayar lebih besar dengan tanpa denda. Pinjaman jangka pendek 10-15 tahun juga tersedia. Pinjaman didanai dan dengan *callable annuity bonds*.
- Pinjaman dengan masa 30 tahun dengan tingkat bunga tidak tetap yang disesuaikan setiap 1,2,3 atau 10 tahun. Pinjaman jenis ini dapat dipinjam lebih dari 30 tahun. Bank akan melakukan penyesuaian bunga berdasarkan biaya pendanaan periode yang akan datang. Pinjaman ini didanai dengan *non-callable annuity bonds*.
- Pinjaman dengan hanya membayar bunga tetap selama 30 tahun, pembayaran pinjaman dilakukan diakhir masa pinjaman.

Selain *fee* untuk pelayanan, komponen lain yang ditambahkan pada tingkat bunga pinjaman adalah beban *fee* diawal sekitar €200. Disamping itu biaya lembaga pengadilan sebesar 1,5% sebagai biaya registrasi akte jaminan.

2.5.4 Cina [25]

Kondisi pemenuhan perumahan di Cina pada 2007 cukup baik, dengan kondisi kepemilikan tempat tinggal di perkotaan mencapai 83% dan ruang 28m² per orang penduduk, hal ini jauh meningkat dari 6,7 m² pada tahun 1978 . Hal ini dicapai dengan kerja sama antara pemerintah dengan developer yang ada, khususnya bagi proyek-proyek yang diperuntukkan masyarakat berpenghasilan menengah dan berpenghasilan rendah. Pemerintah memberikan perlakuan khusus penggunaan tanah gratis dan incentive pajak.

Sejak tahun 1970 Cina telah berusaha untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam usaha pemenuhan perumahan ditengah perkembangan kota dan kesejahteraan masyarakatnya. Selama periode tersebut dua cara yang inovatif telah dilakukan antara lain : program pengadaan rumah terjangkau yang dimulai pada tahun 1994 dan dibentuknya *House Provident Fun (HPF)* pada tahun 1996.

Penggunaan HPF merupakan skema yang diadopsi Cina dari Singapura dengan nama *Central Provident Fund (CPF)*, cara ini efektif untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat yang bekerja di sektor formal yang memiliki

kepastian penghasilan setiap tahunnya. Sedangkan masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal masih tergantung pada program pengadaan rumah terjangkau yang didanai dari pemerintah.

Program pengadaan perumahan terjangkau terdiri dari tiga program yaitu :

- Program penyediaan perumahan sewa murah milik pemerintah.
- Program perumahan murah, dan
- Program pembangunan perumahan dengan pembatasan harga jual.

Program-program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Program Penyediaan Perumahan Sewa Murah Milik Pemerintah

Pendanaan program ini dibiayai oleh dana pemerintah lokal dan bantuan pemerintah pusat. *Housing and Urban-Rural Construction Department* di level pemerintah lokal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan investasi proyek-proyek baru berhubungan dengan program ini. Selain itu *Bureau of Public Housing Property Management* bertanggung jawab untuk mengurus dan memelihara fasilitas yang telah tersedia. Biaya sewa yang dikenakan relatif sangat rendah dan berbeda-beda tergantung lokasi dan kondisi rumah. Rata-rata biaya sewa adalah sepersepuluh dari harga pasar perbulan dengan total luas 30-60 m².

- Program Penyediaan Perumahan Murah

Sebutan rumah murah mengacu pada target pembeli yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang disubsidi. Konsep ini pertama dilakukan pada tahun 1994. Sasaran yang dapat membeli rumah jenis ini harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu : merupakan warga negara Cina, berpenghasilan rendah, dan sulit mendapatkan perumahan. Harga rumah tersebut biasanya 20-30% lebih murah daripada perumahan sejenis di lokasi yang sama. Walaupun rumah yang disubsidi tersebut menjadi hak milik perorangan, namun ada kriteria khusus dalam penjualan kembali jenis perumahan ini. Kriteria tersebut adalah hanya dapat dijual kembali setelah 5 tahun dari waktu pembelian dan harga jual kembali yang ada hanya tinggal 70% dari harga baru awal, dan prioritas pembeli adalah negara melalui badan yang memiliki otoritas di sektor perumahan.

- Program Penyediaan Perumahan dengan Pembatasan Harga

Hal ini terjadi dengan keadaan di Cina saat ini, dimana harga property yang ada memiliki harga yang semakin melambung tinggi sekitar **15-23** kali harga pendapatan tahunan rata-rata masyarakat, dimana harga ideal adalah 3-5 kali menurut rekomendasi United Nation (UN). Untuk memecahkan permasalahan ini pemerintah meluncurkan program khusus penyediaan perumahan dengan pembatasan harga jual yang ditargetkan untuk masyarakat menengah kebawah. Pemerintah memberikan kesempatan kepada developer untuk ikut dalam program ini dengan keuntungan yang pantas. Dalam hal penjualan kembali jenis perumahan ini juga hanya boleh dijual kembali setelah 5 tahun kepada negara dengan harga 65-70% dari harga baru.

2.6 *Housing Affordability* dan *Willingnes to Pay*

Housing affordability merupakan suatu topik yang selalu penting untuk dibahas para pengambil kebijakan di suatu daerah. Hal ini dikarenakan hubungannya dengan permasalahan sosial di masyarakat, khususnya penyediaan *Affordable housing*. Penyediaan *Affordable housing* bertujuan untuk mencegah masyarakat dari suatu keadaan sulit, memenuhi suatu biaya tertentu (*shelter cost*) guna mendapatkan suatu tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dasar. Dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal tersebut diperlukan suatu tingkat pendapatan (*income*), dimana *shelter cost* dan *income* memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing unit pengeluaran. Dalam hubungan antara *income* terhadap tingkat *housing affordability* dan *willingness to pay* terdapat beberapa pengertian yang harus diketahui antarlain [26]:

Tabel 2.11 Tabel Istilah yang Berhubungan dengan *Housing Affordability Problem*

Istilah	Definisi
<i>Affordability</i>	Kemampuan suatu individu untuk memilih sesuatu dengan harga pasar.
<i>Affordable housing</i>	Suatu istilah umum yang berhubungan dengan <i>low cost housing</i> . Definisi ini berfungsi untuk memenuhi suatu <i>affordability benchmark</i> . Sebagai

Tabel 2.11 (lanjutan)

Istilah	Definisi
	gambaran spesifikasi <i>affordability benchmark</i> di USA, sesuai dengan <i>Nasional Affordable Housing Act 1990 Affordable housing</i> memiliki pengertian : Suatu harga sewa yang tidak melebihi 30% pendapatan suatu keluarga, dimana nilai pendapatan tersebut adalah sebanding dengan 65% dari <i>median income</i> di areal tersebut.
<i>Housing affordability</i>	Jumlah maksimum dari pendapatan suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.
<i>Housing stress</i>	Suatu istilah umum yang menyatakan akibat negatif terhadap suatu rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi suatu tempat tinggal yang layak.

Sumber : (Yates, Burke, Arthurson, Jacob, and Gabriel, 2005)

Selain itu terdapat 2 interpretasi yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan antara *income* terhadap tingkat *affordability*, interpretasi-interpretasi tersebut yaitu interpretasi *normative* dan *positive* [27]. Interpretasi *normative* memiliki suatu pertanyaan yang harus dijawab, “berapa banyak seharusnya unit konsumsi yang diberikan sehingga mampu dipenuhi?”. Sedangkan interpretasi *positive* memiliki suatu pertanyaan yang harus dijawab, “berapa banyak unit konsumsi yang diberikan sesuai dengan situasi kemampuan sehingga mungkin dipenuhi?”. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu diketahui indikator-indikator yang berhubungan dengan tingkat *housing affordability* suatu unit pengeluaran serta diperlukan suatu model pendekatan kebutuhan rumah (*model of Housing Demand*) untuk mengetahui apakah suatu unit pengeluaran mengalami housing affordability problem atau tidak.

2.6.1 Indikator-Indikator Housing Affordability and Willingness to Pay

Menurut Miron (1985) indikator-indikator yang berhubungan dengan tingkat *Housing Affordability* dan *Willingness to pay* adalah :

Universitas Indonesia

2.6.1.1 Unit Pengeluaran (*Spending Unit*)

Unit Pengeluaran merupakan subjek yang diobservasi dalam melakukan penghitungan tingkat *Housing Affordability* dan *Willingness to pay*. Pengertian Unit Pengeluaran adalah kelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tinggal yang sama, mengumpulkan suatu pendapatan untuk melakukan pengeluaran. Dalam pelaksanaannya suatu Unit Pengeluaran dapat dikatakan sebagai suatu rumah tangga (*household*). Unit Pengeluaran dapat dibagi berdasarkan jenisnya menjadi : Unit Pengeluaran yang tinggal dengan menggunakan rumah sewa dan Unit Pengeluaran yang tinggal dengan menggunakan rumah milik, dalam hal ini pemilikannya menggunakan kredit perumahan (*housing mortgaged*) untuk pembelian rumah pertama. Setiap Unit Pengeluaran akan memiliki karakteristik tertentu yang berbeda-beda, hal tersebut misalnya usia kepala rumah tangga (*age*), siapa yang mengepalai rumah tangga (*sex*), status perkawinan (*marital status*), status pekerjaan (*employment status*), jumlah anggota keluarga (*size of unit*), dan ukuran tempat tinggal (*Type of dwelling*), banyaknya ruangan (*number of rooms*), banyaknya kamar mandi, lokasi geografis, dll.

2.6.1.2 Pengeluaran Untuk Tempat Tinggal (*Shelter Expenditure*)

Shelter expenditure yang ada tergantung dari jenis Unit Pengeluaran yang bersangkutan. Unit yang tinggal dengan menggunakan rumah sewa maka *Shelter expenditure* terbagi menjadi :

- a. *Principal Accommodations Expense* (PAE), terdiri dari :
 - a) *Property tax*
 - b) *Insurance premium*
 - c) *Dwelling maintenance and repair*
 - d) *Rental payment*
 - e) *Water*
 - f) *Electricity*
 - g) *Gas*
 - h) *Other fuel expense*
- b. *Other Accommodations Expense* (OAE)

Sehingga nilai *Total Shelter Expense* (TSE) unuk Unit Pengeluaran yang tinggal dengan menggunakan rumah sewa adalah :

$$TSE = PAE + AOE \quad (2.1)$$

Dalam perhitungannya, Miron hanya menggunakan nilai PAE, hal ini dikarenakan harga OAE yang merupakan biaya menginap diperjalanan saat melakukan aktifitas sehari-hari sangat jarang, sehingga bernilai kecil dibandingkan PAE. Selanjutnya Unit yang tinggal dengan menggunakan rumah milik maka nilai *Shelter expenditure* juga hanya menggunakan nilai *Principal Accommodations Expense* (PAE), yang terdiri dari :

- a. *Mortgage interest expense* (MIE) yang merupakan nilai bunga kredit yang ditanggung.
- b. *Net principal accommodation expense* (NPAE) yang terdiri dari :
 - a) *Mortgage charge*
 - b) *Penalty payment*
 - c) *Survey cost*
 - d) *Appraisal cost*
 - e) *Property tax*
 - f) *Insurance premium*
 - g) *Dwelling maintenance and repair*
 - h) *Water*
 - i) *Electricity*
 - j) *Gas*
 - k) *Other fuel expense*

Sehingga nilai *Total Shelter Expense* (TSE) unuk Unit Pengeluaran yang tinggal dengan menggunakan rumah milik adalah :

$$TSE = PAE + AOE \text{ dimana } PAE = MIE + NPAE \quad (2.2)$$

Kembali Dalam perhitungannya Miron hanya menggunakan nilai PAE, hal ini dikarenakan harga OAE yang merupakan biaya menginap diperjalanan saat melakukan aktifitas sehari-hari sangat jarang, sehingga bernilai kecil dibandingkan PAE. Sebagai pembanding dengan pengertian pengeluaran untuk tempat tinggal (*shelter expenditure*), ada juga yang menyebutkan dengan sebutan

housing cost [28] yang terdiri biaya sewa, repayment, bunga pinjaman kredit, pajak, asuransi, perbaikan dan pemeliharaan.

2.6.1.3 Pendapatan (*Income*)

Tidak seperti pengeluaran, pendapatan memiliki struktur yang sama antara Unit Pengeluaran yang tinggal dengan menggunakan rumah sewa dan Unit Pengeluaran yang tinggal dengan menggunakan rumah milik. Pendapatan dapat dibagi menjadi :

- a. Gaji atau pendapatan yang merupakan *Total Current Income* (Y)
 - a) *Wage*
 - b) *Allowance*
 - c) *Income* dari penyewa
 - d) *Interest, dividend, other investment income*
 - e) *Income* dari *government (allowance family)*
 - f) Uang pensiun
 - g) Penghasilan lain (*alimony*)
- b. *Other money receipts* (OMR) merupakan uang yang didapat dari orang diluar Unit Pengeluaran.
- c. *Net changes in assets and debts* (NCAD) yang terdiri dari :
 - a) *Cash held in bank*
 - b) *Money owned to spending unit*
 - c) *Money deposited against future purchase*
 - d) *Net change in financial asset*
 - e) *Sales of personal dan real property*
 - f) *Investment in non-incorporated businesses*

Miron menggambarkan hubungan antara total *expenditure* (E) dengan nilai-nilai pendapatan di atas sebagai :

$$E = Y + OMR - NCAD \quad (2.3)$$

Dalam perhitungan berikutnya nilai $Y + OMR - NCAD$ merupakan jenis pendapatan yang dinamai *source of fund* sebagai pembanding dengan nilai Y terhadap tingkat *housing affordability*.

2.6.1.4 Keadaan-Keadaan Khusus Pada Unit Pengeluaran

Maksud dari hal ini adalah, Miron menggambarkan bahwasanya ada suatu kondisi yang terjadi pada suatu Unit Pengeluaran sehingga mempengaruhi tingkat *housing affordability*, antara lain :

- a. Keadaan hidup sendiri, hal ini umumnya terjadi pada suatu Unit Pengeluaran dengan karakteristik ; masih muda, janda, dan perceraian.
- b. Adanya kondisi istri dalam suatu Unit Pengeluaran yang dikepalai oleh seorang suami yang aktif bekerja ikut bekerja. Kepala rumah tangga dalam kajian *housing affordability* merupakan individu yang memiliki penghasilan dominan untuk pengeluaran suatu Unit Pengeluaran.
- c. Perubahan tingkat suku bunga dan biaya *mortgage* di bidang perumahan. Hal ini sangat berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan *housing affordability* dengan melakukan usaha-usaha, antara lain : memperlakukan tingkat suku bunga yang rendah, adanya uang muka yang terjangkau, serta memudahkan persyaratan sehingga *housing affordability* problem dapat diminimalisir.
- d. Pertumbuhan nilai penghasilan (*grow of income*), hal ini berhubungan dengan *income* setiap Unit Pengeluaran. Sangat jelas dengan adanya *grow of income* dari tahun ketahun maka *housing affordability* setiap Unit Pengeluaran akan terus meningkat.

2.6.2 Pendekatan Terhadap Tingkat Affordability

Untuk mengetahui tolak ukur apakah suatu Unit Pengeluaran memiliki *affordability problem* menurut Miron terdapat empat pendekatan yaitu : *Minimum Budget*, *The Low Income Cut Off*, *Shelter Cost to Income Ratio*, dan *Core need Approaches*. Pendekatan dengan menggunakan *Minimum Budget* dan *The Low Income Cut Off* berfungsi untuk menentukan *affordability problem* secara umum dimana gambaran kasus yang terjadi adalah pendapatan suatu rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan dasar yang tidak hanya dibatasi pada *housing*. Sedangkan pendekatan dengan menggunakan *Shelter Cost to Income Ratio* dan *Core need Approaches* berfungsi untuk mengidentifikasi *housing affordability* problem

dimana gambaran kasus yang terjadi adalah *shelter cost* memiliki nilai relatif yang tinggi terhadap pendapatan.

2.6.2.1 Minimum Budget

Pada pendekatan *minimum budget* suatu keluarga memiliki *affordability problem* apabila pendapatan yang ada bernilai dibawah ambang batas pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk *housing (merit good including housing)*. Kebutuhan dasar termasuk housing tersebut tercantum di dalam suatu pedoman yang disebut sebagai “*Guide for family budgeting*”. Pedoman ini disusun pengambil kebijakan sesuai keadaan daerah serta terbagi berdasarkan tipe dan jumlah anggota keluarga tanpa melihat level pendapatan. Contoh “*Guide for family budgeting*” sebagai berikut:

Tabel 2.12 *Guide for Family Budgeting*

Expenditure Category	Minimum Budget		Percent of Total
	Month	Year	Minimum Budget
	(\$)	(\$)	(\$)
Food	402.81	4,833.74	28.3
Housing	388.00	4,656.00	27.3
Homefurnishing & Equipment	62.14	745.63	4.4
Household Operation	18.05	216.62	1.3
Clothing	134.31	1,611.76	9.4
Health Care	76.42	917.07	5.4
Personal Care	40.90	490.82	2.9
Recreation, Reading, Gift and Contribution, and Communication	149.44	1,793.26	10.5
Alcohol and Tobacco	55.09	661.06	3.9
Transportation	60.24	722.85	4.2
Special School Needs	9.45	113.41	0.7
Life Insurance	9.50	114.00	0.7
Contingency Fund	17.00	204.00	1.2
Total Minimum Budget	1,423.35	17,080.22	100.0
Estimate Income Tax	238.50	2,862.00	17.1
Threshold Income	1,661.85	19,942.00	

Sumber : (Miron, 1985)

2.6.2.2 *The Low Income Cut-Off*

Pendekatan *The low income cut-off* berfungsi untuk menentukan batas pengeluaran yang diperuntukkan kelompok *low income family* dengan dengan item pengeluaran terdiri dari makanan, tempat tinggal, and pakaian. *Low income cut-off* bukan merupakan gambaran garis kemiskinan tetapi merupakan gambaran kebutuhan *low income family*.

2.6.2.3 *Shelter Cost to Income Ratio*

Pendekatan *Shelter cost to income ratio* memberikan penilaian khusus pada housing cost, dimana suatu rumah tangga yang mengeluarkan lebih dari 25% pendapatannya untuk *housing cost* maka rumah tangga tersebut memiliki *affordability problem*. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara, maka semakin tinggi proporsi yang dapat diterima untuk *housing cost* [29].

Shelter cost to income ratio yang ada di berbagai negara :

- *Developing country* proporsi yang diterima 10-15%
- *Western Europe* yang diterima 15-20%
- *North America* yang diterima 20-30%

Pendekatan *Shelter cost to income ratio* hanya mengacu kepada proporsi *housing cost* tanpa mempertimbangkan kelayakan pemenuhan rumah bagi rumah tangga tersebut.

2.6.2.4 *Core Need*

Pendekatan *Core need* mempertimbangkan tiga aspek dalam menentukan suatu rumah tangga memiliki housing affordability problem atau tidak, yaitu :

- *Physical adequacy dan Suitability*
- *Housing affordability*
- *Financial capacity*

Pendekatan *Core need* memberikan gambaran, bahwasanya suatu keluarga memiliki *affordability problem* apabila :

- a. Suatu rumah tangga tinggal di suatu tempat tinggal yang tidak sebanding dengan jumlah anggota keluarga karena keluarga tersebut tidak mampu memenuhinya walaupun dengan pengeluaran lebih dari 25% pendapatan.

- b. Suatu rumah tangga tinggal di suatu tempat tinggal yang sebanding dengan jumlah anggota keluarga namun keluarga tersebut harus melakukan pengeluaran dengan pengeluaran lebih dari 25% pendapatan.

Contoh minimum space standar untuk minimum expenditure :

- 1 ruang untuk suami + istri.
- 1 ruang untuk anak beda jenis kelamin dengan usia > 5 tahun.
- Selain itu dapat saling disatukan berbagi space yang ada.

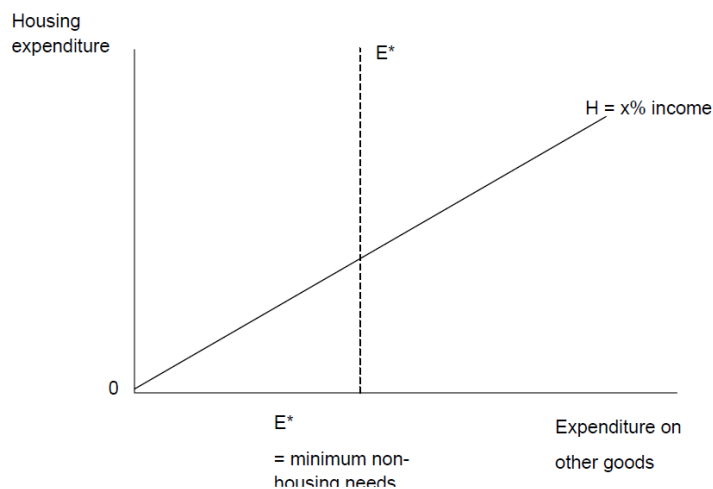
Selain pendekatan diatas Yates, Burke, Arthurson, Jacob, and Gabriel (2005) menambahkan suatu pendekatan lain yaitu *Residual Measure*.

2.6.2.5 *Residual Measure*

Pendekatan ini memusatkan perhatian terhadap hubungan antara *housing cost* dan kemampuan suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan esensial lain sesuai suatu standart yang diakui. Dengan kata lain pendekatan ini mengharuskan suatu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan *housing* dan *non housing* yang layak untuk tingkat pendapatannya, dalam penelitiannya Yates, Burke, Arthurson, Jacob, dan Gabriel menggunakan *housing affordable benchmark* sebesar 30% untuk *housing* dan untuk mengetahui kebutuhan *non housing* menggunakan data living standart berupa :

- *The Henderson poverty line*, yang dibuat oleh *the Commission of Inquiry into Poverty (chaired by Ronald Henderson) in 1974*;
- *The budget standard developed oleh the University of New South Wales Social Policy Research Centre in 1998*.

Selanjutnya hubungan antara *housing affordable benchmark*, *housing expenditure*, *expenditure on other good*, dan *minimum non housing need* dapat digambarkan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 2.10 Segita Residual Measure

Sumber : (Yates, Burke, Arthurson, Jacob, and Gabriel, 2005)

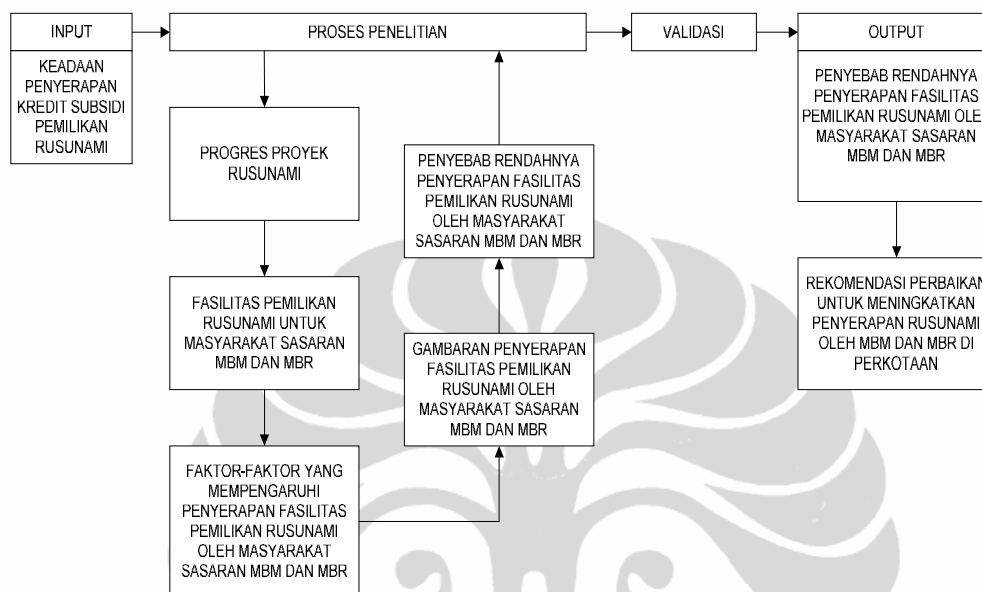
Suatu keluarga yang memiliki pola pengeluaran berada di atas garis E' dan berada di bawah garis OH yang tidak berada dalam kondisi *afford ability problem*.

2.7 Kerangka Berfikir dan Hipotesa Penelitian

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal khususnya Rusunami merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat perkotaan. Hal ini dikarenakan ketersediaan tanah di daerah perkotaan yang semakin sulit, kondisi kekurangan rumah (*backlog*) diperkirakan meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,455 juta unit pada akhir tahun 2009, dan sesuai data BPS tahun 2007, sebanyak 98% rumah tangga di Indonesia merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, dan masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal yang memiliki keterbatasan daya beli dan memiliki penghasilan yang tidak tetap [30].

Kondisi di atas harus dijadikan tolak ukur perencanaan penyediaan pilihan perumahan di perkotaan, Rusunami merupakan pilihan kepemilikan perumahan dengan karakteristik rumah susun dan diharapkan dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Selanjutnya sehubungan dengan rendahnya penyerapan kredit subsidi pemilikan Rusunami oleh MBM dan MBR di perkotaan, diperlukan suatu penelitian mengapa hal ini terjadi di masyarakat.

Dari studi literatur yang ada, tinggi rendahnya penyerapan tempat tinggal terhadap masyarakat sasaran MBM dan MBR tidak terlepas dari kondisi *Housing Finance system* yang ada di suatu negara.



Gambar 2.11 Kerangka Berpikir Penelitian

Dari uraian rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka berpikir penelitian yang ada, maka adapun hipotesis penelitian ini adalah :

Rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran MBM dan MBR di perkotaan saat ini diakibatkan oleh *Housing Finance System* yang belum maksimal.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendahuluan

Penelitian merupakan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis [31]. Rasional artinya penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya dalam suatu penelitian terdapat tujuan penelitian yang harus dicapai, untuk mencapai tujuan penelitian ini, perlu dirumuskan metodologi penelitian yang akan digunakan. Pada bab metodologi penelitian ini, akan dibahas pemilihan strategi penelitian, proses penelitian, variabel penelitian, pengumpulan data dan analisis yang digunakan.

3.2 Pemilihan Strategi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan sesuatu, dengan suatu cara yang sistematis, sehingga menambah ilmu pengetahuan orang yang melakukannya, oleh karena itu penelitian memiliki 3 karakteristik [32] :

- Data dikumpulkan secara sistematis.
- Data diinterpretasikan secara sistematis.
- Adanya tujuan yang jelas untuk menemukan sesuatu.

Strategi penelitian merupakan alur penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Yin menjelaskan pembagian strategi penelitian menjadi lima strategi antara lain [33] :

Tabel 3.1 Strategi Penelitian menurut Yin (2006)

STRATEGI	Jenis Pertanyaan yang digunakan	Kendala terhadap peristiwa yang diteliti	Fokus terhadap peristiwa yang berjalan/baru diselesaikan
Eksperimen	Bagaimana, mengapa	Ya	Ya
Survey	Siapa, apa, dimana, berapa banyak, berapa besar	Tidak	Ya
Analisis	Siapa, apa, dimana, berapa banyak, berapa besar	Tidak	Ya/Tidak
Sejarah	Bagaimana, mengapa	Tidak	Tidak
Studi Kasus	Bagaimana, mengapa	Tidak	Ya

Dari berbagai strategi yang ada di atas, maka untuk mencapai tujuan penelitian peneliti akan menggunakan strategi survey, hal ini sesuai dengan jenis pertanyaan yang akan dijawab yaitu :

- a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan?
- b. Bagaimana gambaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhasil terserap oleh fasilitas kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan?
- c. Apa penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

3.3 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan tahapan penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian, hal ini terdiri dari menetapkan masalah yang akan diteliti, melakukan studi literatur, menetapkan variabel penelitian, menetapkan populasi dan sampel penelitian, melakukan survey kuesioner ke pakar, penetapan variabel penelitian hasil validasi pakar, pengumpulan data sekunder mengenai variabel terpilih terhadap sampel yang telah ditetapkan, melakukan analisis

deskriptif, melakukan temuan dan pembahasan hasil analisis data, dan melakukan wawancara terstruktur untuk validasi hasil temuan dan pembahasan. Secara detail penjelasan proses penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan masalah yang ada di dalam penelitian.

Sesuai dengan signifikansi permasalahan yang ada pada bab pendahuluan, masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah rendahnya realisasi kredit subsidi pemilikan Rusunami untuk masyarakat sasaran, yaitu masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dari data unit Rusunami yang telah mengalami serah kunci mulai tahun 2007-2010 dengan jumlah unit yang mendapatkan subsidi memiliki selisih jumlah yang sangat signifikan.

b. Melakukan studi literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.

Studi literatur dilakukan dengan membaca konsep, teori, dan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan studi terhadap peraturan yang berhubungan dengan Rusunami sesuai dengan topik penelitian.

c. Menetapkan variabel penelitian.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau suatu obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981). Pada penelitian ini variabel penelitian terdiri dari hal-hal yang mempengaruhi masyarakat yang tergolong MBM dan MBR untuk berhasil atau tidak dalam memperoleh fasilitas pemilikan tempat tinggal, khususnya tempat tinggal yang berupa Rumah Susun Sederhana Milik atau disingkat Rusunami. Pada penelitian ini fasilitas pemilikan yang dimaksud adalah KPR Sarusuna Bersubsidi.

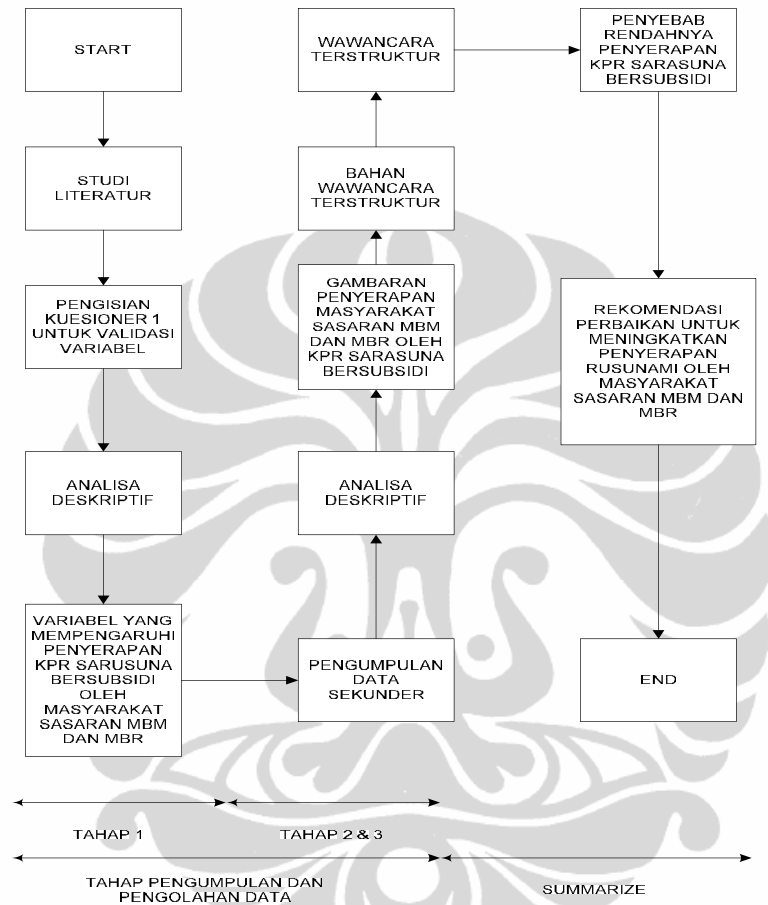
d. Menetapkan populasi dan sampel penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat sasaran MBM dan MBR yang telah lolos verifikasi tahap 1 dan verifikasi tahap 2 untuk mendapatkan dana subsidi selisih bunga dan uang muka dalam pemilikan Rusunami sampai akhir 2010. Sampel adalah bagian dari populasi yang telah ditetapkan tersebut.

- e. Melakukan survey kuesioner terhadap pakar untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan.
- f. Melakukan pembobotan nilai untuk menentukan variabel mana yang berpengaruh dengan pembagian kelompok menjadi berpengaruh dan tidak berpengaruh dengan analisis deskriptif. Variabel yang terkelompok berpengaruh akan dijadikan variabel penelitian untuk dilakukan pengumpulan data sekunder selanjutnya.
- g. Melakukan pengumpulan data sekunder terhadap variabel-variabel terpilih sesuai dengan sampel yang ditetapkan yang bersumber dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Bank BTN.
- h. Melakukan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang didapat, sehingga menghasilkan informasi bagaimana gambaran masyarakat MBM dan MBR yang terserap fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi. Selain itu juga berguna untuk mendapatkan gambaran keadaan *Housing Finance System* yang ada saat ini khususnya untuk pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran MBM dan MBR.
- i. Melakukan temuan dan pembahasan terhadap informasi yang didapat dari hasil analisa deskriptif data sekunder yang ada.

- j. Melakukan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dengan proses pelaksanaan KPR Sarusuna Bersubsidi untuk memvalidasi hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan.



Gambar 3.1 Proses Penelitian

3.4 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variabel penelitian terdiri dari hal-hal yang mempengaruhi masyarakat yang tergolong MBM dan MBR untuk berhasil atau tidak dalam memperoleh fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator		Referensi
1	Karakteristik Masyarakat Sasaran	1.1	Jenis kelamin penanggung kredit.	Miron (1985)
		1.2	Tingkat pendidikan penanggung kredit.	Miron (1985)
		1.3	Usia penanggung kredit.	Miron (1985)
		1.4	Status perkawinan penanggung kredit	Miron (1985)
		1.5	Status duda penanggung kredit.	Miron (1985)
		1.6	Status janda penanggung kredit	Miron (1985)
		1.7	Jumlah anggota keluarga (istri/suami plus anak) penanggung kredit.	Miron (1985)
		1.8	Pekerjaan penanggung kredit (formal atau informal).	Miron (1985)
		1.9	Tingkat penghasilan per bulan penanggung kredit.	<i>Nigeria Housing Finance Conference (2007)</i>
		1.10	Status Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (bekerja atau tidak bekerja).	Miron (1985)
		1.11	Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (formal atau informal).	Miron (1985)
		1.12	Tingkat penghasilan per bulan Istri/Suami penanggung kredit.	<i>Nigeria Housing Finance Conference (2007)</i>
		1.13	Persentase pengeluaran setiap bulan terhadap penghasilan perbulan.	Miron (1985)
2	Karakteristik Rusunami yang tersedia	2.1	Lokasi Rusunami yang dibeli.	<i>Nigeria Housing Finance Conference (2007)</i>
		2.2	Harga Rusunami yang dibeli.	<i>Nigeria Housing Finance Conference (2007)</i>
		2.3	Tipe rusunami yang dibeli (luas bangunan milik).	<i>Nigeria Housing Finance Conference (2007)</i>

Tabel 3.2 (lanjutan)

No	Variabel	Indikator		Referensi
3	Bentuk kredit yang tersedia	3.1	Persentase Uang muka dibandingkan harga Rusunami yang dibeli.	United Nation (2005)
		3.2	Lama masa cicilan kredit (<i>periods of redemption</i>).	United Nation (2005)
		3.3	Ada atau tidaknya fasilitas pencicilan uang muka.	United Nation (2005)
		3.4	Persentase penghasilan per bulan untuk pembayaran pinjaman.	United Nation (2005)
		3.5	Besarnya tingkat suku bunga pinjaman (<i>Mortgage rates</i>)	United Nation (2005)
		3.6	Jenis suku bunga pinjaman (fixed atau lainnya).	United Nation (2005)
		3.7	Persyaratan dokumen yang diperlukan.	Warnock (2007)

Sumber : Hasil Olahan

3.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari tiga tahap :

Tahap pertama adalah penentuan variabel yang berpengaruh dari hasil kuesioner pakar. Pakar yang mengisi kuesioner adalah orang yang berpengalaman dan terlibat langsung dengan proses yang menjadi topik penelitian. Pakar dalam penelitian ini terdiri dari pakar yang berasal dari pihak yang berhak melakukan verifikasi para masyarakat calon penerima subsidi selisih bunga dan uang muka yaitu dari Lembaga Penerbit Kredit (LPK) dalam hal ini Bank Tabungan Negara (BTN) dan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada tahap ini adalah kuesioner. Kuesioner ini berisi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap lolos atau tidaknya masyarakat sasaran untuk mendapatkan subsidi kredit pemilikan Rusunami. Bentuk kuesioner dan keterangan untuk penilaian adalah skala 1-5 sebagai berikut :

- 1 = Sangat rendah pengaruhnya;
- 2 = Rendah pengaruhnya;
- 3 = Sedang pengaruhnya;

- 4 = Tinggi pengaruhnya;
5 = Sangat tinggi pengaruhnya.

Tabel 3.3 Format Kuesioner Penelitian ke Pakar

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Lolos atau Tidaknya Verifikasi Masyarakat Sasaran dalam Mendapatkan Subsidi Kredit Pemilikan Rusunami	Tingkat Pengaruh				
		1	2	3	4	5
1	Karakteristik Masyarakat Sasaran					
X1	Jenis kelamin penanggung kredit.					
X2	Tingkat pendidikan penanggung kredit.					
X3	Usia penanggung kredit.					
X4	Status perkawinan penanggung kredit					
X5	Status duda penanggung kredit.					
X6	Status janda penanggung kredit.					
X7	Jumlah anggota keluarga (istri/suami plus anak) penanggung kredit					
X8	Pekerjaan penanggung kredit (formal atau informal).					
X9	Tingkat penghasilan per bulan penanggung kredit.					
X10	Status Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (bekerja atau tidak bekerja).					
X11	Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (formal atau informal).					
X12	Tingkat penghasilan per bulan Istri/Suami penanggung kredit.					
X13	Persentase pengeluaran setiap bulan terhadap penghasilan perbulan.					
2	Karakteristik Rusunami yang Tersedia					
X14	Lokasi Rusunami yang dibeli.					
X15	Harga Rusunami yang dibeli.					
X16	Tipe rusunami yang dibeli (luas bangunan milik).					
3	Bentuk kredit yang tersedia					
X17	Persentase Uang muka dibandingkan harga Rusunami yang dibeli.					

Tabel 3.3 (lanjutan)

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Lolos atau Tidaknya Verifikasi Masyarakat Sasaran dalam Mendapatkan Subsidi Kredit Pemilikan Rusunami	Tingkat Pengaruh				
		1	2	3	4	5
X18	Lama masa cicilan kredit (<i>periods of redemption</i>).					
X19	Ada atau tidaknya fasilitas pencicilan uang muka.					
X20	Persentase penghasilan per bulan untuk pembayaran pinjaman.					
X21	Besarnya tingkat suku bunga pinjaman (<i>Mortgage rates</i>).					
X22	Jenis suku bunga pinjaman (<i>fixed</i> atau lainnya).					
X23	Persyaratan dokumen yang diperlukan.					

Sumber : Hasil Olahan

Hasil kuesiner tersebut akan dibobot untuk menentukan variabel mana yang berpengaruh dengan pembagian berpengaruh dan tidak berpengaruh. Variabel yang terkelompok berpengaruh akan dijadikan variabel penelitian, dan digunakan untuk pengumpulan data sekunder selanjutnya.

Tahap kedua adalah pengumpulan data sekunder berasal dari data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Data tersebut berupa variasi data variabel yang diteliti pada sampel yang telah ditetapkan, selain itu data sekunder yang dikumpulkan juga termasuk kondisi progres pembangunan Rusunami, serta peraturan yang berhubungan dengan Rusunami dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Tahap ketiga adalah pengumpulan data tahap wawancara terstruktur untuk menjawab sekaligus memvalidasi hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan. Pakar yang dituju adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses dan pengambilan keputusan kebijakan yang berhubungan dengan program KPR Sarusuna Bersubsidi yang ada di masyarakat. Adapun bentuk pertanyaan wawancara terstruktur yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Bapak/Ibu setuju bahwasanya temuan penyerapan Rusunami yang rendah oleh masyarakat sasaran, yaitu hanya 21% dari jumlah unit yang telah melakukan serah terima kunci dari tahun 2007- 2010 merupakan hal yang dapat mengindikasikan bahwasanya program proyek Rusunami yang dicanangkan oleh pemerintah yang seharusnya dikhususkan untuk sasaran

Universitas Indonesia

masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan mengalami **salah sasaran** ?

- b. Pemerintah belum memiliki sikap yang tegas dalam mengatur batasan unit Rusunami yang dapat dijual dengan harga komersil oleh developer. Hal ini terlihat dari walaupun pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menpera No 39 Tahun 2008 yang membatasi hunian komersil disuatu Rusunami tidak boleh melebihi 30%, namun hal ini hanya bersifat himbauan. Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?
- c. Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, batas harga Sarusuna paling banyak setiap kelompok sasaran adalah :

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak
1 (Penghasilan maks 4,5 juta rupiah)	144 Juta rupiah
2 (Penghasilan maks 3,5 juta rupiah)	110 Juta rupiah
3 (Penghasilan maks 2,5 juta rupiah)	75 Juta rupiah

Dari 1893 debitur KPR Sarusunan Bersubsidi ternyata harga Sarusuna berkisar antara 89 juta – 144 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan kelompok sasaran 3 sulit untuk membeli Rusunami dikarenakan batas harga paling banyak sesuai ketentuan sudah tidak didapat di pasaran. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga terbawah rusunami sedangkan harga teratas adalah tetap, oleh sebab itu Rusunami yang ada saat ini dengan fasilitas KPR Sarauna Bersubsidi yang diprogramkan oleh pemerintah hanya dinikmati oleh masyarakat kelompok sasaran 1, Hal ini diperkuat dengan data bahwasanya dari jumlah 1893 debitur KPR Sarasuna Bersubsidi, jumlah masyarakat sasaran 1 adalah 74%, masyarakat sasaran 2 adalah 22%, dan masyarakat sasaran 3 hanya 4%. Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan

Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

- d. Suatu skema pemilikan tempat tinggal di dalam berbagai literatur sering disebut sebagai *Housing Finance System*. Semakin baik *Housing Finance System* suatu negara maka akan semakin terjangkau harga tempat tinggal yang tersedia oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Untuk Indonesia saat ini *Housing Finance System* yang ada masih belum maksimal. Walaupun besaran uang muka yang minimal hanya 12,5%, dimana rata-rata di negara dengan *Housing Finance System* yang baik antara 10-20% namun tenor yang ada masih cenderung pendek antara 10-15 tahun, sedangkan di China dan Malaysia menurut *Warnock (2008)* dapat mencapai 20-30 tahun. selain itu suku bunga pasar khusus KPR Sarusuna Bersubsidi masih tinggi, yaitu sesuai ketentuan BI-rate + 4 (Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010) dengan nilai cenderung diatas 10%, sedangkan sebagai pembandingan di China dan Malaysia hanya 5,5-7,5% (*Word Bank (2006)*). Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?
- e. Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, kondisi masa subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka yang kemudian disebut KPR Sarusuna Bersubsidi hanya berlangsung 4-8 tahun, selanjutnya akan mengikuti bunga pasar yang ada, apakah menurut Bapak/Ibu hal ini dapat menjadi hal yang menyebabkan keengganan Lembaga Pemberi Kredit (LPK) untuk menyalurkan kredit terhadap masyarakat kelompok sasaran, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?
- f. Sesuai ketentuan yang ada pada Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

KPR Sarasuna Bersubsidi, dalam proses verifikasi masyarakat sasaran, terdapat verifikasi administrasi yang harus dilalui, verifikasi ini mengharuskan masyarakat sasaran memenuhi persyaratan :

- a) Maksimum penghasilan
- b) Maksimum harga rusunami
- c) Minimum uang muka
- d) Maksimum kredit pinjaman
- e) Surat keterangan penghasilan
- f) Surat pernyataan belum memiliki rumah
- g) Surat pernyataan tidak menjual rusun sebelum 5 tahun
- h) Surat perjanjian kredit
- i) Pernyataan pengenaan suku bunga subsidi sesuai tahun
- j) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- k) Berita Acara Serah Terima (BAST)
- l) Akta Jual Beli (AJB)
- m) Surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi

Dari item persyaratan administratif diatas apakah menurut Bapak/Ibu ada yang merupakan penyebab proses verifikasi administrasi cenderung menjadi lama dan belum terkoordinasi dengan baik antara institusi yang berwenang, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

- g. Selain pertanyaan yang telah ditanyakan di atas, Apakah menurut Bapak/Ibu masih ada penyebab yang mendasar lainnya yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

3.6 Analisa Data

Analisis Deskriptif [34]

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, Pada analisis deskriptif memuat cara-cara penyajian data dan penjelasan kelompok data melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Modus adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Mean ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada dalam kelompok itu.

Selain itu untuk menjelaskan keadaan suatu kelompok data, dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut. Variasi data tersebut dapat berupa rentang data dan standar deviasi atau simpangan baku dari kelompok data yang telah diketahui. Rentang data dapat diketahui dengan jalan mengurangi data terbesar dengan data terkecil yang ada pada kelompok tersebut. Varian adalah jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar terhadap varian disebut standar deviasi atau simpangan baku.

BAB 4

GAMBARAN PERATURAN PROYEK RUSUNAMI

4.1 Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pembangunan rusunami pemerintah menggunakan acuan peraturan yang berhubungan dengan Rumah Susun sederhana (rusuna) yang telah ada sebelumnya. Sebagai tempat hunian pada daerah perkotaan, pembangunan rumah susun di Indonesia diatur sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah peraturan yang terkait dengan rumah susun di Indonesia pada umumnya dan DKI Jakarta khususnya antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis;
- g. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun;
- h. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- i. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 354 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah Bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- j. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1934 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Penghitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Sederhana/Murah yang Dikonversi Dengan Dana Oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT;
- k. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- l. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana;
- m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
- n. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- r. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Dengan Pola Pengembangan Fungsi Campuran (Mixed-Use) di Perkotaan.

4.2 Lahan Untuk Pembangunan Proyek Rusunami

Dalam pelaksanaan suatu proyek, ketersediaan lahan/tanah merupakan hal dasar yang harus dipenuhi, selain itu tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat bertambah akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sehingga sistem penyediaan tanah untuk perumahan dan pemukiman harus ditangani secara nasional. Proses penyediaannya harus dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah agar penggunaan dan pemanfaatannya dapat menjangkau masyarakat secara adil dan merata tanpa menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam proses bermukimnya [35]. Dalam hal ini pemerintah hendaknya dapat melakukan penyusunan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dengan tidak meninggalkan asas keserasian dan keseimbangan dalam perkehidupan, maksud dari asas ini adalah bahwasanya pembangunan rumah susun harus terdapat adanya keserasian dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan rumah susun, hal ini untuk mencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan sosial [36]. Idealnya pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman menyiapkan perencanaan lahan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri dari :

a. Kawasan siap bangun.

Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan terdiri atas jaringan jalan untuk memperlancar hubungan antar lingkungan, saluran pembuangan air hujan untuk drainase, dan saluran pembuangan air limbah untuk kesehatan lingkungan dalam kawasan siap bangun.

b. Lingkungan siap bangun.

Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.

c. Kaveling tanah matang.

Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan. Pelaksana dan pengelola kawasan siap bangun dilakukan oleh BUMN dan atau badan lain yang ditunjuk oleh pemerintah dan bekerja sama dengan BUMD, koperasi, dan badan usaha swasta dibidang pembangunan perumahan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun, pemerintah dapat membantu badan usaha milik negara atau badan lain dengan pemanfaatan tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman.

Namun pada kenyataannya hal ini tidak berjalan maksimal, bahkan penguasaan lahan yang khususnya berada di areal perkotaan banyak dikuasai oleh pengembang. Khusus di kawasan DKI Jakarta untuk meningkatkan optimasi penggunaan lahan secara lebih efisien dan mengimbangi penyediaan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan komersial dengan pembangunan perumahan bagi masyarakat pemerintah daerah DKI Jakarta mengambil kebijakan bahwasanya terhadap lokasi/lahan yang dimohon dengan kondisi lapangan dan/atau rencana kota peruntukannya adalah perumahan dengan luas 5000m² atau lebih, kepada pemohon diwajibkan membiayai dan membangun rumah susun sederhana murah beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat secara komersial. Pembangunan rumah susun murah dimaksud, lokasi dan persyaratan penjualannya ditetapkan kemudian oleh Gubernur DKI Jakarta [37]. Selanjutnya khusus penempatan lokasi kewajiban tersebut pada wilayah pengembangan barat dan timur adalah 10% dari areal manfaat secara komersial. Tetapi apabila

kewajiban penyediaan lahan tersebut (20% dan 10%) tidak dilaksanakan pada lokasi yang ditentukan, maka dapat dialihkan dengan lahan yang senilai dengan lahan semula. Selain itu pemohon juga harus membiayai prasarana jalan masuk/penghubung dari lokasi perumahan ke jalan umum [38]. Dalam hal rumah susun sederhana/murah dapat dibangun di luar areal Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) apabila [39] :

- a. Kurang dari 1000m²;
- b. Dikaitkan dengan urgensi dan kebutuhan.

Namun dengan berjalannya waktu kebijakan ini mengalami perubahan dengan alasan pertimbangan kondisi para pengembang yang banyak mengalami kerugian. Karena alasan tersebut banyak pengembang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu adanya pasal 13 Keputusan Gubernur provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 tahun 2001 Tentang Cara Penerimaan kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah provinsi DKI Jakarta, ditetapkan bahwa kewajiban pengembang dapat dikompensasikan/dikonversi dalam bentuk dana dengan perhitungan kewajiban yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang SIPPT, dengan rumusan [40]:

- a. Apabila pengembang akan membangun dan mengelola kewajiban rumah susun sederhana/murah yang telah ditetapkan sesuai tercantum dalam SIPPT dan bangunan beserta fasilitasnya, penempatan, dan harga bangunan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Apabila untuk membangun rumah susun sederhana/murah yang telah ditetapkan dalam SIPPT yang telah ditetapkan dihibahkan (konversi) maka perhitungan nilai tersebut :

$$6 \times \text{Luas Efektif} \times (\text{NJOP SIPPT terbit} + \text{NJOP terakhir}) \quad (4.1)$$

Selanjutnya apabila pengembang bersedia melakukan pembangunan rumah susun sederhana murah/sederhana maka pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana/murah dilakukan dengan cara sebagai berikut [41]:

- a. Pembangunan rumah susun sederhana/murah harus dilaksanakan bersama atau mendahului dengan pelaksanaan pembangunan areal manfaat komersial.

- b. Pelaksana pembangunan rumah susun sederhana/murah oleh pemegang SIPPT atau kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- c. Melaporkan pelaksanaannya secara periodik kepada dinas Perumahan.
- d. Dinas Perumahan melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana/murah sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah (P3RS2M).
- e. Penyelenggara pembangunan yang menyimpang dari ketentuan SP3RS2M akan dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku.

4.3 Perizinan Pembangunan Proyek Rusunami

Rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ pengembang di bidang pembangunan rumah susun sederhana, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha dan hal lain yang terkait [42].

Penyelenggara pembangunan rumah susun wajib memiliki perizinan yang meliputi [43]:

- a. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
- b. Keterangan Rencana Kota;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Layak Huni;
- e. Izin-izin lain yang diperlukan.

Selain itu Perizinan diajukan oleh penyelenggara pembangunan kepada Pemerintah Daerah, dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut [44]:

- a. Sertifikat hak atas tanah;
- b. Fatwa peruntukan tanah;
- c. Rencana tapak;

- d. Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertical dan horizontal dari satuan rumah susun;
- e. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
- f. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;
- g. Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya.

Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dapat disebut juga sebagai pertelaan, memiliki pengertian secara detail rincian batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dalam bentuk gambar dan uraian [45]. Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dari Pemerintah daerah atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proposionalnya. Apabila ada perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan rumah susun tersebut harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah [46]. Pengesahan Pertelaan adalah pengesahan oleh Pemerintah Daerah atas pertelaan yang telah jelas dan benar menerangkan tentang pemisahan rumah susun atas satuan satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal[47]. Pemberian kemudahan perizinan dan insentif dari Pemerintah Daerah kepada pengembang pembangunan Rusuna antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, pemberian bantuan teknis dan fasilitasi, keringanan biaya dan kemudahan dalam memperoleh izin pembangunan Rusuna [48].

Selanjutnya Penyelenggara pembangunan rumah susun wajib mengajukan permohonan izin layak huni setelah menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan perizinan yang telah diberikan [49]. Surat izin layak huni dikeluarkan oleh pemerintah daerah apabila rumah susun yang telah selesai dibangun telah dilakukan pemeriksaan dan terbukti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan. Surat ini selanjutnya

merupakan salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat hak milik atas satuan-satuan rumah susun yang akan dijual kepada masyarakat [50].

Setelah mendapatkan Surat Izin Layak Huni penyelenggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, dan batasan-batasannya dalam arah vertikal dan horizontal [51]. Akta pemisahan tersebut disahkan oleh Pemerintah Daerah dan selanjutnya akta pemisahan tersebut harus didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, izin layak huni, beserta warkah-warkah lainnya. Hak milik atas satuan rumah susun terjadi sejak didaftarkannya akta pemisahan dengan dibuatnya buku tanah untuk setiap satuan rumah susun yang bersangkutan [52].

4.4 Kemudahan yang Diberikan Pemerintah Terhadap Pembangunan Proyek Rusunami

Mengingat pentingnya pembangunan rumah susun untuk membantu masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar yakni tempat tinggal yang layak huni dengan harga yang terjangkau. Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Rusuna dengan melakukan [53]:

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rusuna tingkat Daerah, yang diketuai oleh Gubernur, beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha;
- b. Penyusunan Peraturan Daerah yang mendorong percepatan pembangunan Rusuna;
- c. Penentuan dan penetapan lokasi-lokasi yang memenuhi kriteria yang diperuntukan bagi pembangunan Rusuna; dan
- d. Pemberian kemudahan perizinan dan insentif kepada pengembang untuk membangun Rusuna.

Secara garis besar pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan pembangunan rumah susun yang berkaitan dengan [54]:

- a. Penerbitan perizinan;
- b. Pembangunan prasarana lingkungan, sarana, dan utilitas;

- c. Kemudahan ini diberikan kepada rumah susun yang penjualannya diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pelaksanaannya diawasi oleh Gubernur Kepala Daerah.

Jenis kemudahan perizinan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengembang Rusuna, antara lain [55] :

- a. izin status hak atas tanah dan pemanfaatannya;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Rusuna;
- c. Izin prinsip dan/atau izin lokasi pembangunan Rusuna;
- d. Penyederhanaan dan percepatan persetujuan arsitektur;
- e. Penyederhanaan dan percepatan prosedur izin uji beban (*loading test*) dan Izin Pendahuluan (IP);
- f. Penyederhanaan dan percepatan prosedur pengesahan pertelaan dan akte pemisahan;
- g. Penyederhanaan dan percepatan sertifikasi rusun; dan
- h. Penyederhanaan prosedur penetapan lokasi konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah bersama melalui konsolidasi tanah.

Selain itu terdapat jenis insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengembang Rusuna, antara lain [56] :

- a. Keringanan biaya retribusi atas izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan Rusuna;
- b. Pemberian izin secara cepat, tepat, dan murah;
- c. penyediaan lokasi atau tanah negara berupa tanah-tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) dan tanah-tanah terlantar yang dikuasai pemerintah daerah;
- d. Membantu penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk Rusuna;
- e. Pemberian izin Koefisien Luas Bangunan (KLB) sampai dengan 6,0 (enam koma nol) sepanjang memenuhi keserasian lingkungan dan ketentuan teknis lainnya, khususnya pada kawasan yang memerlukan penempatan kembali (*resettlement*).

Selanjutnya pengembang yang memperoleh kemudahan perizinan dan insentif untuk membangun Rusuna, harus memenuhi kriteria antara lain [57] :

- a. Rusuna yang dibangun dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah yang ditetapkan bersama antara Pengembang dan Pemerintah Daerah;
- b. Rusuna yang dibangun sesuai dengan keserasian lingkungan yang terintegrasi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP); dan
- c. Pada lokasi rusuna disediakan fasilitas usaha dan perbelanjaan.

4.5 Lokasi Proyek Rusunami

Lokasi rumah susun merupakan faktor yang sangat diperhatikan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 menjelaskan :

- a. Rumah susun harus dibangun di lokasi yang sesuai dengan peruntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata guna tanah yang ada;
- b. Rumah susun harus dibangun pada lokasi yang memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan dalam lingkungan ke sistem jaringan pembuangan air hujan dan jaringan air limbah kota;
- c. Lokasi rumah susun harus mudah dicapai angkutan yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung pada waktu pembangunan maupun penghunian serta perkembangan di masa datang, dengan memperhatikan keamanan, ketertiban, dan gangguan pada lokasi sekitarnya;
- d. Lokasi rumah susun harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik;
- e. Dalam hal lokasi rumah susun belum dapat dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik, penyelenggara pembangunan wajib menyediakan secara sendiri sarana air bersih dan listrik sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku;
- f. Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus dapat memperhitungkan dapat dicapainya optimasi daya guna dan hasil guna tanah, sesuai dengan fungsinya, dengan memperhatikan keserasian dan keselamatan lingkungan sekitar, berdasarkan peraturan yang berlaku;

- g. Tata letak bangunan harus menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan;
- h. Tata letak bangunan harus memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah bersama, segi-segi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang dapat mengancam keselamatan penghuni, bangunan, dan lingkungannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- i. Dalam hal rumah susun digunakan untuk hunian, maka penentuan tata letak bangunan disamping mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan harus dapat menjamin kebebasan penghuni antara satuan rumah susun yang satu dengan yang lainnya.

4.6 Pedoman Teknis Pembangunan Proyek Rusunami

Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Persyaratan yang dimaksud antara lain mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. Persyaratan administratif yang dimaksud antara lain mengenai perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi dan/atau peruntukannya, serta perizinan mendirikan bangunan (IMB) [58]. Selanjutnya Struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan rumah susun harus diperhitungkan kuat dan tahan terhadap [59]:

- a. Beban mati;
- b. Beban bergerak;
- c. Gempa, hujan, angin, banjir;
- d. Kebakaran dalam jangka waktu yang diperhitungkan cukup untuk usaha pengamanan dan penyelamatan;
- e. Daya dukung tanah;
- f. Kemungkinan adanya beban tambahan, baik dari arah vertikal maupun horizontal;
- g. Gangguan/perusak lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hal Pedoman Teknis Pembangunan Rusunami mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi dengan hal-hal penting sebagai berikut :

4.6.1 Ketentuan Umum

Rusuna bertingkat tinggi adalah bangunan gedung rumah susun sederhana dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai dan maksimum 20 lantai dengan kriteria perencanaan yang terdiri dari :

4.6.1.1 Kriteria umum

Penyelenggaraan Rusuna Bertingkat Tinggi harus memenuhi kriteria umum perencanaan sebagai berikut :

- a. Bangunan rusuna bertingkat tinggi harus memenuhi persyaratan fungsional, andal, efisien, terjangkau, sederhana namun dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan di sekitarnya dan peningkatan produktivitas kerja;
- b. Kreativitas disain hendaknya tidak ditekankan kepada kemewahan material, tetapi kepada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, dan mampu mencerminkan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya;
- c. Biaya operasi dan pemeliharaan bangunan gedung sepanjang umurnya diusahakan serendah mungkin;
- d. Desain bangunan rusuna bertingkat tinggi dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.
- e. Bangunan rusuna bertingkat tinggi harus diselenggarakan oleh pengembang atau penyedia jasa konstruksi yang memiliki Surat Keterangan Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6.1.2 Kriteria Khusus

Rusuna bertingkat tinggi yang direncanakan harus memiliki kriteria khusus sebagai berikut :

- a. Rusuna bertingkat tinggi yang direncanakan harus mempertimbangkan identitas setempat pada wujud arsitektur bangunan tersebut;

- b. Masa bangunan sebaiknya simetri ganda, rasio panjang lebar (L/B) < 3 , hindari bentuk denah yang mengakibatkan puntiran pada bangunan;
- c. Jika terpaksa denah terlalu panjang atau tidak simetris : pasang dilatasi bila dianggap perlu;
- d. Lantai Dasar dipergunakan untuk fasos, fasek dan fasum, antara lain : Ruang Unit Usaha, Ruang Pengelola, Ruang Bersama, Ruang Penitipan Anak, Ruang Mekanikal-Elektrikal, Prasarana dan Sarana lainnya, antara lain Tempat Penampungan Sampah/Kotoran;
- e. Lantai satu dan lantai berikutnya diperuntukan sebagai hunian yang 1 (satu) Unit Huniannya terdiri atas : 1 (satu) Ruang Duduk/Keluarga, 2 (dua) Ruang Tidur, 1 (satu) KM/WC, dan Ruang Service (Dapur dan Cuci) dengan total luas per unit adalah 30 m².
- f. Luas sirkulasi, utilitas, dan ruang-ruang bersama maksimum 30% dari total luas lantai bangunan;
- g. Denah unit rusuna bertingkat tinggi harus fungsional, efisien dengan sedapat mungkin tidak menggunakan balok anak, dan memenuhi persyaratan penghawaan dan pencahayaan;
- h. Struktur utama bangunan termasuk komponen penahan gempa (dinding geser atau rangka perimetral) harus kokoh, stabil, dan efisien terhadap beban gempa;
- i. Setiap 3 (tiga) lantai bangunan rusuna bertingkat tinggi harus disediakan ruang bersama yang dapat berfungsi sebagai fasilitas bersosialisasi antar penghuni.
- j. Sistem konstruksi rusuna bertingkat tinggi harus lebih baik, dari segi kualitas, kecepatan dan ekonomis (seperti sistem *formwork* dan sistem pracetak) dibanding sistem konvensional;
- k. Dinding luar rusuna bertingkat tinggi menggunakan beton pracetak sedangkan dinding pembatas antar unit/sarusun menggunakan beton ringan, sehingga beban struktur dapat lebih ringan dan menghemat biaya pembangunan;
- l. Lebar dan tinggi anak tangga harus diperhitungkan untuk memenuhi keselamatan dan kenyamanan, dengan lebar tangga minimal 110 cm;
- m. *Railling*/pegangan rambat balkon dan selasar harus mempertimbangkan faktor privasi dan keselamatan dengan memperhatikan estetika sehingga tidak menimbulkan kesan masif/kaku, dilengkapi dengan *balustrade* dan *railling*;

- n. Penutup lantai tangga dan selasar menggunakan keramik, sedangkan penutup lantai unit hunian menggunakan plester dan acian tanpa keramik kecuali KM/WC;
- o. Penutup dinding KM/WC menggunakan pasangan keramik dengan tinggi maksimum adalah 1.80 meter dari level lantai.
- p. Penutup meja dapur dan dinding meja dapur menggunakan keramik. Tinggi maksimum pasangan keramik dinding meja dapur adalah 0.60 meter dari level meja dapur;
- q. Elevasi KM/WC dinaikkan terhadap elevasi ruang unit hunian, hal ini berkaitan dengan mekanikal-elektrikal untuk menghindari sporing air bekas dan kotor menembus pelat lantai;
- r. Material kusen pintu dan jendela menggunakan bahan alluminium ukuran 3x7 cm, kusen harus tahan bocor dan diperhitungkan agar tahan terhadap tekanan angin. Pemasangan kusen mengacu pada sisi dinding luar, khusus untuk kusen yang terkena langsung air hujan harus ditambahkan detail mengenai penggunaan *sealant*;
- s. Plafond memanfaatkan struktur pelat lantai tanpa penutup (*exposed*);
- t. Seluruh instalasi utilitas harus melalui *shaft*, perencanaan *shaft* harus memperhitungkan estetika dan kemudahan perawatan;
- u. Ruang-ruang mekanikal dan elektrikal harus dirancang secara terintegrasi dan efisien, dengan sistem yang dibuat seefektif mungkin (misalnya : sistem *plumbing* dibuat dengan sistem *positive suction* untuk menjamin efektivitas sistem);
- v. Penggunaan lif direncanakan untuk lantai 6 keatas, bila diperlukan dapat digunakan sistem pemberhentian lif di lantai genap/ganjil.

4.6.2 Ketentuan Administratif

Setiap rusuna bertingkat tinggi harus dibangun berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat mengacu pada keterangan rencana tata kota, RTRW, atau RTBL atas permohonan pengembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6.3 Ketentuan Teknis Tata Bangunan

Rusuna bertingkat tinggi yang direncanakan harus memenuhi ketentuan tata teknis bangunan sebagai berikut :

- a. Bangunan rusuna bertingkat tinggi harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan yang ditetapkan dalam:
 - a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
 - b) Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR); dan/atau
 - c) Peraturan bangunan setempat dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- b. Bangunan rusuna bertingkat tinggi yang dibangun harus memenuhi persyaratan kepadatan (Koefisien Dasar Bangunan) dan ketinggian (Jumlah Lantai Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan) bangunan gedung berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan, serta peraturan bangunan setempat, dengan tetap mempertimbangkan:
 - a) Jarak bebas bangunan rusuna bertingkat tinggi terhadap bangunan gedung lainnya minimum 4 m pada lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan ditambah 0,5 m dari jarak bebas lantai di bawahnya kemampuan dalam menjaga keseimbangan daya dukung lahan dan optimalisasi intensitas bangunan;
 - b) tidak mengganggu lalu lintas udara.
- c. sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 m;
- d. Bentuk denah bangunan gedung rusuna bertingkat tinggi sedapat mungkin simetris dan sederhana, guna mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa;
- e. Dalam hal denah bangunan gedung berbentuk T, L, atau U, atau panjang lebih dari 50 m, maka harus dilakukan pemisahan struktur atau delatasi untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa atau penurunan tanah;
- f. Sirkulasi harus memberikan pencapaian yang mudah, jelas dan terintegrasi dengan sarana transportasi baik yang bersifat pelayanan publik maupun pribadi;

- g. Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikal (*clearance*) dan lebar jalan yang sesuai untuk pencapaian darurat oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan pelayanan lainnya;
- h. Setiap bangunan rusuna bertingkat tinggi diwajibkan menyediakan area parkir dengan rasio 1 (satu) lot parkir kendaraan untuk setiap 5 (lima) unit hunian yang dibangun;
- i. Pencahayaan yang dihasilkan harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari jalan umum;
- j. Setiap kegiatan dalam penyelenggaraan rusuna bertingkat tinggi tidak diperbolehkan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

4.6.4 Ketentuan Teknis Keandalan Bangunan

Rusuna bertingkat tinggi yang direncanakan harus memenuhi ketentuan teknis keandalan bangunan sebagai berikut :

- a. Persyaratan struktur bangunan gedung, dalam hal ini rusuna yang dibangun harus memiliki keandalan pada struktur bangunan, pembebanan pada bangunan, struktur atas bangunan, dan struktur bawah rusuna bertingkat tinggi;
- b. Persyaratan Kemampuan Bangunan Rusuna Bertingkat Tinggi Terhadap Bahaya Kebakaran;
- c. Persyaratan Kemampuan Bangunan Rusuna Bertingkat Tinggi Terhadap Bahaya Petir dan Bahaya Kelistrikan;
- d. Persyaratan Sistem Penghawaan, Persyaratan Sistem Pencahayaan, Persyaratan Sistem Air Minum dan Sanitasi, Persyaratan Tempat Sampah, Penampungan Sampah, dan/atau Pengolahan Sampah;
- e. Bahan bangunan rusuna bertingkat tinggi yang digunakan harus aman bagi kesehatan penghuni dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- f. Persyaratan Kenyamanan Ruang Gerak dalam Bangunan Gedung, Persyaratan Kenyamanan Kondisi Udara Dalam Ruang, Persyaratan Kenyamanan Pandangan, Persyaratan Kenyamanan Terhadap Tingkat Getaran dan Kebisingan;

- g. Persyaratan Hubungan Ke, Dari, dan di Dalam Bangunan Rusuna yang terdiri dari ; Persyaratan Kemudahan Hubungan Horisontal dalam Bangunan Rusuna Bertingkat Tinggi, Persyaratan Kemudahan Hubungan Vertikal, Persyaratan Sarana Evakuasi, Persyaratan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lansia

4.6.5 Ketentuan Biaya Bangunan Rusuna Bertingkat Tinggi

Hal-hal penting yang menyangkut biaya-biaya yang ada pada pembangunan Rusuna bertingkat tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya bangunan rusuna bertingkat tinggi terdiri dari :
 - a) Biaya produksi yang terdiri atas perencanaan, pengawasan, perizinan, dan biaya pembangunan fisik yang terdiri atas pekerjaan arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal;
 - b) Biaya prasarana dan sarana lingkungan serta biaya penyambungan utilitas umum;
 - c) Biaya komponen lain seperti PPn, BPHTB, sertifikat/pertelaan hak milik sarusun, akad kredit/provisi, transaksi PPAT, dan lain sebagainya.
- b. Biaya produksi serta biaya prasarana dan sarana rusuna bertingkat tinggi besarnya dihitung berdasarkan harga yang berlaku disetiap daerah;
- c. Biaya pembangunan rusuna bertingkat tinggi dijadikan sebagai dasar penetapan harga jual dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan berpenghasilan rendah;
- d. Komponen biaya pembangunan fisik rusuna bertingkat tinggi terdiri atas biaya untuk pekerjaan arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal;
- e. Biaya pembangunan fisik rusuna bertingkat tinggi harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung yang meliputi : persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan.
- f. Optimasi biaya pembangunan fisik dapat dilakukan untuk pekerjaan terkait dengan persyaratan kenyamanan dan persyaratan kemudahan, namun tidak boleh dilakukan untuk pekerjaan yang terkait dengan persyaratan keselamatan dan persyaratan kesehatan.

- g. Biaya yang dapat dioptimasi untuk pekerjaan yang terkait dengan persyaratan kenyamanan dan persyaratan kemudahan meliputi :
- a) Luas ruang-ruang bersama, selasar, dan lobi;
 - b) Lantai, dinding luar, dan dinding penyekat antar unit sarusun, dapat menggunakan beton pracetak;
 - c) Bahan penutup lantai;
 - d) Plafon/langit-langit;
 - e) Dinding partisi;
 - f) Daun pintu dan jendela;
 - g) Finishing interior;
 - h) Sebagian tata udara;
 - i) Sebagian elevator/lif;
 - j) Tata suara;
 - k) Telepon dan PABX;
 - l) Saluran televisi.
- h. Biaya yang tidak dapat dioptimasi untuk pekerjaan terkait dengan persyaratan keselamatan dan persyaratan kesehatan meliputi :
- a) Pekerjaan struktur baik struktur bawah termasuk pondasi dalam, besmen, dan struktur atas;
 - b) Instalasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c) Instalasi listrik termasuk genset;
 - d) Penangkal petir ;
 - e) Pencegahan bahaya rayap, serangga dan jamur;
 - f) Pekerjaan sistem pencahayaan;
 - g) Pekerjaan sanitasi meliputi : *plumbing*, saluran air hujan, saluran pembuangan air kotor, dan tempat sampah;
 - h) Fasilitas dan aksesibilitas penyandang cacat.
- i. Untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah biaya yang dapat disubsidi/dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah meliputi:
- a) Biaya perizinan;
 - b) Pajak dan retribusi;
 - c) Subsidi bunga bank KPR Rusuna;

- j. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah biaya yang dapat disubsidi/dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah meliputi:
- a) Biaya pengadaan dan pematangan tanah;
 - b) Biaya perizinan;
 - c) Pajak dan retribusi;
 - d) Biaya pekerjaan mekanikal dan elektrik;
 - e) Biaya penyediaan fasos dan fasum;
 - f) Biaya prasarana dan sarana lingkungan;
 - g) Biaya penyambungan utilitas umum;
 - h) Subsidi bunga bank untuk KPR Rusuna.

4.7 Kelayakan Hunian Rusunami

Untuk mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, maka pembangunan rumah dan perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif serta wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Adapun penjelasan persyaratan-persyaratan di atas sebagai berikut [60]:

- a. Persyaratan teknis merupakan persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan bangunan, dan keandalan sarana serta prasarana lingkungan;
- b. Persyaratan ekologis merupakan persyaratan yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan;
- c. Persyaratan administratif merupakan persyaratan yang berkaitan pemberian izin usaha, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan serta pemberian hak atas tanah;
- d. Pemantauan lingkungan bertujuan untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan, sedangkan pengelolaan lingkungan bertujuan untuk dapat mengambil tindakan koreksi bila terjadi dampak negatif dari pembangunan rumah atau perumahan.

Selain hal-hal di atas keyakan hunian sangat diperhatikan pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada, adapun hal-hal yang berhubungan dengan kelayakan hunian pada rumah susun antara lain :

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun :
 - a) Semua ruang dalam rumah susun merupakan kelompok ruang, yang mempunyai fungsi dan dimensi tertentu (spesifikasi matra ruang tempat tinggal) serta memenuhi persyaratan penghawaan (minimum 1% dari luas ruang yang bersangkutan), pencahayaan, suara, dan bau untuk melindungi penghuni.
 - b) Komponen dan bahan bangunan bukan struktur harus mempunyai keawetan sekurang-kurangnya 20 tahun, sedangkan komponen dan bahan bangunan struktur harus mempunyai keawetan sekurang-kurangnya 50 tahun. Rumah susun harus pula memenuhi persyaratan konstruksi dengan memperhitungkan kekuatan dan ketahanan baik dari arah vertikal maupun horizontal terhadap beban mati, beban bergerak atau beban hidup, beban gempa, angin, beban tambahan, hujan, banjir, kebakaran, daya dukung tanah dan gangguan/perusak lainnya.
 - c) Rumah susun harus dilengkapi dengan alat transportasi bangunan (tangga, lift atau eskalator apabila > 5 lantai), pintu dan tangga darurat kebakaran, alat dan sistem alarm kebakaran (>5 lantai), alat pemadam kebakaran, penangkal petir dan jaringan-jaringan air bersih (0,5 atmosfer setiap keran), tangki penampungan air bersih (kebutuhan minimal 3 hari dengan asumsi 90 liter/orang/hari), saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah (bahan tidak berkarat dan dilengkapi bak kontrol), tempat sampah, tempat jemuran (aman, bersih serta tidak mengganggu pandangan), kelengkapan pemeliharaan bangunan, jaringan listrik, generator listrik (minimum kebutuhan penerangan koridor dan lobi, pompa air, pompa kebakaran dan lift), gas, tempat parkir (5:1) tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, sesuai dengan tingkat keperluan.

- d) Luas tanah untuk bangunan terhadap luas tanah bersama seluas-luasnya 50%, luas tanah untuk prasarana lingkungan (jalan setapak, jalan kendaraan, tempat parkir, dll) seluas 20% dari luas tanah bersama, luas tanah untuk fasilitas lingkungan (fasilitas perniagaan, perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, fasilitas pemerintah dan pelayanan umum, pertamanan, dll) seluas 30% dari luas tanah bersama. Fasilitas lingkungan yang ditempatkan pada bangunan rusun sebesar-besarnya dengan luas 30% dari jumlah luas lantai bangunan rusun dan tidak lebih dari 3 lantai.
- e) Fasilitas niaga dan perbelanjaan harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan antara lain :
- (a) Jumlah penduduk sampai 250 jiwa, disediakan warung dan/atau pelataran kaki lima guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - (b) Jumlah penduduk sampai 1.000 jiwa, disediakan pertokoan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - (c) Jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa, disediakan pusat perbelanjaan (swalayan), bengkel reparasi, dan usaha jasa lainnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- f) Fasilitas pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan antara lain :
- (a) Jumlah penduduk sampai 1.000 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya Taman Kanak-kanak (TK);
 - (b) Jumlah penduduk sampai 1.600 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar (SD);
 - (c) Jumlah penduduk sampai 6.000 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya SLTP;
 - (d) Jumlah penduduk sampai 9.600 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya SLTA.
- g) Fasilitas kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan antara lain :
- (a) Jumlah penduduk sampai 6.000 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya pusat masyarakat pembantu dan tempat praktek dokter;

- (b) Jumlah penduduk sampai 10.000 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya rumah bersalin dan apotik;
 - (c) Jumlah penduduk sampai 1.000 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya pusat kesehatan masyarakat.
- h) Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan antara lain :
- (a) Jumlah penduduk sampai 2.500 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya pos pertahanan sipil (hansip), balai pertemuan, dan rumah duka;
 - (b) Jumlah penduduk sampai 30.000 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, parkir umum, dan gedung serba guna;
 - (c) Jumlah penduduk sampai 120.000 jiwa, disediakan sekurang-kurangnya kantor polisi, kantor pos cabang, kantor telepon cabang.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun :
- a) Rasio perbandingan antara luas satuan rumah susun dengan penghunian yang menggunakan batasan :
 - (a) Tipe 18 maksimum dihuni oleh : 4 orang;
 - (b) Tipe 21 maksimum dihuni oleh : 5 orang;
 - (c) Tipe 36 maksimum dihuni oleh : 8 orang;
 - (d) Tipe 54 maksimum dihuni oleh : 10 orang.
 - b) Memenuhi tata nilai yang meliputi :
 - (a) Tertib hunian;
 - (b) Kebersihan;
 - (c) Bebas gangguan lingkungan;
 - (d) Bebas suara hingar bingar;
 - (e) Menelantarkan satuan rumah susun;
 - (f) Masalah sosial lainnya.
 - c) Selama belum berfungsinya utilitas pada suatu lingkungan rumah susun dilarang dilakukan penjualan satuan rumah susun kepada pihak lain oleh penyelenggara pembangunan. Pengendalian kelayakan penghunian satuan rumah susun dilakukan oleh Dinas Perumahan.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman mengatur bahwasanya Lingkungan suatu pemukiman harus dilengkapi dengan :
- a) Prasarana lingkungan
Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan pemukiman adalah :
 - (a) Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang;
 - (b) Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan;
 - (c) Jaringan saluran air hujan untuk drainase dan pencegahan banjir setempat;
 - (d) Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.
 - b) Sarana lingkungan
Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Fasilitas penunjang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan, sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial budaya, antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga, pemakaman dan pertamanan.
 - c) Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Utilitas umum meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. Utilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun :

- a) Rumah susun harus dilengkapi dengan :
- (a) Jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai persiapan dan perlengkapannya termasuk meter air, pengatur tekanan air, dan tangki air dalam bangunan;
 - (b) Jaringan listrik yang memenuhi persyaratan mengenai kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang berbahaya;
 - (c) Jaringan gas (khusus rumah susun untuk hunian) yang memenuhi persyaratan beserta perlengkapannya termasuk meter gas, pengatur arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan;
 - (d) Saluran pembuangan air hujan yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan pemasangan;
 - (e) Saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, pemasangan;
 - (f) Saluran dan/atau tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan terhadap kebersihan, kesehatan, dan kemudahan;
 - (g) Tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya;
 - (h) Alat transportasi yang berupa tangga, lift, atau *escalator* sesuai dengan tingkat keperluan dan persyaratan yang berlaku;
 - (i) Pintu dan tangga darurat kebakaran;
 - (j) Tempat jemuran;
 - (k) Alat pemadam kebakaran;
 - (l) Penangkal petir;
 - (m) Alat/sistem alarm;
 - (n) Pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu;
 - (o) Generator listrik disediakan untuk rumah susun yang menggunakan *lift*.
- b) Satuan rumah susun harus mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggung jawabkan, dan memenuhi persyaratan (misalnya ukuran

kamar tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi dan sebagainya) sehubungan dengan fungsi dan penggunaannya serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan (letaknya terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama) untuk dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelancaran bagi penghuni dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk hubungan ke dalam maupun ke luar serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni rumah susun yang bersangkutan. Yang dimaksud kebutuhan sehari-hari adalah kebutuhan untuk tidur, mandi, buang hajat, mencuci, menjemur, memasak, makan, menerima tamu, dan menempatkan barang-barang keperluan rumah tangga maupun bahan-bahan kebutuhan sehari-hari;

- c) Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, *lift*, selasar, harus memenuhi ukuran yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan kemudahan bagi penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan sesama penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan;
- d) Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan keserasian lingkungan juga menjamin keamanan dan kenikmatan para penghuni maupun pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan;
- e) Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi penghuni, baik ke dalam maupun keluar dengan penyediaan jalan setapak, jalan kendaraan, dan tempat parkir;
- f) Penyediaan prasarana lingkungan harus mempertimbangkan kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari dan pengamanan bila terjadi hal-hal yang membahayakan, serta struktur, ukuran, dan kekuatan yang cukup sesuai dengan fungsi dan penggunaan jalan tersebut;

- g) Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan utilitas umumnya yang sifatnya menunjang fungsi lainnya dalam rumah susun yang bersangkutan, meliputi :
- (a) Jaringan distribusi air bersih, gas, dan listrik dengan segala kelengkapannya termasuk kemungkinan diperlukan tangki-tangki air, pompa air, tangki gas, gardu-gardu listrik.
 - (b) Saluran pembuangan air hujan yang menghubungkan pembuangan air hujan dari rumah susun ke sistem jaringan pembuangan air kota.
 - (c) Saluran pembuangan air limbah dan/atau tangki septik yang menghubungkan pembuangan air limbah dari rumah susun ke sistem jaringan air limbah kota, atau penampungan air limbah tersebut ke dalam tangki septik dalam lingkungan.
 - (d) Tempat pembuangan sampah yang fungsinya adalah sebagai tempat pengumpulan sampah dari rumah susun untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah kota, dengan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan.
 - (e) Keran-keran air untuk pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang dapat menjangkau semua tempat dalam lingkungan dengan kapasitas air cukup untuk pemadam kebakaran.
 - (f) Tempat parkir kendaraan dan/atau tempat penyimpanan barang yang diperhitungkan terhadap kebutuhan penghuni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan fungsinya.
 - (g) Jaringan telepon dan alat komunikasi lain sesuai dengan tingkat keperluannya.
 - (h) Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruangan ruangan atau/dan bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan masyarakat, tempat bermain bagi anak-anak, dan kontak sosial lainnya, sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
 - (i) Dalam lingkungan rumah susun yang sebagian atau seluruhnya digunakan sebagai hunian untuk jumlah satuan hunian tertentu, harus disediakan ruang dan/atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sehari-hari sesuai standar-standar yang berlaku. Yang dimaksud

dengan bangunan untuk pelayan kebutuhan sehari-hari antara lain untuk kesehatan, pendidikan, peribadatan dan sebagainya.

- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana :
- a) Kawasan padat Luas daerah perencanaan paling sedikit 4.000m² dan paling tinggi 30.000m², kepadatan penduduk paling tinggi 3.500 jiwa per hektar dan KLB paling tinggi 3,5. Kepadatan penduduk paling tinggi 4.000 jiwa per hektar dengan KLB paling tinggi 4 diizinkan pada lokasi yang berdekatan dengan terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan transportasi umum dalam radius 400 meter.
 - b) Kawasan kurang padat Luas daerah perencanaan paling sedikit 10.000m² dan paling tinggi 30.000m², kepadatan penduduk paling tinggi 3.000 jiwa per hektar dan KLB paling tinggi 3. Kepadatan penduduk paling tinggi 3.500 jiwa per hektar dengan KLB paling tinggi 3,5 diizinkan pada lokasi yang berdekatan dengan terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan transportasi umum dalam radius 400 meter.
 - c) Kawasan tidak padat Luas daerah perencanaan paling sedikit 10.000m² dan paling tinggi 30.000m², kepadatan penduduk paling tinggi 2.500 jiwa per hektar dan KLB paling tinggi 2,5. Kepadatan penduduk paling tinggi 3.000 jiwa per hektar dengan KLB paling tinggi 3 diizinkan pada lokasi yang berdekatan dengan terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan transportasi umum dalam radius 400 meter.

4.8 Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pembangunan Proyek Rusunami

Penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek pembangunan rumah susun dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan kebijaksanaan dan pedoman Pemerintah Pusat. Penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek pembangunan rumah susun meliputi penentuan

kelompok sasaran, target yang dicapai, sistem pembangunan dan pembiayaan yang dipakai, serta prioritas pemilihan lokasi berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah perkotaan yang bersangkutan [61].

Urusan pengaturan dan pembinaan rumah susun merupakan kewajiban pemerintah pusat yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kewenangan ini dilakukan dengan tujuan keseragaman dalam pengaturan dan pembinaannya. Namun, sebagian urusan pengaturan dan pembinaan diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini berupa pengaturan rumah susun yang mempunyai karakteristik lokal, hal yang berhubungan dengan tata kota dan tata daerah, misalnya mengenai pemberian izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin kelayakan untuk dihuni, pemberian penyuluhan, bimbingan, dan hal yang menyangkut pemberian kemudahan-kemudahan [62].

Pengaturan dan pembinaan rumah susun meliputi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun, izin layak huni, pemilikan satuan rumah susun, penghunian, pengelolaan, dan tata cara pengawasan. Pengaturan dan pembinaan rumah susun diarahkan untuk dapat meningkatkan usaha pembangunan perumahan dan pemukiman yang fungsional bagi kepentingan rakyat banyak. Pengaturan dan pembinaan rumah susun bertujuan untuk [63]:

- a. Mendukung konsepsi tata ruang yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan kearah vertikal dan untuk meremajakan daerah-daerah kumuh;
- b. Meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan;
- c. Mendorong pembangunan pemukiman berkepadatan tinggi.

Selanjutnya pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan, penerapan dan penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap pemberian kemudahan perizinan dan insentif sesuai peraturan perundang-undangan[64]. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Rusuna, meliputi [65] :

- a. Kemajuan pencapaian pembangunan yang dilakukan pengembang dilihat dari sisi kebutuhan dan ketersediaan;
- b. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan;

- c. Ketepatan sasaran pemanfaat yang menjadi prioritas pembangunan Rusuna;
- d. Efektivitas peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. Tingkat partisipasi pengembang rusuna di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ketepatan sasaran pemanfaat yang menjadi prioritas pembangunan rusuna selain masyarakat tempatan yang harus direlokasi, sampai saat ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Dengan Pola Pengembangan Fungsi Campuran (Mixed-Use) di Perkotaan, persentase luas lantai hunian non subsidi setinggi-tingginya adalah 30%, namun hal ini masih bersifat himbauan.

Selain itu untuk daerah DKI Jakarta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan diatur di dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana sebagai berikut :

- a. Pembinaan terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan rusuna dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- b. Pengendalian terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan rusuna dilaksanakan oleh Kepala Dinas Tata Ruang;
- c. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan rusuna dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
- d. Pengendalian fungsional terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.9 Tanda Pemilikan Rusunami

Rusunami merupakan suatu satuan rumah susun yang dapat digunakan sebagai tempat hunian dan dimiliki dengan status hak milik oleh masyarakat. Pemilikan terhadap satuan rumah susun juga meliputi hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Sebagai contoh bagian bersama antara lain : pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, *lift*, selasar, saluran-saluran, pipa-pipa, jaringan-jaringan listrik, gas, dan

telekomunikasi serta ruang untuk umum. Sebagai contoh benda bersama antara lain : tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir, yang sifatnya terpisah dari struktur bangunan rumah susun. Khusus kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang berkehendak untuk memiliki satuan rumah susun sederhana dapat diberikan kemudahan baik langsung maupun tidak langsung. Kemudahan yang dapat diberikan adalah dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan, prasarana lingkungan, perizinan, perkreditan, perpajakan, fasilitas ekonomi, sosial, dan budaya [66].

Selanjutnya sebagai tanda bukti hak milik atas suatu satuan rumah susun adalah sertifikat hak milik yang terdiri dari [67]:

- a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama;
- b. Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan, yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki;
- c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang bersangkutan.

Sebelum berakhir pada sertifikat hak milik, awalnya penyelenggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun yang telah terbangun atas satuan-satuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, dan batasan-batasannya dalam arah vertikal dan horizontal [68]. Akta pemisahan satuan rumah susun adalah akta pemisahan atas satuan rumah susun yang harus didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, izin layak huni serta warkah-warkah lainnya [69].

Selanjutnya akta pemisahan disahkan oleh Pemerintah Daerah, setelah itu akta pemisahan tersebut harus didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, izin layak huni, beserta warkah-warkah lainnya. Hak milik atas satuan rumah susun terjadi sejak didaftarkannya akta pemisahan dengan dibuatnya buku tanah untuk setiap satuan rumah susun yang bersangkutan [70]. Pada buku Tanah terdiri dari empat halaman dan diantaranya berisikan [71]:

- a. Nama Kantor Pertanahan yang bersangkutan;
- b. Nomor Hak milik Atas Satuan Rumah Susun dengan kode nomor lantai dan blok, jika di dalam tanah hak bersama tersebut dibangun lebih dari satu blok dan nama Desa/Kelurahan letak rumah susun tersebut. Nomor satuan rumah susun ditulis dengan angka latin, nomor lantai ditulis dengan angka romawi, nomor/kode blok disesuaikan dengan nama/sebutan setempat yang masing masing dipisahkan dengan garis miring;
- c. Nama lokasi atau alamat lengkap rumah susun yang bersangkutan. Contoh : Rumah Susun Tanah Abang, Blok Mawar, Lantai II nomor 18 (nomor pintu/kamar);
- d. Hak atas tanah bersama yang diuraikan atas jenis dan nomor hak, berakhirnya hak, serta nomor dan tanggal surat ukur;
- e. Nomor dan tanggal izin layak huni;
- f. Tanggal dan nomor akta pemisahan serta tanggal dan nomor pengesahaannya;
- g. Nomor nilai perbandingan proporsional;
- h. Nomor dan tanggal gambar denah satuan rumah susun yang bersangkutan;
- i. Nama pemilik/pemegang hak milik atas satuan rumah susun;
- j. Tanggal pembukuan hak tersebut dalam buku tanah dan tanda tangan Kepala Kantor Peratanahan serta Cap Kantor.

Selanjutnya salinan Buku Tanah, salinan Surat Ukur dan Gambar Denah setelah dijilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen disebut Sertifikat. Selain itu ada aturan mengenai bahwasanya Hak milik atas satuan rumah susun hapus apabila :

- a. Hak atas tanahnya hapus menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Tanah dan bangunannya musnah;
- c. Terpenuhinya syarat batal;
- d. Pelepasan hak secara sukarela.

4.10 Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun

baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian, dan pengelolaannya. Yang menjadi anggota perhimpunan penghuni adalah subyek hukum yang memiliki, atau memakai, atau menyewa, atau menyewa beli atau yang memanfaatkan satuan rumah susun bersangkutan yang berkedudukan sebagai penghuni. Dalam hal perhimpunan penghuni memutuskan sesuatu yang menyangkut pemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap pemilik hak atas satuan rumah susun mempunyai suara yang sama dengan nilai perbandingan proposional masing-masing. Selanjutnya perhimpunan penghuni mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib, dan aman;
- b. Mengatur dan membina kepentingan penghuni;
- c. Mengelola rumah susun dan lingkungannya.

Selain itu perhimpunan penghuni mempunyai tugas pokok :

- a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun oleh pengurus dalam rapat umum perhimpunan penghuni;
- b. Membina para penghuni kearah kesadaran hidup bersama yang serasi, selaras, dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya;
- c. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas administratif penghunian;
- e. Menunjuk dan membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam pengelolaan rumah susun dan lingkungannya;
- f. Menyelenggarakan pembukuan dan administratif keuangan secara terpisah sebagai kekayaan perhimpunan penghuni;
- g. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pembentukan perhimpunan penghuni wajib dilakukan dengan akta, dan baru sah berkedudukan sebagai badan hukum setelah disahkan oleh Bupati atau Walikota Madya atau di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah. Selanjutnya pengurus perhimpunan penghuni skurang-kurangnya terdiri

dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seorang pengawas pengelolaan.

Pengelolaan terhadap satuan rumah susun meliputi kegiatan-kegiatan operasional yang berupa pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan prasarana lingkungan, serta fasilitas sosial, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pengelolaan terhadap satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Perhimpunan Penghuni. Selanjutnya untuk melakukan pengelolaan tersebut dapat dibentuk atau ditunjuk suatu badan pengelola atas persetujuan perhimpunan penghuni. Badan pengelola mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan, dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;
- b. Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan peruntukannya;
- c. Secara berkala memberikan laporan kepada perhimpunan penghuni disertai permasalahan dan usulan pemecahannya.

Badan pengelola menjalankan tugas-tugas tersebut dibiayai oleh penghuni atau pemilik secara proposional melalui perhimpunan penghuni, namun penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun wajib melakukan pengelolaan dalam jangka sekurang-kurangnya tiga bulan dan paling lama satu tahun sejak terbentuknya perhimpunan penghuni atas biaya penyelenggara pembangunan.

4.11 Pembelian Rusunami Secara Pesan

Dilatarbelakangi adanya langkah-langkah yang ditempuh perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman bersama konsumen melakukan proses pemesanan properti menimbulkan adanya jual beli pendahuluan yang selanjutnya dituangkan di dalam akta perikatan jual beli satuan rumah susun. Jual beli pendahuluan tersebut ditempuh berdasarkan pertimbangan ekonomi yaitu :

- a. Bagi perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman guna memperlancar perolehan dana murah dan kepastian pasar;

- b. Bagi pembeli atau konsumen agar harga jual rumah lebih rendah karena calon pembeli membayar sebagian di muka.

Selanjutnya hal ini diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun karena adanya peraturan lain (UU Nomor 16 Tahun 1985) yang mengharuskan :

- a. Satuan rumah susun yang baru dibangun baru dapat dijual untuk dihuni setelah mendapat izin layak huni dari pemerintah daerah setempat.
- b. Untuk melakukan persyaratan jual beli terlebih dahulu harus memenuhi adanya pembuatan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat tersebut satuan rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jual-beli pendahuluan melalui perikatan jual beli satuan rumah susun. Pada hari pemesanan yang berminat memesan dapat menerima dan menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman yang berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama dan/atau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang dipesan;
- b. Nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;
- c. Luas satuan rumah susun;
- d. Harga jual satuan rumah susun;
- e. Ketentuan pembayaran uang muka;
- f. Spesifikasi bangunan;
- g. Tanggal selesainya pembangunan rumah susun;
- h. Ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan serta menandatangani dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Surat pesanan dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti satuan rumah susun yang dipesan disertai ketentuan tentang tahapan pembayaran. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah

menandatangani surat pemesanan, pemesan dan perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman harus menandatangani akta perikatan jual beli dan selanjutnya kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian perikatan jual beli hak milik atas satuan rumah susun. Apabila pemesan lalai menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dalam jangka waktu tersebut, maka perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat tidak mengembalikan uang pesanan kecuali jika lalai berada di pihak perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman, pemesan dapat memperlihatkan surat penolakan dari Bank bahwa permohonan KPR tidak disetujui atau hal-hal lain yang dapat disetujui bersama antara perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman serta calon pembeli dan uang pesanan akan dikembalikan 100%.

Selanjutnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara lain memuat hal-hal sebagai berikut [72]:

- a. Obyek yang akan diperjual belikan oleh perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman kepada pembeli adalah hak milik atas satuan rumah susun, yang meliputi pula bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama berikut fasilitasnya di lingkungan rumah susun tersebut sesuai dengan nilai perbandingan proporsional dari satuan rumah susun yang bersangkutan. Rumah susun yang akan dijual wajib memiliki izin-izin yang diperlukan seperti izin lokasi, bukti penguasaan dan pembayaran tanah, dan izin mendirikan bangunan;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama merupakan kewajiban seluruh penghuni. Calon pembeli satuan rumah susun harus bersedia menjadi anggota perhimpunan penghuni yang akan dibentuk dan didirikan dengan bantuan perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman guna mengelola dan memelihara bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta fasilitasnya dengan memungut uang pangkal dan iuran yang besarnya akan ditetapkan bersama dikemudian hari secara musyawarah. Untuk tahun pertama (terhitung sejak tanggal penyerahan) uang pangkal dan iuran tersebut belum perlu dibayar;

- c. Kewajiban pengusaha pembangunan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :
- a) Sebelum melakukan pemasaran perdana perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Laporan tersebut harus dilampiri dengan antara lain :
 - (a) Salinan surat persetujuan izin prinsip;
 - (b) Salinan surat keputusan pemberian izin lokasi;
 - (c) Bukti pengadaan dan pelunasan tanah;
 - (d) Salinan surat izin mendirikan bangunan;
 - (e) Gambar denah pertelaan yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah setempat. Kalau dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam tanda terima laporan tersebut belum mendapat jawaban dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka penawaran perdana tersebut dapat dilaksanakan.
 - b) menyediakan dokumen pembangunan perumahan antara lain :
 - (a) Sertifikat hak atas tanah;
 - (b) Rencana tapak;
 - (c) Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;
 - (d) Gambar rencana struktur beserta, perhitungannya;
 - (e) Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;
 - (f) Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya.
 - c) Menyelesaikan bangunan sesuai dengan standar yang telah diperjanjikan;
 - d) Memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam jangka waktu 100 (seratus) hari setelah tanggal ditanda tangani berita acara penyerahan satuan rumah susun, dari pengusaha kepada pemesan dengan ketentuan :

- (a) Tanggung jawab pengusaha tersebut dibatasi oleh desain dan spesifikasi satuan rumah susun;
 - (b) Kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan disebabkan kesalahan pembeli.
- e) Bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersembunyi yang baru dapat diketahui di kemudian hari;
- f) Menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuk perhimpunan penghuni dan membantu menunjuk pengelola setelah perhimpunan penghuni terbentuk;
- g) Mengasuransikan pekerjaan pembangunan tersebut selama berlangsungnya pembangunan;
- h) Jika selama berlangsungnya pembangunan terjadi *force majeure* (keadaan kahar) yang diluar kemampuan para pihak, Pengusaha dan Pembeli akan mempertimbangkan penyelesaiannya sebaik-baiknya dengan dasar pertimbangan utama adalah dapat diselesaikannya pembangunan satuan rumah susun;
- i) Menyiapkan akta jual beli satuan rumah susun kemudian bersama-sama dengan pembeli menandatangani akta jual belinya dihadapan Notaris/PPAT pada tanggal yang ditetapkan. Kemudian Perusahaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman dan/atau Notaris/PPAT yang ditunjuk akan mengurus agar pembeli memperoleh sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pembeli dan biayanya ditanggung oleh pembeli.
- j) Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan, dan jika pengusaha belum dapat menyelesaikan pada waktu tersebut diberi kesempatan menyelesaikan pembangunan tersebut dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dihitung sejak tanggal rencana penyerahan rumah susun tersebut. Apabila ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, maka perikatan jual beli batal demi hukum, dan kebatalan ini tidak perlu dibuktikan atau dimintakan Keputusan Pengadilan atau Badan Arbitrase, kepada perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman diwajibkan

mengembalikan pembayaran uang yang telah diterima dari pembeli ditambah dengan denda dan bunga setiap bulannya sesuai dengan suku bunga bank yang berlaku.

d. Kewajiban Pemesan

Menyatakan bahwa pemesan (calon pembeli) telah membaca, memahami dan menerima syarat-syarat dan ketentuan dari surat pesanan dan pengikatan jual beli serta akan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perhimpunan Penghuni, dan dokumen-dokumen lain terkait, serta bahwa ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut mengikat pembeli :

- a) Setiap pemesan setelah menjadi pembeli satuan rumah susun wajib membayar biaya pengelolaan (*management fee*) dan biaya utilitas (*utility charge*) dan jika terlambat pembayarannya dikenakan denda yang besarnya disesuaikan dengan keputusan Perhimpunan Penghuni;
- b) Yang menjadi tanggung jawab pemesan meliputi :
 - (a) Biaya pembayaran akta-akta yang diperlukan;
 - (b) Biaya jasa PPAT untuk pembuatan akta jual beli satuan rumah susun;
 - (c) Biaya untuk memperoleh Hak Milik atas satuan rumah susun, biaya pendaftaran jual-beli atas satuan rumah susun (biaya pengalihan hak milik atas nama) di Kantor Badan Pertanahan setempat.
- c) Setelah akta jual-beli ditanda tangani tetapi sebelum sertifikat hak milik satuan rumah susun diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan setempat :
 - (a) Jika satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dikenakan biaya administrasi yang ditetapkan oleh perusahaan pembangun dan perumahan dan permukiman, yang besarnya tidak lebih dari 1 % dari harga jual;
 - (b) Jika satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak anggota keluarga karena sebab apapun juga termasuk karena pewarisan menurut hukum dikenakan biaya administrasi untuk Notaris/PPAT yang besarnya sesuai dengan ketentuannya.
- d) Sebelum lunasnya pembayaran atas harga jual satuan rumah susun yang dibelinya, pemesan tidak dapat mengalihkan, atau menjadikan

satuan rumah susun tersebut sebagai jaminan utang tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman.



BAB 5 PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

5.1 Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan pengumpulan dan analisa data yang dilakukan. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan kuesioner ke pakar untuk validasi variabel guna menjawab pertanyaan penelitian poin ke 1. Setelah melakukan validasi variabel, Selanjutnya dilakukan pengumpulan data variabel terpilih berupa data sekunder yang ada dari institusi terkait. Setelah itu hasil data temuan dianalisa dengan analisa deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian poin ke 2. Pertanyaan poin ke 3 dijawab melalui wawancara terstruktur terhadap permasalahan yang ada sesuai hasil pengumpulan dan analisa data untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya.

5.2 Hasil Survey Kuesioner Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Masyarakat Sasaran Mendapatkan KPR Sarasuna Bersubsidi

Survey kuesioner ini bertujuan mendapatkan presepsi para pakar yang terlibat langsung dengan topik penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan. Pakar yang berhasil dihubungi dan mengisi kuesioner adalah sebanyak 5 orang yang berasal dari Lembaga Pemberi Kredit dan Kementrian Pemerintah terkait, adapun profil pakar tersebut adalah :

Tabel 5.1 Profil Pakar Pada Tahap Pengisian Kuesioner

No.	Pakar	Pendidikan	Jabatan	Pengalaman
1	Pakar 1	S1	<i>Vice President Consumer Loan</i>	25 tahun
2	Pakar 2	S1	<i>Consumer Loan Head</i>	18 tahun
3	Pakar 3	S2	<i>Kasubag Umum</i>	15 tahun
4	Pakar 4	S2	<i>Ast. Diputi Fasilitas dan Inovasi pembiayaan Perumahan</i>	21 tahun
5	Pakar 5	S2	<i>Kepala Badan Kebijakan Fiskal</i>	20 tahun

Pakar 1 dan 2 merupakan top management yang terlibat langsung dengan pelaksanaan KPR Sarusuna Bersubsidi dari pihak Lembaga Pemberi kredit. Pakar ke 3 dan 4 merupakan pejabat di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI, Pakar ke 5 merupakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan RI. Kedua institusi ini merupakan institusi yang berwenang dalam penentuan regulasi kebijakan KPR Sarusuna Bersubsidi yang ada di masyarakat. Para pakar tersebut memberikan presepsinya mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan melalui pengisian kuesioner. Adapun hasil pengisian kuesioner para pakar tersebut dijabarkan melalui tabel 5.2.

Tabel 5.2 Jawaban Kuesioner Pakar

NO	VARIABEL	P1	P2	P3	P4	P5	R	PV
1	X1 Jenis kelamin penanggung kredit.	3	2	1	1	2	1.80	T
	X2 Tingkat pendidikan penanggung kredit.	4	2	1	1	4	2.40	T
	X3 Usia penanggung kredit.	4	4	4	4	4	4.00	B
	X4 Status perkawinan penanggung kredit	3	4	1	3	4	3.00	T
	X5 Status duda penanggung kredit.	2	3	1	1	3	2.00	T
	X6 Status janda penanggung kredit.	2	3	1	1	3	2.00	T
	X7 Jumlah anggota keluarga (istri/suami plus anak) penanggung kredit	4	5	1	4	2	3.20	B
	X8 Pekerjaan penanggung kredit (formal atau informal).	4	4	3	4	4	3.80	B
	X9 Tingkat penghasilan per bulan penanggung kredit.	4	4	5	5	5	4.60	B
	X10 Status Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (bekerja atau tidak bekerja).	3	4	2	4	5	3.60	B
	X11 Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (formal atau informal).	3	4	2	4	4	3.40	B
	X12 Tingkat penghasilan per bulan Istri/Suami penanggung kredit.	3	4	5	4	4	4.00	B
	X13 Persentase pengeluaran setiap bulan terhadap penghasilan perbulan.	4	4	1	5	5	3.80	B
2	X14 Lokasi Rusunami yang dibeli.	4	4	1	1	4	2.80	T
	X15 Harga Rusunami yang dibeli.	4	4	5	5	4	4.40	B
	X16 Tipe rusunami yang dibeli (luas bangunan milik)	3	4	3	4	4	3.60	B
3	X17 Persentase Uang muka dibandingkan harga Rusunami yang dibeli.	4	4	2	5	2	3.40	B

Tabel 5.2 (lanjutan)

NO	VARIABEL	P1	P2	P3	P4	P5	R	PV
X18	Lama masa cicilan kredit (<i>periods of redemption</i>)	4	4	2	5	3	3.60	B
X19	Ada atau tidaknya fasilitas pencicilan uang muka..	3	3	1	1	2	2.00	T
X20	Persentase penghasilan per bulan untuk pembayaran pinjaman.	4	4	5	5	4	4.40	B
X21	Besarnya tingkat suku bunga pinjaman (<i>Mortgage Rates</i>)	4	4	3	5	4	4.00	B
X22	Jenis suku bunga pinjaman (fixed atau lainnya).	3	3	4	4	2	3.20	B
X23	Persyaratan dokumen yang diperlukan.	4	4	4	4	4	4.00	B

Sumber : hasil olahan

Keterangan :

P = Pakar

R = Rata-rata penilaian

PV = Peringkat variabel

B = Berpengaruh

T = Tidak Berpengaruh

Hasil dari kuesioner ini merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan.

5.3 Hasil Pengumpulan Data Sekunder Untuk Mengetahui Gambaran Masyarakat Sasaran yang Mendapatkan KPR Sarasuna Bersubsidi

Berdasarkan variabel terpilih hasil penilaian para pakar, peneliti melakukan pencarian data sekunder mengenai gambaran variabel-variabel tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian point ke 2. Adapun variabel-variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Variabel Penelitian

NO	VARIABEL	
1	X3	Usia penanggung kredit.
2	X7	Jumlah anggota keluarga (istri/suami plus anak) penanggung kredit.
3	X8	Pekerjaan penanggung kredit (formal atau informal).
4	X9	Tingkat penghasilan per bulan penanggung kredit.
5	X10	Status Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (bekerja atau tidak bekerja).
6	X11	Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (formal atau informal).
7	X12	Tingkat penghasilan per bulan Istri/Suami penanggung kredit.
8	X13	Persentase pengeluaran setiap bulan terhadap penghasilan perbulan.
9	X15	Harga Rusunami yang dibeli.
10	X16	Tipe rusunami yang dibeli (luas bangunan milik).
11	X17	Persentase Uang muka dibandingkan harga Rusunami yang dibeli.
12	X18	Lama masa cicilan kredit (<i>periods of redemption</i>).
13	X20	Persentase penghasilan per bulan untuk pembayaran pinjaman.
14	X21	Besarnya tingkat suku bunga pinjaman (<i>Mortgage rates</i>).
15	X22	Jenis suku bunga pinjaman (fixed atau lainnya).
16	X23	Persyaratan dokumen yang diperlukan.

Sumber : Hasil Olahan

Data tentang gambaran variasi variabel-variabel tersebut didapatkan dari LPK dan BLU Kementerian Perumahan Rakyat. Sampel data yang didapat terdiri dari perincian sebagai berikut :

Tabel 5.4 Data Penelitian (Data 1) yang Didapat / Data Total Penyerapan

KETERANGAN DEBITUR	JUMLAH DEBITUR
Realisasi tahun 2009	61/62 unit
Realisasi tahun 2010	1832/1838 unit
Belum Realisasi	0/1558 unit
Total data Penyerapan yang didapat	3458 unit

Sumber : Hasil Olahan

Semua data yang diperoleh merupakan debitur yang telah lolos verifikasi 1 dan 2 oleh karena itu variabel X23 (dokumen yang diperlukan) sudah terpenuhi, X22 (jenis suku bunga) yang berlaku adalah fixed selama masa subsidi, dan X21 (Besarnya tingkat suku bunga pinjaman) adalah selalu Bi-rate + 4 sesuai dengan tanggal akat kredit yang terjadi. Untuk X10 (status Pekerjaan istri/suami), X11 (pekerjaan istri/suami), dan X13 (persentase pengeluaran setiap bulan) tidak menjadi pertimbangan persyaratan dalam mendapatkan KPR Sarusuna Bersubsidi, karena sesuai dengan ketentuan pembagian kelompok sasaran yang ada berdasarkan batasan penghasilan dan berlaku untuk perorangan debitur.

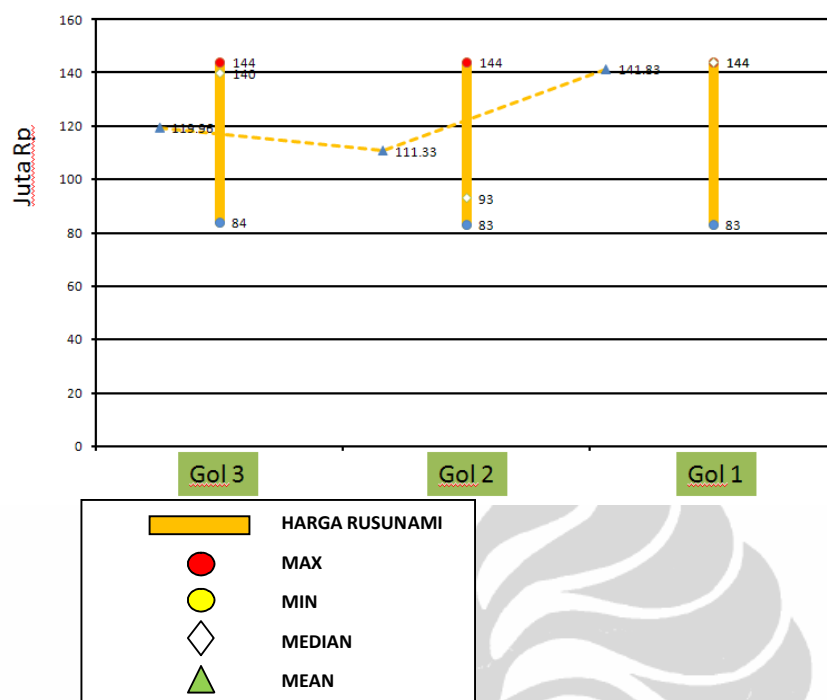
Karena keterbatasan waktu, variasi variabel yang dianalisa dengan analisa deskriptif untuk X3 (usia debitur), X7 (jumlah anggota keluarga), X12 (tingkat penghasilan suami/istri debitur), dilakukan dari sampel 336 debitur yang merupakan bagian dari 3458 orang debitur baik yang sudah mengalami realisasi ataupun belum realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi. Status yang belum realisasi merupakan debitur yang akan dibayarkan subsidinya, namun harus masih melengkapi dokumen yang belum lengkap.

Selanjutnya untuk variabel X8 (pekerjaan debitur), X9 (tingkat penghasilan per-bulan), X15 (harga rusunami), X16 (tipe rusunami), X17 (persentase uang muka), X18 (tenor kredit), dianalisa dari data 1893 (61 + 1832) debitur yang telah mengalami realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi. Khusus untuk X20 (persentase cicilan terhadap penghasilan) peneliti memberikan asumsi suku bunga yang dialami adalah fixed 10% selama masa tenor yang terjadi. Hasil analisa ditampilkan dalam bentuk berbagai *chart* yang ada untuk menggambarkan penyerapan KPR Sarusuna Bersubsidi oleh masyarakat sasaran.

Tabel 5.5 Penghasilan Golongan Kelompok Sasaran Vs Harga Rusunami

NO	PENGHASILAN GOL-3 (Rp)	HARGA RUSUN (Rp)	PENGHASILAN GOL-2 (Rp)	HARGA RUSUN (Rp)	PENGHASILAN GOL-1 (Rp)	HARGA RUSUN (Rp)
1	2,500,000.00	84,000,000.00	3,171,205.00	83,000,000.00	3,990,000.00	83,000,000.00
2	2,500,000.00	84,000,000.00	3,000,000.00	84,000,000.00	4,500,000.00	84,000,000.00
3	2,289,000.00	86,000,000.00	3,000,000.00	84,000,000.00	4,000,000.00	86,000,000.00
4	2,000,000.00	86,000,000.00	3,100,000.00	85,000,000.00	4,500,000.00	86,500,000.00
5	2,470,000.00	87,000,000.00	3,080,000.00	87,000,000.00	3,600,000.00	88,500,000.00
6	2,340,000.00	87,000,000.00	2,900,000.00	87,000,000.00	3,655,011.00	89,000,000.00
7	1,629,626.00	89,000,000.00	3,076,000.00	87,000,000.00	4,300,000.00	89,000,000.00
8	2,100,000.00	89,000,000.00	3,500,000.00	88,000,000.00	3,700,000.00	89,500,000.00
9	2,253,800.00	89,000,000.00	3,000,000.00	89,000,000.00	3,600,000.00	92,500,000.00
10	1,326,000.00	89,000,000.00	3,082,328.00	89,000,000.00	4,500,000.00	93,000,000.00
11	1,492,384.00	89,000,000.00	3,200,000.00	89,000,000.00	4,200,000.00	93,000,000.00
12	2,400,000.00	89,000,000.00	3,309,300.00	89,000,000.00	3,750,000.00	93,000,000.00
13	2,050,000.00	89,000,000.00	3,000,000.00	89,000,000.00	3,800,000.00	93,000,000.00
14	2,000,000.00	89,000,000.00	3,000,000.00	89,000,000.00	4,000,000.00	93,000,000.00
15	2,400,000.00	90,500,000.00	3,000,000.00	89,500,000.00	4,000,000.00	93,000,000.00
16	2,055,400.00	93,000,000.00	3,000,000.00	90,500,000.00	4,500,000.00	93,000,000.00
17	2,500,000.00	93,000,000.00	3,450,000.00	92,500,000.00	4,500,000.00	93,000,000.00
18	2,000,000.00	93,000,000.00	3,500,000.00	92,500,000.00	3,750,000.00	93,000,000.00
19	2,500,000.00	93,000,000.00	3,500,000.00	92,500,000.00	3,693,593.00	93,000,000.00
20	2,500,000.00	93,000,000.00	2,600,000.00	93,000,000.00	3,700,000.00	93,000,000.00
21	2,500,000.00	93,000,000.00	3,500,000.00	93,000,000.00	4,300,000.00	93,000,000.00
22	2,500,000.00	93,000,000.00	3,450,000.00	93,000,000.00	3,650,000.00	93,000,000.00
23	2,500,000.00	93,000,000.00	3,300,000.00	93,000,000.00	3,800,000.00	93,000,000.00
24	1,700,000.00	93,000,000.00	3,200,000.00	93,000,000.00	4,120,000.00	94,000,000.00
25	2,500,000.00	93,000,000.00	3,500,000.00	93,000,000.00	4,312,450.00	96,000,000.00
26	2,400,000.00	93,000,000.00	3,323,000.00	93,000,000.00	4,062,000.00	96,000,000.00
27	2,500,000.00	94,600,000.00	3,500,000.00	93,000,000.00	3,600,000.00	96,000,000.00
28	2,500,000.00	95,500,000.00	3,500,000.00	93,000,000.00	4,150,000.00	96,500,000.00
29	2,500,000.00	96,500,000.00	3,350,000.00	93,000,000.00	4,300,000.00	97,000,000.00
30	2,300,000.00	97,000,000.00	3,350,000.00	93,000,000.00	3,900,000.00	97,000,000.00

Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.1 Golongan Kelompok Sasaran Vs Harga Rusunami

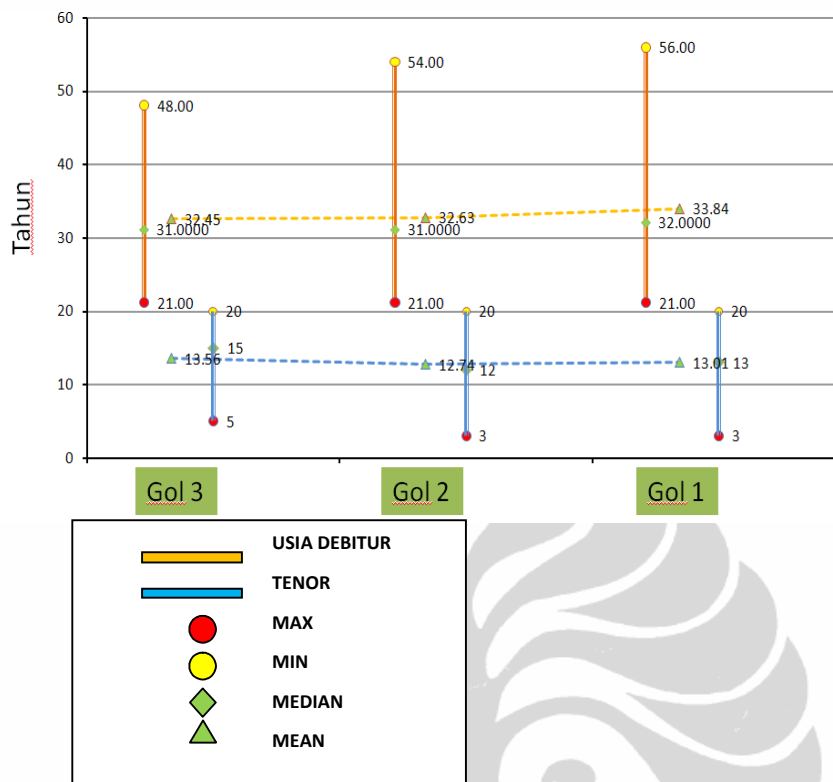
Sumber : Hasil Olahan

Dari Gambar 5.1 dapat dijelaskan bahwasanya walaupun memiliki batasan penghasilan yang berbeda-beda, kecenderungan masyarakat sasaran untuk membeli rusunami memiliki variasi yang sama dari sisi harga. Variasi harga rusunami yang ada adalah paling rendah 83 juta rupiah (modus dibawah 90 juta adalah 89 juta rupiah) dan paling tinggi 144 juta rupiah. Masyarakat gol 1 adalah masyarakat dengan penghasilan maksimum 4,5 juta, Masyarakat gol 2 adalah masyarakat dengan penghasilan maksimum 3,5 juta, Masyarakat gol 3 adalah masyarakat dengan penghasilan maksimum 2,5 juta. Namun dari gambar 5.1 terlihat jelas untuk gol 1 dengan batasan penghasilan 4,5 juta rupiah berdasarkan nilai rata-rata cenderung membeli rusunami dengan rata-rata harga diatas 140 juta rupiah.

Tabel 5.6 Golongan Kelompok Sasaran Vs Umur & Tenor

NO	TENOR GOL3 (TAHUN)	TENOR GOL2 (TAHUN)	TENOR GOL1 (TAHUN)	USIA GOL3 (TAHUN)	USIA GOL2 (TAHUN)	USIA GOL1 (TAHUN)
1	5	3	3	26	25	31
2	5	5	5	25	26	25
3	7	5	5	30	30	31
4	7	5	5	27	27	46
5	10	6	5	31	28	34
6	10	6	5	42	40	25
7	10	6	5	31	48	42
8	10	7	5	33	33	29
9	10	7	5	42	23	32
10	10	7	5	25	39	36
11	10	7	5	26	27	25
12	10	8	6	25	25	35
13	10	8	6	48	26	30
14	10	8	6	34	43	52
15	10	8	6	30	26	24
16	10	8	6	37	36	37
17	10	8	6	21	35	21
18	11	8	6	37	23	33
19	12	8	7	31	47	32
20	12	9	7	47	24	25
21	12	9	7	28	31	27
22	12	9	7	38	43	36
23	12	9	7		51	26
24	12	9	7		38	36
25	12	9	7		22	30
26	13	9	7		42	41
27	14	9	7		23	28
28	15	9	7		34	30
29	15	9	7		26	25
30	15	10	7		31	35

Sumber : (Kementerian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.2 Golongan Kelompok Sasaran Vs Umur & Tenor

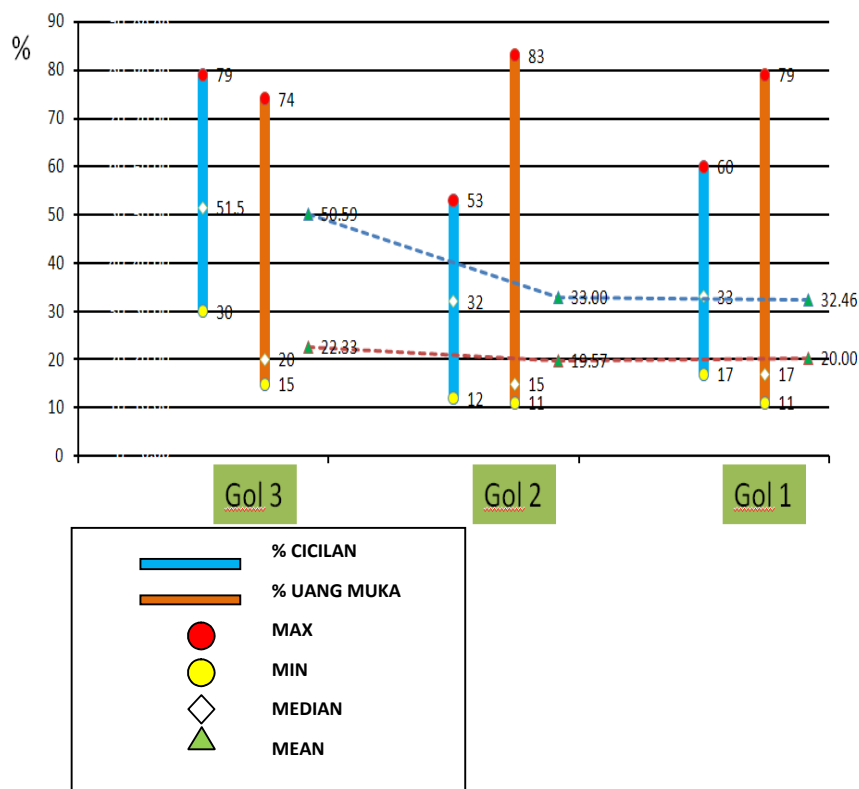
Sumber : Hasil Olahan

Dari Gambar 5.2 dapat dijelaskan bahwasanya variasi usia debitur yang terserap oleh KPR Rasuana Bersubsidi sangat bervariasi dengan kecenderungan rata-rata usia yang hampir sama untuk setiap golongan debitur yaitu 33 tahun. Dari segi tenor KPR, tidak ada perbedaan yang berarti antara setiap golongan debitur, tenor bervariasi antara 3-20 tahun, tentu saja ini diakibatkan nilai uang muka yang bervariasi pula. Namun secara nilai median dan rata-rata kecenderungan tenor tiap golongan adalah antara 10-15 tahun.

Tabel 5.7 Golongan Kelompok Sasaran Vs % Cicilan & % Uang Muka

NO	GOL 3		GOL 2		GOL 1	
	%CICILAN	%UANG MUKA	%CICILAN	%UANG MUKA	%CICILAN	%UANG MUKA
1	69	20	49	20	34	23
2	73	20	46	15	36	20
3	67	20	34	15	44	20
4	52	20	26	25	28	44
5	66	38	33	15	33	25
6	79	20	41	15	54	31
7	51	15	39	20	43	15
8	51	15	48	22	34	15
9	67	20	33	15	34	24
10	56	35	29	72	40	20
11	66	20	32	15	36	20
12	65	20	34	15	31	31
13	69	15	33	38	34	31
14	69	23	34	15	36	15
15	39	20	34	20	34	23
16	40	15	31	20	34	38
17	43	15	32	15	35	21
18	61	23	36	15	39	20
19	78	20	49	41	34	20
20	63	20	32	15	44	20
21	78	20	42	35	33	24
22	35	34	31	15	35	20
23	38	20	31	15	42	24
24	58	15	30	20	33	24
25	52	15	44	21	35	20
26	76	20	38	20	32	26
27	71	17	31	15	37	15
28	68	20	35	15	34	17

Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.3 Golongan Kelompok Sasaran Vs % Cicilan & % Uang Muka

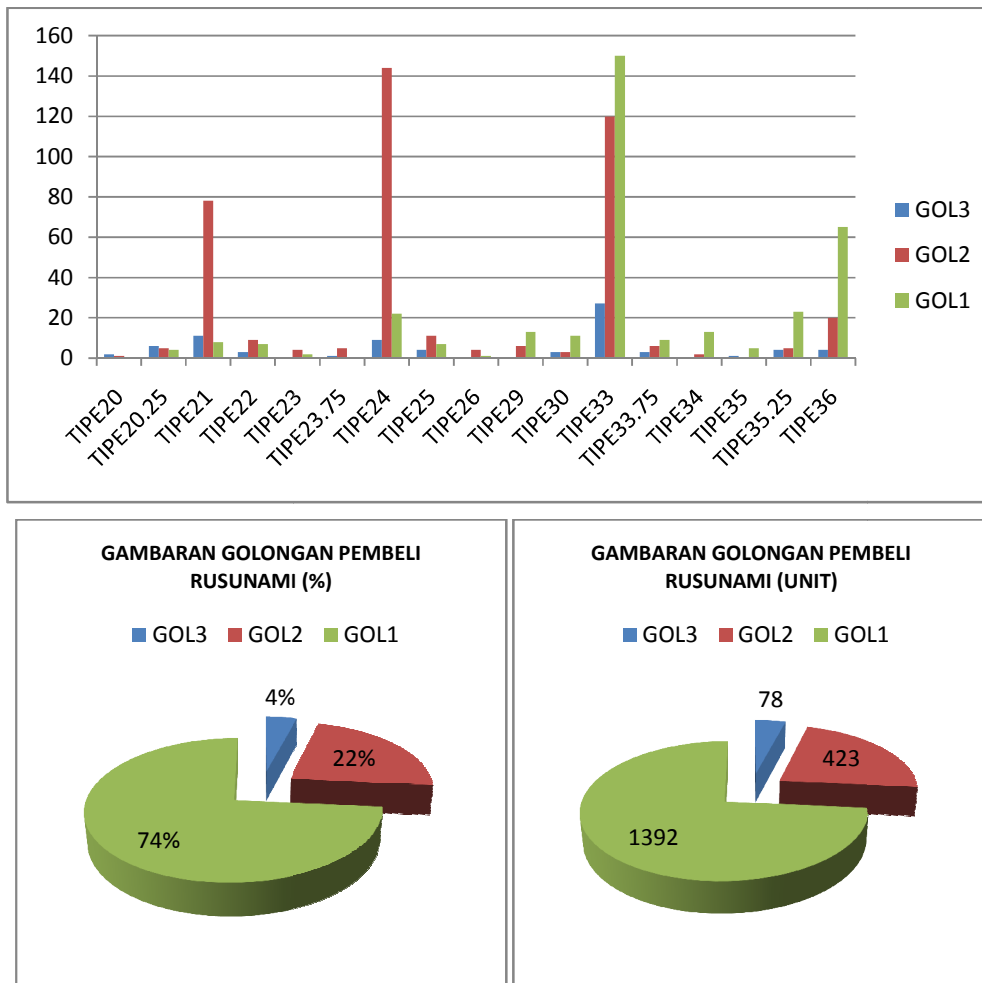
Sumber : Hasil Olahan

Dari Gambar 5.3 dapat dijelaskan bahwasanya terdapat variasi yang hampir sama antara setiap golongan sasaran dari sisi persentase uang muka terhadap harga rusunami yang tersedia. Minimum uang muka yang ada adalah 11% dan maksimum uang muka yang ada adalah 83%, rata-rata persentase antar setiap golongan tidak terdapat perbedaan yang berarti, yaitu antara 19-22 %, sedangkan dari nilai median yang ada nilai persentase uang muka adalah 15-20%. Dari segi persentase cicilan terlihat jelas bahwasanya masyarakat sasaran golongan 3, rata-rata harus mengeluarkan 50% penghasilannya setiap bulan untuk membeli suatu Rusunami. Ini sangat memperhatikan karena menurut berbagai literatur tentang skema pendanaan pemilikan tempat tinggal untuk masyarakat di berbagai negara, nilai maksimum suatu debitur dikategorikan memiliki *housing affordability problem* apabila memiliki cicilan untuk *housing* melebihi 30% penghasilan. Sedangkan golongan 2 dan 3 rata-rata harus mengeluarkan 33% penghasilan setiap bulan untuk memperoleh suatu Rusunami.

Tabel 5.8 Golongan Kelompok Sasaran Vs Tipe Rusunami

No	GOL3	GO2	GOL1
	TIPE (m ²)	TIPE (m ²)	TIPE (m ²)
1	20	20	20.25
2	20	20.25	20.25
3	20.25	20.25	20.25
4	20.25	20.25	20.25
5	20.25	20.25	21
6	20.25	20.25	21
7	20.25	21	21
8	20.25	21	21
9	21	21	21
10	21	21	21
11	21	21	21
12	21	21	21
13	21	21	22
14	21	21	22
15	21	21	22
16	21	21	22
17	21	21	22
18	21	21	22
19	21	21	22
20	22	21	23
21	22	21	23
22	22	21	24
23	23.75	21	24
24	24	21	24
25	24	21	24
26	24	21	24
27	24	21	24
28	24	21	24
29	24	21	24
30	24	21	24

Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.4 Golongan Kelompok Sasaran Vs Tipe Rusunami

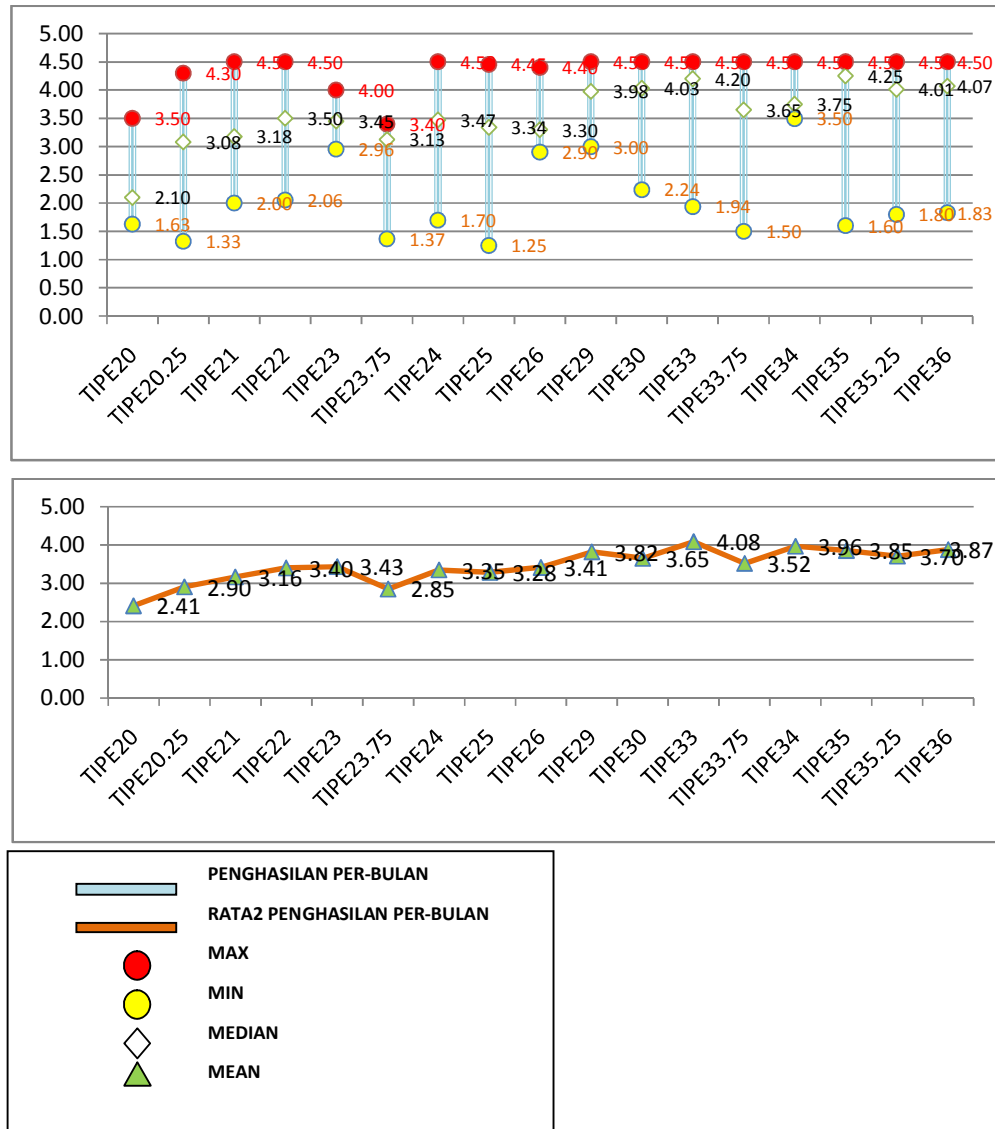
Sumber : Hasil Olahan

Dari gambar 5.4 terlihat penyebaran golongan masyarakat sasaran terhadap tipe rusunami yang tersedia. Setiap golongan cenderung menyebar di setiap tipe, namun terlihat jelas bahwasanya dari total 1893 unit, golongan masyarakat sasaran 3 dengan penghasilan maksimal 2,5 juta rupiah hanya dapat terserap sebanyak 4% oleh KPR Sarusuna Bersubsidi. Masyarakat golongan 2 hanya 22% dan golongan 1 mencapai 74%. Dari data ini dapat disimpulkan hanya masyarakat dengan penghasilan antara 3,5 juta – 4,5 juta rupiah saja yang paling mungkin terserap oleh KPR Sarusuna Bersubsidi.

Tabel 5.9 Penghasilan Pembeli Vs Tipe Rusunami

No	TIPE 20	TIPE 20.25	TIPE 21	TIPE 22	TIPE 23	TIPE 23.75	TIPE 24	TIPE25	TIPE 26	TIPE 29	TIPE 39	TIPE 33	TIPE 33.25	TIPE 34	TIPE 35	TIPE 35.25	TIPE 36
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1,629,626.00	1,326,000.00	2,000,000.00	2,055,400.00	2,959,600.00	1,368,489.00	1,700,000.00	1,250,000.00	2,902,370.00	3,000,000.00	2,236,215.00	1,937,117.00	4,000,000.00	3,496,000.00	1,600,000.00	1,799,100.00	1,832,100.00
2	2,100,000.00	1,492,384.00	2,100,000.00	2,300,000.00	3,125,000.00	2,700,000.00	2,000,000.00	2,025,000.00	3,052,500.00	3,013,000.00	2,414,000.00	2,000,000.00	4,250,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	1,900,000.00	1,943,000.00
3	3,500,000.00	2,000,000.00	2,289,000.00	2,500,000.00	3,400,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	2,254,000.00	3,300,000.00	3,050,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	3,520,700.00	4,000,000.00	1,954,800.00	2,050,000.00
4		2,050,000.00	2,300,000.00	2,800,000.00	3,500,000.00	3,250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,400,000.00	3,250,000.00	2,743,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	3,576,800.00	4,500,000.00	2,250,000.00	2,302,700.00
5		2,253,800.00	2,340,000.00	2,832,900.00	3,600,000.00	3,364,820.00	2,500,000.00	2,600,000.00	4,400,000.00	3,300,000.00	2,950,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	3,621,100.00	4,500,000.00	2,850,000.00	2,550,000.00
6		2,400,000.00	2,400,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	3,400,000.00	2,500,000.00	2,692,500.00		3,500,000.00	3,100,000.00	2,066,700.00	3,000,000.00	3,746,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	2,580,824.00
7		3,000,000.00	2,470,000.00	3,000,000.00			2,500,000.00	2,959,000.00		3,600,000.00	3,650,000.00	2,079,700.00	3,000,000.00	3,750,000.00		3,000,000.00	2,600,000.00
8		3,082,328.00	2,500,000.00	3,075,600.00			2,500,000.00	3,000,000.00		3,763,767.00	3,800,000.00	2,087,000.00	3,300,000.00	3,750,000.00		3,100,000.00	2,693,000.00
9		3,200,000.00	2,500,000.00	3,302,400.00			2,500,000.00	3,245,000.00		3,816,700.00	4,030,000.00	2,110,000.00	3,300,000.00	4,012,300.00		3,500,000.00	3,000,000.00
10		3,309,300.00	2,500,000.00	3,500,000.00			2,600,000.00	3,266,000.00		3,975,000.00	4,100,000.00	2,275,600.00	3,500,000.00	4,254,000.00		3,550,000.00	3,057,645.00
11		3,500,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00			2,600,000.00	3,329,000.00		4,000,000.00	4,100,000.00	2,300,000.00	3,500,000.00	4,300,000.00		3,571,485.00	3,128,000.00
12		3,655,011.00	2,600,000.00	3,500,000.00			2,670,700.00	3,352,700.00		4,000,000.00	4,175,000.00	2,300,000.00	3,797,256.00	4,411,803.00		3,650,000.00	3,143,700.00
13		4,000,000.00	2,600,000.00	3,600,000.00			2,700,000.00	3,500,000.00		4,088,650.00	4,320,100.00	2,303,000.00	3,800,000.00	4,500,000.00		3,710,000.00	3,273,800.00
14		4,000,000.00	2,700,000.00	3,900,000.00			2,700,000.00	3,500,000.00		4,125,213.00	4,400,000.00	2,322,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00		3,798,000.00	3,389,600.00
15		4,300,000.00	2,750,000.00	4,150,000.00			2,700,000.00	3,500,000.00		4,225,000.00	4,461,000.00	2,339,800.00	4,238,100.00	4,500,000.00		3,800,000.00	3,391,907.00
16			2,750,000.00	4,300,000.00			2,725,000.00	4,000,000.00		4,400,000.00	4,500,000.00	2,376,100.00	4,300,000.00			4,000,000.00	3,400,000.00
17			2,800,000.00	4,300,000.00			2,750,000.00	4,000,000.00		4,410,000.00	4,500,000.00	2,400,000.00	4,500,000.00			4,025,000.00	3,400,000.00
18			2,800,000.00	4,426,884.00			2,800,000.00	4,000,000.00		4,500,000.00		2,400,000.00	4,500,000.00			4,047,000.00	3,453,800.00
19			2,800,000.00	4,500,000.00			2,875,000.00	4,120,000.00		4,500,000.00		2,400,000.00				4,050,000.00	3,500,000.00
20			2,823,600.00				2,875,000.00	4,300,000.00				2,400,000.00				4,250,000.00	3,500,000.00

Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.5 Penghasilan Pembeli (Juta Rupiah) Vs Tipe Rusunami

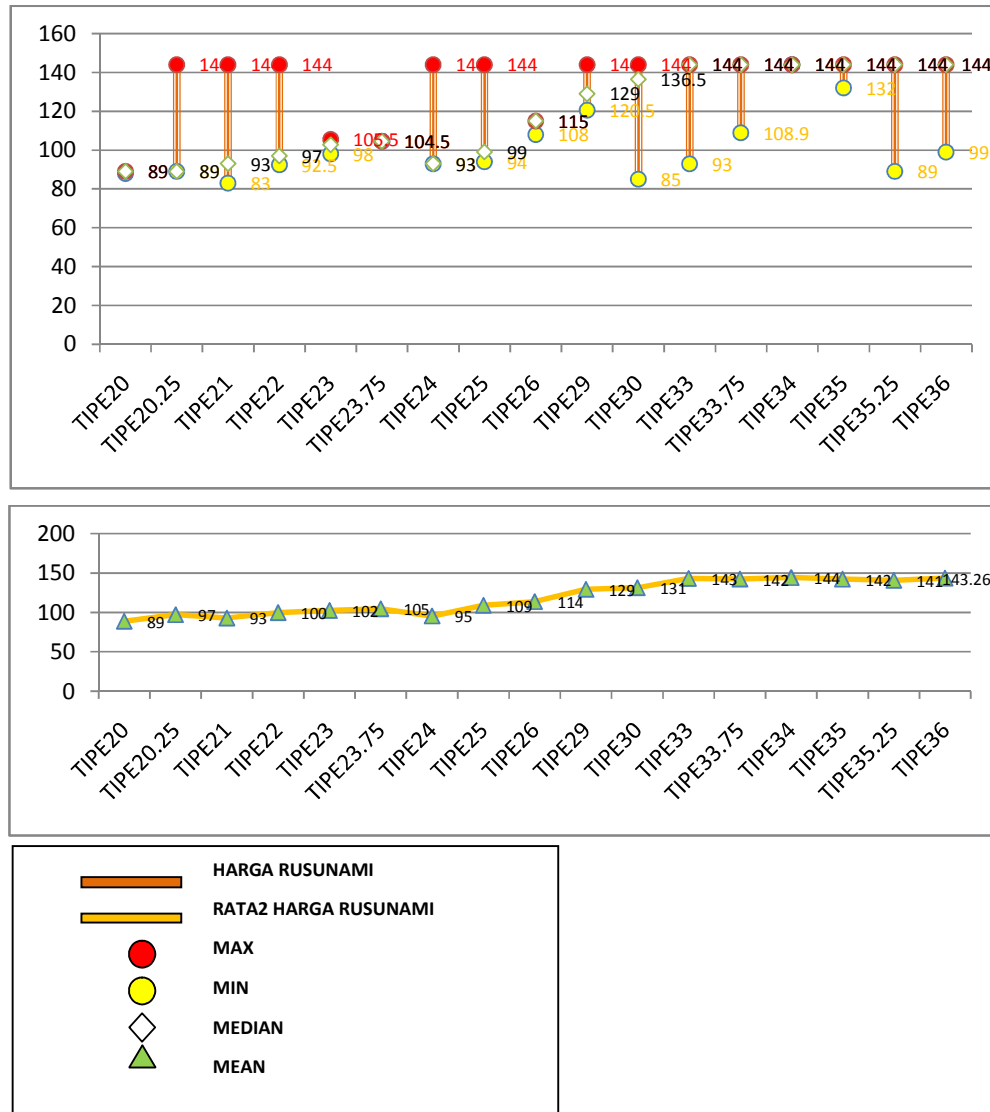
Sumber : Hasil Olahan

Dari gambar 5.5 terlihat penyebaran penghasilan masyarakat MBM dan MBR yang membeli rusunami pada setiap tipe rusunami yang tersedia. Penghasilan minimum yang ada adalah 1,25 juta rupiah dan maksimum adalah 4,5 juta rupiah. Dari pola nilai median dan rata-rata penghasilan yang tergambar, dapat disimpulkan semakin tinggi tipe rusunami semakin tinggi rata-rata penghasilan masyarakat yang membelinya.

Tabel 5.10 Harga Rusunami Vs Tipe Rusunami

No	TIPE 20	TIPE 20.25	TIPE 21	TIPE 22	TIPE 23	TIPE 23.75	TIPE 24	TIPE25	TIPE 26	TIPE 29	TIPE 30	TIPE 33	TIPE 33.75	TIPE 34	TIPE 35	TIPE 35.25	TIPE 36
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	88000000	89000000	83000000	92500000	98000000	104500000	93000000	94000000	108000000	120500000	85000000	93000000	108900000	144000000	132000000	89000000	99000000
2	89000000	89000000	83000000	92500000	101000000	104500000	93000000	99000000	115000000	120500000	123000000	93000000	144000000	144000000	144000000	89000000	123000000
3	89000000	89000000	84000000	93000000	101000000	104500000	93000000	99000000	115000000	120500000	123000000	93000000	144000000	144000000	144000000	144000000	144000000
4		89000000	84000000	93000000	104500000	104500000	93000000	99000000	115000000	122000000	123000000	93000000	144000000	144000000	144000000	144000000	144000000
5		89000000	84000000	96500000	104500000	104500000	93000000	99000000	115000000	123500000	123000000	93000000	144000000	144000000	144000000	144000000	144000000
6		89000000	84000000	96500000	105500000	104500000	93000000	99000000		123500000	123000000	93000000	144000000	144000000	144000000	144000000	144000000
7		89000000	84000000	97000000			93000000	99000000		129000000	131000000	93000000	144000000	144000000		144000000	144000000
8		89000000	86000000	97000000			93000000	99000000		129000000	136000000	93000000	144000000	144000000		144000000	144000000
9		89000000	86000000	97000000			93000000	99000000		129000000	136500000	96000000	144000000	144000000		144000000	144000000
10		89000000	86000000	97000000			93000000	99000000		129000000	136500000	97000000	144000000	144000000		144000000	144000000
11		89000000	86500000	97500000			93000000	99000000		131000000	136500000	100000000	144000000	144000000		144000000	144000000
12		89000000	87000000	97500000			93000000	99000000		131500000	136500000	100000000	144000000	144000000		144000000	144000000
13		98000000	87000000	100000000			93000000	99000000		132000000	141000000	105000000	144000000	144000000		144000000	144000000
14		144000000	87000000	100000000			93000000	99000000		132000000	144000000	106000000	144000000	144000000		144000000	144000000
15		144000000	87000000	100000000			93000000	102500000		132000000	144000000	114000000	144000000	144000000		144000000	144000000
16			87000000	100000000			93000000	102500000		132000000	144000000	132000000	144000000			144000000	144000000
17			88500000	101000000			93000000	116610000		134000000	144000000	132000000	144000000			144000000	144000000
18			89500000	102000000			93000000	116610000		138500000		132000000	144000000			144000000	144000000
19			89500000	144000000			93000000	144000000		144000000		137000000				144000000	144000000
20			90500000				93000000	144000000				137000000				144000000	144000000

Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.6 Harga Rusunami (Juta Rupiah) Vs Tipe Rusunami

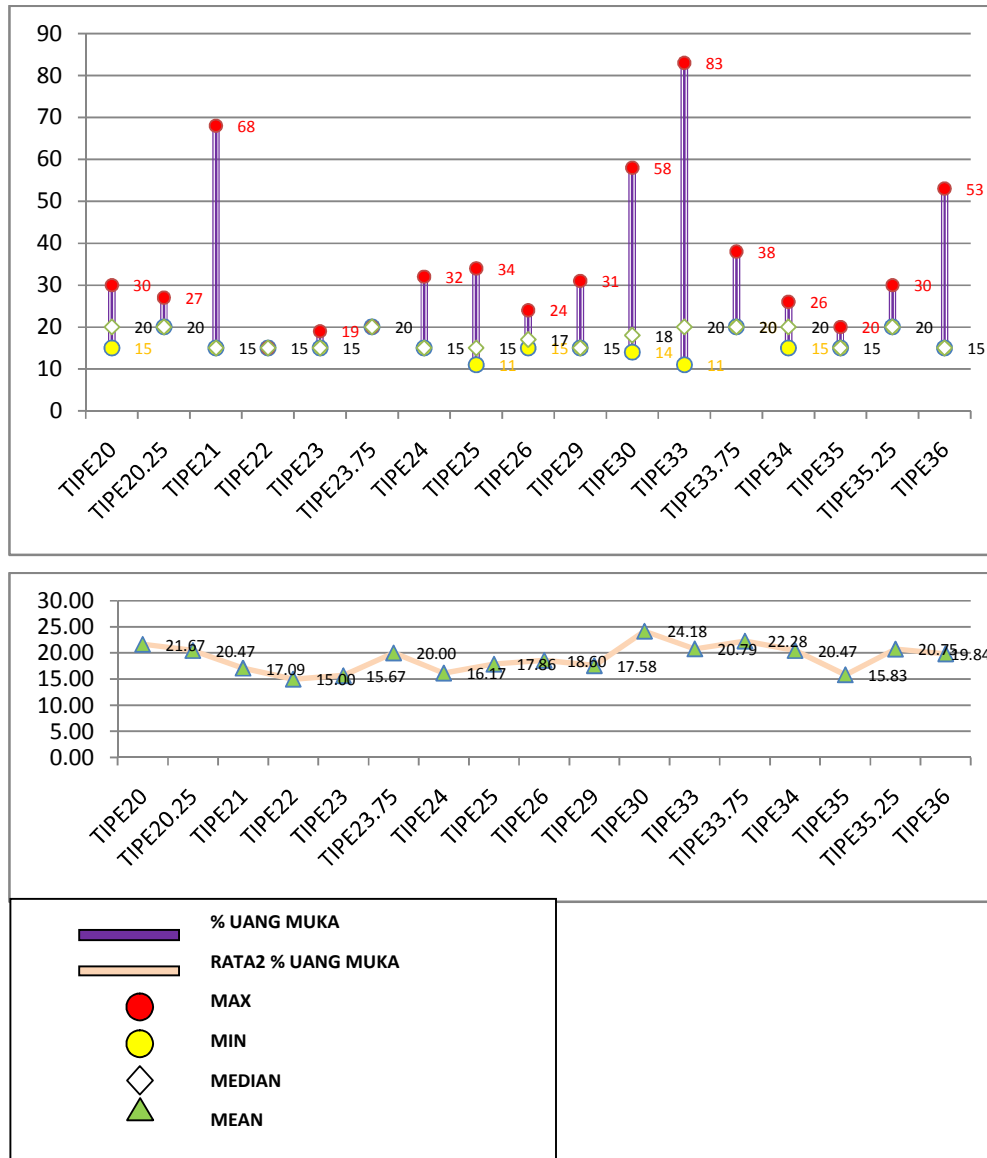
Sumber : Hasil Olahan

Dari gambar 5.6 terlihat penyebaran harga rusunami yang tinggi rentangnya pada setiap tipe, dari gambar pola penyebaran harga terlihat tipe dibawah 30 dan tipe di atas 30 tidak terdapat variasi harga yang berbeda. Variasi harga adalah antara 83 juta – 144 juta. Namun dari pola rata-rata harga rusunami terhadap tipe yang tersedia dapat disimpulkan, semakin tinggi tipe rusunami harganya semakin mahal, antara rata-rata 89 juta – 144 juta rupiah.

Tabel 5.11 Persentase Uang Muka Vs Tipe Rusunami

No	TIPE 20	TIPE 20.25	TIPE 21	TIPE 22	TIPE 23	TIPE 23.75	TIPE 24	TIPE25	TIPE 26	TIPE 29	TIPE 30	TIPE 33	TIPE 33.75	TIPE 34	TIPE 35	TIPE 35.25	TIPE 36
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	15	20	15	15	15	20	15	11	15	15	14	11	20	15	15	20	15
2	20	20	15	15	15	20	15	15	15	15	15	14	20	15	15	20	15
3	30	20	15	15	15	20	15	15	17	15	15	15	20	20	15	20	15
4		20	15	15	15	20	15	15	22	15	15	15	20	20	15	20	15
5		20	15	15	15	20	15	15	24	15	15	15	20	20	15	20	15
6		20	15	15	19	20	15	15		15	15	15	20	20	20	20	15
7		20	15	15			15	15		15	15	15	20	20		20	15
8		20	15	15			15	15		15	18	15	20	20		20	15
9		20	15	15			15	15		15	18	15	20	20		20	15
10		20	15	15			15	15		15	19	15	20	20		20	15
11		20	15	15			15	15		15	19	15	20	20		20	15
12		20	15	15			15	15		15	20	15	20	23		20	15
13		20	15	15			15	15		15	25	15	20	24		20	15
14		20	15	15			15	15		15	35	15	22	24		20	15
15		27	15	15			15	15		17	39	15	23	26		20	15
16			15	15			15	20		22	56	15	27			20	15
17			15	15			15	20		24	58	15	31			20	15
18			15	15			15	20		30		15	38			20	15
19			15	15			15	20		31		15				20	15
20			15				15	29				15				20	15

Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.7 Persentase Uang Muka (%) Vs Tipe Rusunami

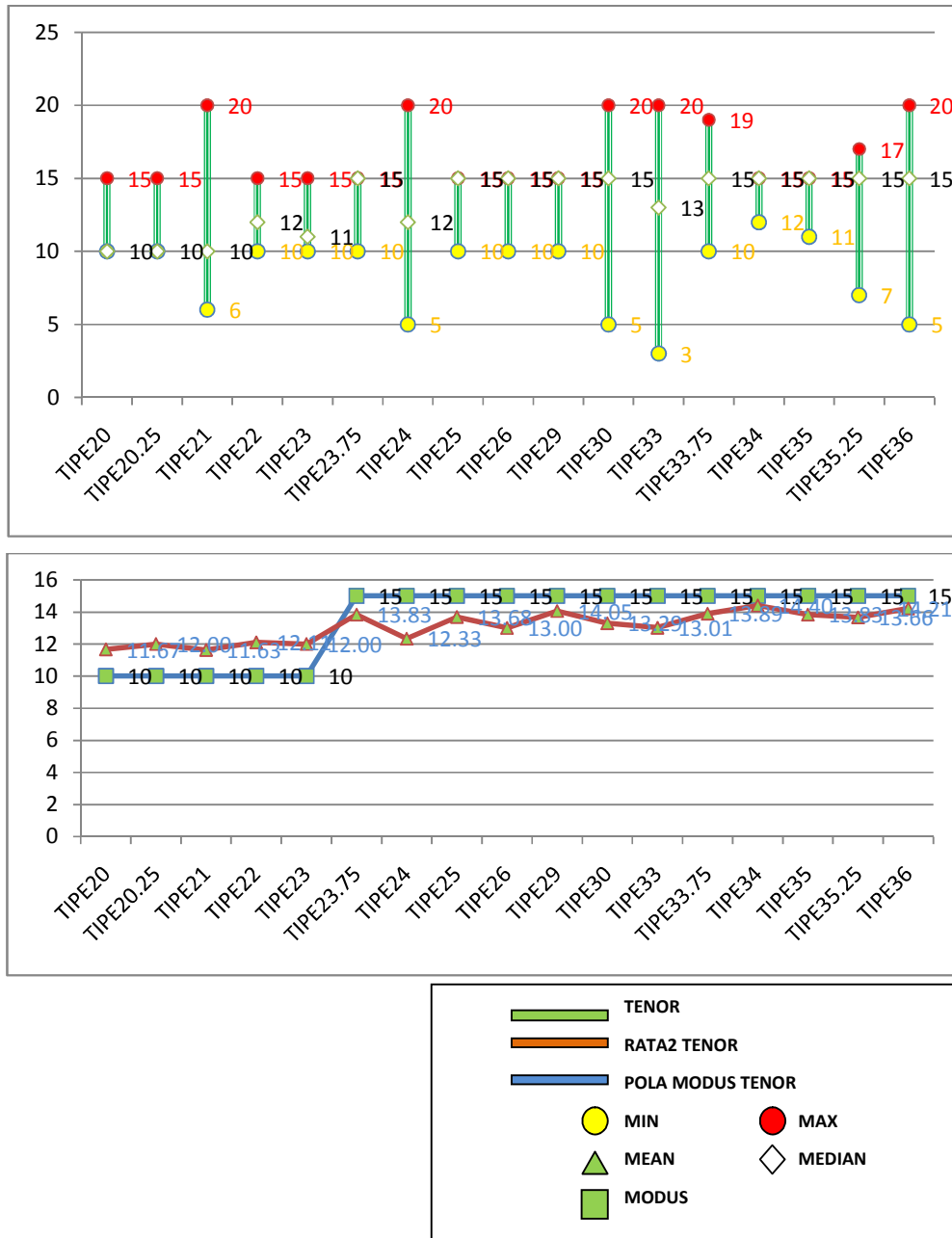
Sumber : Hasil Olahan

Dari gambar 5.7 terlihat penyebaran persentase uang muka terhadap nilai yang bervariasi pada setiap tipe rusunami. Dari pola nilai median yang ada, terlihat variasi nilai uang muka tiap tipe yang ada adalah antara 10-20 %, hal ini juga terlihat dari nilai rata-rata uang muka setiap tipe rusunami, mayoritas berada antara range 10-20%.

Tabel 5.12 Tenor KPR Vs Tipe Rusunami

No	TIPE 20	TIPE 20.25	TIPE 21	TIPE 22	TIPE 23	TIPE 23.75	TIPE 24	TIPE25	TIPE 26	TIPE 29	TIPE 30	TIPE 33	TIPE 33.75	TIPE 34	TIPE 35	TIPE 35.25	TIPE 36
	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)
1	10	10	6	10	10	10	5	10	10	10	5	3	10	12	11	7	5
2	10	10	6	10	10	13	5	10	10	10	10	3	10	12	12	10	7
3	15	10	7	10	10	15	7	10	15	10	10	5	10	12	15	10	10
4		10	7	10	12	15	8	10	15	12	10	5	10	15	15	10	10
5		10	8	10	15	15	8	11	15	15	10	5	11	15	15	12	10
6		10	8	10	15	15	8	12		15	11	5	12	15	15	12	10
7		10	9	10			8	13		15	12	5	15	15		12	10
8		10	10	10			8	15		15	13	5	15	15		12	10
9		11	10	11			8	15		15	15	5	15	15		12	10
10		14	10	12			9	15		15	15	5	15	15		12	10
11		15	10	12			9	15		15	15	5	15	15		12	10
12		15	10	12			9	15		15	15	5	15	15		12	11
13		15	10	13			9	15		15	15	5	15	15		15	12
14		15	10	15			9	15		15	15	6	15	15		15	12
15		15	10	15			9	15		15	15	6	15	15		15	12
16			10	15			9	15		15	20	6	15			15	12
17			10	15			9	15		15	20	6	18			15	12
18			10	15			10	15		15		6	19			15	12
19			10	15			10	15		15		6				15	12
20			10				10	15				6				15	13

Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.8 Tenor KPR (Tahun) Vs Tipe Rusunami

Sumber : Hasil Olahan

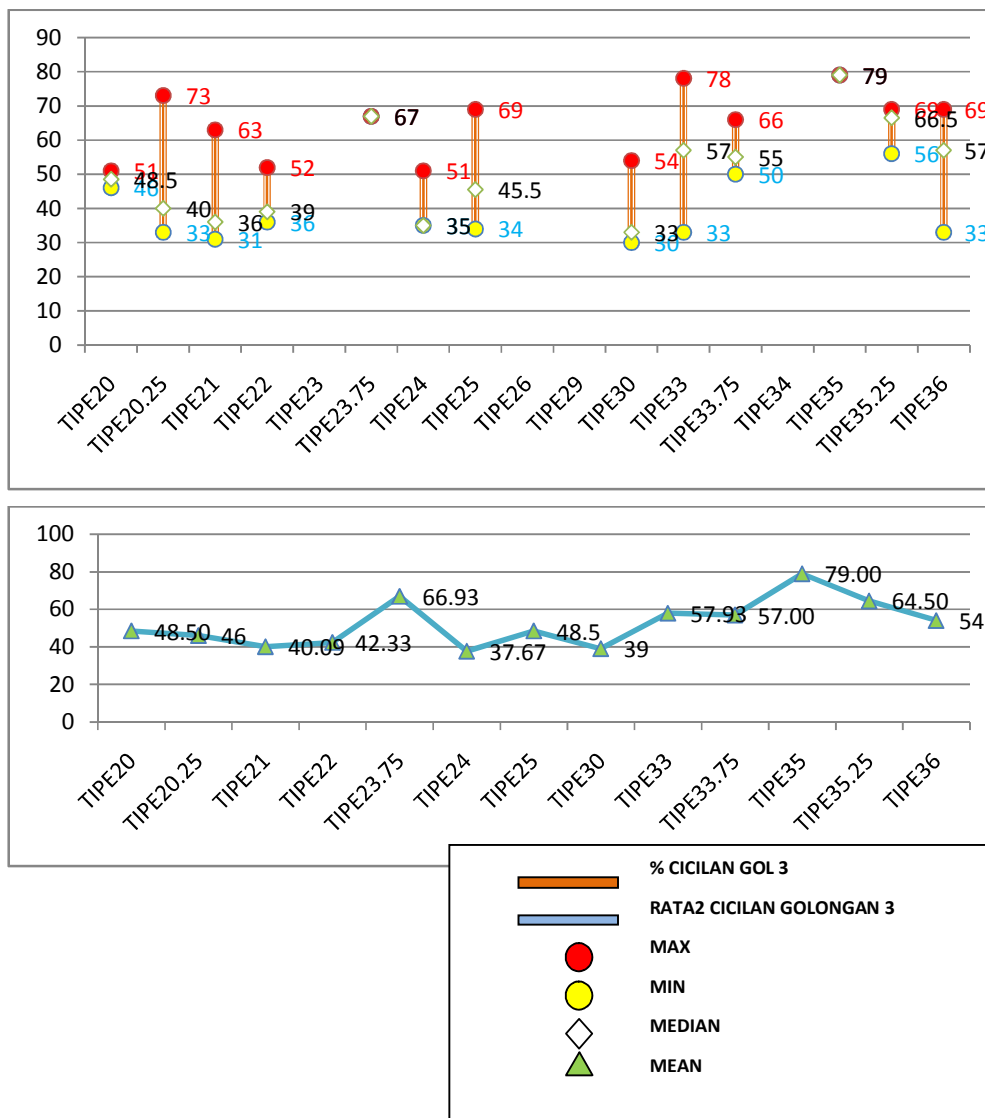
Dari gambar 5.8 terlihat penyebaran lama tenor KPR adalah antara 10-15 tahun pada mayoritas tipe rusunami yang tersedia. Selain itu dari gambaran pola nilai rata-rata tenor, lama tenor cenderung meningkat seiring dengan semakin besar tipe rusun yang dibeli. Sedangkan dari pola nilai modus yang tergambar, tenor

KPR rusunami tipe 24 kebawah adalah cenderung 10 tahun, dan tenor KPR rusunami tipe diatas 24 adalah cenderung 15 tahun.

Tabel 5.13 % Cicilan KPR Vs Tipe Rusunami

NO	GOL 3		GOL 2		GOL 1	
	%CICILAN	TIPE	%CICILAN	TIPE	%CICILAN	TIPE
1	69	25	49	36	34	34
2	73	20.25	46	36	36	33
3	67	23.75	34	21	44	33
4	52	20.25	26	21	28	33
5	66	33.75	33	24	33	33
6	79	35	41	24	54	33
7	51	20	39	25	43	33
8	51	24	48	36	34	33
9	67	35.25	33	33	34	33
10	56	36	29	33	40	35.25
11	66	35.25	32	24	36	36
12	65	33	34	25	31	33
13	69	36	33	36	34	33
14	69	35.25	34	21	36	33
15	39	20.25	34	23.75	34	33
16	40	21	31	24	34	33
17	43	24	32	24	35	33
18	61	33	36	24	39	33
19	78	33	49	33	34	35.25
20	63	33	32	24	44	33
21	78	33	42	30	33	33
22	35	25	31	21	35	33
23	38	20.25	31	21	42	33
24	58	36	30	24	33	34
25	52	22	44	33	35	33
26	76	33	38	21	32	36
27	71	33	31	21	37	36
28	68	33	35	21	34	33
29	46	20	31	22	44	33
30	63	21	35	24	32	33

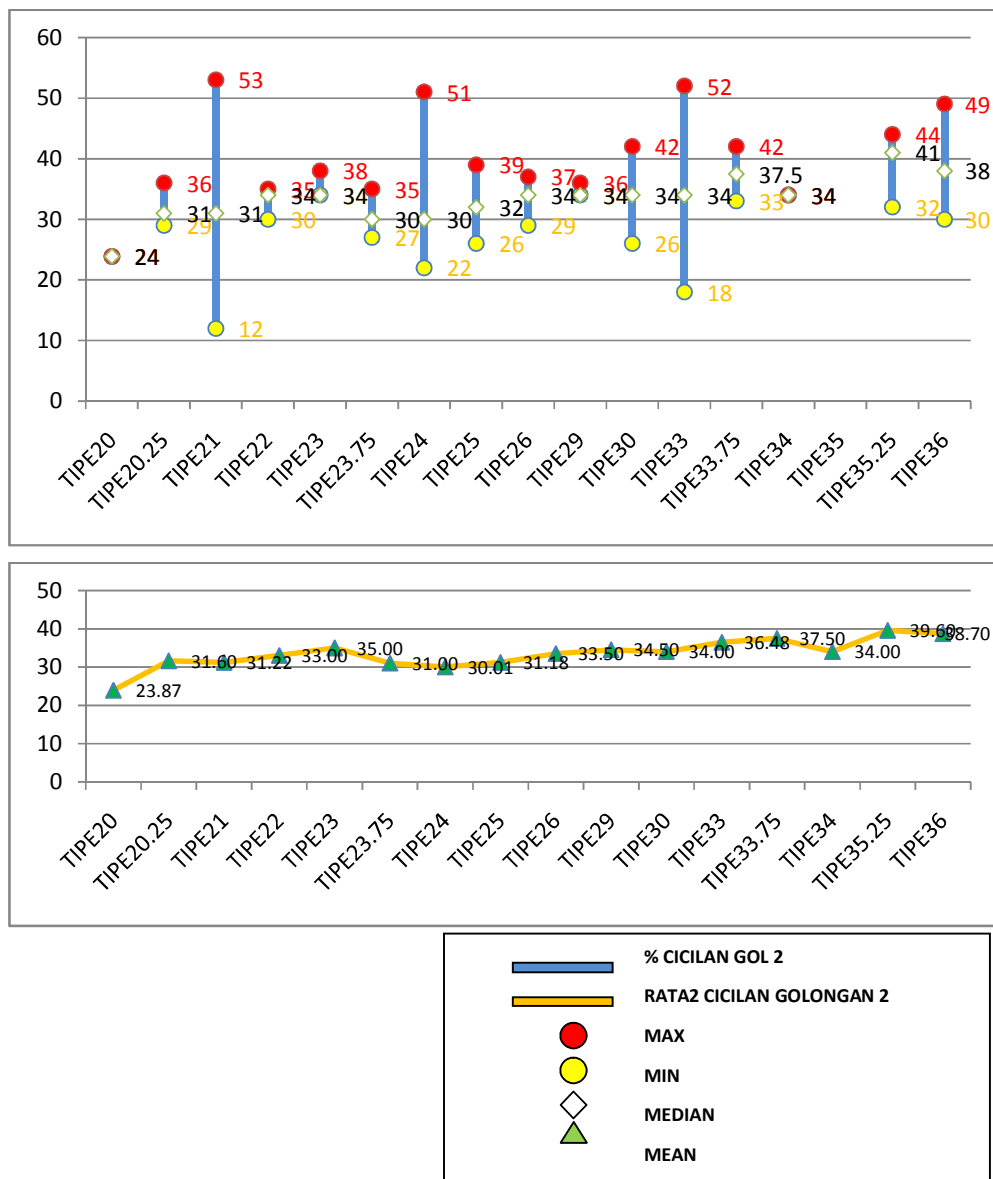
Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)



Gambar 5.9 % Cicilan KPR Gol 3 Vs Tipe Rusunami

Sumber : Hasil Olahan

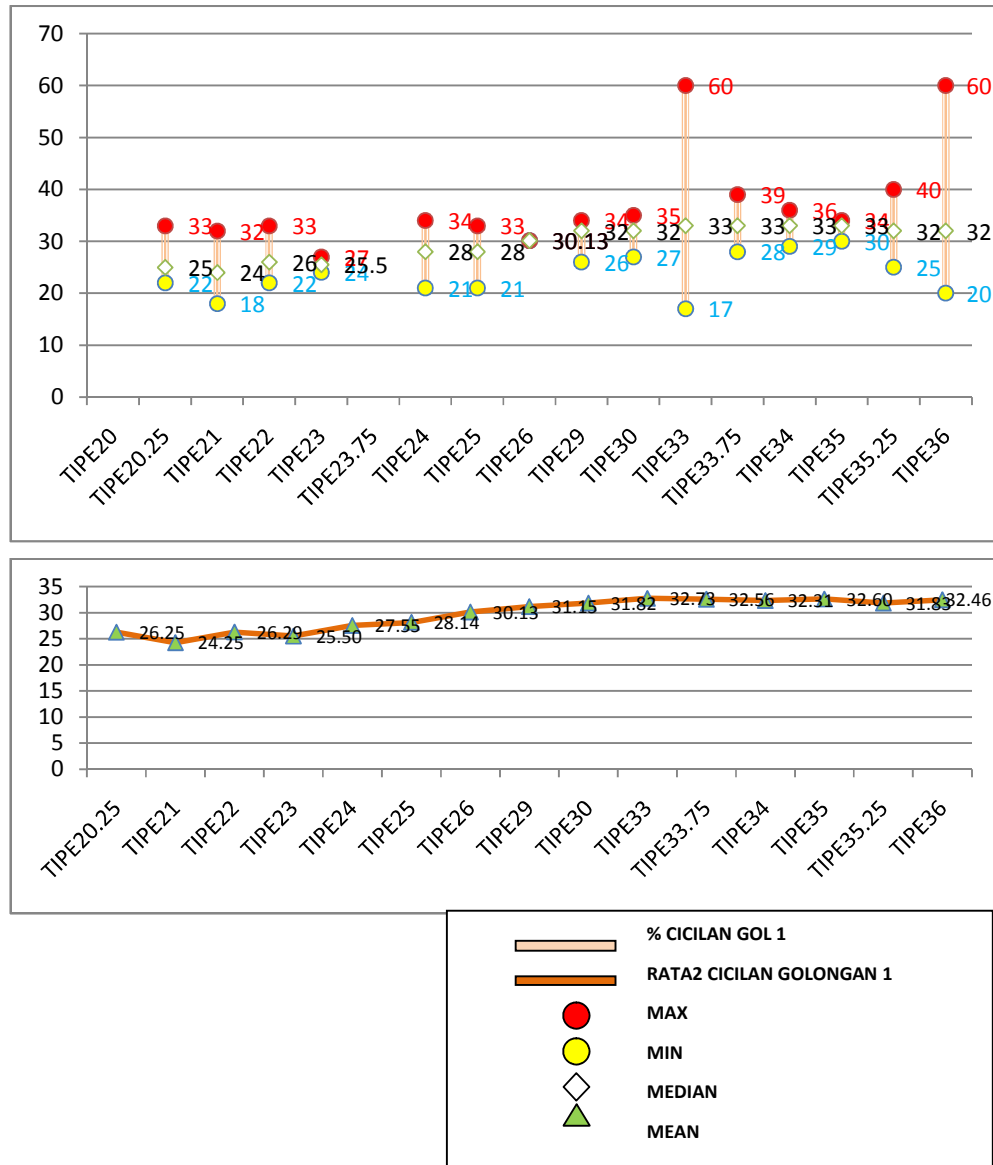
Dari gambar 5.9 terlihat pada golongan masyarakat sasaran 3, persentase cicilan KPR Rusunami bervariasi untuk setiap tipe Rusunami antara 30%-79%. Dari pola nilai median dan nilai rata-rata, % cicilan KPR perbulan golongan masyarakat sasaran 3 mayoritas berada dalam rentang 40% - 60%, hal ini sangat memprihatinkan dan kemungkinan kondisi ini menjadi penyebab penyerapan hanya 4% dari total 1893 unit, sesuai dengan gambar 5.4 yang menggambarkan penyerapan masyarakat golongan ini hanya 4% dari total 1893 unit.



Gambar 5.10 % Cicilan KPR Gol 2 Vs Tipe Rusunami

Sumber : Hasil Olahan

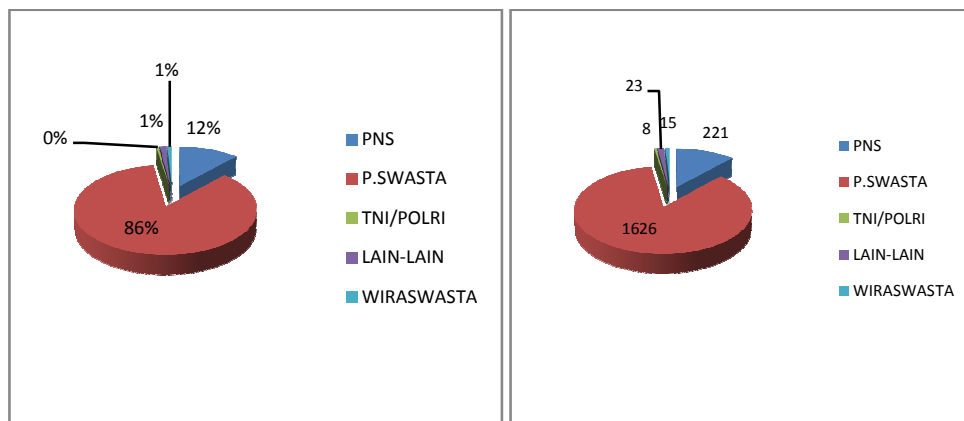
Dari gambar 5.10 terlihat pada golongan masyarakat sasaran 2, persentase cicilan KPR rusunami bervariasi untuk setiap tipe rusunami antara 12%-53%. Dari pola nilai median dan nilai rata-rata % cicilan KPR perbulan, golongan masyarakat sasaran 2 mayoritas berada dalam rentang 30% - 35%, hal ini jauh lebih baik dari golongan 3 namun masih terklasifikasi masyarakat yang memiliki *housing affordability problem*.



Gambar 5.11 % Cicilan KPR Gol 1 Vs Tipe Rusunami

Sumber : Hasil Olahan

Dari gambar 5.11 terlihat pada golongan masyarakat sasaran 1, persentase cicilan KPR rusunami bervariasi untuk setiap tipe rusunami antara 17%-60%. Dari pola nilai median dan nilai rata-rata, % cicilan KPR perbulan golongan masyarakat sasaran 1 mayoritas berada dalam rentang 25% - 33%, hal ini lebih baik dari golongan dua namun sebagian masih terklasifikasi masyarakat yang memiliki *housing affordability problem*.



Gambar 5.12 Gambaran Pekerjaan Debitur

Sumber : Hasil Olahan

Dari gambar 5.12 terlihat gambaran pekerjaan masyarakat sasaran yang terserap oleh KPR Sarusuna Bersubsidi. Dari gambar terlihat pegawai swata adalah jenis pekerjaan yang dominan yaitu 86% dari 1893 debitur KPR Sarusuna Bersubsidi

Karena keterbatasan waktu, variasi variabel yang dianalisa dengan analisa deskriptif untuk X3 (usia debitur), X7 (jumlah anggota keluarga), X12 (tingkat penghasilan suami/istri debitur), dilakukan dari sampel 336 debitur (Data 2) yang merupakan bagian dari 3458 orang debitur baik yang sudah mengalami realisasi ataupun belum realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi. Status yang belum realisasi merupakan debitur yang akan dibayarkan subsidinya, namun harus masih melengkapi dokumen yang belum lengkap. Adapun data mengenai variabel-variabel tersebut dijabarkan di dalam tabel 4.9.

Tabel 5.14 Gambaran Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Usia, Status pernikahan, Status Duda/Janda, Jumlah Anggota Keluarga, Penghasilan Suami/Istri Debitur, dan Tipe Rusun yang Dibeli (Data 2)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TIPE RUSUN
1	1	1	26	0		2		21
2	1	0	25	0		1		36
3	0	0	31	1		3	25000000	36
4	1	1	26	0		1		21
5	0	0	25	0		1		30
6	1	1	30	1		2		36
7	1	0	31	0		1		36

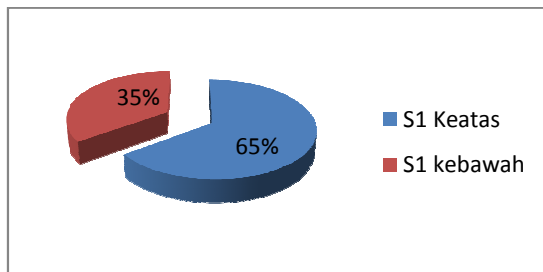
Tabel 5.14 (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TIPE RUSUN
6	1	1	30	1		2		36
7	1	0	31	0		1		36
8	1	0	46	1		4	12000000	36
9	1	1	27	0		1		21
10	1	0	28	0		1		29
11	1	1	34	1		3	1500000	21
12	1	0	25	0		1		33
13	0	0	42	1	J	2		36
14	0	1	25	0		1		21
15	0	0	40	1		3		22
16	0	1	48	1		4	2000000	26
17	1	0	33	1		2	3280000	25
18	0	1	23	1		2		36
19	1	0	29	1		3		22
20	1	1	32	1		4		36
21	1	1	39	1		2		36
22	1	0	27	0		1		26
23	0	1	25	0		1		25
24	0	1	36	1		4		33
25	1	0	25	0		1		33
26	0	0	35	1		3		33
27	0	1	30	0		1		33
28	0	1	52	1		4		33
29	0	1	24	0		1		33
30	1	1	37	1		4		33
31	1	1	26	0		1		21
32	0	1	21	0		1		33
33	1	0	43	0		1		33
34	1	1	33	1		4		33
35	0	1	32	1		2		33
36	1	0	25	0		1		33
37	1	1	27	0		1		33
38	1	0	36	1		3		33
39	1	1	26	0		1		33
40	1	0	36	0		2		33

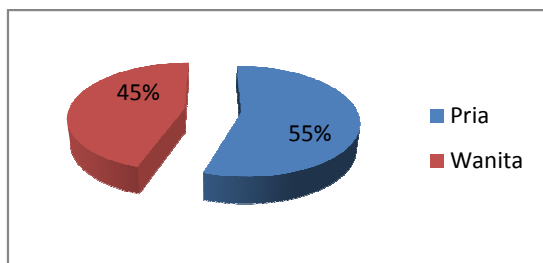
Sumber : (Kementrian Perumahan Rakyat, 2011)

Keterangan :

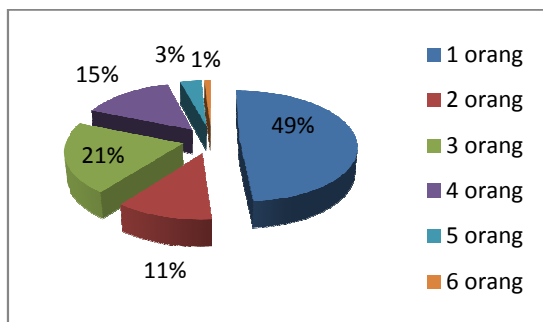
T.PEN (Tingkat Pendidikan)	: S1 keatas =1, S1 kebawah =0
J.KEL (Jenis Kelamin)	: Pria =1, Wanita =0
S.M (Status Pernikahan)	: Sudah Menikah =1, Lajang =0
D/J (Duda/Janda)	: D =Duda, J=Janda
J.ANG.KEL	: Jumlah Anggota Keluarga



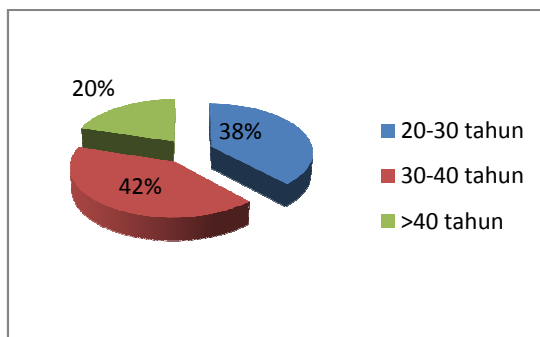
Gambar 5.13 Gambaran Tingkat Pendidikan Debitur



Gambar 5.14 Gambaran Jenis Kelamin Debitur



Gambar 5.15 Gambaran Jumlah Anggota Keluarga Debitur



Gambar 5.16 Gambaran Usia Debitur

Sumber : Hasil Olahan

5.4 Hasil Wawancara Terstruktur Untuk Mengetahui Penyebab Rendahnya Realisasi KPR Sarasuna Bersubsidi Oleh Masyarakat Sasaran

Wawancara terstruktur dilakukan setelah melakukan pengumpulan dan analisa deskriptif terhadap data sekunder yang didapat. Wawancara terstruktur ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Secara umum informasi mengenai KPR Sarasuna Bersubsidi dari setiap pakar dapat dipaparkan sebagai berikut :

Subsidi kredit pemilikan rusunami yang disebut kemudian dengan KPR Sarasuna Bersubsidi merupakan suatu skema pemilikan rumah susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008. Skema ini terdiri dari :

- a. Subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayar oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam waktu tertentu yang selanjutnya disebut subsidi selisih bunga.
- b. Subsidi untuk membantu meringankan debitur dalam memenuhi kewajiban dalam menyediakan uang muka KPR Sarusun.

Debitur yang dimaksud adalah masyarakat dengan batasan penghasilan :

Tabel 5.15 Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran	Batas Penghasilan Paling Banyak (Rp/Bulan)
I	4.500.000
II	3.500.000
III	2.500.000

Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2007

Dalam pelaksanaannya, penghasilan pada tabel 2.4 adalah gaji pokok perorangan debitur, sehingga gaji tersebut bukan merupakan *Take Home Pay* debitur. Selain itu penghasilan tersebut merupakan pendapatan perorangan sehingga, walaupun debitur memiliki suami/istri yang berpenghasilan sama atau bahkan lebih dari batasan ketentuan, maka masih berhak menggunakan fasilitas skema subsidi ini. Suku bunga yang diberikan pada debitur yang menggunakan fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.16 Suku Bunga KPR Sarusuna Bersubsidi

Kelompok Sasaran	Suku Bunga Bersubsidi (%/Tahun)										
	Tahun										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	9,85	9,85	9,85	9,85	Bunga Pasar						
II	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	Bunga Pasar				
III	7	7	7	7	7	7	7	7	Bunga Pasar		

Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008

Suku bunga sesuai kelompok sasaran berlangsung tetap sesuai batasan tenor masa berlaku subsidi mulai dari 4-8 tahun. Namun pada pelaksanaannya tenor masa subsidi hanya 4-6 tahun, hal ini diakibatkan oleh tidak adanya masyarakat sasaran yang menggunakan skim kelompok sasaran 3. Selain itu pada skema KPR Sarusuna Bersubsidi harga Rusunami dibatasi dengan batasan :

Tabel 5.17 Batasan Harga Rusunami

Kelompok Sasaran	Batas Harga Saruna Paling Banyak
I	144.000.000
II	110.000.000
III	75.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2007

Harga sesuai tabel merupakan batasan harga Rusunami sampai saat ini di Indonesia dan harga ini belum ada perubahan sampai saat ini. Dalam menentukan nilai subsidi selisih bunga sesuai tabel 4.3, nilai suku bunga yang berlaku antara Lembaga Penerbit Kredit (LPK) dan debitur adalah sesuai dengan Memorandum Kesepakatan (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara LPK dengan Kementrian Negara Perumahan Rakyat, nilai bunga sebelum potongan subsidi adalah BI-rate berjalan ditambah margin yaitu 4%. Subsidi selisih bunga dibayarkan pihak BLU Kementrian Negara Perumahan Rakyat kepada LPK per-tahun. Setiap tahun akan dilakukan rekonsiliasi kembali. Hal ini dilakukan untuk mengoreksi nilai asumsi (BI-rate + 4) dua belas bulan ke belakang yang telah dibayarkan, apabila terdapat kelebihan atau kekurangan bayar. Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan bayar akan dilakukan penyesuaian sesuai Bi-rate berjalan yang terjadi selama setahun masa subsidi.

Pada tahun pertama fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi memberikan juga bantuan uang muka bagi debitur yang lolos verifikasi, batasan uang muka yang diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.18 Batasan Bantuan Uang Muka Kepemilikan Rusunami

Kelompok Sasaran	Nilai Subsidi/ Rumah Tangga	
	Subsidi Selisih Bunga (Rp)	Bantuan Uang Muka Paling Banyak (Rp)
I	12.300.000	5.000.000
II	15.850.000	6.000.000
III	20.100.000	7.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008

Untuk dapat menggunakan fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi, debitur harus mengalami dua saringan verifikasi. Verifikasi ini mewajibkan calon debitur untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Maksimum penghasilan;
- b. Maksimum harga rusunami;
- c. Minimum uang muka;
- d. Maksimum kredit pinjaman;
- e. Surat keterangan penghasilan;
- f. Surat pernyataan belum memiliki rumah;
- g. Surat pernyataan tidak menjual rusun sebelum 5 tahun;
- h. Surat perjanjian kredit;
- i. Pernyataan pengenaan suku bunga subsidi sesuai tahun;
- j. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- k. Berita Acara Serah Terima (BAST);
- l. Akta Jual Beli (AJB);
- m. Surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi.

Informasi di atas merupakan informasi yang cenderung sama dari setiap pakar yang ada. Selanjutnya Data dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat memperlihatkan penyerapan fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi masih sangat rendah. Adapun rincian kondisi penyerapan fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi oleh masyarakat sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19 Kondisi Penyerapan KPR Saruna Bsrsubsidi oleh MBM dan MBR tahun 2007-2010

KETERANGAN DEBITUR	JUMLAH DEBITUR
Realisasi tahun 2009	62 unit
Realisasi tahun 2010	1838 unit
Belum realisasi	1558 unit
Total Penyerapan KPR Saruna Bsrsubsidi	3458 unit

Sumber : Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Kondisi ini dapat dikatakan rendah apabila dibandingkan dengan jumlah Rusunami yang telah serah terima kunci dari tahun 2007-2010 yang berjumlah 15.803 (data dari Kemenpera 2010) unit di seluruh Indonesia, apabila dibandingkan dengan jumlah total penyerapan KPR di atas, penyerapan hanya

21%, itupun apabila seluruh debitur yang belum mengalami realisasi pencairan dana subsidi dicairkan.

Sehubungan dengan kondisi di atas, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui Apa penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Hasil wawancara mengenai penyebab rendahnya penyerapan KPR Sarusuna Bersubsidi oleh masyarakat sasaran MBM dan MBR dari setiap pakar dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 5.20 Penyebab Rendahnya Jumlah Realisasi Kredit Subsidi Kepemilikan Rusunami oleh Masyarakat Sasaran MBM dan MBR di Perkotaan

No	Penyebab Rendahnya Penyerapan	P1	P3	P4
1	Tidak cocoknya nature proyek Rusunami dengan tujuan proyek yang ada.			√
2	Pemerintah belum memiliki kewenangan dalam mengatur batasan unit Rusunami yang dapat dijual dengan harga komersil.		√	√
3	Adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran.	√	√	√
4	Masih adanya komponen biaya tambahan yang sangat membebani masyarakat sasaran.		√	
5	<i>Housing Finance System</i> yang ada masih belum mantap/maksimal.	√	√	√
6	Kondisi perbankan yang ada saat ini masih belum efisien.			√
7	Penyerapan debitur melalui proses verifikasi yang dilakukan belum dapat mengimbangi jumlah Rusunami yang sudah serah kunci.		√	√
8	Uang muka yang masih tinggi	√		
9	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi tentang kebijakan yang ada antara instansi yang terlibat.		√	
10	Adanya persyaratan administratif yang sulit terpenuhi.	√	√	√
11	Masih rendahnya demand masyarakat sasaran yang ada terhadap Rusunami yang tersedia	√		√
12	Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya masyarakat untuk tinggal di rumah susun.	√	√	√
13	Budaya masyarakat yang terbiasa tinggal di <i>landed house</i> walaupun dipinggiran kota.	√	√	√

Sumber: Hasil Olahan

BAB 6

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan temuan dan pembahasan yang didapat dari hasil penelitian Analisa Penyerapan Rusunami Oleh Masyarakat Berpenghasilan Menengah kebawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perkotaan. Temuan yang didapat merupakan hasil pengumpulan dan analisa data pada bab sebelumnya. Selanjutnya temuan tersebut akan dilakukan pembahasan agar dapat diambil informasi yang dapat bermanfaat bagi para stakeholder yang terlibat yaitu, masyarakat sasaran, pemerintah, perbankan, dan pengembang.

6.2 Temuan

Dalam penelitian ini didapat beberapa temuan sehubungan Penyerapan Rusunami Oleh Masyarakat Berpenghasilan Menengah kebawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perkotaan sebagai berikut :

6.2.1 Progres Proyek Pembangunan Rusunami 2007-2010

Tercatat selama tahun 2007-2010 terdapat 31 pengembang dengan total rencana pembangunan Rusunami sebanyak 169 tower dengan jumlah 66.325 unit. Sampai akhir 2010, jumlah tower yang telah serah terima kunci adalah 42 tower dengan jumlah 15.803 unit Rusunami. Dengan demikian apabila jumlah 66.325 unit sebagai patokan, maka dapat dikatakan proyek rusunami sampai 2010 baru mencapai 24% di seluruh Indonesia.

6.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berhasil atau Tidaknya MBM dan MBR untuk Mendapatkan kredit Subsidi Kepemilikan Rusunami di Perkotaan

Dari hasil validasi para pakar yang terlibat langsung dengan proses berjalannya KPR sarasuna bersubsidi, dan analisa deskriptif teridentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya masyarakat sasaran dalam memperoleh KPR sarasuna bersubsidi antara lain sebagai berikut :

Tabel 6.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berhasil atau Tidaknya MBM dan MBR untuk Mendapatkan kredit Subsidi Kepemilikan Rusunami di Perkotaan

NO	VARIABEL	
1	X3	Usia penanggung kredit.
2	X7	Jumlah anggota keluarga (istri/suami plus anak) penanggung kredit.
3	X8	Pekerjaan penanggung kredit (formal atau informal).
4	X9	Tingkat penghasilan per bulan penanggung kredit.
5	X10	Status Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (bekerja atau tidak bekerja).
6	X11	Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (formal atau informal).
7	X12	Tingkat penghasilan per bulan Istri/Suami penanggung kredit.
8	X13	Persentase pengeluaran setiap bulan terhadap penghasilan perbulan.
9	X15	Harga Rusunami yang dibeli.
10	X16	Tipe rusunami yang dibeli (luas bangunan milik).
11	X17	Persentase Uang muka dibandingkan harga Rusunami yang dibeli.
12	X18	Lama masa cicilan kredit (<i>periods of redemption</i>).
13	X20	Persentase penghasilan per bulan untuk pembayaran pinjaman.
14	X21	Besarnya tingkat suku bunga pinjaman (<i>Mortgage rates</i>).
15	X22	Jenis suku bunga pinjaman (fixed atau lainnya).
16	X23	Persyaratan dokumen yang diperlukan.

Sumber : Hasil Olahan

6.2.3 Gambaran Masyarakat Sasaran yang Terserap KPR Sarusuna Bersubsidi

Dari data 1893 debitur yang didapat adapun temuan gambaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhasil terserap oleh fasilitas kredit subsidi kepemilikan Rusunami adalah sebagai berikut :

6.2.3.1 Harga Rusunami Vs Penghasilan Kelompok Sasaran

Temuan penyebaran harga rusunami yang telah dibagi berdasarkan kelompok sasaran dan harga Rusunami adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2 Kondisi Harga Rusunami yang Dibeli Setiap Golongan Masyarakat Sasaran

Kelompok sasaran 1 (penghasilan maksimal 4,5 juta rupiah, batas harga rusun maksimal 144 juta) berjumlah 1392 debitur dari 1893 debitur (74%)	
Harga \leq 75 juta	0 %
Harga 76 – 110 juta	2,9 %
Harga >110 juta	97,1 %
Kelompok sasaran 2 (penghasilan maksimal 3,5 juta rupiah, batas harga rusun maksimal 110 juta) berjumlah 423 debitur dari 1893 debitur (22%)	
Harga \leq 75 juta	0 %
Harga 76 – 110 juta	63,8 %
Harga >110 juta	36,2 %
Kelompok sasaran 3 (penghasilan maksimal 2.5 juta rupiah, batas harga rusun maksimal 75 juta) berjumlah 78 debitur dari 1893 debitur (4%)	
Harga \leq 75 juta	0 %
Harga 76 – 110 juta	44,9 %
Harga >110 juta	55.1 %

Sumber : Hasil Olahan

6.2.3.2 Kondisi %Cicilan ,Tenor dan Uang Muka KPR Sarasuna Bersubsidi Untuk Membeli Rusunami

Dengan kondisi tenor dan uang muka yang ada, dan dengan masa subsidi maksimal hanya 6 tahun walaupun terjadi pada kelompok sasaran 3 dan asumsi suku bunga 10%, dengan batasan kelayakan %cicilan perbulan adalah 30% penghasilan perbulan, dari analisa data didapat gambaran %cicilan setiap kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 6.3 Kondisi %Cicilan Setiap Kelompok Masyarakat Sasaran

% Cicilan/Penghasilan per-bulan KPR Kelompok sasaran 1 (1392 debitur)	
≤ 30%	24,4 %
31%-40%	72,5 %
41%-50%	2,7 %
>50%	0,4 %
% Cicilan/Penghasilan per-bulan Kelompok sasaran 2 (423 debitur)	
≤ 30%	31,4 %
31%-40%	56,1 %
41%-50%	11,8 %
>50%	0,7 %
% Cicilan/Penghasilan per-bulan Kelompok sasaran 3 (78 debitur)	
≤ 30%	1,3 %
31%-40%	33,3 %
41%-50%	11,6 %
>50%	53,8 %

Sumber : Hasil Olahan

Tenor KPR Sarasuna yang dapat diakses masyarakat sasaran paling lama adalah 15 tahun. Sedangkan uang muka yang dapat dijangkau mayoritas masyarakat sasaran adalah 10-20%. Secara lengkap temuan tentang tenor dan uang muka setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 6.4 Kondisi Tenor dan Uang Muka Setiap Kelompok Masyarakat Sasaran

Tenor KPR Sarasuna Bersubsidi		Uang Muka Sarasuna Bersubsidi	
Kelompok Sasaran 1 (1392 debitur)		Kelompok Sasaran 1 (1392 debitur)	
< 10 Tahun	5,2 %	< 10%	0 %
10 – 15 Tahun	92,2 %	10%-15%	39,8 %
16 – 20 Tahun	2,6 %	15%-20%	39 %
>20	0 %	>20%	21,2 %
Kelompok Sasaran 2 (423 debitur)		Kelompok Sasaran 2 (423 debitur)	
< 10 Tahun	6,9 %	< 10%	0 %
10 – 15 Tahun	86,7 %	10%-15%	55,1%
16 – 20 Tahun	6,4 %	15%-20%	22,4 %
>20	0 %	>20%	22.5 %
Kelompok Sasaran 3 (78 debitur)		Kelompok Sasaran 3 (78 debitur)	
< 10 Tahun	5,1 %	< 10%	0%
10 – 15 Tahun	89,8 %	10%-15%	35.9 %
16 – 20 Tahun	5,1 %	15%-20%	41 %
>20	0 %	>20%	23.1 %

Sumber : Hasil Olahan

6.2.3.3 Umur, Tingkat Pendidikan, Status Perkawinan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pekerjaan Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami

Temuan ini berdasarkan 336 debitur yang tersebar dari berbagai kelompok sasaran, adapun detail temuan sebagai berikut :

Tabel 6.5 Kondisi Umur, Tingkat Pendidikan, Status Perkawinan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pekerjaan Masyarakat Sasaran

Umur Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami	
Minimum	21 Tahun
rata-rata	33 Tahun
Tingkat Pendidikan Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami	
S1 keatas	65%
D3 kebawah	35 %
Status Perkawinan Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami	
Menikah	49,6 %
Lajang	50,4 %
Jumlah Anggota Keluarga Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami	
Status menikah dominan	3 Orang
Status menikah maksimum	6 Orang
Pekerjaan Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami	
Pegawai Swasta	86 %
Pegawai Negeri Sipil	12 %
BUMN	1 %
Wiraswasta	< 1%
TNI/POLRI	< 1%

Sumber : Hasil Olahan

6.2.4 Penyerapan KPR Sarusuna Bersubsidi

KPR sarusuna bersubsidi merupakan fasilitas pemilikan rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Fasilitas ini berjalan mulai tahun 2007-2011. Saat ini fasilitas pemilikan Rusunami yang sedang baru berjalan adalah fasilitas pemilikan rusunami dengan menggunakan KPR sejahtera susun dengan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun program FLLP sampai saat ini masih baru berjalan, dan fasilitas KPR sarusuna bersubsidi masih dijalankan hingga akhir 2011.

Tabel 6.6 Kondisi Penyerapan KPR Saruna Bsrsubsidi oleh MBM dan MBR Tahun 2007-2010

Keterangan Debitur	Jumlah Debitur
Realisasi tahun 2009	62 unit
Realisasi tahun 2010	1.838 unit
Belum realisasi	1.558 unit
Total Penyerapan KPR Saruna Bsrsubsidi	3.458 unit

Sumber : Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Dari 3.458 debitur masih terdapat 1.558 debitur yang belum mengalami realisasi dana subsidi bantuan uang muka dan selisih bunga akibat masih melengkapai persyaratan dokumen administratif yang ada. Kondisi penyerapan ini dapat dikatakan rendah apabila dibandingkan dengan jumlah Rusunami yang telah serah terima kunci dari tahun 2007- November2010 yang berjumlah 15.803 (Kemenpera 2010) unit di seluruh Indonesia, apabila dibandingkan dengan jumlah total penyerapan KPR di atas, penyerapan hanya 21%, itupun apabila seluruh debitur yang belum mengalami realisasi pencairan dana subsidi dicairkan.

6.3 Pembahasan

6.3.1 Progres Proyek Pembangunan Rusunami 2007-2010

Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) adalah suatu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di perkotaan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni

Universitas Indonesia

dengan harga yang terjangkau. Namun dalam pelaksanaannya dari temuan didapat mulai dari 2007-2010 progres proyek ini hanya 24%. Dari temuan yang ada, proyek ini sangat tergantung dari peran swasta sebagai pelaku utama. Hal ini sebenarnya kurang cocok, karena proyek Rusunami memiliki target pasar masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dan rendah. Dari segi komersil proyek ini tentu tidak menarik bagi sektor swasta yang mengutamakan profit. Kondisi yang ada terlihat bahwasnya pemerintah masih belum turun tangan langsung dan hanya sebatas memfasilitasi dengan berbagai kemudahan yang masih belum berjalan maksimal serta pemerintah tidak menjamin apabila masyarakat sasaran tidak mampu membeli hasil produk Rusunami yang telah terbangun. Selain itu pada proyek ini terlihat adanya kondisi lahan yang semakin mahal di daerah perkotaan dan cenderung dikuasai pihak swasta yang berakibat naiknya harga jadi satuan Rusunami di pasaran. Semua kondisi tersebut apabila tidak diperbaiki tentu saja akan berdampak pada progress proyek Rusunami itu sendiri saat ini maupun masa yang akan datang. Sebagai pembanding tentang pemerintah harus turun tangan langsung adalah di Singapura dan China.

Menurut Phang (2001) di Singapura kebijakan tentang kelayakan dan keterjangkauan tempat tinggal merupakan hal yang sangat menjadi perhatian dari pemerintah. Pemerintah mendominasi pemenuhan perumahan di Singapura dengan ketentuan hak pakai selama 99 tahun terhadap suatu rumah tangga yang menggunakan tanah negara. Pada tahun 1997 dari 920.000 unit perumahan 82% dibangun oleh developer pemerintah. Pemerintah membangun flat sebagai tempat tinggal dengan kebijakan 10% dari flat yang dibangun dijadikan tempat tinggal dengan system sewa. Dominasi pemerintah dalam pasar perumahan dapat terjadi akibat kebijakan tentang tanah yang ada di Singapura. Pada tahun 2001 pemerintah menguasai tanah seluas 80% dari luas total Singapura yang meningkat dibandingkan pada tahun 1960 yang hanya 40%. Tingkat kepemilikan rumah meningkat dari 29% pada tahun 1970 menjadi 90% pada tahun 2001. Harga flat-flat di Singapura yang dibangun oleh HDB (developer milik pemerintah) beraneka ragam tergantung lokasi dan jenis disain bangunan. Harga yang menjadi acuan jenis flat yang banyak dibangun adalah harga yang sesuai dengan rata-rata tingkat penghasilan masyarakat dengan target 90% masyarakat dapat membeli flat-flat

tersebut. Perkembangan aset perumahan sektor swasta umumnya dipusatkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan kelompok yang mampu di Singapura. Dengan berjalannya waktu, suplai lahan yang dimiliki swasta meningkat, hal ini disebabkan permintaan yang meningkat dari tempat tinggal komunitas dengan penghasilan yang lebih baik akibat meningkatnya penghasilan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Hao (2009), di Cina khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan bekerja pada sektor non-formal pemerintah melakukan program pengadaan perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sebutan rumah murah mengacu pada target pembeli yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang disubsidi. Konsep ini pertama dilakukan pada tahun 1994. Sasaran yang dapat membeli rumah jenis ini harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu : merupakan warga negara Cina, berpenghasilan rendah, dan sulit mendapatkan perumahan. Harga rumah tersebut 20-30% lebih murah daripada perumahan sejenis di lokasi yang sama

6.3.2 Gambaran Masyarakat Sasaran yang Terserap KPR Sarusuna Bersubsidi

6.3.2.1 Harga Rusunami Vs Penghasilan Kelompok Sasaran

Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 batas harga Sarusuna paling banyak setiap kelompok sasaran adalah :

Tabel 6.7 Batasan Harga Rusunami Setiap Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak
Kelompok sasaran 1	144 Juta rupiah
Kelompok sasaran 2	110 Juta rupiah
Kelompok sasaran 3	75 Juta rupiah

Sumber : Hasil Olahan

Dalam prakteknya ternyata harga Sarusuna berkisar antara 89 juta – 144 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan kelompok sasaran 3 sulit untuk membeli Rusunami yang ada akibat batas harga paling banyak sudah tidak bisa didapat di pasaran, sehingga kelompok sasaran ini terpaksa membeli Rusunami di atas harga sarusuna batasan untuk kelompoknya. Dari 17 type dan 1893 debitur Rusunami yang ada, harga pasar Rusunami/m² rata-rata adalah Rp 4.290.000,-, sedangkan

kemampuan harga skim KPR Sarusuna Bersubsidi yang ada dari ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 untuk kelompok sasaran 3 harga Rusunami/m² adalah sekitar Rp 3.571.000,-(harga saat ini kenaikan 20%), untuk sasaran 1 harga Rusunami/m² adalah Rp 4.000.000,- ,-(harga saat ini kenaikan 7%), dan untuk sasaran 2 harga Rusunami/m² adalah Rp 3.786.000,- (harga saat ini kenaikan 13%). Selain itu dari pola median dan rata-rata harga Rusunami yang didapat dari analisa, memperlihatkan secara logis harga sarusuna semakin meningkat seiring dengan peningkatan type rusun. Harga 144 juta sudah sangat dominan mulai type 33. Dengan semakin naiknya harga terbawah rusunami dan harga teratas adalah tetap maka Rusunami yang ada saat ini dengan fasilitas KPR Sarauna Bersubsidi yang diprogramkan pemerintah hanya dinikmati oleh masyarakat kelompok sasaran 1, dengan batasan penghasilan 3,5-4,5 juta rupiah.

Apabila dilakukan analisa lebih lanjut mengenai Harga Pasar (HP) Rusunami yang didapat dari 1893 debitur yang ada saat ini yaitu Rp 4.290.000,- per meter persegi dan dikaitkan dengan kondisi yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, dimana luas tanah untuk bangunan terhadap luas tanah bersama seluas-luasnya 50% (besaran KDB), luas tanah untuk prasarana lingkungan (jalan setapak, jalan kendaraan, tempat parkir, dll) seluas 20% dari luas tanah bersama, luas tanah untuk fasilitas lingkungan (fasilitas perniagaan, perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, fasilitas pemerintah dan pelayanan umum, pertamanan, dll) seluas 30% dari luas tanah bersama, fasilitas lingkungan yang ditempatkan pada bangunan rusun sebesar-besarnya dengan luas 30% dari jumlah luas lantai bangunan rusun dan tidak lebih dari 3 lantai. serta KLB maksimum yang digunakan adalah 6,0 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan, maka untuk luas tanah 30000 m² jumlah lantai yang dapat dibangun adalah 12 lantai. Sedangkan apabila KLB maksimum yang digunakan adalah 4 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana,

maka untuk luas tanah 30000 m² jumlah lantai yang dapat dibangun adalah hanya 8 lantai.

Dari keadaan diatas maka dapat ditentukan berapa sebenarnya gambaran Harga Tanah Maksimum (HTM) yang harus didapat oleh developer di perkotaan. Apabila diketahui Biaya Konstruksi (BK) saat ini adalah 2,7 juta rupiah per meter persegi bangunan, dengan asumsi biaya-biaya lain sebagai berikut :

- Keuntungan : 20% dari HP
- Biaya perizinan : 3% dari HP
- Biaya pemasaran : 3% dari HP
- Biaya perencanaan : 2,5% dari BK
- Biaya pengawasan : 2% dari BK
- Biaya overhead : 2% dari BK

Maka nilai Harga Tanah Maksimum (HTM) dapat dihitung dengan rumus :

$$HTM = (HP - HPP) \times (Lt) \times (KDB) \times (KB) \quad (6.1)$$

Keterangan :

HPP : total biaya yang ada di tambah besaran keuntungan yang diharapkan

Lt : Jumlah Lantai Rusunami

KB : koefisien bangunan, sesuai peraturan di atas adalah 0,7

KDB : koefisien dasar bangunan, sesuai peraturan di atas adalah 0,5

Dengan nilai HP adalah Rp 4.290.000,- per meter persegi, maka dengan nilai KLB adalah 6 maka di dapat nilai HTM adalah sekitar 1,3 juta rupiah per meter persegi. Selanjutnya Dengan nilai HP adalah Rp 4.290.000,- per meter persegi, maka dengan nilai KLB adalah 4 maka di dapat nilai HTM adalah sekitar 0,8 juta rupiah per meter persegi.

Nilai-nilai HTM tersebut sangat sulit untuk didapatkan di daerah perkotaan saat ini. Sebagai akibatnya maka developer hanya akan membangun Rusunami di daerah pinggiran kota, namun keterbatasan infrastruktur pendukung akan menurunkan minat masyarakat sasaran untuk membelinya di tengah keadaan untuk tinggal di rumah susun pada masyarakat sasaran masih belum membudaya.

6.3.2.2 Kondisi %Cicilan ,Tenor dan Uang Muka KPR Sarasuna Bersubsidi Untuk Membeli Rusunami

Dari temuan yang didapat terlihat jelas bahwasanya %cicilan KPR Sarasuna di Indonesia masih tinggi. Menurut *Australian Housing and Urban Research Institute* (2005), suatu keluarga dikatakan mengalami *Housing Affordability Problem*, apabila biaya yang dikeluarkan untuk memiliki suatu tempat tinggal melebihi 30% penghasilan perbulan, selanjutnya menurut Dolbeare (2000), suatu keluarga dikatakan mengalami *Moderate Housing Affordability Problem* apabila biaya yang dikeluarkan untuk memiliki suatu tempat tinggal antara 30%-50% dan mengalami *Severe Housing Affordability Problem* apabila biaya yang dikeluarkan untuk memiliki suatu tempat tinggal >50% penghasilan perbulan.. Dari temuan yang didapat kelompok sasaran 1 dan 2 mayoritas masih mengalami *Moderate Housing Affordability Problem*, namun untuk masyarakat sasaran 3 sudah berada pada tahap *Severe Housing Affordability Problem*.

Selanjutnya suatu skema pemilikan tempat tinggal di dalam berbagai literatur sering disebut sebagai *Housing Finance System*. Semakin baik *Housing Finance System* suatu negara maka akan semakin terjangkau harga tempat tinggal yang tersedia oleh masyarakatnya. Untuk Indonesia saat ini *Housing Finance System* yang ada masih belum maksimal. Walaupun besaran uang muka yang ditawarkan hanya 12,5%, dimana rata-rata di negara dengan *Housing Finance System* yang baik antara 10-20% namun tenor yang ada masih cenderung pendek antara 10-15 tahun, sedangkan di China dan Malaysia menurut *Warnock (2008)* dapat mencapai 20-30 tahun. selain itu suku bunga pasar khusus KPR Sarasuna Bersubsidi masih tinggi, yaitu sesuai ketentuan BI-rate + 4 (Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomer 13 Tahun 2010) dengan nilai cenderung diatas 10%, sedangkan di China dan Malaysia hanya 5,5-7,5% (*Word Bank (2006)*). Hal ini tentu saja menjadikan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin sulit mendapatkan tempat tinggal di perkotaan seiring harga tempat tinggal yang terus meningkat.

6.3.2.3 Umur, Tingkat Pendidikan, Status Perkawinan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pekerjaan Masyarakat Sasaran yang Membeli Rusunami

Dari temuan yang didapat umur masyarakat sasaran rata-rata 33 tahun. Hal ini sangat masuk akal mengingat tenor yang ada hanya 15 tahun, sebenarnya masih mampu hingga tenor 20 tahun. Penyebaran Jumlah anggota keluarga yang ada sesuai analisa dan rata-rata adalah 3 orang, hal ini masuk akal karena paling banyak kamar yang tersedia dalam suatu unit Rusunami adalah 2 kamar. Tingkat pendidikan dan status perkawinan merupakan bukan hal yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya masyarakat sasaran memperoleh KPR Sarusuna Bersubsidi sesuai dengan validasi pakar, dan tidak ada perbedaan yang berarti pada tiap masyarakat sasaran. Dari sisi pekerjaan terlihat jelas masyarakat yang membeli Rusunami mayoritas adalah seorang pegawai yang memiliki penghasilan tetap, namun yang menarik adalah kondisi ini didominasi oleh pegawai swasta, hal ini diperlukan penelitian lain untuk mengetahui apa penyebab sebenarnya.

6.3.3 Penyerapan KPR Sarusuna Bersubsidi

Temuan penyerapan Rusunami yang rendah yaitu hanya 21% oleh masyarakat sasaran dari jumlah unit yang telah melakukan serah terima hingga akhir 2010, mengindikasikan bahwasanya program proyek Rusunami yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya dengan sasaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan belum berhasil. Selain itu Pemerintah belum memiliki kewenangan dalam mengatur batasan unit Rusunami yang dapat dijual dengan harga komersil. Oleh karena itu pemerintah tidak dapat mengatur lebih dalam selain menghimbau pengembang yang sifat dasarnya merupakan industri perumahan.

Selanjutnya adanya kenaikan harga terbawah rusunami dan harga teratas adalah tetap maka Rusunami yang ada saat ini dengan fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi yang diprogramkan pemerintah hanya dinikmati oleh masyarakat kelompok sasaran 1, dengan batasan penghasilan 3,5-4,5 juta rupiah. Padahal masyarakat dengan maksimal 2,5 juta rupiah sangat dominan di perkotaan, sehingga akibat kondisi ini banyak masyarakat yang tidak mampu membeli

Rusunami yang ada di pasaran. Harga Rusunami juga tidak terlepas dari harga lahan yang semakin melonjak dan tidak terkendali di perkotaan, diperlukan partisipasi pemerintah daerah untuk menyediakan lahan gratis bagi pembangunan Rusunami dan kebijakan pemerintah pusat untuk segera menerapkan sistem *land banking* baik secara kelembagaan maupun sektoral sehingga harga pasar tanah dapat terkendali, spekulasi tanah dapat diminimalisasi, kejelasan status lahan dapat terjamin, dan penggunaan tanah yang seimbang baik untuk sosial atau komersil di perkotaan dapat dicapai. Selain itu masih adanya komponen biaya tambahan yang sangat membebani masyarakat sasaran khususnya MBR apabila membeli Rusunami, antara lain :

- a. Biaya Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan notaris yang sangat masih sangat tinggi.
- b. Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Satuan Rumah Susun.
- c. Biaya Pendaftaran (Balik Nama) sertifikat hak milik atas Satuan Rumah Susun ke atas nama Pihak kedua.
- d. Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- e. Biaya Pengurusan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Bank.
- f. Biaya pemeliharaan.
- g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- h. Biaya menghadap view bagi beberapa unit di masing-masing tower.
- i. Biaya kemahalan, dll.

Biaya-biaya ini jumlahnya bervariasi namun sangat memberatkan masyarakat sasaran.

Hal lain yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan adalah kondisi *Housing Finance System* yang ada saat ini masih belum mantap/maksimal dan kondisi perbankan yang ada saat ini masih belum efisien. Walaupun besaran uang muka yang ditawarkan hanya 12,5% namun masih terasa berat bagi masyarakat sasaran MBM dan MBR, selain itu tenor yang dapat diakses cenderung pendek antara 10-15 tahun, dan suku bunga pasar khusus KPR Sarusuna Bersubsidi masih tinggi, yaitu sesuai ketentuan BI-rate + 4 (Lampiran 3, Peraturan

Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomer 13 Tahun 2010) dengan nilai cenderung diatas 10%. Hal lain yang harus difikirkan adalah apakah perbankan yang ada saat ini sudah efisien. Apabila perbankan efisien, maka biaya operasionalnya tentu akan kecil dan margin yang diteruskan kepada masyarakat juga dapat semakin rendah. Semua hal ini terjadi akibat masih belum adanya sumber dana dari masyarakat dengan bunga rendah, seharusnya tersedia sumber-sumber dana murah untuk pembiayaan jangka panjang baik dari dana pemerintah maupun sumber dana lainnya yang didukung oleh kebijakan khusus pemerintah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi MBM dan MBR. Sebagai contoh sumber dana yang dapat digunakan adalah dana pensiun dan jamsostek.

Hal lain yang dapat menjadi penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan antara lain Masih kurangnya demand masyarakat sasaran dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya masyarakat untuk tinggal di rumah susun karena adanya multiplayer efek yang memberikan manfaat terhadap masyarakat sasaran itu sendiri. Selain itu budaya masyarakat kita saat ini, dimana tinggal di rumah susun masih belum memasyarakat dikarenakan masyarakat sudah terbiasa tinggal di *landed house* walaupun dipinggiran kota. Selanjutnya dari sisi suplay, hal ini berhubungan dengan skala ekonomis, dan biaya yang dikeluarkan, belum adanya jaminan kepastian demand mengakibatkan suplay akan menunggu kepastian tersebut. Hal ini terkait dengan *nature* Rusunami yang di dominasi sektor swasta sehingga merupakan industri perumahan yang tidak bisa berhenti apabila telah berjalan.

Hal lain yang dapat menjadi penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan adalah adanya persyaratan administratif yang sulit terpenuhi, persyaratan tersebut adalah dokumen format A3 yang harus ditanda tangani kepala kantor cabang pajak setempat dan debitur. Dokumen ini berisikan keterangan bahwasanya NPWP orang yang bersangkutan adalah benar, dan penghasilan orang yang bersangkutan tidak melebihi 4,5 juta. Hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi

dan sosialisasi sampai level kepala cabang, sehingga banyak kantor pajak yang tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut. Selain itu data yang datang dari pihak LPK sering tidak lengkap (NPWP, BAST, dan SPT) sehingga walaupun hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap calon debitur pada umumnya sudah tepat sasaran, namun penyerapan debitur melalui proses verifikasi yang dilakukan belum dapat mengimbangi jumlah Rusunami yang sudah serah kunci di lapangan.

6.3.4 Manfaat Temuan Penelitian Bagi Para Stakeholder

6.3.4.1 Masyarakat Sasaran

Sebagai salah satu stakeholder dalam proyek Rusunami, masyarakat sasaran (MBM dan MBR) memiliki ekspektasi dapat memiliki tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau dengan lokasi yang dekat dengan tempat kerja di perkotaan. Temuan penelitian ini bagi masyarakat sasaran dapat menjadi acuan kondisi harga Rusunami yang ada di pasaran. Selain itu dapat pula sebagai acuan kondisi tenor, uang muka, dan tingkat suku bunga yang harus dipenuhi untuk membeli Rusunami dalam mengikuti skema KPR pemilikan Sarusuna yang tersedia melalui Lembaga Penyedia Kredit (LPK) yang ada.

6.3.4.2 Pihak Perbankan/ *Lender*

Sebagai salah satu stakeholder dalam proyek Rusunami, pihak perbankan/*lender* mengharapkan keuntungan yang dapat menutupi biaya operasional dan mencukupi kebutuhan pengeluaran untuk pertumbuhan investasi di sektor perumahan. Bagi pihak perbankan/*lender*, temuan analisa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengambil kebijakan mengenai tenor, uang muka, dan tingkat suku bunga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sasaran khususnya masyarakat sasaran yang tergolong MBR.

6.3.4.3 Pengembang

Pihak pengembang memiliki ekspektasi memperoleh keuntungan yang wajar dengan pertimbangan skala ekonomis yang terukur. Temuan analisa penelitian ini dapat memberikan gambaran harga Rusunami yang ada di pasaran

dan karakteristik masyarakat pembeli Rusunami yang pembiayaannya dapat difasilitasi oleh pihak perbankan.

6.3.4.4 Pemerintah

Sebagai regulator, pemerintah memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pemerintah harus dapat mengatasi *backlog* perumahan yang ada dengan membuat kebijakan yang tepat dan dapat mengayomi kepentingan seluruh masyarakat termasuk MBM dan MBR di perkotaan. Bagi pemerintah, hasil temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kemampuan perbankan, harga sarana yang ada di pasaran, dan kondisi penyerapan KPR Sarana Bersubsidi oleh masyarakat sasaran. Harga Rusunami yang terus meningkat dibandingkan kemampuan skema skim yang ada harus diatasi dengan berbagai kebijakan yang tidak hanya langsung mengarah kepada pembuatan *Housing Finance System* yang lebih baik, tetapi juga kebijakan pendukung mengenai lahan yang harganya terus meningkat di perkotaan. Pemerintah harus melakukan penguasaan lahan dengan perencanaan tata ruang yang matang terlebih dahulu dan melakukan pembangunan infrastruktur pendukung sebelum pihak pengembang melakukan pembangunan. Hal ini akan dapat menjaga harga akhir Rusunami yang akan dihasilkan oleh pihak pengembang. Selain itu dengan adanya infrastruktur pendukung berupa sarana transportasi, listrik, air dan hal lainnya sesuai ketentuan yang ada, maka produk Rusunami yang dihasilkan akan dapat lebih menarik keinginan masyarakat sasaran untuk membelinya di tengah budaya tinggal di *landed house* yang masih tinggi pada masyarakat Indonesia yang ada di perkotaan.

6.3.5 Kaitan Hasil Penelitian dengan Manajemen Proyek

Rusunami merupakan proyek pemerintah yang awalnya dicanangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional untuk tahun 2004-2009. Proyek ini sangat penting untuk menyeimbangkan penggunaan lahan di perkotaan antara penggunaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman khususnya bagi MBM dan MBR, terhadap penggunaan lahan untuk pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan serta pelayanan

sosial dan kegiatan ekonomi di perkotaan. Diperlukan pendekatan manajemen proyek agar proyek ini berhasil mencapai tujuan secara menyeluruh.

Dari hasil penelitian terlihat bahwasanya proyek ini belum berhasil mencapai tujuan dasarnya yaitu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dengan harga yang terjangkau khususnya MBR di perkotaan. Perlu dilakukan pembahasan mengenai *Project Scope Management* kembali dalam proyek ini. Hal ini diperlukan untuk menentukan *Product Scope* dan *Project Scope* sehingga tujuan proyek dapat tercapai [73]. *Product Scope* adalah bentuk dan fungsi yang menggambarkan hasil produk, dan *Project Scope* adalah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam suatu proyek sehingga hasil produk dihasilkan sesuai dengan fungsinya [74]. Pendekatan ini sangat perlu dianalisa kembali untuk menyesuaikan antara fungsi proyek Rusunami yang bersifat sosial dengan proses pelaksanaan proyek ini di lapangan.

Selain itu diperlukan penyempurnaan *Project Communication Management* dalam pelaksanaan proyek ini ke depan. Kegiatan tersebut akan memberikan gambaran keseluruhan mengenai informasi yang penting mengenai kepentingan, keterlibatan dan pengaruh setiap orang atau organisasi yang ada terhadap suksesnya proyek secara keseluruhan [75]. Kondisi tersebut akan dilanjutkan dengan perencanaan komunikasi yang diperlukan untuk memastikan seluruh ekspektasi setiap stakeholder dapat dicapai. Dalam proyek Rusunami komunikasi antar institusi yang terlibat harus dapat disempurnakan. Peran dan fungsi setiap kementerian yang ada dan pemerintah daerah harus dijalankan saling mengisi dan sejalan sehingga proyek ini dapat berjalan secara baik secara keseluruhan.

Hal lain yang diperlukan adalah penyempurnaan *Project Financing* dalam pelaksanaan proyek ini ke depan. Hal ini sangat terkait dengan penyempurnaan *Housing Finance System* yang ada. Pemerintah harus dapat membentuk sumber-sumber dana murah untuk pembiayaan jangka panjang baik dari dana pemerintah maupun sumber dana lainnya yang didukung oleh kebijakan khusus pemerintah untuk membantu pembiayaan pembangunan dan pemilikan perumahan bagi MBM dan MBR. Sebagai contoh sumber dana yang dapat digunakan adalah dana pensiun, jamsostek, dan membentuk instrumen tabungan perumahan nasional

melalui undang-undang tersendiri dimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

6.4 Pembuktian Hipotesa Penelitian

Sesuai hasil temuan dan analisa data secara statistik deskriptif yang menggambarkan masyarakat sasaran yang terserap KPR Sarasuna Bersubsidi sebagai bahan pertanyaan wawancara terstruktur, dan hasil wawancara terstruktur oleh para pakar dimana dari tiga pakar yang ada menjawab setuju seluruhnya sesuai keterangan Tabel 5.20, maka hipotesa penelitian ini terbukti bahwa :

“Rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran MBM dan MBR di perkotaan saat ini diakibatkan oleh *Housing Finance System* yang belum maksimal”. Kondisi belum maksimal tersebut antarlain :

- a. Dari gambaran masyarakat sasaran yang terserap terlihat KPR Sarasuna Bersubsidi hanya dinikmati oleh kelompok sasaran 1 dengan penghasilan antara 3,5-4,5 juta rupiah.
- b. Kecepatan verifikasi yang tidak dapat mengimbangi jumlah Rusunami yang siap huni di pasaran.
- c. Harga Rusunami khususnya untuk masyarakat sasaran MBR sesuai Skim KPR Sarasuna Bersubsidi sudah tidak ada lagi di pasaran.
- d. Suku bunga pasar yang masih tinggi di atas 10%, dengan masa subsidi hanya 4-8 tahun.
- e. Tidak tersedianya dana jangka panjang dengan bunga murah, sehingga tenor KPR maksimal hanya 15 tahun.
- f. Uang muka yang masih tinggi, khususnya bagi MBR sehingga harus mencicil sampai 6 bulan.
- g. Kurangnya koordinasi antara institusi terkait sehingga menyebabkan adanya persyaratan administratif yang sulit untuk dipenuhi.
- h. Masih adanya biaya-biaya tambahan lainnya yang memberatkan masyarakat sasaran khususnya MBR.

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada maka dapat diambil tiga kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat sasaran (MBM dan MBR) mendapatkan kredit Subsidi Kepemilikan Rusunami di perkotaan adalah :
 - a) Karakteristik masyarakat terbagi menjadi :
 - (a) Usia
 - (b) Jumlah anggota keluarga
 - (c) Total penghasilan
 - (d) Pekerjaan
 - b) Karakteristik Rusunami terbagi menjadi :
 - (a) Harga Rusunami
 - (b) Tipe Rusunami
 - c) Bentuk kredit yang tersedia terbagi menjadi :
 - (a) Persyaratan dokumen
 - (b) Uang muka
 - (c) Tingkat suku bunga
 - (d) Tenor KPR
 - (e) Jenis suku bunga (tetap atau mengambang)
- b. Gambaran masyarakat sasaran (MBM dan MBR) yang terserap KPR Sarusuna Bersubsidi sebagai berikut :
 - a) Masyarakat dengan penghasilan antara 3,5 juta – 4,5 juta rupiah saja yang dominan terserap oleh KPR Sarusuna Bersubsidi (74%).
 - b) Masyarakat sasaran yang tergolong mengalami *Moderate Housing Affordability Problem* adalah 72,3% dan tergolong *Savere Housing Affordability Problem* adalah 2,2%. sehingga total masyarakat sasaran yang tergolong mengalami *Housing Affordability Problem* adalah 74,5%.

- c) MBM dan MBR membeli Rusunami pada kisaran harga 89 juta rupiah hingga harga 144 juta rupiah. Harga 144 juta rupiah sudah dominan mulai type 33.
 - d) Dari 17 type dan 1893 debitur Rusunami yang ada, masyarakat sasaran membeli Rusunami dengan harga pasar Rusunami/m² rata-rata adalah Rp 4.290.000,-.
 - e) Dengan asumsi suku bunga fixed 10% per tahun, dominan masyarakat sasaran memiliki porsi cicilan penghasilan untuk KPR antara 31% - 40%.
 - f) Kebanyakan masyarakat sasaran membayar uang muka antara 10%-20%.
 - g) Kebanyakan masyarakat sasaran mengakses tenor KPR hanya 10-15 tahun.
 - h) Usia masyarakat sasaran minimum 21 tahun dan rata-rata 33 tahun.
 - i) Pekerjaan masyarakat sasaran yang membeli Rusunami bekerja di sektor formal (pegawai swasta & pegawai negeri) adalah lebih dari 99%.
 - j) Tingkat pendidikan masyarakat sasaran dominan adalah minimal S1 (65%).
 - k) Kondisi status pernikahan masyarakat sasaran yang menikah dan lajang adalah seimbang 51% : 49%. Dari masyarakat yang menikah, dominan jumlah anggota keluarga adalah 3 orang.
- a. Penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh MBM dan MBR di perkotaan sebagai berikut :
- a) Tidak cocoknya *nature* proyek Rusunami yang ada (motif profit) dengan tujuan proyek yang ada (motif sosial).
 - b) Pemerintah belum memiliki kewenangan mengatur batasan unit Rusunami yang dapat dijual dengan harga komersil.
 - c) Kurangnya koordinasi dan sosialisasi mengenai kebijakan yang ada antara instansi yang terlibat.
 - d) Penyerapan debitur melalui proses verifikasi yang dilakukan belum dapat mengimbangi jumlah Rusunami yang sudah serah kunci.
 - e) Adanya persyaratan administratif yang sulit terpenuhi.
 - f) Masih rendahnya *demand* masyarakat sasaran yang ada terhadap Rusunami yang tersedia.

- g) Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya masyarakat untuk tinggal di rumah susun.
- h) Budaya masyarakat yang terbiasa tinggal di *landed house* walaupun dipinggiran kota.
- i) Adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran.
- j) Masih adanya komponen biaya tambahan yang sangat membebani masyarakat sasaran.
- k) *Housing Finance System* yang ada masih belum mantap/maksimal.
- l) Kondisi perbankan yang ada saat ini masih belum efisien.
- m) Uang muka yang masih tinggi.

Adapun Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh MBM dan MBR di perkotaan (poin a-h) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya masyarakat untuk tinggal di rumah susun karena adanya multiplier efek yang memberikan manfaat terhadap masyarakat sasaran itu sendiri.
- b. Pemerintah harus mencari cara agar BUMN dan BUMD yang ada dapat menjadi pemain yang dominan dalam menyediakan Rusunami khusus bagi masyarakat sasaran MBM dan MBR.
- c. Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan yang ada sampai ke level terbawah untuk memastikan kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan cepat dan tepat.

Adapun Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh MBM dan MBR di perkotaan (poin i dan j) adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah harus melakukan penguasaan lahan dengan perencanaan tata ruang yang matang terlebih dahulu dan melakukan pembangunan infrastruktur pendukung sebelum pihak pengembang melakukan pembangunan. Selain itu diperlukan partisipasi pemerintah daerah untuk menyediakan lahan bagi pembangunan Rusunami dan kebijakan pemerintah pusat untuk segera menerapkan sistem *land banking* sehingga harga pasar tanah dapat terkendali, spekulasi tanah dapat diminimalisasi, kejelasan status lahan dapat terjamin,

dan penggunaan tanah yang seimbang baik untuk sosial atau komersil di perkotaan dapat dicapai.

- b. Selain pembuatan skim pembiayaan perumahan yang lebih maksimal, untuk mengatasi permasalahan dalam jangka pendek, pemerintah harus menyiapkan dana tambahan khususnya bagi masyarakat yang tergolong MBR berupa *Public service Obligation* (PSO) untuk mengatasi kenaikan faktor-faktor harga yang ada.
- c. Pemerintah harus membuat kebijakan tambahan khususnya bagi masyarakat yang tergolong MBR berupa penghapusan biaya tambahan untuk mendukung usaha sosialisasi pentingnya tinggal di rumah susun dan usaha lebih membudayakan tinggal di rumah susun pada masyarakat sasaran di perkotaan.

Adapun Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh MBM dan MBR di perkotaan (poin k - m) adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan sumber-sumber dana murah untuk pembiayaan jangka panjang baik dari dana pemerintah maupun sumber dana lainnya yang didukung oleh kebijakan khusus pemerintah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi MBM dan MBR. Sebagai contoh sumber dana yang dapat digunakan adalah dana pensiun dan jamsostek.
- b. Pihak perbankan harus meningkatkan efisiensi sehingga margin yang diteruskan ke masyarakat sasaran khususnya MBR dapat lebih kecil.
- c. Pemerintah harus membentuk instrumen tabungan perumahan nasional yang dibentuk melalui undang-undang tersendiri dimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- d. Pembentukan BUMN khusus sebagai pengelola dana jangka panjang untuk perumahan.

7.2 SARAN

Dalam penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai skim baru bagi masyarakat sasaran MBM dan MBR yang diprogramkan pemerintah. Kebijakan baru ini dikenal dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan demikian dapat menjadi masukan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan MBM dan MBR memiliki tempat tinggal yang layak di perkotaan.
- b. Dalam hubungan antara harga Rusunami untuk masyarakat MBR terhadap harga pasar Rusunami yang terus meningkat, diperlukan penelitian lanjutan mengenai kajian penyusunan tata ruang untuk Rusunami dengan penentuan zona tanah yang memiliki harga yang fisibel sesuai dengan *demand* harga dari pihak developer.

DAFTAR ACUAN

- [1] Sugandhy, Aca. (2005). *Peran masyarakat dalam pembangunan perumahan*. Jakarta: Urban and Regional Development Institute.
- [2] Rencana Strategis Kemenpera 2010-2014. January 10, 2010.
- [3] Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014.
- [4] Rencana Strategis Kemenpera 2010-2014. January 10, 2010.
- [5] 1000 tower, 1001 masalah (2010, Maret 15). *TEMPOonline*. <http://majalah.tempointeraktif.Com/id/arsip/2010/03/15/LK/mbm.20100315.Lk132999.id.html>
- [6] Waluyo J., Yusuf. (2010, September 09). Kemenpera-BTN sepakat jalankan fasilitas likuiditas. *Bisnis Indonesia*. <http://bataviase.co.id/node/376589>.
- [7] Waluyo J., Yusuf. (2010, September 09). Kemenpera-BTN sepakat jalankan fasilitas likuiditas. *Bisnis Indonesia*. <http://bataviase.co.id/node/376589>.
- [8] Dewi S., Aisah. (2010, October 15). Personal interview.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- [11] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
- [12] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.
- [13] Melangkah di atas kerikil tajam. (Agust 20, 2008). *Indonesianestate.com*. <http://www.realestatindonesia.org/article/detail.aspx?aid=3>
- [14] Rencana Strategis Kemenpera 2010-2014. January 10, 2010.
- [15] Grahandaka, M. (2009). Rusunami, rusunawa akan kemana?. *Vibiznews*. http://propertybusinessacademy.com/content/home/home_news/7
- [16] Waluyo J., Yusuf. (2010, September 09). Kemenpera-BTN sepakat jalankan fasilitas likuiditas. *Bisnis Indonesia*. <http://bataviase.co.id/node/376589>.
- [17] Waluyo J., Yusuf. (2010, September 09). Kemenpera-BTN sepakat jalankan fasilitas likuiditas. *Bisnis Indonesia*. <http://bataviase.co.id/node/376589>.
- [18] United Nation. (2005). *Housing finance systems for countries In transition principles and example*. New York and Geneva : Author.
- [19] Finnerty, Jhon D. (2007). *Project financing asset-basaed financial engineering*. New Jersey : Jhon Wiley & Sons, Inc.

- [20] Zhang, Xing Q. (2009). Pro-poor housing finance in asia. *GH Bank Housing Journal*.
- [21] Warnock, Veronica C., Warnock, Francis E. (2007). Market and housing finance. *Journal of Housing Economics*.
- [22] Phang, S.Y. (2001), Housing policy, wealth formation and the singapore economy, *Housing Studies*, Vol. 16, No. 4, 445-459.
- [23] United Nation. (2005). *Housing finance systems for countries In transition principles and example*. New York and Geneva : Author.
- [24] United Nation. (2005). *Housing finance systems for countries In transition principles and example*. New York and Geneva : Author.
- [25] Hao, Yan. (2009). Welfare housing program in urban china. *EAI Background Brief*, No. 485.
- [26] Yates, J., Burke, T., Arthurson, K., Jacob, K., Gabriel, M. (2005). *Conceptualising and measuring the housing affordability problem*. Research Paper 1 for The Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI).
- [27] Miron, Jhon R. (1984). *Housing affordability and willingness to pay*. Research Paper No. 154 for Canada Mortgage and Housing Corporation.
- [28] Yates, J., Burke, T., Arthurson, K., Jacob, K., Gabriel, M. (2005). *Conceptualising and measuring the housing affordability problem*. Research Paper 1 for The Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI).
- [29] Miron, Jhon R. (1984). *Housing affordability and willingness to pay*. Research Paper No. 154 for Canada Mortgage and Housing Corporation.
- [30] Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014.
- [31] Sugiono. (2010). *Statistika untuk penelitian*. Jakarta : Alvabeta.
- [32] Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2003). *Research methods for business student* (3rd ed). London : Pretice Hall.
- [33] Yin, Robert K. (2006). *Case study research design and methods (Volume 5)*. London : Sage Publication.
- [34] Sugiono. (2010). *Statistika untuk penelitian*. Jakarta : Alvabeta.
- [35] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
- [36] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.
- [37] Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- [38] Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 354 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah Bagi

Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- [39] Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 354 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah Bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- [40] Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1934 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Penghitungn Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Sederhana/Murah yang Dikonversi Dengan Dana Oleh Para Pengembangan Pemegang SIPPT.
- [41] Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 354 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah Bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- [42] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [43] Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- [44] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [45] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.
- [46] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. Tentang Rumah Susun.
- [47] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [48] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [49] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [50] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.
- [51] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [52] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [53] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [54] Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- [55] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [56] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [57] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [58] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.
- [59] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [60] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
- [61] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [62] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.
- [63] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [64] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [65] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [66] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [67] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.
- [68] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [69] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [70] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [71] Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
- [72] Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.
- [73] Project Management Institute. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Pennsylvania : Author.
- [74] Project Management Institute. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Pennsylvania : Author.

- [75] Project Management Institute. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Pennsylvania : Author.

DAFTAR REFERENSI

- 1000 tower, 1001 masalah (2010, Maret 15). *TEMPOonline*.
<http://majalah.tempointeraktif.Com/id/arsip/2010/03/15/LK/mbm.20100315.Lk132999.id.html>
- Brounen, D., Neutyeboom, P., Dijkhuizen, Arjen V. (2006). House price and affordability a first and second look across countries. *DNB Working Paper*, No. 83.
- Dewi S., Aisah. (2010, October 15). Personal interview.
- Dolbeare, Cushing N. (2001). Housing affordability : challenge and context. *A Journal of Policy Development and Research*, Vol.5, No.2.
- Finnerty, Jhon D. (2007). *Project financing asset-basaed financial engineering*. New Jersey : Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Grahandaka, M. (2009). Rusunami, rusunawa akan kemana?. *Vibiznews*.
http://propertybusinessacademy.com/content/home/home_news/7
- Guest, Ross S. (2005). A life cycle analysis of housing affordability option for first home owner-occupier in australia. *The Economic Record*, Vol.81, No.254, 237-248.
- Hao, Yan. (2009). Welfare housing program in urban china. *EAI Background Brief*, No. 485.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1934 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Penghitungn Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Sederhana/Murah yang Dikonversi Dengan Dana Oleh Para Pengembangan Pemegang SIPPT.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 354 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah Bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.
- Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014.

- Luffman, Jacqueline. (2006). Measuring housing affordability. *Statistic Canada*, Catalogue no. 75-001-XIE.
- Lux, Martin. (2004). Quasi-normative approach to housing affordability. *Housing Research Group Discussion Paper*, No.1.
- Mayer, Christopher J., Somerville, C Tsurriel. (2003). Government regulation and changes in the affordable housing stock. *FRBNY Economic Policy Review*.
- Melangkah di atas kerikil tajam. (Agust 20, 2008). *Indonesianestate.com*. <http://www.realestatindonesia.org/articledetail.aspx?aid=3>
- Miron, Jhon R. (1984). *Housing affordability and willingness to pay*. Research Paper No. 154 for Canada Mortgage and Housing Corporation.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- Phang, S, Y. (2007). The Singapore model of housing and the welfare state. *Singapore Management University*.
- Phang, S,Y. (2001), Housing policy, wealth formation and the singapore economy, *Housing Studies*, Vol. 16, No. 4, 445-459.
- Project Management Institute. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Pennsylvania : Author.
- Quigley, John M., Raphael, S. (2004). Is housing unaffordable? Why isn't it more affordable. *Journal of Economic Perspective*, Vol. 18, No.1, 129-152.
- Rea, W., Yuen, J., Engeland, J., Figueroa, R. (2008). The dynamics of housing affordability. *Statistic Canada*, Catalogue no. 75-001-X.
- Rencana Strategis Kemenpera 2010-2014. January 10, 2010.
- Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2003). *Research methods for business student* (3rd ed). London : Pretice Hall.
- Sugandhy, Aca. (2005). *Peran masyarakat dalam pembangunan perumahan*. Jakarta: Urban and Regional Development Institute.
- Sugiono. (2010). *Statistika untuk penelitian*. Jakarta : Alvabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

- United Nation. (2005). *Housing finance systems for countries In transition principles and example*. New York and Geneva : Author.
- Waluyo J., Yusuf. (2010, September 09). Kemenpera-BTN sepakat jalankan fasilitas likuiditas. *Bisnis Indonesia*. <http://bataviase.co.id/node/376589>.
- Warnock, Veronica C., Warnock, Francis E. (2007). Market and housing finance. *Journal of Housing Economics*.
- Yates, J., Burke, T., Arthurson, K., Jacob, K., Gabriel, M. (2005). *Conceptualising and measuring the housing affordability problem*. Research Paper 1 for The Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI).
- Yin, Robert K. (2006). *Case study research design and methods (Volume 5)*. London : Sage Publication.
- Zhang, Xing Q. (2009). Pro-poor housing finance in asia. *GH Bank Housing Journal*.



Lampiran 1

Kuesioner ke Pakar

**ANALISA PENYERAPAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI) OLEH MASYARAKAT BERPENGHASILAN
MENENGAH KEBAWAH (MBM) DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
DI PERKOTAAN**



KUESIONER PENELITIAN KE PAKAR

Oleh

RAHMAT YUSMAL ANDI

0906580073

**BIDANG KEKHUSUSAN MANAJEMEN PROYEK
PROGRAM PASCASARJANA BIDANG ILMU TEKNIK
FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS INDONESIA
GENAP 2010/2011**

L1 - 1

Universitas Indonesia

RESUME PENELITIAN

Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) merupakan bentuk upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di perkotaan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dengan harga yang terjangkau. Upaya ini awalnya merupakan suatu program pembangunan jangka menengah di bidang perumahan yang dicanangkan oleh Pemerintah didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009. Program ini sangat penting untuk menyeimbangkan penggunaan lahan di perkotaan antara penggunaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman, dengan penggunaan lahan untuk pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan serta pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Penyeimbangan ini juga sangat penting untuk mengatasi pertumbuhan pemukiman kumuh yang merupakan bagian kawasan perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan, baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Untuk menyukseskan program ini khusus bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah membuat suatu skema pembiayaan kepemilikan Rusunami atau yang dikenal dengan nama KPR Sarusuna Bersubsidi dengan tujuan agar harga jual Rusunami yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terjangkau oleh MBM dan MBR di perkotaan. Namun dari temuan awal penyerapan diketahui realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi hanya 62 unit dari tahun 2007-2010. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah-bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan, bagaimana gambaran masyarakat berpenghasilan menengah-bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhasil terserap oleh fasilitas kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan, dan apa penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan metode survey kuesioner dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menyukseskan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di perkotaan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dengan harga yang terjangkau.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan.
- 2) Mengidentifikasi gambaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhasil terserap oleh fasilitas kredit subsidi kepemilikan Rusunami di perkotaan.
- 3) Mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.

DATA RESPONDEN DAN PETUNJUK SINGKAT

1. Nama Responden :
2. Nama Perusahaan/Institusi :
3. Alamat Perusahaan/institusi :
4. Jabatan :
5. Pengalaman Kerja : (tahun)
6. Pendidikan Terakhir : SLTA / D3 / S1 / S2 / S3 (lingkari yang perlu)
7. Tanda tangan :

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Jawaban merupakan persepsi Bapak/Ibu mengenai tingkat pengaruh variabel-variabel yang tersedia terhadap lolos atau tidaknya hasil verifikasi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dalam mendapatkan subsidi kredit pemilikan Rusunami.
2. Pengisian kuesioner dilakukan dengan memberikan tanda ✓ atau X pada kolom yang telah disediakan.

B. Keterangan untuk penilaian ”Pengaruh Varibel-Variabel Terpilih Terhadap Lolos atau Tidaknya Hasil Verifikasi Masyarakat Sasaran dalam Mendapatkan Subsidi Kredit Pemilikan Rusunami.

- 1 = Sangat rendah pengaruhnya;
- 2 = Rendah pengaruhnya;
- 3 = Sedang pengaruhnya;
- 4 = Tinggi pengaruhnya;
- 5 = Sangat tinggi pengaruhnya.

C. Contoh pengisian kuesioner

Menurut persepsi Bapak/Ibu, berapakah tingkat pengaruh variabel-variabel berikut terhadap lolos atau tidaknya hasil verifikasi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dalam mendapatkan subsidi kredit pemilikan Rusunami ?

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Lolos atau Tidaknya Verifikasi Masyarakat Sasaran dalam Mendapatkan Subsidi Kredit Pemilikan Rusunami	Tingkat Pengaruh				
		1	2	3	4	5
1	Karakteristik Masyarakat Sasaran					
X1	Jenis kelamin penanggung kredit	X				
X2	Tingkat pendidikan penanggung kredit	X				
X3	Usia penanggung kredit.		X			
X4	Status perkawinan penanggung kredit		X			
X5	Status duda penanggung kredit.		X			
X6	Status janda penanggung kredit.		X			

PERTANYAAN KUESIONER PENELITIAN

Menurut persepsi Bapak/Ibu, berapakah tingkat pengaruh variabel-variabel berikut terhadap lolos atau tidaknya hasil verifikasi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dalam mendapatkan subsidi kredit pemilikan Rusunami ?

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Lolos atau Tidaknya Verifikasi Masyarakat Sasaran dalam Mendapatkan Subsidi Kredit Pemilikan Rusunami	Tingkat Pengaruh				
		1	2	3	4	5
1	Karakteristik Masyarakat Sasaran					
X1	Jenis kelamin penanggung kredit.					
X2	Tingkat pendidikan penanggung kredit.					
X3	Usia penanggung kredit.					
X4	Status perkawinan penanggung kredit					
X5	Status duda penanggung kredit.					
X6	Status janda penanggung kredit.					
X7	Jumlah anggota keluarga (istri/suami plus anak) penanggung kredit					

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Lolos atau Tidaknya Verifikasi Masyarakat Sasaran dalam Mendapatkan Subsidi Kredit Pemilikan Rusunami	Tingkat Pengaruh				
		1	2	3	4	5
X8	Pekerjaan penanggung kredit (formal atau informal).					
X9	Tingkat penghasilan per bulan penanggung kredit.					
X10	Status Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (bekerja atau tidak bekerja).					
X11	Pekerjaan istri/suami penanggung kredit (formal atau informal).					
X12	Tingkat penghasilan per bulan Istri/Suami penanggung kredit.					
X13	Persentase pengeluaran setiap bulan terhadap penghasilan perbulan.					
2	Karakteristik Rusunami yang Tersedia					
X14	Lokasi Rusunami yang dibeli.					
X15	Harga Rusunami yang dibeli.					
X16	Tipe rusunami yang dibeli (luas bangunan milik)					
3	Bentuk kredit yang tersedia					
X17	Persentase Uang muka dibandingkan harga Rusunami yang dibeli.					

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Lolos atau Tidaknya Verifikasi Masyarakat Sasaran dalam Mendapatkan Subsidi Kredit Pemilikan Rusunami	Tingkat Pengaruh				
		1	2	3	4	5
X18	Lama masa cicilan kredit (<i>periods of redemption</i>)					
X19	Ada atau tidaknya fasilitas pencicilan uang muka.					
X20	Persentase penghasilan per bulan untuk pembayaran pinjaman.					
X21	Besarnya tingkat suku bunga pinjaman (<i>Mortgage rates</i>)					
X22	Jenis suku bunga pinjaman (<i>fixed</i> atau lainnya).					
X23	Kelengkapan persyaratan dokumen yang diperlukan					

Apakah menurut persepsi Bapak/Ibu, variabel-variabel yang tersedia masih kurang lengkap ? Apabila kurang, mohon Bapak/Ibu tambahkan variabel-variabel tersebut beserta tingkat pengaruhnya terhadap lolos atau tidaknya verifikasi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dalam mendapatkan subsidi kredit pemilikan Rusunami.

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Lolos atau Tidaknya Verifikasi Masyarakat Sasaran dalam Mendapatkan Subsidi Kredit Pemilikan Rusunami	Tingkat Pengaruh				
		1	2	3	4	5

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu telah menyediakan waktu mengisi kuesioner ini.

Hormat kami,

Rahmat Yusmal Andi, ST



Lampiran 2

Data 1 Debitur KPR Sarasuna Bersubsidi

Lampiran 2 : Data 1 Debitur KPR Sarasuna Bersubsidi)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1	PS	1,629,626	89,000,000	13,350,000	15	51	0.1	75,650,000	15	6,000,000	1,498,382	7,498,382	20	3
2	PS	2,100,000	89,000,000	17,800,000	20	46	0.1	71,200,000	10	6,000,000	1,323,209	7,323,209	20	3
3	PS	3,500,000	88,000,000	26,400,000	30	24	0.1	61,600,000	10	6,000,000	1,144,799	7,144,799	20	2
4	PS	2,253,800	89,000,000	17,800,000	20	41	0.1	71,200,000	11	6,000,000	1,341,748	7,341,748	20.25	3
5	PS	1,326,000	89,000,000	17,800,000	20	73	0.1	71,200,000	10	6,000,000	1,323,209	7,323,209	20.25	3
6	PS	1,492,384	89,000,000	17,800,000	20	52	0.1	71,200,000	15	6,000,000	1,421,289	7,421,289	20.25	3
7	PS	2,400,000	89,000,000	17,800,000	20	33	0.1	71,200,000	15	6,000,000	1,421,289	7,421,289	20.25	3
8	PS	2,050,000	89,000,000	17,800,000	20	38	0.1	71,200,000	15	6,000,000	1,421,289	7,421,289	20.25	3
9	PS	2,000,000	89,000,000	17,800,000	20	39	0.1	71,200,000	15	6,000,000	1,421,289	7,421,289	20.25	3
10	PS	3,000,000	89,000,000	17,800,000	20	32	0.1	71,200,000	10	6,000,000	1,323,209	7,323,209	20.25	2
11	PS	3,082,328	89,000,000	17,800,000	20	31	0.1	71,200,000	10	6,000,000	1,323,209	7,323,209	20.25	2
12	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	20.25	2
13	PS	3,200,000	89,000,000	17,800,000	20	30	0.1	71,200,000	10	6,000,000	1,323,209	7,323,209	20.25	2
14	PS	3,309,300	89,000,000	17,800,000	20	29	0.1	71,200,000	10	6,000,000	1,323,209	7,323,209	20.25	2
15	PS	3,655,011	89,000,000	17,800,000	20	26	0.1	71,200,000	10	5,000,000	831,548	5,831,548	20.25	1
16	PS	4,000,000	98,000,000	26,800,000	27	24	0.1	71,200,000	10	5,000,000	831,548	5,831,548	20.25	1
17	PS	4,300,000	89,000,000	17,800,000	20	22	0.1	71,200,000	10	5,000,000	831,548	5,831,548	20.25	1
18	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	14	5,000,000	1,427,533	6,427,533	20.25	1
19	PS	2,289,000	86,000,000	13,000,000	15	36	0.1	73,000,000	14	6,000,000	1,436,553	7,436,553	21	3
20	PS	2,000,000	86,000,000	13,000,000	15	40	0.1	73,000,000	15	6,000,000	1,457,221	7,457,221	21	3
21	WRS	2,500,000	84,000,000	12,600,000	15	31	0.1	71,400,000	15	6,000,000	2,694,290	8,694,290	21	3
22	PS	2,400,000	90,500,000	13,575,000	15	35	0.1	76,925,000	15	6,000,000	2,561,669	8,561,669	21	3
23	PS	2,500,000	95,500,000	14,325,000	15	44	0.1	81,175,000	10	6,000,000	1,566,946	7,566,946	21	3
24	PS	2,470,000	87,000,000	13,050,000	15	33	0.1	73,950,000	15	6,000,000	1,533,625	7,533,625	21	3
25	PS	2,340,000	87,000,000	13,050,000	15	35	0.1	73,950,000	15	6,000,000	1,663,875	7,663,875	21	3

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
26	PS	2,500,000	84,000,000	12,600,000	15	35	0.1	71,400,000	12	6,000,000	1,606,500	7,606,500	21	3
27	PS	2,300,000	97,060,000	19,412,000	20	37	0.1	77,648,000	15	6,000,000	1,550,004	7,550,004	21	3
28	PS	2,100,000	144,000,000	22,500,000	16	63	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,565,503	6,565,503	21	3
29	PS	2,500,000	94,600,000	18,920,000	20	52	0.1	75,680,000	7	6,000,000	1,359,476	7,359,476	21	3
30	PS	2,883,995	95,500,000	14,325,000	15	34	0.1	81,175,000	12	6,000,000	1,551,827	7,551,827	21	2
31	PS	3,450,000	92,500,000	13,875,000	15	31	0.1	78,625,000	10	6,000,000	1,461,198	7,461,198	21	2
32	PS	3,500,000	95,500,000	14,325,000	15	31	0.1	81,175,000	10	6,000,000	1,508,588	7,508,588	21	2
33	PS	3,176,500	95,500,000	14,325,000	15	35	0.1	81,175,000	10	6,000,000	2,055,178	8,055,178	21	2
34	PS	3,000,000	90,500,000	13,600,000	15	28	0.1	76,900,000	15	6,000,000	1,780,763	7,780,763	21	2
35	PNS	3,171,205	83,000,000	12,450,000	15	43	0.1	70,550,000	6	6,000,000	1,386,373	7,386,373	21	2
36	PS	3,500,000	95,500,000	14,325,000	15	31	0.1	81,175,000	10	6,000,000	1,660,528	7,660,528	21	2
37	PS	3,080,000	87,000,000	13,050,000	15	33	0.1	73,950,000	10	6,000,000	1,512,732	7,512,732	21	2
38	PS	3,000,000	89,500,000	13,500,000	15	28	0.1	76,000,000	15	6,000,000	1,576,140	7,576,140	21	2
39	PS	2,900,000	87,000,000	13,050,000	15	28	0.1	73,950,000	15	6,000,000	1,533,625	7,533,625	21	2
40	TNI/POLRI	3,076,000	87,000,000	13,050,000	15	33	0.1	73,950,000	10	6,000,000	1,395,570	7,395,570	21	2
41	PS	2,600,000	93,000,000	13,950,000	15	34	0.1	79,050,000	14	6,000,000	1,543,529	7,543,529	21	2
42	PS	2,700,000	98,500,000	14,775,000	15	34	0.1	83,725,000	15	6,000,000	1,658,322	7,658,322	21	2
43	PS	3,219,700	95,500,000	14,325,000	15	34	0.1	81,175,000	10	6,000,000	1,496,929	7,496,929	21	2
44	PS	3,143,000	95,500,000	14,325,000	15	28	0.1	81,175,000	15	6,000,000	1,607,815	7,607,815	21	2
45	PS	3,000,000	94,000,000	14,100,000	15	34	0.1	79,900,000	11	6,000,000	1,494,042	7,494,042	21	2
46	PS	3,425,000	97,500,000	14,625,000	15	33	0.1	82,875,000	10	6,000,000	1,540,182	7,540,182	21	2
47	PS	2,863,200	94,000,000	14,100,000	15	53	0.1	79,900,000	6	6,000,000	1,427,610	7,427,610	21	2
48	PNS	3,500,000	92,500,000	13,875,000	15	30	0.1	78,625,000	10	6,000,000	1,449,905	7,449,905	21	2
49	PS	3,000,000	84,000,000	12,600,000	15	26	0.1	71,400,000	15	6,000,000	1,606,500	7,606,500	21	2
50	PS	3,000,000	84,000,000	12,600,000	15	32	0.1	71,400,000	10	6,000,000	1,606,500	7,606,500	21	2
51	PNS	2,866,500	106,000,000	21,200,000	20	46	0.1	84,800,000	8	6,000,000	1,537,480	7,537,480	21	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
52	PS	2,900,000	97,060,000	19,412,000	20	36	0.1	77,648,000	10	6,000,000	1,443,041	7,443,041	21	2
53	PS	3,000,000	97,060,000	48,530,000	50	28	0.1	48,530,000	7	6,000,000	871,767	6,871,767	21	2
54	PS	2,800,000	97,060,000	19,412,000	20	38	0.1	77,648,000	10	6,000,000	1,443,041	7,443,041	21	2
55	PS	3,500,000	93,000,000	24,000,000	26	27	0.1	69,000,000	10	6,000,000	2,131,982	8,131,982	21	2
56	PS	3,450,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	2,440,965	8,440,965	21	2
57	PS	3,300,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	2,440,965	8,440,965	21	2
58	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	27	0.1	79,000,000	15	6,000,000	2,630,768	8,630,768	21	2
59	PS	3,500,000	93,000,000	18,000,000	19	29	0.1	75,000,000	10	6,000,000	2,317,372	8,317,372	21	2
60	PS	3,323,000	93,000,000	14,000,000	15	26	0.1	79,000,000	15	6,000,000	2,384,503	8,384,503	21	2
61	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
62	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
63	PS	3,350,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
64	PS	3,350,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,568,840	7,568,840	21	2
65	PNS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	21	2
66	PS	3,115,000	93,000,000	44,000,000	47	21	0.1	49,000,000	10	6,000,000	910,635	6,910,635	21	2
67	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
68	PS	2,600,000	93,000,000	23,000,000	25	26	0.1	70,000,000	20	6,000,000	1,492,876	7,492,876	21	2
69	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	21	2
70	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
71	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
72	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
73	PS	3,260,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
74	PS	3,000,000	93,000,000	15,000,000	16	35	0.1	78,000,000	10	6,000,000	1,438,379	7,438,379	21	2
75	PS	2,900,000	93,000,000	19,000,000	20	35	0.1	74,000,000	10	6,000,000	1,364,616	7,364,616	21	2
76	PS	3,500,000	93,000,000	18,000,000	19	29	0.1	75,000,000	10	6,000,000	1,383,057	7,383,057	21	2
77	PS	3,000,000	93,000,000	15,000,000	16	35	0.1	78,000,000	10	6,000,000	1,438,379	7,438,379	21	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
78	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	21	2
79	PS	2,800,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	21	2
80	PS	2,823,600	93,000,000	14,000,000	15	34	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	21	2
81	PS	3,350,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	21	2
82	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	21	2
83	PNS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	21	2
84	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	21	2
85	PS	3,300,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	21	2
86	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	21	2
87	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	13	6,000,000	1,520,416	7,520,416	21	2
88	PS	2,750,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	21	2
89	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	21	2
90	PS	3,499,600	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	21	2
91	PS	2,850,000	93,000,000	14,000,000	15	36	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	21	2
92	PS	2,800,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	21	2
93	PS	3,441,200	93,000,000	18,000,000	19	30	0.1	75,000,000	10	6,000,000	1,383,057	7,383,057	21	2
94	PS	3,400,000	93,000,000	20,000,000	22	29	0.1	73,000,000	10	6,000,000	1,346,176	7,346,176	21	2
95	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	21	2
96	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	21	2
97	PNS	3,300,000	93,000,000	14,000,000	15	26	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	21	2
98	PS	3,150,000	93,000,000	14,000,000	15	27	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	21	2
99	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	21	2
100	PS	3,000,000	93,000,000	23,000,000	25	32	0.1	70,000,000	10	6,000,000	1,300,908	7,300,908	21	2
101	PS	3,500,000	93,000,000	63,000,000	68	12	0.1	30,000,000	9	6,000,000	550,288	6,550,288	21	2
102	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	21	2
103	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	21	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
104	PS	3,350,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	21	2
105	PS	3,380,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	2,185,070	8,185,070	21	2
106	PNS	2,960,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	2,353,061	8,353,061	21	2
107	PS	2,750,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	15	6,000,000	2,353,061	8,353,061	21	2
108	PS	4,000,000	86,000,000	12,900,000	15	20	0.1	73,100,000	15	5,000,000	919,181	5,919,181	21	1
109	PS	4,500,000	86,500,000	12,975,000	15	18	0.1	73,525,000	15	5,000,000	2,356,632	7,356,632	21	1
110	PS	4,500,000	84,000,000	12,600,000	15	22	0.1	71,400,000	10	5,000,000	1,148,373	6,148,373	21	1
111	PS	3,990,000	83,000,000	12,450,000	15	24	0.1	70,550,000	10	5,000,000	956,009	5,956,009	21	1
112	PS	3,700,000	89,500,000	13,425,000	15	32	0.1	76,075,000	8	5,000,000	886,785	5,886,785	21	1
113	PS	3,600,000	88,500,000	13,275,000	15	28	0.1	75,225,000	10	5,000,000	1,692,563	6,692,563	21	1
114	PS	4,500,000	93,000,000	14,000,000	15	24	0.1	79,000,000	10	5,000,000	2,082,682	7,082,682	21	1
115	PS	4,200,000	93,000,000	14,000,000	15	26	0.1	79,000,000	10	5,000,000	911,297	5,911,297	21	1
116	PNS	2,300,000	97,000,000	14,550,000	15	39	0.1	82,450,000	15	6,000,000	1,812,651	7,812,651	22	3
117	PS	2,500,000	96,500,000	14,475,000	15	36	0.1	82,025,000	15	6,000,000	1,803,307	7,803,307	22	3
118	PNS	2,055,400	93,000,000	14,000,000	15	52	0.1	79,000,000	10	6,000,000	2,440,965	8,440,965	22	3
119	PS	3,000,000	97,000,000	14,550,000	15	34	0.1	82,450,000	12	6,000,000	1,637,353	7,637,353	22	2
120	PS	3,302,400	100,000,000	15,000,000	15	35	0.1	85,000,000	10	6,000,000	1,579,674	7,579,674	22	2
121	PS	3,500,000	92,500,000	13,875,000	15	30	0.1	78,625,000	10	6,000,000	1,461,198	7,461,198	22	2
122	PS	3,000,000	97,500,000	14,625,000	15	34	0.1	82,875,000	12	6,000,000	1,584,326	7,584,326	22	2
123	PS	3,500,000	100,000,000	15,000,000	15	33	0.1	85,000,000	10	6,000,000	1,567,465	7,567,465	22	2
124	PNS	2,832,900	102,000,000	15,300,000	15	34	0.1	86,700,000	15	6,000,000	1,717,247	7,717,247	22	2
125	PS	3,500,000	97,500,000	14,625,000	15	32	0.1	82,875,000	10	6,000,000	1,528,278	7,528,278	22	2
126	PNS	3,075,600	100,000,000	15,000,000	15	34	0.1	85,000,000	12	6,000,000	1,912,500	7,912,500	22	2
127	PS	2,800,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	22	2
128	PS	4,500,000	100,000,000	15,000,000	15	24	0.1	85,000,000	11	5,000,000	1,007,242	6,007,242	22	1
129	PS	4,300,000	97,000,000	14,550,000	15	26	0.1	82,450,000	10	5,000,000	951,095	5,951,095	22	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
130	PS	4,150,000	96,500,000	14,475,000	15	22	0.1	82,025,000	15	5,000,000	1,018,680	6,018,680	22	1
131	PS	4,426,884	101,000,000	15,150,000	15	26	0.1	85,850,000	10	5,000,000	990,315	5,990,315	22	1
132	WRS	3,900,000	97,000,000	14,550,000	15	29	0.1	82,450,000	10	5,000,000	951,095	5,951,095	22	1
133	PS	3,600,000	92,500,000	13,875,000	15	24	0.1	78,625,000	15	5,000,000	1,769,063	6,769,063	22	1
134	PS	4,300,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	22	1
135	PNS	2,959,600	98,000,000	14,700,000	15	38	0.1	83,300,000	10	6,000,000	1,607,966	7,607,966	23	2
136	PS	3,125,000	101,000,000	15,150,000	15	34	0.1	85,850,000	12	6,000,000	1,666,654	7,666,654	23	2
137	PS	3,400,000	105,500,000	20,500,000	19	34	0.1	85,000,000	10	6,000,000	1,579,674	7,579,674	23	2
138	PS	3,500,000	104,500,000	15,675,000	15	34	0.1	88,825,000	10	6,000,000	1,638,001	7,638,001	23	2
139	PS	3,600,000	104,500,000	15,675,000	15	27	0.1	88,825,000	15	5,000,000	1,116,912	6,116,912	23	1
140	PS	4,000,000	101,000,000	15,150,000	15	24	0.1	85,850,000	15	5,000,000	1,146,187	6,146,187	23	1
141	PS	1,368,489	104,500,000	20,900,000	20	67	0.1	83,600,000	15	6,000,000	1,668,817	7,668,817	23.75	3
142	PS	3,000,000	104,500,000	21,300,000	20	30	0.1	83,200,000	15	6,000,000	1,660,832	7,660,832	23.75	2
143	PS	3,250,000	104,500,000	20,900,000	20	35	0.1	83,600,000	10	6,000,000	1,553,655	7,553,655	23.75	2
144	PS	2,700,000	104,500,000	20,900,000	20	34	0.1	83,600,000	15	6,000,000	1,668,817	7,668,817	23.75	2
145	PS	3,400,000	104,500,000	20,900,000	20	27	0.1	83,600,000	15	6,000,000	1,668,817	7,668,817	23.75	2
146	WRS	3,364,820	104,500,000	20,900,000	20	29	0.1	83,600,000	13	6,000,000	1,621,529	7,621,529	23.75	2
147	PS	2,500,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	15	6,000,000	2,630,768	8,630,768	24	3
148	PS	2,000,000	93,000,000	14,000,000	15	43	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	3
149	PS	2,500,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	3
150	PS	2,500,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	3
151	PS	2,500,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	3
152	PS	2,500,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	3
153	PS	2,500,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	3
154	PS	1,700,000	93,000,000	14,000,000	15	51	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	3
155	PS	2,500,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	3

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
156	PNS	3,493,225	93,000,000	23,000,000	25	31	0.1	70,000,000	8	6,000,000	1,269,146	7,269,146	24	2
157	PS	3,000,000	97,000,000	19,400,000	20	35	0.1	77,600,000	10	6,000,000	1,442,149	7,442,149	24	2
158	PS	3,395,000	105,000,000	21,000,000	20	34	0.1	84,000,000	10	6,000,000	1,561,089	7,561,089	24	2
159	PS	3,000,000	94,000,000	18,800,000	20	34	0.1	75,200,000	10	6,000,000	1,397,546	7,397,546	24	2
160	PS	2,700,000	95,000,000	19,000,000	20	31	0.1	76,000,000	15	6,000,000	1,517,106	7,517,106	24	2
161	PS	3,200,000	109,000,000	16,350,000	15	39	0.1	92,650,000	10	6,000,000	1,708,537	7,708,537	24	2
162	PS	3,500,000	96,000,000	19,200,000	20	48	0.1	76,800,000	5	6,000,000	1,373,886	7,373,886	24	2
163	PNS	3,400,000	95,000,000	19,000,000	20	30	0.1	76,000,000	10	6,000,000	142,414	7,412,414	24	2
164	PS	3,300,000	96,000,000	19,200,000	20	51	0.1	76,800,000	5	6,000,000	1,373,886	7,373,886	24	2
165	PS	3,500,000	95,000,000	19,000,000	20	24	0.1	76,000,000	15	6,000,000	1,517,106	7,517,106	24	2
166	PS	2,750,000	95,000,000	19,000,000	20	30	0.1	76,000,000	15	6,000,000	1,517,106	7,517,106	24	2
167	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	2,214,057	8,214,057	24	2
168	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
169	PS	3,300,000	93,000,000	14,000,000	15	26	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
170	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
171	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2
172	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2
173	PS	2,800,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
174	PS	3,275,000	93,000,000	23,000,000	25	33	0.1	70,000,000	8	6,000,000	1,269,146	7,269,146	24	2
175	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,488,737	7,488,737	24	2
176	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2
177	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2
178	PS	3,492,000	93,000,000	18,000,000	19	29	0.1	75,000,000	10	6,000,000	1,393,830	7,393,830	24	2
179	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	27	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
180	PS	3,100,000	93,000,000	23,000,000	25	28	0.1	70,000,000	12	6,000,000	1,338,194	7,338,194	24	2
181	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
182	PNS	3,450,150	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
183	PS	2,600,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,829,393	7,829,393	24	2
184	PNS	2,600,000	93,000,000	14,000,000	15	41	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,524,961	7,524,961	24	2
185	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,524,961	7,524,961	24	2
186	PS	3,300,000	93,000,000	15,000,000	16	26	0.1	78,000,000	15	6,000,000	1,617,617	7,617,617	24	2
187	PS	2,725,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,638,356	7,638,356	24	2
188	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,568,840	7,568,840	24	2
189	PS	3,250,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,524,961	7,524,961	24	2
190	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,524,961	7,524,961	24	2
191	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,490,873	7,490,873	24	2
192	PS	3,500,000	93,000,000	13,950,000	15	33	0.1	79,050,000	9	6,000,000	1,450,009	7,450,009	24	2
193	PS	3,500,000	93,000,000	19,000,000	20	23	0.1	74,000,000	15	6,000,000	1,477,183	7,477,183	24	2
194	PS	3,475,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
195	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
196	PS	3,450,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2
197	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
198	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	9	6,000,000	1,449,091	7,449,091	24	2
199	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2
200	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
201	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
202	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
203	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
204	PS	3,500,000	93,000,000	28,000,000	30	29	0.1	65,000,000	8	6,000,000	1,178,493	7,178,493	24	2
205	PS	3,000,000	93,000,000	16,000,000	17	30	0.1	77,000,000	13	6,000,000	1,493,513	7,493,513	24	2
206	PS	3,500,000	93,000,000	19,000,000	20	23	0.1	74,000,000	15	6,000,000	1,477,183	7,477,183	24	2
207	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
208	PS	3,000,000	93,000,000	13,950,000	15	34	0.1	79,050,000	11	6,000,000	1,478,148	7,478,148	24	2
209	PS	3,121,413	93,000,000	14,000,000	15	34	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
210	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
211	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
212	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
213	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	24	2
214	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
215	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
216	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
217	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
218	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
219	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
220	PS	3,300,000	93,000,000	14,000,000	15	26	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
221	PS	3,472,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
222	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
223	PS	3,300,000	93,000,000	14,000,000	15	26	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
224	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
225	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
226	PS	3,500,000	93,000,000	13,950,000	15	31	0.1	79,050,000	10	6,000,000	1,457,742	7,457,742	24	2
227	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
228	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
229	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
230	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	34	0.1	79,000,000	9	6,000,000	1,437,911	7,437,911	24	2
231	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
232	PS	3,500,000	93,000,000	14,500,000	16	29	0.1	78,500,000	11	6,000,000	1,467,864	7,467,864	24	2
233	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
234	PS	3,500,000	93,000,000	14,500,000	16	29	0.1	78,500,000	11	6,000,000	1,467,864	7,467,864	24	2
235	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
236	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
237	PS	3,450,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
238	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
239	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
240	WRS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
241	PS	3,500,000	93,000,000	15,000,000	16	35	0.1	78,000,000	8	6,000,000	1,403,302	7,403,302	24	2
242	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
243	PS	3,289,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
244	PS	2,700,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
245	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	9	6,000,000	1,437,911	7,437,911	24	2
246	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
247	PS	3,293,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
248	PS	2,875,000	93,000,000	23,000,000	25	33	0.1	70,000,000	10	6,000,000	1,290,853	7,290,853	24	2
249	PS	3,500,000	93,000,000	13,950,000	15	31	0.1	79,050,000	10	6,000,000	1,457,742	7,457,742	24	2
250	PS	2,950,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
251	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
252	PS	2,700,000	93,000,000	14,000,000	15	36	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
253	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
254	PS	2,900,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
255	PS	2,670,700	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
256	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
257	PS	2,875,000	93,000,000	14,000,000	15	34	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
258	PS	3,500,000	93,000,000	23,000,000	25	34	0.1	70,000,000	7	6,000,000	1,247,781	7,247,781	24	2
259	PS	3,360,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
260	PS	3,300,000	93,000,000	24,000,000	26	33	0.1	69,000,000	8	6,000,000	1,241,382	7,241,382	24	2
261	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	9	6,000,000	1,437,911	7,437,911	24	2
262	PS	3,100,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	24	2
263	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	22	0.1	79,000,000	20	6,000,000	1,671,700	7,671,700	24	2
264	PS	3,300,000	93,000,000	18,000,000	19	31	0.1	75,000,000	10	6,000,000	1,383,057	7,383,057	24	2
265	PS	3,340,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
266	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
267	PS	3,250,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	24	2
268	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	35	0.1	79,000,000	8	6,000,000	1,421,293	7,421,293	24	2
269	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
270	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
271	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
272	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
273	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
274	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
275	PS	2,900,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
276	PS	3,300,000	93,000,000	14,000,000	15	26	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
277	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,488,737	7,488,737	24	2
278	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
279	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
280	PNS	3,464,858	93,000,000	18,000,000	19	24	0.1	75,000,000	15	6,000,000	1,497,145	7,497,145	24	2
281	PS	3,500,000	93,000,000	13,950,000	15	33	0.1	79,050,000	9	6,000,000	1,450,009	7,450,009	24	2
282	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
283	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
284	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
285	PS	3,000,000	93,000,000	16,000,000	17	35	0.1	77,000,000	10	6,000,000	1,430,998	7,430,998	24	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
286	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	24	2
287	PNS	3,100,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,510,247	7,510,247	24	2
288	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	24	2
289	PS	3,364,700	93,000,000	14,000,000	15	34	0.1	79,000,000	9	6,000,000	1,449,091	7,449,091	24	2
290	PS	3,211,000	93,000,000	14,000,000	15	27	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
291	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	24	2
292	PS	3,100,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
293	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
294	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
295	PS	3,400,000	93,000,000	14,000,000	15	32	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	24	2
296	PS	2,940,000	93,000,000	14,000,000	15	34	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,477,213	7,477,213	24	2
297	PS	3,100,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	11	6,000,000	1,488,737	7,488,737	24	2
298	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	30	0.1	79,000,000	12	6,000,000	1,498,542	7,498,542	24	2
299	PS	3,000,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	24	2
300	PS	4,349,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	24	1
301	PS	4,312,450	96,000,000	19,200,000	20	24	0.1	76,800,000	10	5,000,000	896,951	5,896,950	24	1
302	PS	4,062,000	96,000,000	19,200,000	20	21	0.1	76,800,000	15	5,000,000	965,706	5,965,706	24	1
303	PS	3,750,000	93,000,000	14,000,000	15	23	0.1	79,000,000	15	5,000,000	2,250,539	7,250,539	24	1
304	PS	4,100,000	142,000,000	22,000,000	15	32	0.1	120,000,000	15	5,000,000	3,109,588	8,109,588	24	1
305	PS	3,750,000	142,000,000	25,000,000	18	33	0.1	117,000,000	16	5,000,000	2,706,125	7,706,125	24	1
306	PS	3,800,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	10	5,000,000	979,439	5,979,439	24	1
307	PS	4,350,000	140,500,000	21,075,000	15	30	0.1	119,425,000	15	5,000,000	1,483,156	6,483,156	24	1
308	PS	4,000,000	93,000,000	14,000,000	15	24	0.1	79,000,000	12	5,000,000	938,474	5,938,474	24	1
309	PS	4,000,000	93,000,000	14,000,000	15	27	0.1	79,000,000	10	5,000,000	911,297	5,911,297	24	1
310	PS	4,500,000	93,000,000	14,000,000	15	24	0.1	79,000,000	10	5,000,000	911,297	5,911,297	24	1
311	PS	4,500,000	93,000,000	14,000,000	15	24	0.1	79,000,000	10	5,000,000	911,297	5,911,297	24	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
312	PS	3,750,000	93,000,000	14,000,000	15	23	0.1	79,000,000	15	5,000,000	981,112	5,981,112	24	1
313	PS	3,693,593	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	9	5,000,000	898,851	5,898,851	24	1
314	PS	3,700,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	10	5,000,000	911,297	5,911,297	24	1
315	PS	4,200,000	144,000,000	25,000,000	17	33	0.1	119,000,000	13	5,000,000	1,434,958	6,434,958	24	1
316	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,475,957	6,475,957	24	1
317	PS	4,450,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,449,289	6,449,289	24	1
318	PS	4,300,000	93,000,000	29,400,000	32	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	24	1
319	PS	3,650,000	93,000,000	14,000,000	15	21	0.1	79,000,000	20	5,000,000	1,062,191	6,062,191	24	1
320	PS	3,800,000	93,000,000	14,000,000	15	28	0.1	79,000,000	10	5,000,000	911,297	5,911,297	24	1
321	PS	4,300,000	100,000,000	31,400,000	31	22	0.1	68,600,000	10	5,000,000	801,182	5,801,182	24	1
322	PS	2,500,000	144,000,000	28,800,000	20	56	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	25	3
323	PNS	1,250,000	99,000,000	20,000,000	20	69	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,576,992	7,576,992	25	3
324	PS	2,254,000	99,000,000	29,000,000	29	34	0.1	70,000,000	15	6,000,000	1,397,335	7,397,335	25	3
325	PS	2,025,000	99,000,000	34,000,000	34	35	0.1	65,000,000	15	6,000,000	1,297,525	7,297,525	25	3
326	PS	2,692,500	99,000,000	14,850,000	15	34	0.1	84,150,000	15	6,000,000	1,679,796	7,679,796	25	2
327	PS	3,500,000	99,000,000	15,000,000	15	33	0.1	84,000,000	10	6,000,000	1,561,089	7,561,089	25	2
328	PS	3,329,000	99,000,000	15,000,000	15	28	0.1	84,000,000	15	6,000,000	1,676,802	7,676,802	25	2
329	PS	3,500,000	99,000,000	14,850,000	15	26	0.1	84,150,000	15	6,000,000	1,679,796	7,679,796	25	2
330	PNS	2,959,000	99,000,000	29,000,000	29	26	0.1	70,000,000	15	6,000,000	1,397,335	7,397,335	25	2
331	PNS	3,352,700	99,000,000	15,000,000	15	27	0.1	84,000,000	15	6,000,000	1,676,802	7,676,802	25	2
332	PS	3,245,000	99,000,000	15,000,000	15	33	0.1	84,000,000	11	6,000,000	1,582,961	7,582,961	25	2
333	PS	3,266,000	102,500,000	15,375,000	15	29	0.1	87,125,000	15	6,000,000	1,960,313	7,960,313	25	2
334	PS	3,000,000	102,500,000	15,375,000	15	32	0.1	87,125,000	15	6,000,000	1,960,313	7,960,313	25	2
335	PS	2,600,000	116,610,000	23,322,000	20	39	0.1	93,288,000	15	5,000,000	1,173,031	6,173,031	25	2
336	PS	3,500,000	116,610,000	23,322,000	20	36	0.1	93,288,000	10	5,000,000	1,089,515	6,089,515	25	2
337	PS	4,300,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	25	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
338	PS	4,120,000	94,000,000	10,000,000	11	28	0.1	84,000,000	10	5,000,000	981,040	5,981,040	25	1
339	PS	4,451,880	99,000,000	14,850,000	15	21	0.1	84,150,000	15	5,000,000	1,058,127	6,058,127	25	1
340	PS	4,310,000	99,000,000	15,000,000	15	21	0.1	84,000,000	15	5,000,000	1,056,241	6,056,241	25	1
341	PS	4,000,000	99,000,000	15,000,000	15	28	0.1	84,000,000	10	5,000,000	981,040	5,981,040	25	1
342	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	25	1
343	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	25	1
344	PNS	3,052,500	115,000,000	19,500,000	17	34	0.1	95,500,000	15	5,000,000	1,186,028	6,186,028	26	2
345	PS	2,902,370	115,000,000	25,000,000	22	34	0.1	90,000,000	15	5,000,000	1,131,687	6,131,687	26	2
346	PS	3,400,000	108,000,000	16,200,000	15	37	0.1	91,800,000	10	6,000,000	2,065,500	8,065,500	26	2
347	PS	3,300,000	115,000,000	27,250,000	24	29	0.1	87,750,000	15	6,000,000	1,974,375	7,974,375	26	2
348	PS	4,400,000	115,000,000	17,250,000	15	30	0.1	97,750,000	10	5,000,000	1,127,586	6,127,586	26	1
349	PS	3,000,000	132,000,000	39,000,000	30	34	0.1	93,000,000	15	5,000,000	1,169,409	6,169,409	29	2
350	PS	3,250,000	132,000,000	32,000,000	24	34	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	29	2
351	PS	3,300,000	120,500,000	18,075,000	15	34	0.1	102,425,000	15	5,000,000	1,272,030	6,272,030	29	2
352	PS	3,500,000	132,000,000	22,500,000	17	34	0.1	109,500,000	15	5,000,000	1,376,885	6,376,885	29	2
353	PS	3,050,000	123,500,000	27,250,000	22	35	0.1	96,250,000	15	6,000,000	2,165,625	8,165,625	29	2
354	PS	3,013,000	144,000,000	44,000,000	31	36	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	29	2
355	PS	3,975,000	122,000,000	18,300,000	15	29	0.1	103,700,000	15	5,000,000	2,687,202	7,687,202	29	1
356	PNS	4,400,000	131,000,000	19,650,000	15	28	0.1	111,350,000	15	5,000,000	2,538,329	7,538,329	29	1
357	PS	4,500,000	123,500,000	18,525,000	15	26	0.1	104,975,000	15	5,000,000	1,319,987	6,319,987	29	1
358	WRS	4,500,000	129,000,000	19,350,000	15	33	0.1	109,650,000	10	5,000,000	1,280,607	6,280,607	29	1
359	WRS	4,410,000	129,000,000	19,350,000	15	34	0.1	109,650,000	10	5,000,000	1,280,607	6,280,607	29	1
360	PS	4,088,650	131,500,000	19,725,000	15	30	0.1	111,775,000	15	5,000,000	1,631,604	6,631,604	29	1
361	WRS	3,763,767	120,500,000	18,000,000	15	30	0.1	102,500,000	15	5,000,000	1,320,692	6,320,692	29	1
362	PS	4,125,213	120,500,000	18,075,000	15	34	0.1	102,425,000	10	5,000,000	1,225,665	6,225,665	29	1
363	PS	4,000,000	129,000,000	19,350,000	15	30	0.1	109,650,000	15	5,000,000	1,361,759	6,361,759	29	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
364	PS	4,000,000	138,500,000	20,775,000	15	32	0.1	117,725,000	15	5,000,000	1,462,043	6,462,043	29	1
365	PS	4,225,000	129,000,000	19,350,000	15	32	0.1	109,650,000	12	5,000,000	1,318,825	6,318,825	29	1
366	PS	3,600,000	132,000,000	19,800,000	15	34	0.1	112,200,000	15	5,000,000	1,410,836	6,410,836	29	1
367	PS	3,816,700	134,000,000	20,100,000	15	33	0.1	113,900,000	15	5,000,000	1,432,212	6,432,212	29	1
368	PS	2,414,000	123,000,000	69,000,000	56	30	0.1	54,000,000	10	5,000,000	630,668	5,630,668	30	3
369	PS	2,236,215	123,000,000	48,000,000	39	33	0.1	75,000,000	20	5,000,000	1,008,409	6,008,409	30	3
370	PNS	2,500,000	144,000,000	83,000,000	58	54	0.1	61,000,000	5	5,000,000	682,858	5,682,858	30	3
371	PS	2,950,000	123,000,000	22,000,000	18	34	0.1	101,000,000	20	5,000,000	1,357,991	6,357,991	30	2
372	PS	3,100,000	85,000,000	12,000,000	14	26	0.1	73,000,000	15	6,000,000	1,457,221	7,457,221	30	2
373	PNS	2,743,000	144,000,000	50,000,000	35	42	0.1	94,000,000	12	5,000,000	1,130,593	6,130,593	30	2
374	PS	4,461,000	123,000,000	23,000,000	19	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	30	1
375	PS	4,100,000	123,000,000	23,000,000	19	27	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	30	1
376	PS	3,800,000	131,000,000	19,650,000	15	32	0.1	111,350,000	15	5,000,000	1,486,639	6,486,639	30	1
377	PS	4,500,000	136,500,000	20,500,000	15	35	0.1	116,000,000	10	5,000,000	1,338,108	6,338,108	30	1
378	PS	4,100,000	136,500,000	20,475,000	15	31	0.1	116,025,000	15	5,000,000	1,458,933	6,458,933	30	1
379	PS	4,500,000	136,500,000	20,475,000	15	28	0.1	116,025,000	15	5,000,000	1,458,933	6,458,933	30	1
380	PS	4,030,000	136,000,000	20,400,000	15	31	0.1	115,600,000	15	5,000,000	1,453,589	6,453,589	30	1
381	PS	3,650,000	136,500,000	24,500,000	18	34	0.1	112,000,000	15	5,000,000	2,520,000	7,520,000	30	1
382	PS	4,400,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	11	5,000,000	1,365,109	6,365,109	30	1
383	PNS	4,320,100	144,000,000	36,000,000	25	34	0.1	108,000,000	10	5,000,000	1,245,824	6,245,824	30	1
384	PS	4,175,000	141,000,000	21,150,000	15	34	0.1	119,850,000	13	5,000,000	1,463,245	6,463,245	30	1
385	PNS	2,000,000	144,000,000	33,000,000	23	61	0.1	111,000,000	15	5,000,000	1,395,747	6,395,747	33	3
386	PS	2,000,000	144,000,000	28,800,000	20	78	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	3
387	PNS	2,400,000	137,000,000	20,550,000	15	53	0.1	116,450,000	15	5,000,000	1,500,435	6,500,435	33	3
388	PNS	2,275,600	144,000,000	28,800,000	20	55	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	3
389	PS	2,000,000	144,000,000	29,000,000	20	63	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	3

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
390	PS	2,000,000	144,000,000	28,800,000	20	78	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	3
391	PS	2,300,000	144,000,000	28,800,000	20	55	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	3
392	PNS	2,500,000	144,000,000	28,800,000	20	62	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	3
393	PNS	2,500,000	144,000,000	28,800,000	20	56	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	3
394	PNS	2,339,800	144,000,000	44,000,000	31	58	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	3
395	PNS	2,500,000	144,000,000	28,800,000	20	50	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	3
396	PNS	2,066,700	144,000,000	28,800,000	20	76	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	3
397	PS	2,485,000	144,000,000	28,800,000	20	51	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	3
398	PNS	2,110,000	144,000,000	34,000,000	24	71	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,268,895	6,268,895	33	3
399	PDS	2,087,000	144,000,000	28,800,000	20	68	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	3
400	PDS	1,937,117	144,000,000	28,800,000	20	65	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	3
401	PS	2,500,000	144,000,000	84,000,000	58	41	0.1	60,000,000	7	5,000,000	667,491	5,667,491	33	3
402	PS	2,400,000	144,000,000	44,000,000	31	57	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	3
403	PNS	2,300,000	144,000,000	33,000,000	23	65	0.1	111,000,000	10	5,000,000	1,296,374	6,296,374	33	3
404	PNS	2,447,100	144,000,000	107,000,000	74	33	0.1	37,000,000	5	5,000,000	414,193	5,414,193	33	3
405	PNS	2,400,000	144,000,000	51,000,000	35	42	0.1	93,000,000	15	5,000,000	1,169,409	6,169,409	33	3
406	PNS	2,322,000	144,000,000	39,000,000	27	53	0.1	105,000,000	13	5,000,000	1,281,942	6,281,942	33	3
407	TNI/POLRI	2,500,000	140,000,000	21,000,000	15	47	0.1	119,000,000	20	5,000,000	3,299,027	8,299,027	33	3
408	PS	2,400,000	93,000,000	14,000,000	15	36	0.1	79,000,000	15	6,000,000	2,630,768	8,630,768	33	3
409	PS	2,303,000	140,000,000	21,000,000	15	63	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	3
410	PS	2,079,700	144,000,000	24,000,000	17	71	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,478,891	6,478,891	33	3
411	PS	2,376,100	144,000,000	22,000,000	15	56	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,515,135	6,515,135	33	3
412	PS	3,200,000	114,000,000	12,000,000	11	44	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	2
413	PNS	3,500,000	144,000,000	36,700,000	25	34	0.1	107,300,000	15	5,000,000	1,349,222	6,349,222	33	2
414	PS	3,500,000	144,000,000	37,000,000	26	33	0.1	107,000,000	15	5,000,000	1,345,450	6,345,450	33	2
415	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
416	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	45	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	2
417	PNS	3,250,000	144,000,000	45,000,000	31	33	0.1	99,000,000	15	5,000,000	1,244,855	6,244,855	33	2
418	PNS	3,500,000	144,000,000	35,000,000	24	34	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,370,598	6,370,598	33	2
419	PS	3,000,000	105,000,000	21,000,000	20	31	0.1	84,000,000	15	6,000,000	1,676,802	7,676,802	33	2
420	PS	3,500,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,320,301	6,320,301	33	2
421	PS	3,067,100	144,000,000	28,800,000	20	41	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
422	PS	3,000,000	144,000,000	39,000,000	27	38	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,320,301	6,320,301	33	2
423	PS	3,482,840	144,000,000	43,200,000	30	39	0.1	100,800,000	10	5,000,000	1,177,248	6,177,248	33	2
424	PS	3,077,000	144,000,000	29,000,000	20	41	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	2
425	PS	3,147,000	144,000,000	34,000,000	24	38	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	2
426	PS	3,434,651	144,000,000	28,800,000	20	37	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
427	PS	3,495,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
428	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	45	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	2
429	PS	3,127,000	144,000,000	58,000,000	40	30	0.1	86,000,000	15	5,000,000	1,081,389	6,081,389	33	2
430	PNS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	45	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	2
431	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	45	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	2
432	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	45	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	2
433	PS	3,000,000	143,000,000	28,600,000	20	42	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	2
434	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
435	PNS	3,052,000	144,000,000	28,800,000	20	41	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
436	PS	3,500,000	144,000,000	29,600,000	21	44	0.1	114,400,000	10	5,000,000	1,336,082	6,336,082	33	2
437	PNS	3,200,000	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
438	PS	3,149,900	144,000,000	44,000,000	31	43	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	2
439	PNS	3,000,000	144,000,000	28,800,000	20	42	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
440	PDN	3,352,000	144,000,000	28,800,000	20	38	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
441	TNI/POLRI	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
442	PS	3,500,000	144,000,000	49,000,000	34	32	0.1	95,000,000	13	5,000,000	1,159,852	6,159,852	33	2
443	PS	3,250,000	144,000,000	34,000,000	24	46	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	2
444	PS	2,899,194	144,000,000	46,000,000	32	37	0.1	98,000,000	15	5,000,000	1,217,076	6,217,076	33	2
445	PNS	3,410,652	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	18	5,000,000	1,491,437	6,491,437	33	2
446	PS	2,900,000	144,000,000	64,000,000	44	37	0.1	80,000,000	10	5,000,000	922,833	5,922,833	33	2
447	PS	2,668,600	144,000,000	104,000,000	72	29	0.1	40,000,000	6	5,000,000	442,211	5,442,211	33	2
448	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	17	5,000,000	1,471,544	6,471,544	33	2
449	PS	3,500,000	144,000,000	64,000,000	44	31	0.1	80,000,000	10	5,000,000	922,833	5,922,833	33	2
450	PNS	2,969,888	144,000,000	28,800,000	20	44	0.1	115,200,000	14	5,000,000	1,409,926	6,409,926	33	2
451	PS	3,500,000	144,000,000	36,000,000	25	34	0.1	108,000,000	15	5,000,000	1,341,267	6,341,267	33	2
452	PNS	3,248,000	144,000,000	32,000,000	22	34	0.1	112,000,000	20	5,000,000	1,487,294	6,487,294	33	2
453	PS	3,500,000	144,000,000	49,000,000	34	33	0.1	95,000,000	12	5,000,000	1,128,545	6,128,545	33	2
454	PDS	3,403,000	144,000,000	66,000,000	46	33	0.1	78,000,000	9	5,000,000	887,473	5,887,473	33	2
455	PS	3,500,000	144,000,000	64,000,000	44	31	0.1	80,000,000	10	5,000,000	922,833	5,922,833	33	2
456	PNS	2,925,800	144,000,000	115,000,000	80	33	0.1	29,000,000	3	5,000,000	339,967	5,339,967	33	2
457	PNS	3,300,000	144,000,000	34,000,000	24	45	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	2
458	PS	3,500,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,320,301	6,320,301	33	2
459	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
460	PNS	3,100,000	144,000,000	44,000,000	31	44	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	2
461	PNS	3,033,000	144,000,000	119,000,000	83	18	0.1	25,000,000	5	5,000,000	27,986	5,279,860	33	2
462	PS	3,300,000	144,000,000	28,800,000	20	43	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	2
463	PNS	3,085,000	144,000,000	28,800,000	20	41	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	2
464	PNS	3,350,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	16	5,000,000	1,339,297	6,339,297	33	2
465	PS	3,000,000	144,000,000	64,000,000	44	27	0.1	80,000,000	18	5,000,000	1,048,669	6,048,669	33	2
466	PS	3,000,000	106,000,000	21,200,000	20	38	0.1	84,800,000	10	6,000,000	1,575,957	7,575,957	33	2
467	PS	3,340,000	144,000,000	28,800,000	20	47	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,328,879	6,328,879	33	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
468	PNS	3,011,900	144,000,000	47,000,000	33	35	0.1	97,000,000	15	5,000,000	1,219,707	6,219,707	33	2
469	PNS	2,700,000	144,000,000	59,000,000	41	49	0.1	85,000,000	8	5,000,000	967,076	5,967,076	33	2
470	PS	2,750,000	140,000,000	30,000,000	21	44	0.1	110,000,000	15	5,000,000	2,850,456	7,850,456	33	2
471	PS	3,314,311	140,000,000	60,000,000	43	26	0.1	80,000,000	15	5,000,000	2,073,059	7,073,059	33	2
472	PS	3,200,000	140,000,000	25,000,000	18	49	0.1	115,000,000	10	5,000,000	2,759,189	7,759,189	33	2
473	PS	2,614,000	93,000,000	14,000,000	15	33	0.1	79,000,000	15	6,000,000	2,630,768	8,630,768	33	2
474	PS	3,500,000	140,000,000	25,000,000	18	34	0.1	115,000,000	17	5,000,000	3,066,598	8,066,598	33	2
475	PS	3,336,666	93,000,000	18,000,000	19	25	0.1	75,000,000	15	6,000,000	2,497,565	8,497,565	33	2
476	PS	3,500,000	143,000,000	21,500,000	15	34	0.1	121,500,000	20	5,000,000	3,368,334	8,368,334	33	2
477	PS	3,285,000	93,000,000	14,000,000	15	29	0.1	79,000,000	12	6,000,000	2,515,250	8,515,250	33	2
478	PS	3,500,000	142,000,000	32,000,000	23	33	0.1	110,000,000	17	5,000,000	2,933,267	7,933,267	33	2
479	PS	3,500,000	144,000,000	21,600,000	15	38	0.1	122,400,000	15	5,000,000	3,171,780	8,171,780	33	2
480	PS	3,500,000	142,000,000	22,000,000	15	42	0.1	120,000,000	12	5,000,000	2,969,897	7,969,897	33	2
481	PS	3,250,000	142,000,000	22,000,000	15	38	0.1	120,000,000	17	5,000,000	3,199,928	8,199,928	33	2
482	PS	3,500,000	142,000,000	24,000,000	17	34	0.1	118,000,000	18	5,000,000	2,805,499	7,805,499	33	2
483	PS	3,500,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,320,301	6,320,301	33	2
484	PNS	3,500,000	144,000,000	50,000,000	35	29	0.1	94,000,000	15	5,000,000	1,181,984	6,181,984	33	2
485	PS	3,450,000	100,000,000	30,000,000	30	28	0.1	70,000,000	10	6,000,000	1,300,908	7,300,908	33	2
486	PS	3,500,000	144,000,000	42,000,000	29	32	0.1	102,000,000	15	5,000,000	1,282,578	6,282,578	33	2
487	PS	3,500,000	144,000,000	37,000,000	26	33	0.1	107,000,000	15	5,000,000	1,345,450	6,345,450	33	2
488	PS	3,500,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	20	5,000,000	1,645,723	6,645,723	33	2
489	PS	3,500,000	140,000,000	21,000,000	15	42	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,519,544	6,519,544	33	2
490	PS	3,500,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	20	5,000,000	1,741,761	6,741,761	33	2
491	PS	3,500,000	140,000,000	32,000,000	23	34	0.1	108,000,000	15	5,000,000	1,441,913	6,441,913	33	2
492	PS	3,500,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,401,860	6,401,860	33	2
493	PS	3,500,000	142,000,000	22,000,000	15	34	0.1	120,000,000	20	5,000,000	1,713,207	6,713,207	33	2

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
494	PS	3,500,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,401,860	6,401,860	33	2
495	PS	3,500,000	144,000,000	42,000,000	29	32	0.1	102,000,000	15	5,000,000	1,361,807	6,361,807	33	2
496	PS	3,500,000	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,335,105	6,335,105	33	2
497	PS	3,500,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	17	5,000,000	1,579,287	6,579,287	33	2
498	PS	3,500,000	144,000,000	29,000,000	20	48	0.1	115,000,000	9	5,000,000	1,357,295	6,357,295	33	2
499	PS	3,028,200	144,000,000	29,000,000	20	52	0.1	115,000,000	10	5,000,000	1,376,143	6,376,143	33	2
500	PS	3,500,000	144,000,000	22,000,000	15	41	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	33	2
501	PS	3,500,000	144,000,000	36,000,000	25	34	0.1	108,000,000	15	5,000,000	1,358,024	6,358,024	33	2
502	PS	3,500,000	144,000,000	49,000,000	34	30	0.1	95,000,000	15	5,000,000	1,194,558	6,194,558	33	2
503	PS	3,200,000	144,000,000	46,000,000	32	42	0.1	98,000,000	10	5,000,000	1,144,546	6,144,546	33	2
504	PS	3,500,000	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	33	2
505	PS	3,500,000	144,000,000	37,000,000	26	33	0.1	107,000,000	15	5,000,000	1,345,450	6,345,450	33	2
506	PS	3,500,000	144,000,000	21,600,000	15	47	0.1	122,400,000	10	5,000,000	1,429,515	6,429,515	33	2
507	PS	3,500,000	144,000,000	35,000,000	24	34	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,370,598	6,370,598	33	2
508	PS	3,500,000	142,000,000	22,000,000	15	42	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	2
509	PS	3,500,000	144,000,000	24,000,000	17	38	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	2
510	PS	3,500,000	144,000,000	34,000,000	24	38	0.1	110,000,000	12	5,000,000	1,323,034	6,323,034	33	2
511	PS	3,500,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	20	5,000,000	1,593,530	6,593,530	33	2
512	PS	3,500,000	143,000,000	21,500,000	15	34	0.1	121,500,000	20	5,000,000	1,613,449	6,613,449	33	2
513	PS	3,500,000	144,000,000	59,000,000	41	42	0.1	85,000,000	7	5,000,000	945,613	5,945,613	33	2
514	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,456,820	7,456,820	33	2
515	PS	3,200,000	93,000,000	14,000,000	15	27	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	33	2
516	PS	3,500,000	100,000,000	30,000,000	30	27	0.1	70,000,000	10	6,000,000	1,290,853	7,290,853	33	2
517	PS	3,000,000	142,000,000	22,000,000	15	49	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,425,530	6,425,530	33	2
518	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	25	0.1	79,000,000	15	6,000,000	1,564,735	7,564,735	33	2
519	PS	3,485,000	144,000,000	36,000,000	25	40	0.1	108,000,000	11	5,000,000	1,311,314	6,311,314	33	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
520	PS	3,500,000	144,000,000	46,000,000	32	34	0.1	98,000,000	12	5,000,000	1,207,761	6,207,761	33	2
521	PS	3,500,000	143,000,000	34,000,000	24	34	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,404,443	6,404,443	33	2
522	PS	3,500,000	143,000,000	34,000,000	24	34	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,404,443	6,404,443	33	2
523	PS	3,395,000	144,000,000	25,000,000	17	38	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,533,291	6,533,291	33	2
524	PS	3,395,000	144,000,000	25,000,000	17	38	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,533,291	6,533,291	33	2
525	PS	3,500,000	144,000,000	29,000,000	20	45	0.1	115,000,000	10	5,000,000	1,376,143	6,376,143	33	2
526	PS	3,500,000	93,000,000	14,000,000	15	31	0.1	79,000,000	10	6,000,000	1,468,167	7,468,167	33	2
527	PS	3,500,000	144,000,000	29,000,000	20	32	0.1	115,000,000	20	5,000,000	1,546,227	6,546,227	33	2
528	PS	3,500,000	144,000,000	35,000,000	24	34	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,370,598	6,370,598	33	2
529	PS	3,500,000	144,000,000	22,000,000	15	38	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	2
530	PS	3,500,000	144,000,000	45,000,000	31	31	0.1	99,000,000	15	6,000,000	2,217,397	8,217,397	33	2
531	PS	3,310,000	143,000,000	21,500,000	15	40	0.1	121,500,000	15	6,000,000	2,728,424	8,728,424	33	2
532	PNS	3,649,120	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
533	WRS	3,929,800	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
534	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	27	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
535	PNS	4,287,700	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
536	PS	4,200,000	144,000,000	29,000,000	20	30	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
537	PS	3,650,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
538	PS	3,930,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
539	PNS	4,468,100	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	11	5,000,000	1,365,109	6,365,109	33	1
540	PS	3,564,000	144,000,000	32,500,000	23	34	0.1	111,500,000	15	5,000,000	1,402,034	6,402,034	33	1
541	PNS	4,481,100	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
542	PS	4,300,000	144,000,000	29,000,000	20	29	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
543	PS	3,974,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
544	PS	4,420,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
545	PS	3,925,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
546	PNS	4,268,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
547	PS	3,997,800	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
548	PS	4,200,000	144,000,000	29,000,000	20	30	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
549	PS	4,449,300	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
550	PS	3,620,000	144,000,000	33,000,000	23	34	0.1	111,000,000	15	5,000,000	1,395,747	6,395,747	33	1
551	PNS	4,461,400	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
552	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
553	PNS	3,628,600	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
554	PS	4,300,600	144,000,000	33,800,000	23	31	0.1	110,200,000	12	5,000,000	1,325,440	6,325,440	33	1
555	PS	4,500,000	143,000,000	28,600,000	20	34	0.1	114,400,000	10	5,000,000	1,336,082	6,336,082	33	1
556	PS	4,290,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
557	PS	4,242,000	144,000,000	28,800,000	20	37	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
558	PS	4,350,000	144,000,000	34,000,000	24	28	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
559	PS	4,433,640	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
560	PS	4,175,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
561	PNS	4,250,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
562	PS	3,751,200	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
563	PS	4,480,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
564	PS	4,396,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
565	PS	4,100,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
566	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
567	PS	3,791,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
568	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
569	PS	4,400,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
570	PS	4,000,000	144,000,000	31,000,000	22	33	0.1	113,000,000	13	5,000,000	1,379,614	6,379,614	33	1
571	PS	3,572,968	144,000,000	35,000,000	24	33	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,370,598	6,370,598	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
572	PS	3,800,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
573	PS	4,350,000	144,000,000	29,000,000	20	29	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
574	PNS	3,980,300	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
575	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
576	PS	3,636,900	144,000,000	32,400,000	23	34	0.1	111,600,000	15	5,000,000	1,403,291	6,403,291	33	1
577	PNS	3,634,000	144,000,000	64,000,000	44	30	0.1	80,000,000	10	5,000,000	934,323	5,934,323	33	1
578	PS	4,197,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
579	PS	3,875,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
580	PS	3,650,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
581	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	14	5,000,000	1,427,533	6,427,533	33	1
582	PS	3,750,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
583	PS	3,700,000	144,000,000	31,000,000	22	33	0.1	113,000,000	15	5,000,000	1,420,895	6,420,895	33	1
584	PS	4,025,000	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
585	PS	3,750,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
586	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
587	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
588	PS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
589	PS	4,465,400	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
590	PS	3,762,000	144,000,000	44,000,000	31	34	0.1	100,000,000	11	5,000,000	1,184,991	6,184,991	33	1
591	PS	3,626,800	144,000,000	33,000,000	23	34	0.1	111,000,000	15	5,000,000	1,395,747	6,395,747	33	1
592	PNS	4,362,100	144,000,000	36,100,000	25	34	0.1	107,900,000	10	5,000,000	1,260,169	6,260,169	33	1
593	PS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
594	PNS	4,320,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
595	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
596	PS	4,460,100	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
597	PNS	4,467,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
598	PS	4,028,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
599	PS	4,235,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
600	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
601	PS	4,120,000	144,000,000	43,000,000	30	33	0.1	101,000,000	10	5,000,000	1,179,583	6,179,583	33	1
602	PNS	4,008,600	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
603	PS	4,053,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
604	PS	4,029,000	144,000,000	57,500,000	40	29	0.1	86,500,000	10	5,000,000	1,010,237	6,010,237	33	1
605	PS	3,760,000	144,000,000	34,000,000	24	32	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
606	PS	4,238,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
607	PS	3,950,000	144,000,000	31,000,000	22	31	0.1	113,000,000	15	5,000,000	1,420,895	6,420,895	33	1
608	PS	3,750,000	144,000,000	36,200,000	25	31	0.1	107,800,000	15	5,000,000	1,355,509	6,355,509	33	1
609	PNS	4,468,200	144,000,000	78,800,000	55	25	0.1	65,200,000	7	5,000,000	73,434	5,734,340	33	1
610	PS	4,367,000	144,000,000	59,900,000	42	33	0.1	84,100,000	7	5,000,000	947,209	5,947,209	33	1
611	PS	3,941,500	144,000,000	30,000,000	21	32	0.1	114,000,000	15	5,000,000	1,433,470	6,433,470	33	1
612	PS	4,282,500	144,000,000	43,200,000	30	32	0.1	100,800,000	10	5,000,000	1,177,248	6,177,248	33	1
613	PS	4,100,000	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
614	PNS	4,239,000	143,000,000	28,600,000	20	30	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	1
615	PS	4,000,000	144,000,000	34,000,000	24	37	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
616	PS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
617	TNI/POLR I	4,455,325	132,000,000	19,800,000	15	32	0.1	112,200,000	11	5,000,000	1,666,384	6,666,384	33	1
618	PS	4,200,000	137,000,000	20,550,000	15	30	0.1	116,450,000	15	5,000,000	1,699,846	6,699,846	33	1
619	WRS	4,300,000	137,000,000	20,550,000	15	37	0.1	116,450,000	10	5,000,000	1,443,742	6,443,742	33	1
620	PNS	4,462,000	140,500,000	21,075,000	15	29	0.1	119,425,000	15	5,000,000	1,594,449	6,594,449	33	1
621	PS	4,500,000	140,500,000	21,075,000	15	32	0.1	119,425,000	12	5,000,000	1,524,970	6,524,970	33	1
622	PNS	3,557,700	137,000,000	20,550,000	15	36	0.1	116,450,000	15	5,000,000	1,554,729	6,554,729	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
623	PS	4,000,000	137,000,000	20,550,000	15	34	0.1	116,450,000	13	5,000,000	1,421,734	6,421,734	33	1
624	PS	3,900,000	97,000,000	14,550,000	15	29	0.1	82,450,000	10	5,000,000	951,095	5,951,095	33	1
625	PS	3,802,122	132,000,000	19,800,000	15	32	0.1	112,200,000	15	5,000,000	1,410,836	6,410,836	33	1
626	PS	3,800,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
627	PS	4,500,000	137,000,000	20,550,000	15	28	0.1	116,450,000	15	5,000,000	1,464,277	6,464,277	33	1
628	PS	3,800,000	132,000,000	19,800,000	15	35	0.1	112,200,000	13	5,000,000	2,524,500	7,524,500	33	1
629	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
630	PS	4,349,000	144,000,000	34,000,000	24	34	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
631	PS	3,536,847	144,000,000	36,000,000	25	33	0.1	108,000,000	15	5,000,000	1,358,024	6,358,024	33	1
632	PNS	3,909,055	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
633	PS	4,016,340	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
634	PS	3,592,011	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
635	PS	3,927,593	144,000,000	41,000,000	28	29	0.1	103,000,000	15	5,000,000	1,295,152	6,295,152	33	1
636	PS	4,205,520	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
637	PS	3,596,000	144,000,000	28,800,000	20	43	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
638	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
639	PS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	37	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
640	PS	4,152,447	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
641	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
642	PS	3,862,950	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
643	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
644	PS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
645	PS	4,300,000	144,000,000	33,000,000	23	35	0.1	111,000,000	10	5,000,000	1,296,374	6,296,374	33	1
646	PS	3,715,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
647	PS	3,600,000	144,000,000	28,800,000	20	43	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
648	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
649	PS	3,920,000	144,000,000	28,800,000	20	40	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
650	PS	4,220,000	144,000,000	28,800,000	20	37	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
651	PS	3,650,000	144,000,000	35,000,000	24	37	0.1	109,000,000	12	5,000,000	1,311,007	6,311,007	33	1
652	PS	4,085,200	144,000,000	28,800,000	20	38	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
653	PS	3,785,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
654	PS	4,162,000	144,000,000	28,800,000	20	38	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
655	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
656	PS	3,896,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
657	PNS	4,450,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
658	TNI/POLRI	3,763,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
659	PS	3,750,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
660	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
661	PS	3,950,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
662	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
663	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	46	0.1	115,200,000	7	5,000,000	1,297,485	6,297,485	33	1
664	PS	3,800,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
665	PS	3,577,725	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
666	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	39	0.1	115,000,000	10	5,000,000	1,343,090	6,343,090	33	1
667	PS	4,462,640	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
668	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
669	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
670	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
671	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
672	PS	4,280,000	144,000,000	28,800,000	20	37	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
673	PS	3,675,300	144,000,000	28,800,000	20	43	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
674	PNS	3,760,100	144,000,000	44,000,000	31	36	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
675	PS	4,345,000	143,000,000	28,600,000	20	29	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	1
676	PS	3,521,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
677	PS	4,263,000	144,000,000	28,800,000	20	37	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
678	PS	3,800,000	144,000,000	28,800,000	20	41	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
679	PS	4,122,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
680	PS	4,460,298	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
681	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
682	PS	4,031,274	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
683	PS	4,291,251	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
684	PS	4,100,000	144,000,000	29,000,000	20	38	0.1	115,000,000	10	5,000,000	1,343,090	6,343,090	33	1
685	PS	3,960,500	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
686	PS	4,096,342	144,000,000	28,800,000	20	38	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
687	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	42	0.1	115,000,000	9	5,000,000	1,324,729	6,324,729	33	1
688	PS	4,202,300	144,000,000	28,800,000	20	37	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
689	PS	4,319,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
690	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
691	PNS	4,046,700	144,000,000	29,600,000	21	38	0.1	114,400,000	10	5,000,000	1,336,082	6,336,082	33	1
692	PS	3,600,000	96,000,000	19,200,000	20	29	0.1	76,800,000	10	5,000,000	896,950	5,896,950	33	1
693	PS	3,600,000	143,000,000	28,600,000	20	35	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	1
694	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
695	PS	3,800,000	144,000,000	28,800,000	20	41	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
696	PS	4,463,850	144,000,000	44,000,000	31	25	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	33	1
697	PNS	3,566,600	144,000,000	29,600,000	21	35	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	1
698	PS	3,951,594	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
699	PS	4,000,000	143,000,000	28,600,000	20	31	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	1
700	PS	4,410,000	143,000,000	29,000,000	20	33	0.1	114,000,000	11	5,000,000	1,350,889	6,350,889	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
701	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
702	PS	3,900,000	142,000,000	28,400,000	20	40	0.1	113,600,000	10	5,000,000	1,326,739	6,326,739	33	1
703	PS	4,480,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
704	PS	4,420,000	143,000,000	28,600,000	20	28	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	1
705	PS	3,650,000	144,000,000	28,800,000	20	43	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
706	PS	3,600,000	143,000,000	28,600,000	20	35	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	1
707	PS	3,600,000	143,000,000	28,600,000	20	35	0.1	114,400,000	15	5,000,000	1,438,499	6,438,499	33	1
708	PS	3,679,000	143,000,000	28,600,000	20	42	0.1	114,400,000	10	5,000,000	1,336,082	6,336,082	33	1
709	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	44	0.1	115,200,000	7	5,000,000	1,297,485	6,297,485	33	1
710	PNS	4,340,000	143,000,000	28,800,000	20	29	0.1	114,200,000	15	5,000,000	1,435,985	6,435,985	33	1
711	PS	4,097,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
712	PS	4,032,587	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
713	PS	3,523,205	143,000,000	28,600,000	20	44	0.1	114,400,000	10	5,000,000	1,336,082	6,336,082	33	1
714	PS	4,326,603	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
715	PS	4,000,000	143,000,000	28,600,000	20	35	0.1	114,400,000	12	5,000,000	1,375,956	6,375,956	33	1
716	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
717	PS	3,900,000	144,000,000	29,000,000	20	40	0.1	115,000,000	10	5,000,000	1,343,090	6,343,090	33	1
718	PS	3,650,000	144,000,000	28,800,000	20	43	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
719	PS	4,440,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
720	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
721	PS	4,370,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
722	PS	4,400,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
723	PS	4,400,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
724	PS	4,042,900	144,000,000	46,000,000	32	33	0.1	98,000,000	10	5,000,000	1,144,546	6,144,546	33	1
725	PS	4,000,000	144,000,000	34,000,000	24	34	0.1	110,000,000	12	5,000,000	1,323,034	6,323,034	33	1
726	PNS	4,116,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	14	5,000,000	1,427,533	6,427,533	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
727	PNS	3,536,200	144,000,000	64,000,000	44	28	0.1	80,000,000	12	5,000,000	962,207	5,962,207	33	1
728	PDN	3,787,700	144,000,000	54,000,000	38	32	0.1	90,000,000	10	5,000,000	1,051,114	6,051,114	33	1
729	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
730	PNS	3,609,200	144,000,000	54,000,000	38	34	0.1	90,000,000	10	5,000,000	1,051,114	6,051,114	33	1
731	PNS	4,063,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
732	PNS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	28	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
733	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
734	PNS	4,352,300	144,000,000	29,000,000	20	29	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
735	PNS	3,564,600	144,000,000	55,000,000	38	34	0.1	89,000,000	10	5,000,000	1,039,435	6,039,435	33	1
736	PS	4,400,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	11	5,000,000	1,365,109	6,365,109	33	1
737	PS	3,600,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
738	PNS	4,210,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
739	PNS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
740	PS	4,000,000	144,000,000	45,000,000	31	30	0.1	99,000,000	12	5,000,000	1,190,731	6,190,731	33	1
741	PNS	4,500,000	144,000,000	78,800,000	55	25	0.1	65,200,000	7	5,000,000	73,434	5,734,340	33	1
742	PNS	4,436,472	144,000,000	29,000,000	20	28	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
743	PNS	4,152,600	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
744	PS	3,800,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
745	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
746	PS	4,500,000	144,000,000	31,000,000	22	32	0.1	113,000,000	11	5,000,000	1,339,039	6,339,039	33	1
747	PDN	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
748	PS	3,931,292	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
749	PNS	4,175,800	144,000,000	48,000,000	33	31	0.1	96,000,000	10	5,000,000	1,121,188	6,121,188	33	1
750	PS	4,031,800	144,000,000	49,000,000	34	32	0.1	95,000,000	10	5,000,000	1,109,509	6,109,509	33	1
751	PNS	4,000,000	144,000,000	34,000,000	24	37	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
752	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	28	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m ²)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
753	PS	4,500,000	144,000,000	49,000,000	34	33	0.1	95,000,000	8	5,000,000	1,080,849	6,080,849	33	1
754	PS	4,370,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
755	PS	4,000,000	144,000,000	46,000,000	32	33	0.1	98,000,000	10	5,000,000	1,144,546	6,144,546	33	1
756	PS	4,300,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
757	PNS	3,800,000	144,000,000	40,000,000	28	30	0.1	104,000,000	15	5,000,000	1,307,727	6,307,727	33	1
758	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
759	PS	4,000,000	144,000,000	39,000,000	27	32	0.1	105,000,000	12	5,000,000	1,262,896	6,262,896	33	1
760	PS	4,250,000	144,000,000	41,000,000	28	27	0.1	103,000,000	15	5,000,000	1,295,152	6,295,152	33	1
761	PS	4,150,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
762	PNS	4,397,200	144,000,000	36,000,000	25	33	0.1	108,000,000	10	5,000,000	1,261,337	6,261,337	33	1
763	PS	4,173,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
764	PS	4,450,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
765	PS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	14	5,000,000	1,427,533	6,427,533	33	1
766	PDN	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
767	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
768	PS	4,350,000	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
769	PNS	3,826,200	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
770	PNS	4,447,000	144,000,000	45,000,000	31	30	0.1	99,000,000	10	5,000,000	1,156,225	6,156,225	33	1
771	PNS	4,332,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
772	PDS	4,315,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
773	PDS	4,263,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
774	PNS	3,764,000	144,000,000	94,000,000	65	29	0.1	50,000,000	5	5,000,000	55,972	5,559,720	33	1
775	PS	4,139,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
776	PS	4,122,532	144,000,000	30,000,000	21	30	0.1	114,000,000	15	5,000,000	1,433,470	6,433,470	33	1
777	PNS	4,400,000	144,000,000	79,000,000	55	32	0.1	65,000,000	5	5,000,000	727,636	5,727,636	33	1
778	PS	3,658,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	16	5,000,000	1,469,400	6,469,400	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
779	PNS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
780	PS	4,300,000	144,000,000	94,000,000	65	22	0.1	50,000,000	6	5,000,000	559,612	5,559,612	33	1
781	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
782	PDS	3,800,600	144,000,000	54,000,000	38	32	0.1	90,000,000	10	5,000,000	1,051,114	6,051,114	33	1
783	PNS	3,700,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
784	PS	4,100,020	144,000,000	44,000,000	31	33	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
785	PNS	4,146,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
786	PS	4,062,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
787	PNS	3,551,200	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	33	1
788	PNS	3,905,200	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
789	PS	4,000,000	144,000,000	49,000,000	34	32	0.1	95,000,000	10	5,000,000	1,109,509	6,109,509	33	1
790	PS	4,225,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
791	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	11	5,000,000	1,365,109	6,365,109	33	1
792	TNI/POLRI	4,154,087	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	11	5,000,000	1,184,991	6,184,991	33	1
793	PNS	4,071,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
794	PS	4,211,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
795	PS	4,000,000	144,000,000	34,000,000	24	34	0.1	110,000,000	12	5,000,000	1,306,736	6,306,736	33	1
796	PNS	4,476,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	9	5,000,000	1,137,786	6,137,786	33	1
797	PNS	3,571,650	144,000,000	28,800,000	20	44	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,328,879	6,328,879	33	1
798	PDS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
799	PS	4,400,000	144,000,000	34,000,000	24	34	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,268,895	6,268,895	33	1
800	PS	4,500,000	144,000,000	54,000,000	38	31	0.1	90,000,000	8	5,000,000	1,011,397	6,011,397	33	1
801	PS	3,883,000	144,000,000	114,000,000	79	26	0.1	30,000,000	3	5,000,000	347,409	5,347,409	33	1
802	PNS	4,423,170	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	11	5,000,000	1,348,305	6,348,305	33	1
803	PNS	4,170,000	144,000,000	74,000,000	51	29	0.1	70,000,000	7	5,000,000	77,874	5,778,740	33	1
804	PS	4,350,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
805	PNS	4,500,000	144,000,000	32,000,000	22	34	0.1	112,000,000	10	5,000,000	1,291,966	6,291,966	33	1
806	PNS	4,300,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	11	5,000,000	1,287,444	6,287,444	33	1
807	PS	3,918,055	144,000,000	44,000,000	31	28	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,241,914	6,241,914	33	1
808	PNS	4,215,000	144,000,000	59,000,000	41	22	0.1	85,000,000	15	5,000,000	1,055,627	6,055,627	33	1
809	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,268,895	6,268,895	33	1
810	PNS	4,365,800	144,000,000	29,000,000	20	32	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,366,133	6,366,133	33	1
811	PNS	3,602,300	144,000,000	28,800,000	20	43	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,328,879	6,328,879	33	1
812	PNS	3,602,300	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	16	5,000,000	1,451,263	6,451,263	33	1
813	PS	3,920,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
814	PS	4,472,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
815	PNS	3,537,900	144,000,000	44,000,000	31	54	0.1	100,000,000	6	5,000,000	1,105,528	6,105,528	33	1
816	PS	4,475,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
817	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	37	0.1	115,200,000	11	5,000,000	1,348,305	6,348,305	33	1
818	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
819	PNS	4,255,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
820	PNS	3,556,500	144,000,000	44,000,000	31	34	0.1	100,000,000	12	5,000,000	1,187,942	6,187,942	33	1
821	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	20	5,000,000	1,529,788	6,529,788	33	1
822	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,328,879	6,328,879	33	1
823	PNS	3,677,940	144,000,000	28,800,000	20	60	0.1	115,200,000	6	5,000,000	1,273,568	6,273,568	33	1
824	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	26	0.1	115,200,000	20	5,000,000	1,529,788	6,529,788	33	1
825	PS	4,139,000	144,000,000	36,000,000	25	32	0.1	108,000,000	12	5,000,000	1,282,977	6,282,977	33	1
826	PNS	4,492,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
827	PDS	4,173,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
828	PNS	4,499,900	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,153,541	6,153,541	33	1
829	PDS	4,150,000	144,000,000	49,000,000	34	31	0.1	95,000,000	10	5,000,000	1,095,864	6,095,864	33	1
830	PNS	4,373,900	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
831	PDS	4,299,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
832	PDS	4,317,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
833	PNS	4,156,860	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
834	PDS	4,202,000	144,000,000	29,000,000	20	30	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,428,201	6,428,201	33	1
835	PNS	4,178,400	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,153,541	6,153,541	33	1
836	PNS	3,586,300	144,000,000	28,800,000	20	44	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,328,879	6,328,879	33	1
837	PNS	4,436,700	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
838	PNS	4,048,800	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
839	PS	3,750,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
840	PS	4,106,931	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	13	5,000,000	1,386,724	6,386,724	33	1
841	PS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
842	PNS	3,570,000	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,368,509	6,368,509	33	1
843	PNS	3,587,600	144,000,000	64,000,000	44	32	0.1	80,000,000	9	5,000,000	910,229	5,910,229	33	1
844	PDS	3,881,000	144,000,000	29,000,000	20	32	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,428,201	6,428,201	33	1
845	PS	3,650,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,366,105	6,366,105	33	1
846	PS	4,475,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
847	PS	4,270,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
848	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
849	PDS	4,283,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
850	PNS	4,238,600	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
851	PS	4,359,600	144,000,000	41,000,000	28	32	0.1	103,000,000	10	5,000,000	1,202,941	6,202,941	33	1
852	PNS	4,363,600	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
853	PS	4,309,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
854	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
855	PNS	4,483,000	144,000,000	59,000,000	41	32	0.1	85,000,000	7	5,000,000	957,345	5,957,345	33	1
856	PNS	4,087,000	144,000,000	28,800,000	20	48	0.1	115,200,000	7	5,000,000	1,297,485	6,297,485	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
857	PNS	4,033,000	144,000,000	94,000,000	65	17	0.1	50,000,000	10	5,000,000	583,952	5,583,952	33	1
858	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
859	PS	4,120,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
860	PS	3,755,000	144,000,000	29,000,000	20	37	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
861	PS	4,500,000	144,000,000	39,000,000	27	32	0.1	105,000,000	10	5,000,000	1,226,299	6,226,299	33	1
862	PS	4,385,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
863	PS	4,244,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
864	PS	4,300,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
865	PNS	4,358,382	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
866	PS	3,785,200	144,000,000	54,000,000	38	32	0.1	90,000,000	10	5,000,000	1,051,114	6,051,114	33	1
867	PNS	3,700,000	144,000,000	32,000,000	22	33	0.1	112,000,000	15	5,000,000	1,408,321	6,408,321	33	1
868	PNS	4,200,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
869	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
870	PS	4,300,000	144,000,000	50,000,000	35	30	0.1	94,000,000	10	5,000,000	1,097,830	6,097,830	33	1
871	PS	4,500,000	144,000,000	84,000,000	58	29	0.1	60,000,000	5	5,000,000	671,664	5,671,664	33	1
872	PNS	4,300,000	144,000,000	69,000,000	48	27	0.1	75,000,000	8	5,000,000	853,302	5,853,302	33	1
873	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
874	PS	4,150,000	144,000,000	34,000,000	24	29	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
875	PS	4,012,639	144,000,000	54,000,000	38	30	0.1	90,000,000	10	5,000,000	1,051,114	6,051,114	33	1
876	PS	4,485,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
877	PNS	4,010,600	144,000,000	34,000,000	24	30	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
878	PS	4,428,300	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
879	PNS	4,171,100	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
880	PNS	4,237,470	144,000,000	62,000,000	43	33	0.1	82,000,000	7	5,000,000	923,557	5,923,557	33	1
881	PNS	4,418,600	144,000,000	54,000,000	38	32	0.1	90,000,000	8	5,000,000	1,023,962	6,023,962	33	1
882	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
883	TNI/PORI	3,700,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
884	PS	3,715,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
885	PNS	3,619,100	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	16	5,000,000	1,469,400	6,469,400	33	1
886	PS	3,992,800	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
887	PNS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
888	PNS	4,500,000	144,000,000	54,000,000	38	34	0.1	90,000,000	7	5,000,000	1,013,660	6,013,660	33	1
889	PS	3,800,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
890	PS	4,250,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
891	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
892	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
893	PNS	4,200,000	144,000,000	34,000,000	24	32	0.1	110,000,000	12	5,000,000	1,323,034	6,323,034	33	1
894	PNS	3,927,300	144,000,000	28,800,000	20	40	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33	1
895	PNS	4,115,930	144,000,000	28,800,000	20	44	0.1	115,200,000	8	5,000,000	1,310,672	6,310,672	33	1
896	PNS	4,146,500	144,000,000	44,000,000	31	33	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
897	PDS	4,436,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
898	PS	3,600,000	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
899	PNS	4,487,020	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
900	PNS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
901	PS	4,000,000	144,000,000	45,000,000	31	30	0.1	99,000,000	12	5,000,000	1,190,731	6,190,731	33	1
902	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
903	PNS	4,470,000	144,000,000	43,500,000	30	30	0.1	100,500,000	10	5,000,000	1,159,309	6,159,309	33	1
904	PS	3,900,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
905	PS	3,870,000	144,000,000	34,000,000	24	31	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,366,105	6,366,105	33	1
906	PNS	4,133,300	144,000,000	29,000,000	20	30	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,428,201	6,428,201	33	1
907	PNS	4,299,256	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,430,685	6,430,685	33	1
908	PS	4,208,000	144,000,000	30,000,000	21	30	0.1	114,000,000	15	5,000,000	1,415,782	6,415,782	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
909	TNI/POLR I	4,030,900	144,000,000	84,000,000	58	33	0.1	60,000,000	5	5,000,000	663,457	5,663,457	33	1
910	PS	3,825,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,428,201	6,428,201	33	1
911	PNS	4,036,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	13	5,000,000	1,406,473	6,406,473	33	1
912	PS	4,119,900	144,000,000	89,000,000	62	26	0.1	55,000,000	6	5,000,000	615,573	5,615,573	33	1
913	PDS	3,900,000	144,000,000	94,000,000	65	20	0.1	50,000,000	8	5,000,000	568,868	5,568,868	33	1
914	PNS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
915	PNS	4,453,900	144,000,000	94,000,000	65	19	0.1	50,000,000	7	5,000,000	563,144	5,563,144	33	1
916	PNS	4,470,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33	1
917	PS	4,270,000	144,000,000	94,000,000	65	26	0.1	50,000,000	5	5,000,000	55,972	5,559,720	33	1
918	PS	3,900,000	144,000,000	24,000,000	17	42	0.1	120,000,000	10	5,000,000	3,556,970	8,556,970	33	1
919	PS	3,800,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,390,052	8,390,052	33	1
920	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	29	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,390,052	8,390,052	33	1
921	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	36	0.1	119,000,000	10	5,000,000	3,137,204	8,137,204	33	1
922	PS	4,500,000	142,000,000	21,300,000	15	29	0.1	120,700,000	15	5,000,000	3,438,481	8,438,481	33	1
923	WRS	4,500,000	142,000,000	24,500,000	17	32	0.1	117,500,000	12	5,000,000	3,196,180	8,196,180	33	1
924	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	3,236,982	8,236,982	33	1
925	PS	4,500,000	142,000,000	26,625,000	19	31	0.1	115,375,000	12	5,000,000	3,138,377	8,138,377	33	1
926	PS	4,100,000	142,000,000	22,000,000	15	33	0.1	120,000,000	14	5,000,000	3,367,410	8,367,410	33	1
927	PS	4,500,000	142,000,000	22,000,000	15	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	3,264,184	8,264,184	33	1
928	PS	4,500,000	142,000,000	21,300,000	15	33	0.1	120,700,000	12	5,000,000	3,283,225	8,283,225	33	1
929	PS	4,000,000	142,000,000	21,300,000	15	33	0.1	120,700,000	15	5,000,000	3,127,727	8,127,727	33	1
930	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	29	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
931	PS	4,500,000	140,000,000	50,000,000	36	24	0.1	90,000,000	12	5,000,000	2,227,422	7,227,422	33	1
932	PS	4,150,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,991,417	7,991,417	33	1
933	PS	3,800,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
934	PS	3,900,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
935	PS	4,300,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	1
936	PS	4,400,000	140,000,000	30,000,000	21	34	0.1	110,000,000	10	5,000,000	2,639,224	7,639,224	33	1
937	PS	4,500,000	140,000,000	70,000,000	50	27	0.1	70,000,000	7	5,000,000	1,614,018	6,614,018	33	1
938	PS	3,990,160	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
939	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
940	PS	4,000,000	142,000,000	22,000,000	15	33	0.1	120,000,000	15	5,000,000	3,109,588	8,109,588	33	1
941	PS	4,500,000	142,000,000	57,000,000	40	32	0.1	85,000,000	7	5,000,000	1,959,879	6,959,879	33	1
942	PS	4,250,000	142,000,000	52,000,000	37	31	0.1	90,000,000	9	5,000,000	2,127,680	7,127,680	33	1
943	PS	3,800,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
944	PS	4,250,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,991,417	7,991,417	33	1
945	PS	3,800,000	140,000,000	22,000,000	16	34	0.1	118,000,000	15	5,000,000	3,057,761	8,057,761	33	1
946	PS	4,400,000	140,000,000	21,000,000	15	30	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
947	PS	4,250,000	140,000,000	23,000,000	16	34	0.1	117,000,000	12	5,000,000	2,895,649	7,895,649	33	1
948	PS	4,500,000	140,000,000	30,000,000	21	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	2,639,224	7,639,224	33	1
949	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
950	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
951	PS	4,225,000	140,000,000	21,000,000	15	31	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
952	PS	4,250,000	140,000,000	34,000,000	24	34	0.1	106,000,000	10	5,000,000	2,543,252	7,543,252	33	1
953	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	1
954	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	1
955	PS	4,250,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,991,417	7,991,417	33	1
956	PS	3,700,000	142,000,000	21,300,000	15	32	0.1	120,700,000	20	5,000,000	3,346,156	8,346,156	33	1
957	PS	4,000,000	140,000,000	30,000,000	21	34	0.1	110,000,000	12	5,000,000	2,722,405	7,722,405	33	1
958	PS	4,500,000	144,000,000	59,000,000	41	32	0.1	85,000,000	7	5,000,000	1,959,879	6,959,879	33	1
959	PS	4,500,000	142,000,000	22,000,000	15	29	0.1	120,000,000	15	5,000,000	3,109,588	8,109,588	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
960	PS	3,585,550	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	18	5,000,000	3,243,506	8,243,506	33	1
961	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
962	PS	4,425,000	144,000,000	25,000,000	17	32	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,991,417	7,991,417	33	1
963	PS	3,590,000	142,000,000	22,000,000	15	33	0.1	120,000,000	20	5,000,000	3,326,750	8,326,750	33	1
964	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	1
965	PS	4,000,000	142,000,000	21,300,000	15	37	0.1	120,700,000	12	5,000,000	2,987,221	7,987,221	33	1
966	PS	4,500,000	144,000,000	23,500,000	16	33	0.1	120,500,000	12	5,000,000	2,982,271	7,982,271	33	1
967	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
968	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	29	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
969	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	3,171,780	8,171,780	33	1
970	PS	4,500,000	140,000,000	25,000,000	18	35	0.1	115,000,000	10	5,000,000	2,759,189	7,759,189	33	1
971	PS	4,200,000	140,000,000	21,000,000	15	31	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
972	PS	4,150,000	142,000,000	21,300,000	15	32	0.1	120,700,000	15	5,000,000	3,127,727	8,127,727	33	1
973	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	2,969,897	7,969,897	33	1
974	PS	4,500,000	142,000,000	21,300,000	15	33	0.1	120,700,000	12	5,000,000	2,987,221	7,987,221	33	1
975	PS	3,800,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	16	5,000,000	3,155,226	8,155,226	33	1
976	PS	3,800,000	140,000,000	23,000,000	16	34	0.1	117,000,000	15	5,000,000	3,031,848	8,031,848	33	1
977	PS	3,600,000	144,000,000	32,000,000	22	34	0.1	112,000,000	15	5,000,000	2,902,282	7,902,282	33	1
978	PS	3,700,000	144,000,000	27,000,000	19	35	0.1	117,000,000	15	5,000,000	3,031,848	8,031,848	33	1
979	PS	4,076,000	144,000,000	24,000,000	17	32	0.1	120,000,000	15	5,000,000	3,109,588	8,109,588	33	1
980	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	27	0.1	119,000,000	18	5,000,000	3,216,477	8,216,477	33	1
981	PNS	4,000,000	142,000,000	42,000,000	30	34	0.1	100,000,000	10	5,000,000	2,399,294	7,399,294	33	1
982	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	39	0.1	115,000,000	10	5,000,000	2,759,189	7,759,189	33	1
983	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	14	5,000,000	3,037,731	8,037,731	33	1
984	PS	4,250,000	140,000,000	25,000,000	18	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	2,846,151	7,846,151	33	1
985	PS	4,452,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
986	PS	3,750,000	142,000,000	21,300,000	15	34	0.1	120,700,000	16	5,000,000	3,173,631	8,173,631	33	1
987	PS	4,300,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	1
988	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	1
989	PS	4,250,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,991,417	7,991,417	33	1
990	PS	4,150,000	140,000,000	21,000,000	15	31	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
991	PS	4,000,000	142,000,000	32,000,000	23	32	0.1	110,000,000	13	5,000,000	2,765,176	7,765,176	33	1
992	PS	4,500,000	142,000,000	21,300,000	15	29	0.1	120,700,000	15	5,000,000	3,127,727	8,127,727	33	1
993	PS	3,700,000	142,000,000	44,000,000	31	34	0.1	98,000,000	11	5,000,000	2,387,804	7,387,804	33	1
994	PNS	4,448,500	142,000,000	21,300,000	15	33	0.1	120,700,000	12	5,000,000	2,987,221	7,987,221	33	1
995	PS	4,500,000	142,000,000	23,000,000	16	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,945,147	7,945,147	33	1
996	PS	3,750,000	140,000,000	21,000,000	15	35	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
997	PS	3,750,000	142,000,000	25,000,000	18	34	0.1	117,000,000	15	5,000,000	3,031,848	8,031,848	33	1
998	PS	4,500,000	142,000,000	22,000,000	15	29	0.1	120,000,000	15	5,000,000	3,109,588	8,109,588	33	1
999	PS	4,300,000	140,000,000	70,000,000	50	31	0.1	70,000,000	6	5,000,000	1,601,543	6,601,543	33	1
1000	PNS	4,400,000	142,000,000	21,300,000	15	34	0.1	120,700,000	12	5,000,000	2,987,221	7,987,221	33	1
1001	PNS	4,249,299	142,000,000	52,000,000	37	29	0.1	90,000,000	10	5,000,000	2,159,365	7,159,365	33	1
1002	PS	4,060,000	142,000,000	21,300,000	15	34	0.1	120,700,000	14	5,000,000	3,081,127	8,081,127	33	1
1003	PS	4,440,000	140,000,000	21,000,000	15	29	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
1004	PS	4,325,000	142,000,000	32,000,000	23	31	0.1	110,000,000	12	5,000,000	2,722,405	7,722,405	33	1
1005	PS	4,291,000	140,000,000	60,000,000	43	27	0.1	80,000,000	9	5,000,000	1,891,272	6,891,272	33	1
1006	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
1007	PS	4,500,000	142,000,000	21,300,000	15	33	0.1	120,700,000	12	5,000,000	2,987,221	7,987,221	33	1
1008	PS	4,500,000	140,000,000	70,000,000	50	27	0.1	70,000,000	7	5,000,000	1,614,018	6,614,018	33	1
1009	PS	4,200,000	142,000,000	21,300,000	15	34	0.1	120,700,000	13	5,000,000	3,034,152	8,034,152	33	1
1010	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	11	5,000,000	2,899,476	7,899,476	33	1
1011	PS	3,740,000	142,000,000	21,300,000	15	35	0.1	120,700,000	15	5,000,000	3,127,727	8,127,727	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1012	PS	3,666,000	140,000,000	21,000,000	15	36	0.1	119,000,000	15	5,000,000	3,083,675	8,083,675	33	1
1013	PS	4,000,000	144,000,000	23,300,000	16	33	0.1	120,700,000	15	5,000,000	3,127,727	8,127,727	33	1
1014	PS	3,598,500	142,000,000	21,300,000	15	37	0.1	120,700,000	15	5,000,000	3,127,727	8,127,727	33	1
1015	PS	3,750,000	144,000,000	46,000,000	32	29	0.1	98,000,000	15	5,000,000	2,234,003	7,234,003	33	1
1016	PS	4,350,000	144,000,000	25,000,000	17	30	0.1	119,000,000	15	5,000,000	2,712,718	7,712,718	33	1
1017	PS	4,239,000	140,000,000	21,000,000	15	31	0.1	119,000,000	15	5,000,000	2,712,718	7,712,718	33	1
1018	PS	3,600,000	144,000,000	29,000,000	20	35	0.1	115,000,000	15	5,000,000	2,621,534	7,621,534	33	1
1019	PS	4,500,000	144,000,000	47,500,000	33	33	0.1	96,500,000	8	5,000,000	1,982,134	6,982,134	33	1
1020	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	2,790,224	7,790,224	33	1
1021	PS	3,975,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	2,712,718	7,712,718	33	1
1022	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	11	5,000,000	2,551,885	7,551,885	33	1
1023	PS	3,884,000	140,000,000	25,000,000	18	31	0.1	115,000,000	17	5,000,000	2,697,466	7,697,466	33	1
1024	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	11	5,000,000	2,551,885	7,551,885	33	1
1025	PS	4,200,000	140,000,000	23,000,000	16	34	0.1	117,000,000	12	5,000,000	2,548,108	7,548,108	33	1
1026	PNS	3,900,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	15	5,000,000	2,735,514	7,735,514	33	1
1027	PS	3,545,000	140,000,000	21,000,000	15	43	0.1	119,000,000	11	5,000,000	2,551,885	7,551,885	33	1
1028	PS	4,316,700	142,000,000	21,500,000	15	34	0.1	120,500,000	12	5,000,000	2,624,333	7,624,333	33	1
1029	PS	4,350,000	140,000,000	41,000,000	29	33	0.1	99,000,000	9	5,000,000	2,060,729	7,060,729	33	1
1030	PS	4,250,000	140,000,000	21,000,000	15	31	0.1	119,000,000	15	5,000,000	2,712,718	7,712,718	33	1
1031	PNS	4,078,000	140,000,000	39,000,000	28	34	0.1	101,000,000	10	5,000,000	2,133,190	7,133,190	33	1
1032	PS	4,300,000	142,000,000	43,000,000	30	33	0.1	99,000,000	9	5,000,000	2,060,729	7,060,729	33	1
1033	PS	3,750,000	140,000,000	25,000,000	18	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	2,621,534	7,621,534	33	1
1034	PS	4,190,000	142,000,000	21,300,000	15	32	0.1	120,700,000	15	5,000,000	2,751,471	7,751,471	33	1
1035	PS	4,325,500	140,000,000	21,000,000	15	32	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,632,036	7,632,036	33	1
1036	PNS	3,867,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1037	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1038	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1039	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1040	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1041	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1042	PS	4,000,000	144,000,000	34,000,000	24	32	0.1	110,000,000	13	5,000,000	1,342,987	6,342,987	33	1
1043	PS	4,200,000	144,000,000	24,000,000	17	35	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1044	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1045	PNS	4,100,000	144,000,000	27,000,000	19	33	0.1	117,000,000	13	5,000,000	1,428,449	6,428,449	33	1
1046	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	14	5,000,000	1,516,754	6,516,754	33	1
1047	PS	4,000,000	142,000,000	19,600,000	14	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1048	PNS	3,843,400	144,000,000	34,000,000	24	34	0.1	110,000,000	13	5,000,000	1,342,987	6,342,987	33	1
1049	PS	3,950,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1050	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1051	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1052	PS	4,200,000	144,000,000	39,000,000	27	31	0.1	105,000,000	12	5,000,000	1,262,896	6,262,896	33	1
1053	PS	3,800,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	14	5,000,000	1,363,096	6,363,096	33	1
1054	PS	4,500,000	144,000,000	26,000,000	18	29	0.1	118,000,000	15	5,000,000	1,483,767	6,483,767	33	1
1055	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	31	0.1	119,000,000	13	5,000,000	1,452,867	6,452,867	33	1
1056	PS	4,400,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	33	1
1057	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1058	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1059	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1060	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1061	PS	4,500,000	142,000,000	21,300,000	15	33	0.1	120,700,000	12	5,000,000	1,451,730	6,451,730	33	1
1062	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1063	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1064	PNS	3,800,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1065	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1066	PNS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1067	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1068	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1069	PS	3,800,000	144,000,000	21,600,000	15	35	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1070	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1071	PNS	4,447,400	144,000,000	21,600,000	15	37	0.1	122,400,000	10	5,000,000	1,429,515	6,429,515	33	1
1072	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1073	PNS	3,800,000	144,000,000	21,600,000	15	35	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1074	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1075	PNS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1076	PS	4,500,000	144,000,000	26,000,000	18	32	0.1	118,000,000	12	5,000,000	1,419,255	6,419,255	33	1
1077	PNS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1078	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1079	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1080	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1081	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	29	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1082	PS	4,100,000	144,000,000	41,000,000	28	29	0.1	103,000,000	13	5,000,000	1,257,524	6,257,524	33	1
1083	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1084	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1085	PS	4,000,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1086	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,431,283	6,431,283	33	1
1087	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1088	PS	4,450,000	144,000,000	24,000,000	17	32	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,465,076	6,465,076	33	1
1089	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1090	PS	3,800,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1091	PS	4,500,000	144,000,000	26,000,000	18	32	0.1	118,000,000	12	5,000,000	1,419,255	6,419,255	33	1
1092	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1093	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
1094	PS	4,000,000	144,000,000	34,000,000	24	30	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1095	PS	4,200,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1096	PS	4,000,000	144,000,000	57,000,000	40	29	0.1	87,000,000	10	5,000,000	1,016,077	6,016,077	33	1
1097	PS	3,900,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	20	5,000,000	1,645,723	6,645,723	33	1
1098	PS	3,930,024	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1099	PS	4,130,000	144,000,000	23,000,000	16	33	0.1	121,000,000	14	5,000,000	1,499,405	6,499,405	33	1
1100	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,424,843	6,424,843	33	1
1101	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1102	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1103	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1104	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1105	PS	4,000,000	144,000,000	39,000,000	27	29	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,320,301	6,320,301	33	1
1106	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1107	PS	4,000,000	144,000,000	44,000,000	31	27	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	33	1
1108	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1109	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1110	PS	4,400,000	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
1111	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1112	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1113	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	29	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1114	PS	4,200,000	144,000,000	59,000,000	41	32	0.1	85,000,000	8	5,000,000	967,076	5,967,076	33	1
1115	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1116	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1117	PS	4,000,000	144,000,000	61,600,000	43	32	0.1	82,400,000	8	5,000,000	937,494	5,937,494	33	1
1118	PS	4,109,215	143,000,000	22,000,000	15	36	0.1	121,000,000	12	5,000,000	1,455,338	6,455,338	33	1
1119	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1120	PS	4,500,000	142,000,000	22,000,000	15	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1121	PS	3,800,000	144,000,000	28,000,000	19	33	0.1	116,000,000	15	5,000,000	1,458,618	6,458,618	33	1
1122	PS	3,800,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1123	PS	3,800,000	144,000,000	25,000,000	17	33	0.1	119,000,000	16	5,000,000	1,517,870	6,517,870	33	1
1124	PDS	4,500,000	144,000,000	39,000,000	27	26	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,320,301	6,320,301	33	1
1125	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1126	PNS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1127	PS	4,500,000	142,000,000	21,300,000	15	33	0.1	120,700,000	12	5,000,000	1,451,730	6,451,730	33	1
1128	PS	3,750,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1129	PS	4,250,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,293,452	7,293,452	33	1
1130	PS	4,000,000	143,000,000	22,300,000	16	33	0.1	120,700,000	15	5,000,000	2,397,079	7,397,079	33	1
1131	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,258,570	7,258,570	33	1
1132	PS	4,200,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	15	5,000,000	2,080,501	7,080,501	33	1
1133	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	11	5,000,000	1,942,601	6,942,601	33	1
1134	PS	4,100,000	144,000,000	21,500,000	15	33	0.1	122,500,000	15	5,000,000	2,123,844	7,123,844	33	1
1135	PS	4,400,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,809,301	6,809,301	33	1
1136	PNS	4,200,000	143,000,000	21,450,000	15	32	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,916,751	6,916,751	33	1
1137	PNS	4,426,600	143,000,000	21,450,000	15	34	0.1	121,550,000	12	5,000,000	1,832,672	6,832,672	33	1
1138	PS	4,000,000	144,000,000	22,500,000	16	33	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,915,962	6,915,962	33	1
1139	PS	3,950,000	144,000,000	22,500,000	16	34	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,915,962	6,915,962	33	1
1140	PS	4,000,000	144,000,000	22,500,000	16	33	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,915,962	6,915,962	33	1
1141	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	24	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,576,924	6,576,924	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1142	PS	4,500,000	143,000,000	21,500,000	15	33	0.1	121,500,000	12	5,000,000	1,831,918	6,831,918	33	1
1143	PS	4,185,000	144,000,000	39,000,000	27	34	0.1	105,000,000	10	5,000,000	1,536,619	6,536,619	33	1
1144	PS	4,400,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,728,852	6,728,852	33	1
1145	PS	4,200,000	144,000,000	34,000,000	24	29	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,605,694	6,605,694	33	1
1146	PS	4,500,000	144,000,000	57,600,000	40	26	0.1	86,400,000	10	5,000,000	1,170,789	6,170,789	33	1
1147	PS	4,450,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,653,198	6,653,198	33	1
1148	PS	4,370,000	144,000,000	24,000,000	17	60	0.1	120,000,000	5	5,000,000	1,425,441	6,425,441	33	1
1149	PS	3,850,000	144,000,000	24,000,000	17	42	0.1	120,000,000	10	5,000,000	1,487,755	6,487,755	33	1
1150	PS	4,200,000	144,000,000	34,000,000	24	32	0.1	110,000,000	12	5,000,000	1,404,620	6,404,620	33	1
1151	PS	4,200,000	144,000,000	29,000,000	20	30	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,535,370	6,535,370	33	1
1152	PS	3,900,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	14	5,000,000	1,513,043	6,513,043	33	1
1153	PS	4,045,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	13	5,000,000	1,490,672	6,490,672	33	1
1154	PS	4,200,000	142,000,000	22,000,000	15	31	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,602,126	6,602,126	33	1
1155	PS	4,170,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1156	PS	4,500,000	144,000,000	59,000,000	41	32	0.1	85,000,000	7	5,000,000	1,016,056	6,016,056	33	1
1157	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1158	PS	4,025,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	20	5,000,000	1,741,761	6,741,761	33	1
1159	PS	4,059,455	142,000,000	36,300,000	26	35	0.1	105,700,000	10	5,000,000	1,310,464	6,310,464	33	1
1160	PS	4,500,000	144,000,000	22,500,000	16	33	0.1	121,500,000	12	5,000,000	1,551,467	6,551,467	33	1
1161	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,535,370	6,535,370	33	1
1162	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	29	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,602,126	6,602,126	33	1
1163	PS	4,415,986	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,557,851	6,557,851	33	1
1164	PS	4,500,000	144,000,000	22,450,000	16	30	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,622,820	6,622,820	33	1
1165	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1166	PS	4,000,000	143,000,000	22,000,000	15	33	0.1	121,000,000	15	5,000,000	1,615,477	6,615,477	33	1
1167	PS	4,000,000	143,000,000	22,000,000	15	33	0.1	121,000,000	15	5,000,000	1,615,477	6,615,477	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1168	PS	4,500,000	144,000,000	22,500,000	16	46	0.1	121,500,000	7	5,000,000	1,452,363	6,452,363	33	1
1169	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,581,409	6,581,409	33	1
1170	PS	3,600,000	143,000,000	28,000,000	20	35	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,535,370	6,535,370	33	1
1171	PDS	3,750,000	144,000,000	27,000,000	19	34	0.1	117,000,000	15	5,000,000	1,562,072	6,562,072	33	1
1172	PS	4,000,000	144,000,000	32,000,000	22	32	0.1	112,000,000	14	5,000,000	1,473,573	6,473,573	33	1
1173	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,239,796	6,239,796	33	1
1174	PS	4,100,000	143,000,000	21,500,000	15	40	0.1	121,500,000	10	5,000,000	1,506,352	6,506,352	33	1
1175	PS	3,800,000	144,000,000	22,000,000	15	44	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,512,551	6,512,551	33	1
1176	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,586,594	6,586,594	33	1
1177	PS	4,500,000	143,000,000	21,450,000	15	42	0.1	121,550,000	8	5,000,000	1,467,846	6,467,846	33	1
1178	PS	4,350,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1179	PS	4,000,000	144,000,000	24,000,000	17	37	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,532,313	6,532,313	33	1
1180	PNS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	42	0.1	122,400,000	10	5,000,000	1,517,510	6,517,510	33	1
1181	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,586,594	6,586,594	33	1
1182	PS	4,301,425	140,000,000	21,000,000	15	30	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,588,775	6,588,775	33	1
1183	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1184	PS	4,127,500	144,000,000	25,000,000	17	37	0.1	119,000,000	11	5,000,000	1,497,024	6,497,024	33	1
1185	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1186	PS	4,281,100	144,000,000	29,000,000	20	29	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,535,370	6,535,370	33	1
1187	PS	4,150,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1188	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,239,796	6,239,796	33	1
1189	PS	4,095,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1190	PS	3,800,000	144,000,000	22,000,000	15	35	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,628,828	6,628,828	33	1
1191	PS	4,000,000	143,000,000	45,000,000	31	27	0.1	98,000,000	15	5,000,000	1,308,403	6,308,403	33	1
1192	PS	4,150,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	14	5,000,000	1,578,828	6,578,828	33	1
1193	PS	4,300,000	144,000,000	34,000,000	24	31	0.1	110,000,000	12	5,000,000	1,404,620	6,404,620	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1194	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1195	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,532,313	6,532,313	33	1
1196	PS	3,875,000	143,000,000	44,000,000	31	35	0.1	99,000,000	10	5,000,000	1,227,398	6,227,398	33	1
1197	PS	4,437,500	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,586,594	6,586,594	33	1
1198	PS	3,850,000	144,000,000	29,000,000	20	37	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,468,466	6,468,466	33	1
1199	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,586,594	6,586,594	33	1
1200	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,628,828	6,628,828	33	1
1201	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,562,959	6,562,959	33	1
1202	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1203	PS	4,200,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,239,796	6,239,796	33	1
1204	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1205	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,628,828	6,628,828	33	1
1206	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1207	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	11	5,000,000	1,446,704	6,446,704	33	1
1208	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,535,370	6,535,370	33	1
1209	PS	4,300,000	143,000,000	21,450,000	15	31	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,622,820	6,622,820	33	1
1210	PS	4,200,000	144,000,000	24,000,000	17	39	0.1	120,000,000	10	5,000,000	1,487,755	6,487,755	33	1
1211	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,532,313	6,532,313	33	1
1212	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	36	0.1	120,000,000	10	5,000,000	1,487,755	6,487,755	33	1
1213	PS	4,000,000	142,000,000	26,300,000	19	32	0.1	115,700,000	15	5,000,000	1,544,716	6,544,716	33	1
1214	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	45	0.1	115,000,000	8	5,000,000	1,388,748	6,388,748	33	1
1215	PS	4,350,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1216	PNS	4,453,800	144,000,000	25,000,000	17	33	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,519,544	6,519,544	33	1
1217	PS	4,000,000	142,000,000	22,000,000	15	37	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,532,313	6,532,313	33	1
1218	PS	3,900,000	144,000,000	22,500,000	16	34	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,622,152	6,622,152	33	1
1219	PS	4,400,000	144,000,000	72,000,000	50	28	0.1	72,000,000	7	5,000,000	860,659	5,860,659	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1220	PS	4,000,000	143,000,000	23,000,000	16	34	0.1	120,000,000	14	5,000,000	1,578,828	6,578,828	33	1
1221	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,628,828	6,628,828	33	1
1222	PS	4,500,000	144,000,000	22,450,000	16	37	0.1	121,550,000	10	5,000,000	1,506,972	6,506,972	33	1
1223	PS	4,000,000	143,000,000	63,000,000	44	31	0.1	80,000,000	8	5,000,000	966,085	5,966,085	33	1
1224	PS	4,400,000	143,000,000	23,000,000	16	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,532,313	6,532,313	33	1
1225	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	13	5,000,000	1,490,672	6,490,672	33	1
1226	PS	4,500,000	143,000,000	21,450,000	15	33	0.1	121,550,000	12	5,000,000	1,552,105	6,552,105	33	1
1227	PS	3,600,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	17	5,000,000	1,579,287	6,579,287	33	1
1228	PS	4,500,000	144,000,000	59,000,000	41	26	0.1	85,000,000	10	5,000,000	1,053,826	6,053,826	33	1
1229	PNS	4,306,788	144,000,000	24,000,000	17	38	0.1	120,000,000	10	5,000,000	1,487,755	6,487,755	33	1
1230	PS	4,150,000	143,000,000	21,500,000	15	32	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,622,152	6,622,152	33	1
1231	PDS	4,500,000	144,000,000	39,000,000	27	26	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,401,860	6,401,860	33	1
1232	PS	3,836,500	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	12	5,000,000	1,276,927	6,276,927	33	1
1233	PS	4,200,000	144,000,000	22,450,000	16	28	0.1	121,550,000	20	5,000,000	1,735,336	6,735,336	33	1
1234	PS	4,450,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,586,594	6,586,594	33	1
1235	PS	3,700,000	140,000,000	25,000,000	18	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,535,370	6,535,370	33	1
1236	PS	3,850,000	144,000,000	22,000,000	15	35	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,628,828	6,628,828	33	1
1237	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1238	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	33	1
1239	PS	4,250,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,468,466	6,468,466	33	1
1240	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,628,828	6,628,828	33	1
1241	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,562,959	6,562,959	33	1
1242	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,512,551	6,512,551	33	1
1243	PS	4,000,000	144,000,000	44,000,000	31	34	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,239,796	6,239,796	33	1
1244	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,628,828	6,628,828	33	1
1245	PS	3,750,000	143,000,000	23,000,000	16	43	0.1	120,000,000	10	5,000,000	1,487,755	6,487,755	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1246	PS	4,200,000	143,000,000	21,450,000	15	32	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,622,820	6,622,820	33	1
1247	PS	4,477,000	144,000,000	44,000,000	31	24	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,335,105	6,335,105	33	1
1248	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,557,851	6,557,851	33	1
1249	PS	4,500,000	143,000,000	33,000,000	23	42	0.1	110,000,000	7	5,000,000	1,314,896	6,314,896	33	1
1250	PS	4,500,000	143,000,000	21,500,000	15	33	0.1	121,500,000	12	5,000,000	1,551,467	6,551,467	33	1
1251	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,586,594	6,586,594	33	1
1252	PS	4,413,500	144,000,000	22,450,000	16	30	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,622,820	6,622,820	33	1
1253	PS	3,700,000	144,000,000	22,450,000	16	36	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,622,820	6,622,820	33	1
1254	PS	3,600,000	144,000,000	22,450,000	16	35	0.1	121,550,000	17	5,000,000	1,669,238	6,669,238	33	1
1255	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,571,946	6,571,946	33	1
1256	PS	3,650,000	144,000,000	23,000,000	16	36	0.1	121,000,000	15	5,000,000	1,559,061	6,559,061	33	1
1257	PS	4,300,000	144,000,000	95,000,000	66	18	0.1	49,000,000	8	5,000,000	571,179	5,571,179	33	1
1258	PS	4,500,000	142,000,000	21,300,000	15	29	0.1	120,700,000	15	5,000,000	1,555,195	6,555,195	33	1
1259	PS	4,500,000	144,000,000	23,000,000	16	32	0.1	121,000,000	13	5,000,000	1,513,728	6,513,728	33	1
1260	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1261	PS	4,400,000	143,000,000	21,500,000	15	37	0.1	121,500,000	10	5,000,000	1,453,925	6,453,925	33	1
1262	PS	4,500,000	143,000,000	22,000,000	15	29	0.1	121,000,000	15	5,000,000	1,559,061	6,559,061	33	1
1263	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1264	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1265	PS	4,500,000	144,000,000	40,000,000	28	44	0.1	104,000,000	6	5,000,000	1,192,493	6,192,493	33	1
1266	PS	4,160,000	144,000,000	22,450,000	16	32	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,566,148	6,566,148	33	1
1267	PS	4,210,800	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1268	PS	3,850,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,546,176	6,546,176	33	1
1269	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1270	PS	4,200,000	144,000,000	43,200,000	30	33	0.1	100,800,000	10	5,000,000	1,206,219	6,206,219	33	1
1271	PS	3,800,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	20	5,000,000	1,653,330	6,653,330	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1272	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,571,946	6,571,946	33	1
1273	PS	4,350,000	144,000,000	21,600,000	15	38	0.1	122,400,000	10	5,000,000	1,464,695	6,464,695	33	1
1274	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	35	0.1	115,000,000	10	5,000,000	1,376,143	6,376,143	33	1
1275	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	11	5,000,000	1,396,307	6,396,307	33	1
1276	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,508,469	6,508,469	33	1
1277	PS	3,632,000	144,000,000	29,000,000	20	35	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,481,752	6,481,752	33	1
1278	PS	4,200,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	13	5,000,000	1,488,708	6,488,708	33	1
1279	PS	3,902,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,571,946	6,571,946	33	1
1280	PS	4,495,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,459,908	6,459,908	33	1
1281	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,508,469	6,508,469	33	1
1282	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1283	PS	4,000,000	143,000,000	21,500,000	15	33	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,565,503	6,565,503	33	1
1284	PS	4,200,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,546,176	6,546,176	33	1
1285	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,478,891	6,478,891	33	1
1286	PS	4,500,000	143,000,000	54,000,000	38	34	0.1	89,000,000	7	5,000,000	1,026,977	6,026,977	33	1
1287	PS	4,300,000	144,000,000	29,100,000	20	33	0.1	114,900,000	12	5,000,000	1,416,038	6,416,038	33	1
1288	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,417,270	6,417,270	33	1
1289	PS	4,500,000	144,000,000	35,500,000	25	26	0.1	108,500,000	15	5,000,000	1,398,001	6,398,001	33	1
1290	PS	4,250,000	144,000,000	44,000,000	31	26	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,288,480	6,288,480	33	1
1291	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,478,891	6,478,891	33	1
1292	PS	4,437,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,526,238	6,526,238	33	1
1293	PS	3,991,600	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1294	PS	4,500,000	143,000,000	23,000,000	16	29	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,546,176	6,546,176	33	1
1295	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,508,469	6,508,469	33	1
1296	PNS	4,000,000	144,000,000	46,000,000	32	27	0.1	98,000,000	15	5,000,000	1,262,710	6,262,710	33	1
1297	PS	4,000,000	143,000,000	21,500,000	15	41	0.1	121,500,000	10	5,000,000	1,453,925	6,453,925	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1298	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1299	PS	4,000,000	143,000,000	24,000,000	17	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,533,291	6,533,291	33	1
1300	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	41	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,459,908	6,459,908	33	1
1301	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,503,539	6,503,539	33	1
1302	PS	4,500,000	144,000,000	32,000,000	22	34	0.1	112,000,000	10	5,000,000	1,340,243	6,340,243	33	1
1303	PS	4,192,700	144,000,000	24,000,000	17	39	0.1	120,000,000	10	5,000,000	1,401,485	6,401,485	33	1
1304	PS	4,000,000	143,000,000	21,500,000	15	33	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,527,777	6,527,777	33	1
1305	PS	4,100,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1306	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1307	PS	4,000,000	144,000,000	25,000,000	17	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1308	PS	4,000,000	143,000,000	21,500,000	15	33	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,527,777	6,527,777	33	1
1309	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1310	PS	4,500,000	144,000,000	22,450,000	16	30	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,528,406	6,528,406	33	1
1311	PNS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
1312	PS	4,300,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,465,076	6,465,076	33	1
1313	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1314	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1315	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1316	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1317	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	28	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1318	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	41	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,424,843	6,424,843	33	1
1319	PS	4,370,000	144,000,000	25,000,000	17	33	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,431,283	6,431,283	33	1
1320	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1321	PS	4,500,000	144,000,000	56,000,000	39	33	0.1	88,000,000	7	5,000,000	991,134	5,991,134	33	1
1322	PS	4,466,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1323	PS	4,250,000	144,000,000	22,000,000	15	31	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1324	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1325	PS	3,575,000	144,000,000	29,000,000	20	35	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1326	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1327	PS	4,500,000	143,000,000	21,500,000	15	37	0.1	121,500,000	10	5,000,000	1,419,004	6,419,004	33	1
1328	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1329	PS	4,210,000	144,000,000	23,000,000	16	34	0.1	121,000,000	13	5,000,000	1,477,285	6,477,285	33	1
1330	PS	3,750,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1331	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1332	PS	4,300,000	144,000,000	22,000,000	15	31	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1333	PS	4,350,000	144,000,000	24,000,000	17	35	0.1	120,000,000	11	5,000,000	1,421,989	6,421,989	33	1
1334	PS	4,300,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,431,283	6,431,283	33	1
1335	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1336	PS	3,750,000	144,000,000	21,600,000	15	44	0.1	122,400,000	10	5,000,000	1,429,515	6,429,515	33	1
1337	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1338	PS	4,145,000	144,000,000	22,500,000	16	40	0.1	121,500,000	10	5,000,000	1,419,004	6,419,004	33	1
1339	PS	3,646,480	144,000,000	30,000,000	21	34	0.1	114,000,000	15	5,000,000	1,433,470	6,433,470	33	1
1340	PS	4,200,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1341	PS	4,500,000	144,000,000	31,600,000	22	31	0.1	112,400,000	12	5,000,000	1,351,901	6,351,901	33	1
1342	PS	4,200,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1343	PS	4,500,000	144,000,000	22,500,000	16	59	0.1	121,500,000	5	5,000,000	1,360,119	6,360,119	33	1
1344	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1345	PS	4,000,000	144,000,000	26,600,000	18	46	0.1	117,400,000	8	5,000,000	1,335,702	6,335,702	33	1
1346	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	34	0.1	119,000,000	11	5,000,000	1,410,139	6,410,139	33	1
1347	PS	4,361,700	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1348	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1349	PS	4,300,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1350	PS	4,500,000	140,000,000	35,000,000	25	26	0.1	105,000,000	15	5,000,000	1,320,301	6,320,301	33	1
1351	PS	4,500,000	143,000,000	21,450,000	15	37	0.1	121,550,000	10	5,000,000	1,419,588	6,419,588	33	1
1352	PS	4,500,000	144,000,000	22,450,000	16	37	0.1	121,550,000	10	5,000,000	1,419,588	6,419,588	33	1
1353	PS	4,500,000	144,000,000	79,000,000	55	25	0.1	65,000,000	7	5,000,000	732,088	5,732,088	33	1
1354	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1355	PS	4,350,000	144,000,000	29,000,000	20	32	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1356	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1357	PS	4,350,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	14	5,000,000	1,511,797	6,511,797	33	1
1358	PS	3,650,000	142,000,000	28,000,000	20	34	0.1	114,000,000	15	5,000,000	1,433,470	6,433,470	33	1
1359	PNS	4,496,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1360	PS	4,000,000	144,000,000	40,000,000	28	32	0.1	104,000,000	12	5,000,000	1,250,869	6,250,869	33	1
1361	PS	4,000,000	144,000,000	64,000,000	44	27	0.1	80,000,000	10	5,000,000	934,323	5,934,323	33	1
1362	PS	4,300,000	140,000,000	21,000,000	15	30	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1363	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	29	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1364	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1365	PS	4,110,000	142,000,000	21,300,000	15	32	0.1	120,700,000	15	5,000,000	1,517,717	6,517,717	33	1
1366	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,424,843	6,424,843	33	1
1367	PS	3,800,000	144,000,000	49,000,000	34	34	0.1	95,000,000	10	5,000,000	1,109,509	6,109,509	33	1
1368	PS	3,800,000	144,000,000	39,000,000	27	37	0.1	105,000,000	10	5,000,000	1,226,299	6,226,299	33	1
1369	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	39	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,424,843	6,424,843	33	1
1370	PS	4,000,000	143,000,000	34,000,000	24	30	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,370,598	6,370,598	33	1
1371	PS	4,225,500	140,000,000	61,000,000	44	32	0.1	79,000,000	7	5,000,000	889,768	5,889,768	33	1
1372	PS	4,150,000	140,000,000	35,000,000	25	34	0.1	105,000,000	10	5,000,000	1,226,299	6,226,299	33	1
1373	PS	3,600,000	144,000,000	44,000,000	31	38	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
1374	PS	4,360,000	144,000,000	21,600,000	15	38	0.1	122,400,000	10	5,000,000	1,429,515	6,429,515	33	1
1375	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,424,843	6,424,843	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1376	PS	4,350,000	142,000,000	21,300,000	15	34	0.1	120,700,000	12	5,000,000	1,451,730	6,451,730	33	1
1377	PS	4,372,667	142,700,000	22,700,000	16	34	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1378	PS	4,500,000	143,000,000	21,500,000	15	33	0.1	121,500,000	12	5,000,000	1,461,352	6,461,352	33	1
1379	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	35	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1380	PS	4,350,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1381	PS	4,100,000	143,000,000	21,500,000	15	35	0.1	121,500,000	13	5,000,000	1,483,390	6,483,390	33	1
1382	PS	4,500,000	143,000,000	23,000,000	16	31	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,465,076	6,465,076	33	1
1383	PS	3,983,000	142,000,000	22,000,000	15	34	0.1	120,000,000	14	5,000,000	1,487,013	6,487,013	33	1
1384	PS	4,481,476	142,000,000	22,000,000	15	30	0.1	120,000,000	14	5,000,000	1,487,013	6,487,013	33	1
1385	PS	3,600,000	140,000,000	28,000,000	20	34	0.1	112,000,000	15	5,000,000	1,408,321	6,408,321	33	1
1386	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1387	PS	3,700,000	144,000,000	22,450,000	16	36	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,528,406	6,528,406	33	1
1388	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1389	PS	4,000,000	144,000,000	25,000,000	17	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1390	PS	4,436,000	144,000,000	24,000,000	17	30	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1391	PS	4,475,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1392	PS	3,750,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	17	5,000,000	1,539,086	6,539,086	33	1
1393	PS	4,000,000	144,000,000	43,200,000	30	31	0.1	100,800,000	12	5,000,000	1,212,381	6,212,381	33	1
1394	PS	4,000,000	144,000,000	25,000,000	17	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1395	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,431,283	6,431,283	33	1
1396	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1397	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	33	1
1398	PS	3,950,000	144,000,000	25,000,000	17	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1399	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1400	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1401	PS	4,100,000	144,000,000	32,000,000	22	33	0.1	112,000,000	12	5,000,000	1,347,090	6,347,090	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1402	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1403	PS	4,411,000	143,000,000	22,000,000	15	30	0.1	121,000,000	15	5,000,000	1,521,490	6,521,490	33	1
1404	PS	4,000,000	143,000,000	45,000,000	31	29	0.1	98,000,000	13	5,000,000	1,196,479	6,196,479	33	1
1405	PS	3,600,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1406	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1407	PS	3,750,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1408	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1409	PS	4,100,000	144,000,000	24,000,000	17	32	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1410	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1411	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
1412	PS	4,437,500	144,000,000	33,000,000	23	34	0.1	111,000,000	10	5,000,000	1,296,374	6,296,374	33	1
1413	PS	4,000,000	144,000,000	39,000,000	27	32	0.1	105,000,000	12	5,000,000	1,262,896	6,262,896	33	1
1414	PS	4,500,000	144,000,000	34,500,000	24	33	0.1	109,500,000	10	5,000,000	1,278,855	6,278,855	33	1
1415	PS	3,900,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1416	PNS	4,000,000	144,000,000	24,000,000	17	35	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,465,076	6,465,076	33	1
1417	PS	4,300,000	144,000,000	29,000,000	20	29	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1418	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1419	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	27	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1420	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1421	PS	4,150,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1422	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1423	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1424	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1425	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1426	PS	3,700,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1427	PS	4,135,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	13	5,000,000	1,404,031	6,404,031	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1428	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1429	PS	3,600,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1430	PS	4,000,000	144,000,000	29,000,000	20	39	0.1	115,000,000	10	5,000,000	1,343,090	6,343,090	33	1
1431	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1432	PS	4,000,000	144,000,000	44,000,000	31	27	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	33	1
1433	PS	4,450,000	144,000,000	22,450,000	16	30	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,528,406	6,528,406	33	1
1434	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1435	PS	4,250,000	144,000,000	22,000,000	15	31	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1436	PS	4,000,000	144,000,000	45,000,000	31	34	0.1	99,000,000	10	5,000,000	1,156,225	6,156,225	33	1
1437	PS	4,100,000	144,000,000	27,000,000	19	39	0.1	117,000,000	10	5,000,000	1,366,448	6,366,448	33	1
1438	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1439	PS	4,288,900	144,000,000	25,000,000	17	34	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,431,283	6,431,283	33	1
1440	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1441	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	60	0.1	122,400,000	5	5,000,000	1,370,194	6,370,194	33	1
1442	PS	4,000,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1443	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,449,289	6,449,289	33	1
1444	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,425,530	6,425,530	33	1
1445	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	45	0.1	122,000,000	8	5,000,000	1,371,005	6,371,005	33	1
1446	PS	4,180,000	144,000,000	34,000,000	24	36	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,268,895	6,268,895	33	1
1447	PS	4,200,000	144,000,000	27,000,000	19	38	0.1	117,000,000	10	5,000,000	1,349,643	6,349,643	33	1
1448	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	27	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,366,105	6,366,105	33	1
1449	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,407,320	6,407,320	33	1
1450	PS	4,300,000	144,000,000	22,000,000	15	28	0.1	122,000,000	20	5,000,000	1,620,088	6,620,088	33	1
1451	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,515,135	6,515,135	33	1
1452	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,425,530	6,425,530	33	1
1453	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,153,541	6,153,541	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1454	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,471,133	6,471,133	33	1
1455	PS	3,688,000	144,000,000	29,000,000	20	38	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,366,133	6,366,133	33	1
1456	PS	3,860,000	144,000,000	27,000,000	19	33	0.1	117,000,000	15	5,000,000	1,453,039	6,453,039	33	1
1457	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	27	0.1	122,400,000	20	5,000,000	1,625,400	6,625,400	33	1
1458	PS	4,500,000	144,000,000	41,600,000	29	31	0.1	102,400,000	10	5,000,000	1,181,226	6,181,226	33	1
1459	PS	4,000,000	144,000,000	34,000,000	24	30	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,366,105	6,366,105	33	1
1460	PS	4,300,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	10	5,000,000	1,211,218	6,211,218	33	1
1461	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,413,651	6,413,651	33	1
1462	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,425,530	6,425,530	33	1
1463	PS	3,900,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,515,135	6,515,135	33	1
1464	PS	3,800,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,428,201	6,428,201	33	1
1465	PS	4,150,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1466	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,471,133	6,471,133	33	1
1467	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	29	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,477,878	6,477,878	33	1
1468	PS	4,000,000	144,000,000	22,500,000	16	33	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,508,926	6,508,926	33	1
1469	PNS	4,296,000	144,000,000	27,000,000	19	33	0.1	117,000,000	12	5,000,000	1,389,892	6,389,892	33	1
1470	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,475,957	6,475,957	33	1
1471	PS	3,600,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	17	5,000,000	1,468,989	6,468,989	33	1
1472	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,454,041	6,454,041	33	1
1473	PS	4,000,000	144,000,000	24,000,000	17	41	0.1	120,000,000	10	5,000,000	1,384,249	6,384,249	33	1
1474	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	9	5,000,000	1,137,786	6,137,786	33	1
1475	PS	3,750,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,428,201	6,428,201	33	1
1476	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,153,541	6,153,541	33	1
1477	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,515,135	6,515,135	33	1
1478	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1479	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,449,289	6,449,289	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1480	PS	4,200,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,153,541	6,153,541	33	1
1481	PS	4,200,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,447,016	6,447,016	33	1
1482	PS	4,100,000	143,000,000	21,500,000	15	32	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,508,926	6,508,926	33	1
1483	PS	3,600,000	144,000,000	29,000,000	20	35	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,428,201	6,428,201	33	1
1484	PS	4,370,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,425,530	6,425,530	33	1
1485	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1486	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,515,135	6,515,135	33	1
1487	PS	4,143,288	144,000,000	27,500,000	19	31	0.1	116,500,000	15	5,000,000	1,446,830	6,446,830	33	1
1488	PS	4,200,000	142,000,000	22,000,000	15	31	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,490,297	6,490,297	33	1
1489	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	27	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,366,105	6,366,105	33	1
1490	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,454,041	6,454,041	33	1
1491	PS	3,914,950	144,000,000	24,000,000	17	37	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,425,530	6,425,530	33	1
1492	PS	4,500,000	144,000,000	31,000,000	22	28	0.1	113,000,000	15	5,000,000	1,403,363	6,403,363	33	1
1493	PS	4,250,000	144,000,000	23,000,000	16	31	0.1	121,000,000	15	5,000,000	1,502,716	6,502,716	33	1
1494	PS	4,000,000	144,000,000	45,000,000	31	30	0.1	99,000,000	12	5,000,000	1,176,062	6,176,062	33	1
1495	PS	3,800,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,428,201	6,428,201	33	1
1496	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1497	PS	4,269,500	144,000,000	32,000,000	22	34	0.1	112,000,000	11	5,000,000	1,310,852	6,310,852	33	1
1498	PS	3,980,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1499	PS	4,300,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,471,133	6,471,133	33	1
1500	PS	4,500,000	144,000,000	31,600,000	22	34	0.1	112,400,000	10	5,000,000	1,296,580	6,296,580	33	1
1501	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,454,041	6,454,041	33	1
1502	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1503	PS	4,500,000	144,000,000	23,000,000	16	32	0.1	121,000,000	13	5,000,000	1,459,075	6,459,075	33	1
1504	PS	4,500,000	144,000,000	23,000,000	16	32	0.1	121,000,000	13	5,000,000	1,459,075	6,459,075	33	1
1505	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	29	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,477,878	6,477,878	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1506	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1507	PS	4,500,000	143,000,000	21,500,000	15	32	0.1	121,500,000	13	5,000,000	1,465,104	6,465,104	33	1
1508	PS	3,600,000	144,000,000	30,000,000	21	33	0.1	114,000,000	17	5,000,000	1,456,215	6,456,215	33	1
1509	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	27	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,366,105	6,366,105	33	1
1510	PS	3,875,000	144,000,000	22,450,000	16	33	0.1	121,550,000	16	5,000,000	1,531,259	6,531,259	33	1
1511	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1512	PS	4,350,000	143,000,000	21,500,000	15	38	0.1	121,500,000	10	5,000,000	1,401,552	6,401,552	33	1
1513	PS	4,200,000	143,000,000	28,000,000	20	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,366,133	6,366,133	33	1
1514	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,531,242	6,531,242	33	1
1515	PS	3,795,600	144,000,000	27,000,000	19	34	0.1	117,000,000	15	5,000,000	1,507,522	6,507,522	33	1
1516	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,503,539	6,503,539	33	1
1517	PS	3,630,000	143,000,000	28,000,000	20	35	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,481,752	6,481,752	33	1
1518	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1519	PS	3,795,600	144,000,000	27,000,000	19	34	0.1	117,000,000	15	5,000,000	1,507,522	6,507,522	33	1
1520	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	32	0.1	119,000,000	12	5,000,000	1,466,567	6,466,567	33	1
1521	PS	4,300,000	144,000,000	22,000,000	15	31	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,571,946	6,571,946	33	1
1522	PS	3,950,000	144,000,000	22,500,000	16	34	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,565,503	6,565,503	33	1
1523	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1524	PS	4,500,000	144,000,000	40,000,000	28	25	0.1	104,000,000	15	5,000,000	1,340,019	6,340,019	33	1
1525	PS	4,500,000	144,000,000	40,000,000	28	25	0.1	104,000,000	15	5,000,000	1,340,019	6,340,019	33	1
1526	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,531,242	6,531,242	33	1
1527	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1528	PS	4,400,000	144,000,000	25,000,000	17	30	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,533,291	6,533,291	33	1
1529	PS	4,500,000	144,000,000	32,000,000	22	30	0.1	112,000,000	12	5,000,000	1,380,298	6,380,298	33	1
1530	PS	4,100,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	14	5,000,000	1,549,112	6,549,112	33	1
1531	PS	3,750,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	17	5,000,000	1,622,175	6,622,175	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1532	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	36	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,503,539	6,503,539	33	1
1533	PS	4,245,000	144,000,000	27,000,000	19	37	0.1	117,000,000	10	5,000,000	1,400,076	6,400,076	33	1
1534	PS	4,275,000	144,000,000	21,600,000	15	39	0.1	122,400,000	10	5,000,000	1,464,695	6,464,695	33	1
1535	PS	4,200,000	144,000,000	29,000,000	20	43	0.1	115,000,000	8	5,000,000	1,340,523	6,340,523	33	1
1536	PS	4,500,000	144,000,000	45,000,000	31	32	0.1	99,000,000	9	5,000,000	1,168,454	6,168,454	33	1
1537	PS	3,784,000	144,000,000	45,000,000	31	35	0.1	99,000,000	10	5,000,000	1,184,679	6,184,679	33	1
1538	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	33	1
1539	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,196,646	6,196,646	33	1
1540	PS	4,250,000	144,000,000	61,600,000	43	33	0.1	82,400,000	7	5,000,000	950,819	5,950,819	33	1
1541	PS	4,500,000	144,000,000	23,000,000	16	29	0.1	121,000,000	15	5,000,000	1,521,490	6,521,490	33	1
1542	PS	4,260,821	143,000,000	43,000,000	30	29	0.1	100,000,000	12	5,000,000	1,202,759	6,202,759	33	1
1543	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1544	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
1545	PS	3,925,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	14	5,000,000	1,425,054	6,425,054	33	1
1546	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	35	0.1	122,000,000	14	5,000,000	1,511,797	6,511,797	33	1
1547	PS	4,207,000	144,000,000	21,600,000	15	39	0.1	122,400,000	10	5,000,000	1,429,515	6,429,515	33	1
1548	PNS	4,339,400	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1549	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1550	PNS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1551	PS	3,800,000	144,000,000	45,000,000	31	35	0.1	99,000,000	10	5,000,000	1,156,225	6,156,225	33	1
1552	PS	4,490,000	144,000,000	59,000,000	41	23	0.1	85,000,000	12	5,000,000	1,022,345	6,022,345	33	1
1553	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1554	PS	4,150,000	144,000,000	22,450,000	16	33	0.1	121,550,000	14	5,000,000	1,487,643	6,487,643	33	1
1555	PS	4,500,000	144,000,000	32,000,000	22	34	0.1	112,000,000	10	5,000,000	1,291,966	6,291,966	33	1
1556	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1557	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1558	PS	4,450,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,471,133	6,471,133	33	1
1559	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,475,957	6,475,957	33	1
1560	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,471,133	6,471,133	33	1
1561	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,475,957	6,475,957	33	1
1562	PS	4,200,000	144,000,000	22,500,000	16	32	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,508,926	6,508,926	33	1
1563	PS	4,000,000	144,000,000	27,600,000	19	34	0.1	116,400,000	13	5,000,000	1,403,606	6,403,606	33	1
1564	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1565	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,447,016	6,447,016	33	1
1566	PS	3,600,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	20	5,000,000	1,620,088	6,620,088	33	1
1567	PS	4,100,000	140,000,000	21,000,000	15	32	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,477,878	6,477,878	33	1
1568	PS	4,000,000	144,000,000	26,000,000	18	32	0.1	118,000,000	15	5,000,000	1,465,459	6,465,459	33	1
1569	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,515,135	6,515,135	33	1
1570	PS	4,380,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1571	PS	3,984,600	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1572	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1573	PS	4,200,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	33	1
1574	PS	4,410,000	144,000,000	49,000,000	34	29	0.1	95,000,000	10	5,000,000	1,109,509	6,109,509	33	1
1575	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1576	PS	3,763,000	140,000,000	60,000,000	43	29	0.1	80,000,000	10	5,000,000	934,323	5,934,323	33	1
1577	PNS	4,100,000	140,000,000	30,000,000	21	36	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
1578	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1579	PS	4,200,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
1580	PS	4,400,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1581	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1582	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1583	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1584	PS	4,486,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1585	PS	4,000,000	144,000,000	24,000,000	17	37	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1586	PS	4,100,000	140,000,000	21,000,000	15	32	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1587	PS	4,270,560	144,000,000	22,000,000	15	31	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1588	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1589	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1590	PS	4,500,000	144,000,000	74,000,000	51	30	0.1	70,000,000	6	5,000,000	783,457	5,783,457	33	1
1591	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1592	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1593	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1594	PS	4,330,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1595	PS	4,500,000	142,000,000	57,000,000	40	32	0.1	85,000,000	7	5,000,000	957,345	5,957,345	33	1
1596	PNS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1597	PS	3,800,000	144,000,000	25,000,000	17	34	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1598	PS	4,500,000	144,000,000	39,000,000	27	34	0.1	105,000,000	9	5,000,000	1,209,535	6,209,535	33	1
1599	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1600	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1601	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1602	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1603	PS	4,325,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	33	1
1604	PS	4,200,000	144,000,000	26,000,000	18	33	0.1	118,000,000	13	5,000,000	1,440,658	6,440,658	33	1
1605	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1606	PS	4,300,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,465,076	6,465,076	33	1
1607	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1608	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1609	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1610	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1611	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1612	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1613	PS	4,200,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1614	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
1615	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,465,076	6,465,076	33	1
1616	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1617	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	33	1
1618	PNS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1619	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1620	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1621	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1622	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	36	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1623	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1624	PS	4,500,000	144,000,000	26,000,000	18	32	0.1	118,000,000	12	5,000,000	1,419,255	6,419,255	33	1
1625	PS	4,500,000	144,000,000	26,000,000	18	32	0.1	118,000,000	12	5,000,000	1,419,255	6,419,255	33	1
1626	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1627	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1628	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1629	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1630	PS	4,000,000	144,000,000	39,000,000	27	32	0.1	105,000,000	12	5,000,000	1,262,896	6,262,896	33	1
1631	PS	4,064,300	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1632	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1633	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	29	0.1	119,000,000	15	5,000,000	1,496,341	6,496,341	33	1
1634	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1635	PS	4,250,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1636	PS	4,250,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,508,915	6,508,915	33	1
1637	PS	3,700,000	144,000,000	31,000,000	22	33	0.1	113,000,000	15	5,000,000	1,420,895	6,420,895	33	1
1638	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1639	PS	4,300,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	33	1
1640	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1641	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1642	PS	4,500,000	144,000,000	34,000,000	24	33	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,284,695	6,284,695	33	1
1643	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1644	WRS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1645	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	14	5,000,000	1,511,797	6,511,797	33	1
1646	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1647	PS	4,460,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	33	1
1648	PS	4,000,000	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	12	5,000,000	1,202,759	6,202,759	33	1
1649	PS	4,000,000	144,000,000	34,000,000	24	30	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1650	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,465,076	6,465,076	33	1
1651	PS	4,500,000	144,000,000	25,000,000	17	31	0.1	119,000,000	13	5,000,000	1,452,867	6,452,867	33	1
1652	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1653	PS	4,350,000	144,000,000	28,000,000	19	33	0.1	116,000,000	12	5,000,000	1,395,200	6,395,200	33	1
1654	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1655	PS	4,225,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1656	PS	4,000,000	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	12	5,000,000	1,202,759	6,202,759	33	1
1657	PS	4,250,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
1658	PS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33	1
1659	PS	4,400,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1660	PS	3,780,000	144,000,000	26,000,000	18	34	0.1	118,000,000	15	5,000,000	1,483,767	6,483,767	33	1
1661	PS	3,547,930	144,000,000	34,000,000	24	34	0.1	110,000,000	15	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1662	PS	3,800,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	33	1
1663	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1664	PS	4,300,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	10	5,000,000	1,226,299	6,226,299	33	1
1665	PS	4,057,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	33	1
1666	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1667	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1668	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1669	PS	4,300,000	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1670	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1671	PS	4,450,000	144,000,000	23,000,000	16	33	0.1	121,000,000	12	5,000,000	1,455,338	6,455,338	33	1
1672	PS	4,250,000	143,000,000	21,450,000	15	31	0.1	121,550,000	15	5,000,000	1,509,547	6,509,547	33	1
1673	PS	4,000,000	144,000,000	24,000,000	17	33	0.1	120,000,000	15	5,000,000	1,490,297	6,490,297	33	1
1674	PS	4,500,000	143,000,000	24,000,000	17	34	0.1	119,000,000	11	5,000,000	1,392,781	6,392,781	33	1
1675	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	30	0.1	115,000,000	13	5,000,000	1,386,724	6,386,724	33	1
1676	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	31	0.1	120,000,000	13	5,000,000	1,447,016	6,447,016	33	1
1677	PS	4,400,000	144,000,000	22,500,000	16	30	0.1	121,500,000	15	5,000,000	1,508,926	6,508,926	33	1
1678	PS	3,820,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	16	5,000,000	1,536,928	6,536,928	33	1
1679	PS	4,000,000	144,000,000	52,000,000	36	31	0.1	92,000,000	10	5,000,000	1,061,258	6,061,258	33	1
1680	PS	4,026,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	33	1
1681	PS	4,000,000	144,000,000	23,000,000	16	33	0.1	121,000,000	15	5,000,000	1,502,716	6,502,716	33	1
1682	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,407,320	6,407,320	33	1
1683	PS	4,000,000	144,000,000	28,000,000	19	33	0.1	116,000,000	14	5,000,000	1,437,446	6,437,446	33	1
1684	PS	4,140,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1685	PS	4,300,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,383,172	6,383,172	33	1
1686	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	33	1
1687	PS	4,000,000	144,000,000	32,000,000	22	33	0.1	112,000,000	13	5,000,000	1,367,405	6,367,405	33	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1688	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1689	PS	4,400,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	33	1
1690	PS	4,225,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1691	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1692	PS	4,244,396	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	14	5,000,000	1,516,754	6,516,754	33	1
1693	PS	3,546,667	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	20	5,000,000	1,645,723	6,645,723	33	1
1694	PS	4,250,000	144,000,000	29,000,000	20	33	0.1	115,000,000	12	5,000,000	1,417,270	6,417,270	33	1
1695	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	33	1
1696	PS	4,000,000	144,000,000	44,000,000	31	31	0.1	100,000,000	12	5,000,000	1,276,927	6,276,927	33	1
1697	PS	3,575,000	144,000,000	34,000,000	24	42	0.1	110,000,000	10	5,000,000	1,363,775	6,363,775	33	1
1698	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1699	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1700	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	33	1
1701	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	31	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,586,146	7,586,146	33	1
1702	PS	4,420,000	143,000,000	21,450,000	15	34	0.1	121,550,000	12	5,000,000	2,601,091	7,601,091	33	1
1703	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	2,748,634	7,748,634	33	1
1704	PS	4,320,000	144,000,000	22,000,000	15	31	0.1	122,000,000	15	5,000,000	2,732,550	7,732,550	33	1
1705	PS	4,000,000	144,000,000	59,000,000	41	33	0.1	85,000,000	8	5,000,000	1,715,696	6,715,696	33	1
1706	PS	4,250,000	144,000,000	29,000,000	20	30	0.1	115,000,000	15	5,000,000	2,575,265	7,575,265	33	1
1707	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	12	5,000,000	2,610,721	7,610,721	33	1
1708	PS	4,450,000	140,000,000	30,000,000	21	27	0.1	110,000,000	15	5,000,000	2,463,775	7,463,775	33	1
1709	PS	4,500,000	143,000,000	21,500,000	15	33	0.1	121,500,000	12	5,000,000	2,600,021	7,600,021	33	1
1710	PS	4,500,000	143,000,000	23,000,000	16	31	0.1	120,000,000	13	5,000,000	2,607,878	7,607,878	33	1
1711	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	28	0.1	122,000,000	20	5,000,000	2,923,170	7,923,170	33	1
1712	PS	4,100,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	2,732,550	7,732,550	33	1
1713	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	2,732,550	7,732,550	33	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1714	PS	3,750,000	144,000,000	33,300,000	23	32	0.1	110,700,000	15	5,000,000	2,485,897	7,485,897	33	1
1715	PS	3,700,000	140,000,000	25,000,000	18	30	0.1	115,000,000	20	5,000,000	2,582,459	7,582,459	33	1
1716	PS	4,375,000	144,000,000	21,600,000	15	38	0.1	122,400,000	10	5,000,000	2,540,261	7,540,261	33	1
1717	PNS	4,200,695	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	2,748,634	7,748,634	33	1
1718	PS	4,110,000	142,000,000	21,300,000	15	32	0.1	120,700,000	15	5,000,000	2,703,433	7,703,433	33	1
1719	PS	4,200,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	13	5,000,000	2,586,146	7,586,146	33	1
1720	PS	4,000,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	14	5,000,000	2,625,877	7,625,877	33	1
1721	PS	4,050,000	140,000,000	21,000,000	15	32	0.1	119,000,000	15	5,000,000	2,665,357	7,665,357	33	1
1722	PS	4,500,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	11	5,000,000	2,507,488	7,507,488	33	1
1723	PS	4,350,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	12	5,000,000	2,546,523	7,546,523	33	1
1724	PS	4,375,000	142,000,000	21,300,000	15	30	0.1	120,700,000	15	5,000,000	2,710,459	7,710,459	33	1
1725	PS	4,250,000	142,000,000	21,300,000	15	33	0.1	120,700,000	13	5,000,000	2,623,091	7,623,091	33	1
1726	PNS	4,450,000	142,000,000	31,300,000	22	32	0.1	110,700,000	11	5,000,000	2,332,596	7,332,596	33	1
1727	PS	4,000,000	142,000,000	47,000,000	33	32	0.1	95,000,000	10	5,000,000	1,971,608	6,971,608	33	1
1728	PS	4,250,000	140,000,000	80,000,000	57	31	0.1	60,000,000	5	5,000,000	1,187,694	6,187,694	33	1
1729	PS	4,500,000	144,000,000	32,000,000	22	34	0.1	112,000,000	10	5,000,000	2,324,422	7,324,422	33	1
1730	PS	3,900,000	140,000,000	21,000,000	15	33	0.1	119,000,000	15	5,000,000	2,665,357	7,665,357	33	1
1731	PS	4,500,000	143,000,000	21,450,000	15	30	0.1	121,550,000	15	5,000,000	2,721,351	7,721,351	33	1
1732	PS	4,005,000	140,000,000	21,000,000	15	34	0.1	119,000,000	14	5,000,000	2,625,877	7,625,877	33	1
1733	PS	3,700,000	142,000,000	27,000,000	19	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	2,575,765	7,575,765	33	1
1734	PS	2,500,000	144,000,000	28,800,000	20	50	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	3
1735	PS	2,300,000	144,000,000	28,800,000	20	55	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	3
1736	PS	1,500,000	144,000,000	54,000,000	38	66	0.1	90,000,000	15	5,000,000	1,131,687	6,131,687	33.75	3
1737	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	18	5,000,000	1,510,084	6,510,084	33.75	2
1738	PS	3,000,000	144,000,000	28,800,000	20	42	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	2
1739	PS	3,300,000	144,000,000	33,800,000	23	33	0.1	110,200,000	19	5,000,000	1,463,366	6,463,366	33.75	2

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1740	PS	3,000,000	144,000,000	28,800,000	20	42	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	2
1741	PS	3,500,000	144,000,000	38,800,000	27	37	0.1	105,200,000	12	5,000,000	1,265,302	6,265,302	33.75	2
1742	PS	3,300,000	144,000,000	28,800,000	20	38	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	2
1743	PS	4,250,000	144,000,000	44,000,000	31	32	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	33.25	1
1744	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	39	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	33.25	1
1745	PS	4,500,000	144,000,000	32,000,000	22	34	0.1	112,000,000	10	5,000,000	1,308,053	6,308,053	33.75	1
1746	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	1
1747	PS	3,797,256	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	1
1748	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	11	5,000,000	1,365,109	6,365,109	33.75	1
1749	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	1
1750	PS	3,800,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	33.75	1
1751	PS	4,238,100	108,900,000	21,780,000	20	28	0.1	87,120,000	10	5,000,000	1,017,478	6,017,478	33.75	1
1752	PS	3,500,000	144,000,000	35,000,000	24	34	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,370,598	6,370,598	34	2
1753	PS	3,496,000	144,000,000	36,800,000	26	34	0.1	107,200,000	15	5,000,000	1,347,964	6,347,964	34	2
1754	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	34	1
1755	PNS	3,520,700	144,000,000	33,800,000	23	34	0.1	110,200,000	15	5,000,000	1,385,687	6,385,687	34	1
1756	PS	4,411,803	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	34	1
1757	PNS	3,746,000	144,000,000	29,500,000	20	33	0.1	114,500,000	15	5,000,000	1,439,757	6,439,757	34	1
1758	PS	3,621,100	144,000,000	28,800,000	20	35	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	34	1
1759	PS	3,576,800	144,000,000	35,000,000	24	33	0.1	109,000,000	15	5,000,000	1,370,598	6,370,598	34	1
1760	PS	4,254,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	34	1
1761	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	34	1
1762	PS	3,750,000	144,000,000	29,000,000	20	34	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	34	1
1763	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	34	1
1764	PS	4,012,300	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	34	1
1765	PS	3,750,000	144,000,000	21,600,000	15	36	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	34	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1766	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	34	1
1767	PS	1,600,000	144,000,000	28,800,000	20	79	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35	3
1768	PS	4,500,000	132,000,000	19,800,000	15	32	0.1	112,200,000	11	5,000,000	2,406,063	7,406,063	35	1
1769	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	35	1
1770	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,930,155	6,930,155	35	1
1771	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,562,959	6,562,959	35	1
1772	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	35	1
1773	PS	1,799,100	144,000,000	28,800,000	20	67	0.1	115,200,000	17	5,000,000	1,489,939	6,489,939	35.25	3
1774	PS	2,250,000	144,000,000	28,800,000	20	56	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	3
1775	PS	1,900,000	144,000,000	28,800,000	20	66	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	3
1776	PNS	1,954,800	144,000,000	33,800,000	23	69	0.1	110,200,000	12	5,000,000	1,325,440	6,325,440	35.25	3
1777	PS	3,100,000	144,000,000	28,800,000	20	41	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	2
1778	PS	3,000,000	89,000,000	17,800,000	20	32	0.1	71,200,000	10	6,000,000	1,323,209	7,323,209	35.25	2
1779	PS	3,500,000	144,000,000	28,800,000	20	40	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	35.25	2
1780	PS	2,850,000	144,000,000	28,800,000	20	44	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	2
1781	PS	3,000,000	89,000,000	17,800,000	20	41	0.1	71,200,000	7	6,000,000	1,278,999	7,278,999	35.25	2
1782	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1783	PS	3,650,000	144,000,000	31,800,000	22	34	0.1	112,200,000	15	5,000,000	1,410,836	6,410,836	35.25	1
1784	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	35.25	1
1785	PS	4,450,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	35.25	1
1786	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	35.25	1
1787	PS	3,571,485	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	17	5,000,000	1,489,939	6,489,939	35.25	1
1788	PS	3,710,000	144,000,000	28,800,000	20	34	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1789	PS	4,250,000	144,000,000	28,800,000	20	30	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1790	PS	4,400,000	144,000,000	31,800,000	22	28	0.1	112,200,000	15	5,000,000	1,410,836	6,410,836	35.25	1
1791	PS	4,025,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1792	WRS	4,047,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1793	PS	3,800,000	144,000,000	39,000,000	27	37	0.1	105,000,000	10	5,000,000	1,226,299	6,226,299	35.25	1
1794	PS	4,400,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1795	PS	4,050,000	144,000,000	28,800,000	20	31	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1796	PS	3,798,000	144,000,000	28,800,000	20	33	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1797	PS	4,300,000	144,000,000	28,800,000	20	29	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1798	PS	4,364,635	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	35.25	1
1799	PS	4,500,000	144,000,000	43,200,000	30	25	0.1	100,800,000	15	5,000,000	1,267,489	6,267,489	35.25	1
1800	PS	4,500,000	144,000,000	28,800,000	20	28	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1801	PS	4,350,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	10	5,000,000	1,345,426	6,345,426	35.25	1
1802	WRS	3,550,000	144,000,000	28,800,000	20	40	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	35.25	1
1803	PS	4,385,100	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	12	5,000,000	1,385,578	6,385,578	35.25	1
1804	PNS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	35.25	1
1805	PNS	2,302,700	144,000,000	74,000,000	51	33	0.1	70,000,000	15	5,000,000	880,201	5,880,201	36	3
1806	PS	2,050,000	144,000,000	22,000,000	15	58	0.1	122,000,000	20	5,000,000	1,640,345	6,640,345	36	3
1807	PNS	1,832,100	144,000,000	50,000,000	35	56	0.1	94,000,000	15	5,000,000	1,181,984	6,181,984	36	3
1808	PNS	1,943,000	144,000,000	21,600,000	15	69	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	36	3
1809	PS	3,500,000	144,000,000	37,000,000	26	33	0.1	107,000,000	15	5,000,000	1,345,450	6,345,450	36	2
1810	PS	2,693,000	144,000,000	54,000,000	38	33	0.1	90,000,000	20	5,000,000	1,210,091	6,210,091	36	2
1811	PS	3,500,000	144,000,000	22,000,000	15	39	0.1	122,000,000	14	5,000,000	1,511,797	6,511,797	36	2
1812	PNS	3,453,800	144,000,000	30,000,000	21	34	0.1	114,000,000	18	5,000,000	1,494,354	6,494,354	36	2
1813	PS	2,580,824	144,000,000	22,000,000	15	46	0.1	122,000,000	20	5,000,000	1,640,345	6,640,345	36	2
1814	PS	3,400,000	144,000,000	21,600,000	15	39	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	36	2
1815	PNS	3,500,000	99,000,000	15,000,000	15	33	0.1	84,000,000	10	6,000,000	1,561,089	7,561,089	36	2
1816	PS	3,391,907	144,000,000	22,000,000	15	44	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	36	2
1817	PNS	3,057,645	144,000,000	24,000,000	17	48	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	36	2

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1818	PS	3,143,700	144,000,000	36,000,000	25	34	0.1	108,000,000	20	5,000,000	1,452,109	6,452,109	36	2
1819	PS	3,400,000	144,000,000	34,000,000	24	34	0.1	110,000,000	17	5,000,000	1,422,685	6,422,685	36	2
1820	PS	3,500,000	144,000,000	49,000,000	34	30	0.1	95,000,000	15	5,000,000	1,194,558	6,194,558	36	2
1821	WRS	3,000,000	144,000,000	21,600,000	15	45	0.1	122,400,000	15	5,000,000	2,430,841	7,430,841	36	2
1822	PNS	3,273,800	144,000,000	21,600,000	15	41	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,634,168	6,634,168	36	2
1823	PS	3,389,600	144,000,000	37,900,000	26	34	0.1	106,100,000	15	5,000,000	1,334,133	6,334,133	36	2
1824	PNS	2,600,000	144,000,000	31,276,000	22	48	0.1	112,724,000	15	6,000,000	2,536,290	8,536,290	36	2
1825	PS	3,500,000	144,000,000	21,600,000	15	38	0.1	122,400,000	15	6,000,000	2,754,000	8,754,000	36	2
1826	PS	3,500,000	144,000,000	21,600,000	15	38	0.1	122,400,000	15	6,000,000	2,754,000	8,754,000	36	2
1827	PS	3,128,000	144,000,000	47,000,000	33	34	0.1	97,000,000	15	6,000,000	2,182,500	8,182,500	36	2
1828	PS	2,550,000	144,000,000	28,800,000	20	49	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	36	2
1829	PS	4,000,000	144,000,000	28,800,000	20	32	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	36	1
1830	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1831	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	36	1
1832	PS	3,577,953	144,000,000	38,000,000	26	32	0.1	106,000,000	15	5,000,000	1,332,875	6,332,875	36	1
1833	PNS	4,497,000	144,000,000	32,000,000	22	30	0.1	112,000,000	12	5,000,000	1,347,090	6,347,090	36	1
1834	PS	3,850,000	144,000,000	39,000,000	27	33	0.1	105,000,000	12	5,000,000	1,262,896	6,262,896	36	1
1835	PS	4,300,697	144,000,000	22,000,000	15	31	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1836	PNS	4,483,728	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1837	PS	4,333,000	144,000,000	54,000,000	38	24	0.1	90,000,000	13	5,000,000	1,098,807	6,098,807	36	1
1838	PS	4,000,000	144,000,000	46,000,000	32	33	0.1	98,000,000	10	5,000,000	1,144,546	6,144,546	36	1
1839	PS	3,728,103	144,000,000	21,600,000	15	36	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	36	1
1840	PS	4,500,000	144,000,000	31,000,000	22	32	0.1	113,000,000	11	5,000,000	1,339,039	6,339,039	36	1
1841	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1842	PNS	4,371,000	144,000,000	24,000,000	17	34	0.1	120,000,000	12	5,000,000	1,443,310	6,443,310	36	1
1843	PS	4,287,000	123,000,000	18,500,000	15	27	0.1	104,500,000	15	5,000,000	1,314,014	6,314,014	36	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas (m2)	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)		
1844	PS	4,450,000	144,000,000	22,000,000	15	34	0.1	122,000,000	12	5,000,000	1,467,365	6,467,365	36	1
1845	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1846	PS	4,185,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1847	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	36	1
1848	PS	4,000,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1849	PS	4,500,000	144,000,000	29,000,000	20	27	0.1	115,000,000	16	5,000,000	1,466,849	6,466,849	36	1
1850	PS	3,697,000	144,000,000	22,000,000	15	36	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1851	PNS	4,500,000	144,000,000	44,000,000	31	30	0.1	100,000,000	10	5,000,000	1,167,904	6,167,904	36	1
1852	PS	4,052,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1853	PS	4,400,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1854	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	28	0.1	122,000,000	20	5,000,000	1,640,345	6,640,345	36	1
1855	PNS	4,445,000	144,000,000	26,000,000	18	31	0.1	118,000,000	13	5,000,000	1,440,658	6,440,658	36	1
1856	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	36	1
1857	PNS	4,485,000	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1858	PS	4,030,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1859	PS	4,400,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	12	5,000,000	1,472,176	6,472,176	36	1
1860	PS	3,700,000	144,000,000	31,000,000	22	33	0.1	113,000,000	15	5,000,000	1,420,895	6,420,895	36	1
1861	PNS	4,232,800	144,000,000	68,000,000	47	20	0.1	76,000,000	14	5,000,000	941,775	5,941,775	36	1
1862	PNS	3,605,200	144,000,000	76,000,000	53	32	0.1	68,000,000	7	5,000,000	765,876	5,765,876	36	1
1863	PNS	4,056,000	144,000,000	44,000,000	31	27	0.1	100,000,000	15	5,000,000	1,257,430	6,257,430	36	1
1864	PS	4,497,458	144,000,000	22,000,000	15	30	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1865	PS	4,500,000	144,000,000	22,000,000	15	37	0.1	122,000,000	10	5,000,000	1,424,843	6,424,843	36	1
1866	PS	4,100,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1867	PS	4,400,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	13	5,000,000	1,489,494	6,489,494	36	1
1868	PS	4,500,000	144,000,000	24,000,000	17	36	0.1	120,000,000	10	5,000,000	1,401,485	6,401,485	36	1
1869	PS	4,300,000	144,000,000	32,000,000	22	35	0.1	112,000,000	10	5,000,000	1,308,053	6,308,053	36	1

Lampiran 2 : (lanjutan)

No	Pekerjaan	Penghasilan	Informasi Kredit							Subsidi			Luas	Gol
			Harga Rusun	Uang Muka	%UM	%C	ASB	Nilai KPR	T	UM	SSB	Jumlah		
			(Rp)	(Rp)				(Rp)	(Th)	(Rp)	(Rp) Th Ke-1	(Rp)	(m2)	
1870	PS	4,100,000	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1871	PS	4,200,000	144,000,000	22,000,000	15	32	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1872	PNS	4,450,000	144,000,000	40,200,000	28	32	0.1	103,800,000	10	5,000,000	1,212,285	6,212,285	36	1
1873	PS	4,089,344	144,000,000	22,000,000	15	33	0.1	122,000,000	15	5,000,000	1,534,064	6,534,064	36	1
1874	WRS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	60	0.1	122,400,000	5	5,000,000	3,068,986	8,068,986	36	1
1875	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	3,486,911	8,486,911	36	1
1876	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	2,430,841	7,430,841	36	1
1877	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	14	5,000,000	1,610,404	6,610,404	36	1
1878	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,586,594	6,586,594	36	1
1879	PS	4,250,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,577,100	6,577,100	36	1
1880	PS	4,100,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	36	1
1881	PS	4,200,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,520,103	6,520,103	36	1
1882	PS	3,600,000	144,000,000	31,300,000	22	34	0.1	112,700,000	15	5,000,000	1,417,123	6,417,123	36	1
1883	PNS	4,264,300	144,000,000	21,600,000	15	31	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	36	1
1884	PS	4,068,333	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	15	5,000,000	1,539,094	6,539,094	36	1
1885	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	32	0.1	122,400,000	13	5,000,000	1,494,378	6,494,378	36	1
1886	PS	4,250,000	144,000,000	41,600,000	29	33	0.1	102,400,000	10	5,000,000	3,035,281	8,035,281	36	1
1887	PS	5,000,000	144,000,000	21,600,000	15	33	0.1	122,400,000	10	5,000,000	2,754,000	7,754,000	36	1
1888	PS	4,000,000	144,000,000	21,600,000	15	34	0.1	122,400,000	15	5,000,000	2,754,000	7,754,000	36	1
1889	PNS	3,579,300	144,000,000	21,600,000	15	37	0.1	122,400,000	15	5,000,000	2,754,000	7,754,000	36	1
1890	PS	4,500,000	144,000,000	21,600,000	15	30	0.1	122,400,000	15	5,000,000	2,754,000	7,754,000	36	1
1891	PS	3,879,000	144,000,000	21,600,000	15	35	0.1	122,400,000	15	5,000,000	2,754,000	7,754,000	36	1
1892	PS	3,550,000	144,000,000	28,800,000	20	36	0.1	115,200,000	15	5,000,000	1,448,559	6,448,559	36	1
1893	PS	4,059,909	144,000,000	29,000,000	20	31	0.1	115,000,000	15	5,000,000	1,446,044	6,446,044	36	1

Keterangan :

% UM = % Uang Muka

% C = % cicilan terhadap penghasilan perbulan

ASB = Asumsi Suku Bunga KPR per-Tahun

T = Tenor KPR

Th = Tahun

SSB = Subsidi Selisih Bunga

Gol = Golongan Masyarakat kelompok sasaran

PS = Pegawai Swasta

PNS = Pegawai negeri sipil

WRS = Wiraswasta

PDN = Pegawai BUMN



Lampiran 3

Data 2 Debitur KPR Sarasuna Bersubsidi

Lampiran 3 : Data 2 Debitur KPR Sarasuna Bersubsidi

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
1	1	1	26	0		2		21
2	1	0	25	0		1		36
3	0	0	31	1		3	25000000	36
4	1	1	26	0		1		21
5	0	0	25	0		1		30
6	1	1	30	1		2		36
7	1	0	31	0		1		36
8	1	0	46	1		4	12000000	36
9	1	1	27	0		1		21
10	1	0	28	0		1		29
11	1	1	34	1		3	1500000	21
12	1	0	25	0		1		33
13	0	0	42	1	J	2		36
14	0	1	25	0		1		21
15	0	0	40	1		3		22
16	0	1	48	1		4	2000000	26
17	1	0	33	1		2	3280000	25
18	0	1	23	1		2		36
19	1	0	29	1		3		22
20	1	1	32	1		4		36
21	1	1	39	1		2		36
22	1	0	27	0		1		26
23	0	1	25	0		1		25
24	0	1	36	1		4		33
25	1	0	25	0		1		33
26	0	0	35	1		3		33
27	0	1	30	0		1		33
28	0	1	52	1		4		33
29	0	1	24	0		1		33
30	1	1	37	1		4		33
31	1	1	26	0		1		21
32	0	1	21	0		1		33
33	1	0	43	0		1		33
34	1	1	33	1		4		33
35	0	1	32	1		2		33
36	1	0	25	0		1		33
37	1	1	27	0		1		33
38	1	0	36	1		3		33
39	1	1	26	0		1		33
40	1	0	36	0		2		33

Lampiran 3 : (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
41	1	0	30	0		2		33
42	0	1	41	1	D	2		33
43	1	1	26	0		1		33
44	0	1	36	1		4		21
45	1	0	28	0		1		33
46	1	1	30	0		1		33
47	1	0	35	0		1		21
48	0	1	25	1		2		33
49	0	1	35	1		4		33
50	0	1	27	0		1		33
51	1	0	27	0		1		33
52	0	1	44	1		3		33
53	0	0	31	1		4	4500000	33
54	0	1	40	1		4		33
55	0	0	49	1		5	3000000	33
56	0	1	56	1		3		33
57	1	1	28	0		1		33
58	1	0	25	0		1		33
59	1	1	27	0		1		33
60	1	0	32	0		1		33
61	0	1	31	0		1		33
62	0	1	31	1		3		36
63	0	0	23	1		2		26
64	1	1	29	0		1		29
65	0	0	49	1		3	2000000	36
66	0	1	47	1		5		21
67	0	1	23	0		1		33
68	1	1	29	1		2		21
69	1	1	24	0		1		21
70	1	0	31	0		1		29
71	0	0	30	0		1		21
72	1	1	43	1		4		23
73	0	1	30	1		3	1165000	33
74	0	0	35	1	J	2		34
75	1	1	51	1		5		21
76	1	0	37	1		3	2500000	29
77	1	0	27	0		1		21
78	1	1	42	1		4		33
79	1	0	38	0		2		33
80	1	1	31	0		1		22

Lampiran 3 : (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
81	0	0	22	0		1		23
82	0	0	42	0		1		23
83	0	0	26	0		1		26
84	0	1	43	1		3		36
85	1	0	40	1		4		33
86	0	0	23	0		1		24
87	0	0	34	0		1		24
88	1	0	30	1		3	3000000	33
89	0	0	38	1		3	2500000	33
90	1	0	30	1		3		33
91	1	0	35	1		3		33
92	1	1	29	0		1		33
93	1	1	26	0		1		33
94	0	1	28	0		1		33
95	1	1	29	1		3		33
96	1	0	32	0		1		33
97	1	1	31	1		4	2500000	33
98	1	1	31	0		1		33
99	1	0	38	0		1		33
100	0	1	40	1	D	3		33
101	1	0	32	0		1		33
102	1	1	26	0		1		33
103	1	1	32	0		1		33
104	1	1	27	0		1		33
105	1	0	26	0		1		33
106	0	0	32	1		2		33
107	1	0	36	0		1		33
108	1	1	33	0		1		33
109	0	0	37	1		3		33
110	1	1	30	1		3		33
111	0	1	32	0		1		33
112	1	0	27	1		3	4200000	33
113	1	1	26	0		1		24
114	1	1	28	0		1		33
115	0	0	23	1		3	1500000	33
116	0	0	40	1	J	3		33
117	0	0	42	1	J	2		21
118	0	0	29	1		3	4500000	33
119	1	1	45	0		1		21
120	1	0	32	1		1		33

Lampiran 3 : (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
121	1	1	38	1		4		33
122	1	1	43	0		1		33
123	1	0	40	1		1		33
124	1	1	38	1		3		33
125	0	0	44	0		1		33
126	1	0	26	0		1		33
127	1	1	38	1		2		33
128	1	1	34	0		1		24
129	1	1	39	1		3		33
130	1	1	29	1		4		33
131	0	0	31	1		4		21
132	0	1	25	0		1		33
133	1	1	28	0		1		33
134	0	0	41	0		1		33
135	1	1	27	0		1		33
136	0	1	30	0		1		33
137	1	1	44	1		5		33
138	0	0	27	0		1		33
139	1	1	29	0		1		33
140	1	1	47	1		6	2500000	33
141	1	1	21	0		1		33
142	0	1	37	0		1		33
143	1	0	42	1	J	3	2850000	33
144	0	0	33	1		2	4500000	33
145	1	0	27	0		1		33
146	1	1	36	1		4		33
147	1	1	39	0		1		33
148	1	1	30	0		1		33
149	1	1	27	1		2		33
150	1	0	41	1		4	4500000	33
151	1	1	25	0		1		33
152	1	1	41	0		1		33
153	1	0	43	0		1		33
154	1	1	29	0		1		33
155	0	1	36	1		3		33
156	1	1	31	1		3		33
157	1	0	25	0		1		21
158	1	1	30	0		1		21
159	0	1	30	0		1		21
160	1	0	30	0		1		35

Lampiran 3 : (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
161	0	1	23	0		1		21
162	0	1	45	1		5		21
163	1	0	39	0		1		29
164	1	0	44	1		3		21
165	1	1	27	0		1		22
166	1	1	33	0		1		21
167	1	1	26	1		3		21
168	1	0	42	0		1		21
169	0	1	24	0		1		22
170	1	1	27	0		1		30
171	0	0	33	1	J	3		36
172	1	0	22	1		2	3935200	29
173	1	1	25	0		1		22
174	1	0	30	0		3		29
175	1	1	40	1		4		22
176	1	0	24	0		1		35
177	1	1	25	0		1		21
178	0	1	44	1		4		21
179	0	0	26	0		1		21
180	1	1	28	0		1		21
181	1	1	49	1		4	1246704	21
182	1	1	25	0		1		22
183	0	0	48	1	J	1		21
184	1	0	34	1		3	750000	21
185	0	0	24	0		1		21
186	1	1	40	0		1		29
187	0	1	21	0		1		21
188	1	0	31	1		3		29
189	0	1	37	1		4		29
190	1	1	35	1		3		33
191	1	0	33	1		3		21
192	1	0	40	1		4		36
193	0	1	39	1	D	2		21
194	1	0	46	1		3		29
195	1	1	44	1		3		34
196	1	0	27	0		1		33
197	1	0	42	1		4	5000000	29
198	1	1	38	0		4		33
199	0	0	24	0		1		30
200	0	1	35	1		1		36

Lampiran 3 : (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
201	0	0	41	1		4	3500000	22
202	1	0	29	1		4	4157000	21
203	0	1	30	0		1		21
204	1	1	47	1		4	2700000	36
205	1	0	27	1		2	3000000	33
206	1	1	37	1		3	1376400	21
207	0	1	34	1		3		35
208	1	0	40	0		1		21
209	1	1	31	1		4		21
210	1	1	39	1		4		36
211	1	0	24	0		1		21
212	0	0	21	0		1		21
213	0	0	34	1		3		22
214	1	0	27	0		1		33
215	0	0	37	1		3	1500000	21
216	1	0	32	1		4	2000000	22
217	1	1	31	0		1		33
218	1	0	30	0		1		21
219	1	0	30	1		2	4000000	22
220	1	0	27	0		1		21
221	1	0	32	1		3	3500000	21
222	1	0	31	1		2	2000000	21
223	0	0	34	1		3		36
224	0	0	47	1	J	4		21
225	1	0	31	1		2		21
226	1	0	38	1		3		33
227	0	1	45	1		3		21
228	0	1	37	0		1		36
229	0	1	22	0		1		29
230	1	1	36	1		2		23
231	1	1	37	0		1		29
232	1	0	46	1		3	3000000	26
233	0	1	28	1		2	1200000	22
234	1	1	55	1		5		36
235	0	1	44	1		3	5000000	29
236	1	1	32	1		3		21
237	1	0	34	0		1		21
238	1	1	44	1		4		36
239	1	1	34	1		4		36
240	1	0	26	0		1		24

Lampiran 3 : (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
241	1	0	32	0		2		33
242	1	1	28	0		1		33
243	1	0	34	0		1		33
244	1	1	48	1		4		33
245	1	0	33	1		2	3000000	33
246	1	0	34	0		2		33
247	0	1	34	0		1		33
248	1	1	24	0		1		29
249	1	1	39	0		3		36
250	1	0	31	1		4		26
251	1	1	39	1		2		35
252	0	1	42	1		4		21
253	0	0	54	1		3		36
254	1	1	31	1		3		36
255	1	1	33	0		1		22
256	0	1	46	1		4		21
257	1	0	38	1		2	3000000	21
258	0	1	26	0		1		30
259	1	0	38	1		4		33
260	0	1	41	1		4		21
261	1	0	31	0		1		33
262	1	0	28	0		1		33
263	1	1	30	1		3		33
264	1	0	29	1		4		21
265	0	0	36	1		2	4134000	21
266	1	1	27	0		1		21
267	1	1	44	1		5		33
268	1	0	45	1	J	3		33
269	0	1	42	1		4		33
270	1	1	29	0		1		33
271	0	1	28	0		1		24
272	0	1	40	0		1		33
273	1	0	30	0		1		33
274	1	1	29	0		1		33
275	0	0	45	1		6	3000000	33
276	1	0	36	1		2	3000000	33
277	1	1	28	0		1		33
278	1	0	38	1		3	3150000	33
279	0	0	33	0		1		33
280	1	1	37	0		1		33

Lampiran 3 : (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
281	1	1	35	1		3		33
282	0	0	26	0		1		24
283	0	1	27	0		1		33
284	1	1	31	0		1		33
285	1	0	33	1		2		33
286	0	1	34	1		3		33
287	0	1	33	0		1		33
288	1	0	38	0		1		33
289	1	1	32	0		1		33
290	1	1	50	1	J	3		33
291	1	1	39	1		4		33
292	1	1	30	0		1		33
293	1	1	30	0		1		33
294	1	1	48	1		4		33
295	0	0	36	1		3	2500000	33
296	0	1	55	1		5		33
297	1	0	30	0		1		33
298	1	0	28	0		1		33
299	0	0	25	0		1		33
300	0	0	48	1	J	3		33
301	0	1	51	1		5		33
302	1	1	39	0		1		33
303	1	1	38	1		3		33
304	0	0	26	1		2		33
305	1	1	31	0		1		33
306	1	0	35	1		2	3000000	33
307	0	1	29	0		1		33
308	0	0	39	1		3	5400000	33
309	0	0	33	1		3		33
310	1	1	43	1	D	1		33
311	0	1	37	0		1		33
312	0	1	31	0		1		33
313	1	0	35	0		1		33
314	1	0	41	1		3		33
315	1	0	47	1		4		33
316	1	0	31	0		1		33
317	1	1	44	1		3		33
318	0	0	45	0		1		33
319	1	1	33	0		6		33
320	1	1	37	0		1		30

Lampiran 3 : (lanjutan)

NO	T.PEN	J.KEL	USIA	S.M	D/J	J.ANG.KEL (ORANG)	PENGHASILAN SUAMI/ISTRI (Rp)	TYPE RUSUN
321	1	1	34	1		3		33
322	1	0	38	1		5	4000000	33
323	0	1	35	1		3		33
324	1	0	28	0		1		33
325	1	1	32	0		1		33
326	1	1	42	1		2		33
327	1	1	48	0		1		24
328	1	0	27	0		1		33
329	0	0	39	1		3	4500000	33
330	1	1	41	1		5		33
331	0	1	33	1		4		33
332	1	1	42	1		4		33
333	1	1	55	0		1		33
334	0	0	27	0		1		33
335	1	0	36	0		1		33
336	1	1	36	0		1		33

Keterangan :

- T.PEN (Tingkat Pendidikan) : S1 keatas =1, S1 kebawah =0
J.KEL (Jenis Kelamin) : Pria =1, Wanita =0
S.M (Status Pernikahan) : Sudah Menikah =1, Lajang =0
D/J (Duda/Janda) : D =Duda, J=Janda
J.ANG.KEL : Jumlah Anggota Keluarga



Lampiran 4

Jawaban Wawancara Terstruktur

**ANALISA PENYERAPAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
(RUSUNAMI) OLEH MASYARAKAT BERPENGHASILAN MENENGAH
KEBAWAH (MBM) DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
(MBR) DI PERKOTAAN**



WAWANCARA TERSTRUKTUR

Oleh

RAHMAT YUSMAL ANDI

0906580073

**BIDANG KEKHUSUSAN MANAJEMEN PROYEK
PROGRAM PASCASARJANA BIDANG ILMU TEKNIK
FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS INDONESIA
GENAP 2010/2011**

Data Responden Wawancara Terstruktur

Nama Responden : Chaeril Azwar
Nama Perusahaan/Institusi : Bank BTN
Alamat Perusahaan/institusi : Jl. Gajah Mada 01
Jabatan : Consumer Lending Department Head
Pengalaman Kerja : 25 (tahun)
Pendidikan Terakhir : SLTA / D3 / **(S1)** / S2 / S3

Jawaban Wawancara Terstruktur

- 1) Apakah Bapak/Ibu setuju bahwasanya temuan penyerapan Rusunami yang rendah oleh masyarakat sasaran, yaitu hanya 21% dari jumlah unit yang telah melakukan serah terima kunci dari tahun 2007- 2010 merupakan hal yang dapat mengindikasikan bahwasanya program proyek Rusunami yang dicanangkan oleh pemerintah yang seharusnya dikhususkan untuk sasaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan mengalami salah sasaran ?

JAWABAN :

Ya / **(Tidak)** (Lingkari sesuai pilihan)

Alasan :

Dari sisi Lembaga Pemberi Kredit (LPK), program pemerintah dalam bentuk instrumen KPR Sarasuna Bersubsidi merupakan bentuk skim yang membantu masyarakat MBM dan MBR, untuk memiliki tempat tinggal dalam bentuk rumah susun, ditengah kondisi bunga pasar yang diberikan pihak LPK. Dalam pelaksanaan instrument ini, pihak LPK berfungsi untuk fokus kepada proses verifikasi calon debitur penerima subsidi yang meliputi pengecekan kelengkapan administrasi, kesesuaian klasifikasi, serta pengecekan fisik bangunan rumah susun dan satuan rumah susun. Selain itu pihak LPK juga melakukan pengecekan dokumen secara formal, wawancara, dan pengecekan lapangan. Hal ini dilakukan agar memastikan agar KPR Sarasuna Bersubsidi yang diterbitkan LPK benar-benar tepat sasaran. Kondisi penyerapan 21% lebih diakibatkan oleh masih rendahnya demand masyarakat sasaran yang ada terhadap Rusunami yang tersedia. Hal ini diakibatkan faktor budaya

masyarakat yang masih cenderung memilih tempat tinggal dalam bentuk *land house* dipinggiran kota. *Land house* masih cenderung diminati masyarakat sasaran, dikarenakan tinggal di suatu rumah susun hanya cocok untuk keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang kecil dan akan memiliki biaya tambahan setiap bulan untuk kegiatan kebersihan, keamanan, maupun maintenance lainnya yang cukup memberatkan, khususnya terhadap MBR.

- 2) Pemerintah belum memiliki sikap yang tegas dalam mengatur batasan unit Rusunami yang dapat dijual dengan harga komersil oleh developer. Hal ini terlihat dari walaupun pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menpera No 39 Tahun 2008 yang membatasi hunian komersil disuatu Rusunami tidak boleh melebihi 30%, namun hal ini hanya bersifat himbauan.

Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / **Tidak**

Alasan :

Kondisi masih rendahnya penyerapan KPR Sarasuna Bersubsidi oleh masyarakat sasaran lebih disebabkan oleh masih rendahnya demand masyarakat sasaran untuk membeli Rusunami. Hal ini diakibatkan faktor budaya masyarakat yang masih cenderung memilih tempat tinggal dalam bentuk *landed house* dipinggiran kota. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan hanya dapat menghimbau pengembang agar mau membangun tower untuk MBM dan MBR yang sifat dasarnya merupakan industri perumahan.

- 3) Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarasuna Bersubsidi, batas harga Sarasuna paling banyak setiap kelompok sasaran adalah :

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak
1 (Penghasilan maks 4,5 juta rupiah)	144 Juta rupiah
2 (Penghasilan maks 3,5 juta rupiah)	110 Juta rupiah
3 (Penghasilan maks 2,5 juta rupiah)	75 Juta rupiah

Dari 1893 debitur KPR Sarusunan Bersubsidi ternyata harga Sarusuna berkisar antara 89 juta – 144 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan kelompok sasaran 3 sulit untuk membeli Rusunami dikarenakan batas harga paling banyak sesuai ketentuan sudah tidak didapat di pasaran. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga terbawah rusunami sedangkan harga teratas adalah tetap, oleh sebab itu Rusunami yang ada saat ini dengan fasilitas KPR Sarauna Bersubsidi yang diprogramkan oleh pemerintah hanya dinikmati oleh masyarakat kelompok sasaran 1, Hal ini diperkuat dengan data bahwasanya dari jumlah 1893 debitur KPR Sarasuna Bersubsidi, jumlah masyarakat sasaran 1 adalah 74%, masyarakat sasaran 2 adalah 22%, dan masyarakat sasaran 3 hanya 4%. Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / Tidak

Alasan :

Keterjangkauan harga Rusunami merupakan faktor yang penting terhadap penyerapan Rusunami oleh MBM dan MBR. Sehingga dengan kenaikan harga Rusunami yang diakibatkan oleh mekanisme pasar hendaknya harus dibarengi dengan upaya peningkatan penghasilan masyarakat. Apabila penghasilan tidak meningkat, tanpa penyesuaian instrumen skim yang ada, maka dapat dipastikan ada kelompok masyarakat yang akhirnya tidak dapat membeli Rusunami. Keterjangkauan harga Rusunami juga tidak terlepas dari harga lahan yang semakin melonjak dan tidak terkendali di perkotaan, diperlukan partisipasi pemerintah daerah untuk menyediakan lahan gratis bagi pembangunan Rusunami dan kebijakan pemerintah pusat untuk segera

menerapkan sistem *land banking* baik secara kelembagaan maupun sektoral sehingga harga pasar tanah bisa dikontrol, spekulasi tanah bisa dicegah, distribusi tanah yang adil baik untuk sosial atau komersil dapat dicapai dan kejelasan mengenai status lahan untuk kepentingan umum dapat terjamin.

- 4) Suatu skema pemilikan tempat tinggal di dalam berbagai literatur sering disebut sebagai *Housing Finance System*. Semakin baik *Housing Finance System* suatu negara maka akan semakin terjangkau harga tempat tinggal yang tersedia oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Untuk Indonesia saat ini *Housing Finance System* yang ada masih belum maksimal. Walaupun besaran uang muka yang minimal hanya 12,5%, dimana rata-rata di negara dengan *Housing Finance System* yang baik antara 10-20% namun tenor yang ada masih cenderung pendek antara 10-15 tahun, sedangkan di China dan Malaysia menurut *Warnock (2008)* dapat mencapai 20-30 tahun. selain itu suku bunga pasar khusus KPR Sarusuna Bersubsidi masih tinggi, yaitu sesuai ketentuan BI-rate + 4 (Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010) dengan nilai cenderung diatas 10%, sedangkan sebagai pembandingan di China dan Malaysia hanya 5,5-7,5% (*Word Bank (2006)*). Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / Tidak

Alasan :

Sistem pembiayaan perumahan yang ada saat ini masih belum maksimal. Hal ini terjadi akibat masih belum adanya sumber dana dari masyarakat dengan bunga rendah, seharusnya tersedia sumber-sumber dana murah untuk pembiayaan jangka panjang baik dari dana pemerintah maupun sumber dana lainnya yang didukung oleh kebijakan khusus pemerintah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi MBM dan MBR. Sebagai contoh sumber dana yang dapat digunakan adalah dana pensiun dan jamsostek. Saat ini pemerintah

telah mengeluarkan kebijakan skim subsidi dengan bunga dibawah 10% dan tetap sepanjang tenor, yang dikenal dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun untuk saat ini sumber dana murah masih murni dari pemerintah bukan dari masyarakat.

- 5) Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarasuna Bersubsidi, kondisi masa subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka yang kemudian disebut KPR Sarasuna Bersubsidi hanya berlangsung 4-8 tahun, selanjutnya akan mengikuti bunga pasar yang ada, apakah menurut Bapak/Ibu hal ini dapat menjadi hal yang menyebabkan keengganan Lembaga Pemberi Kredit (LPK) untuk menyalurkan kredit terhadap masyarakat kelompok sasaran, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / **Tidak**

Alasan :

Bank merupakan industri tersendiri dalam berhubungan dengan industri perumahan. Bank akan menerapkan bunga pasar sesuai perkiraan situasi ekonomi ke depan yang telah terukur. Sehingga perlu dipahami, bahwasanya tanpa skim yang diprogramkan pemerintahpun, bank tetap melaksanakan bisnisnya terhadap masyarakat sasaran. Program KPR Sarasuna Bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk meringankan masyarakat sasaran dalam jangka waktu tertentu untuk memiliki rusun. Sehingga adanya program KPR Sarasuna Bersubsidi justru lebih meningkatkan gairah LPK untuk menerbitkan KPR bagi masyarakat sasaran MBM dan MBR. Walaupun memang terjadinya kondisi *default* pada kelompok MBM dan MBR tetap ada, namun lebih dikarenakan faktor karakter debitur yang tidak menyadari akan pentingnya nilai kepercayaan dalam bisnis perbankan sehingga akan diblacklist dari dunia perbankan. Selain itu dari sisi pemerintah sendiri, pertimbangan menerapkan

masa subsidi hanya 4-8 tahun adalah dengan berakhirnya masa subsidi sesuai kelompok masyarakat sasaran, diharapkan terdapat peningkatan penghasilan sehingga mampu mencicil tanpa ada subsidi lagi dari pemerintah.

- 6) Sesuai ketentuan yang ada pada Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPR Sarasuna Bersubsidi, dalam proses verifikasi masyarakat sasaran, terdapat verifikasi administrasi yang harus dilalui, verifikasi ini mengharuskan masyarakat sasaran memenuhi persyaratan :
- a. Maksimum penghasilan
 - b. Maksimum harga rusunami
 - c. Minimum uang muka
 - d. Maksimum kredit pinjaman
 - e. Surat keterangan penghasilan
 - f. Surat pernyataan belum memiliki rumah
 - g. Surat pernyataan tidak menjual rusun sebelum 5 tahun
 - h. Surat perjanjian kredit
 - i. Pernyataan pengenaan suku bunga subsidi sesuai tahun
 - j. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 - k. Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - l. Akta Jual Beli (AJB)
 - m. Surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi

Dari item persyaratan administratif diatas apakah menurut Bapak/Ibu ada yang merupakan penyebab proses verifikasi administrasi cenderung menjadi lama dan belum terkoordinasi dengan baik antara institusi yang berwenang, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

(Lingkari item persyaratan, apabila ada)

Alasan :

Besaran minimum uang muka yang hanya 12,5% masih terasa berat oleh kelompok masyarakat sasaran sehingga banyak masyarakat sasaran MBM dan MBR masih harus mencicil minimum uang muka tersebut diakibatkan keterbatasan uang kontan yang dimiliki, hal ini dapat berlangsung hingga 6 bulan.

NPWP dan SPT pada awalnya memang menjadi penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan dari Kementerian Perumahan Rakyat bahwasanya NPWP dan SPT calon debitur harus disahkan oleh kantor pajak setempat, sedangkan kantor pajak setempat banyak yang tidak mau melakukannya. Sehingga pada akhir tahun 2010 persyaratan ini dihilangkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Kondisi inilah yang menyebabkan meningkatnya realisasi subsidi selisih bunga dan uang muka dari 62 debitur pada tahun 2009 menjadi 1838 debitur pada akhir 2010.

- 7) Selain pertanyaan yang telah ditanyakan di atas, Apakah menurut Bapak/Ibu masih ada penyebab yang mendasar lainnya yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Penyebab lain rendahnya jumlah realisasi kredit kepemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran adalah :

Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya masyarakat untuk tinggal di rumah susun karena adanya multiplier efek yang memberikan manfaat terhadap masyarakat sasaran itu sendiri. Selain itu budaya masyarakat kita saat ini, dimana tinggal di rumah susun masih belum memasyarakat karena masyarakat sudah terbiasa tinggal di *land house* walaupun dipinggiran kota.

Data Responden Wawancara Terstruktur

Nama Responden : Didik Sunardi
Nama Perusahaan/Institusi : Kementerian Perumahan Rakyat
Alamat Perusahaan/institusi : Jl. Raden Patah 1 No.01
Jabatan : Asisten Deputi Fasilitas dan Inovasi
Pembiayaan
Pengalaman Kerja : 21 (tahun)
Pendidikan Terakhir : SLTA / D3 / S1 / S2 / S3

Jawaban Wawancara Terstruktur

- 1) Apakah Bapak/Ibu setuju bahwasanya temuan penyerapan Rusunami yang rendah oleh masyarakat sasaran, yaitu hanya 21% dari jumlah unit yang telah melakukan serah terima kunci dari tahun 2007- 2010 merupakan hal yang dapat mengindikasikan bahwasanya program proyek Rusunami yang dicanangkan oleh pemerintah yang seharusnya dikhususkan untuk sasaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan mengalami **salah sasaran** ?

JAWABAN :

Ya / Tidak (Lingkari sesuai pilihan)

Alasan :

Penyerapan KPR Sarusuna Bersubsidi hanya 21% dikarenakan adanya pembelian Rusunami tanpa menggunakan fasilitas subsidi, namun hal ini memiliki kronologis sebagai berikut :

Dari sisi pemerintah, pemerintah dalam menerapkan kebijakannya membuat suatu instrumen agar Rusunami yang tersedia dapat diserap oleh masyarakat MBM dan MBR dan tepat sasaran. Instrument tersebut dituangkan didalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, hal ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Setiap Rusunami yang dibeli dengan fasilitas subsidi harus tepat sasaran dan memiliki akuntabilitas yang jelas sebagai penggunaan uang negara, sehingga instrument yang ada memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Pemenuhan persyaratan inilah yang sulit

pada saat itu, antara lain NPWP dan SPT yang harus di sahkan oleh kantor pajak setempat. Kesulitan inilah yang menyebabkan kecepatan verifikasi masyarakat menjadi lambat, sehingga dari sisi pengembang, dimana Rusunami merupakan suatu industri perumahan yang tidak bisa berhenti dikarenakan masalah finansial, pengembang menjual unit yang ada kepada konsumen lain tanpa mennggunakan fasilitas subsidi. Hal ini tidak bisa disalahkan karena pembangunan Rusunami yang ada sepenuhnya dibiayai oleh pengembang.

- 2) Pemerintah belum memiliki sikap yang tegas dalam mengatur batasan unit Rusunami yang dapat dijual dengan harga komersil oleh developer. Hal ini terlihat dari walaupun pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menpera No 39 Tahun 2008 yang membatasi hunian komersil disuatu Rusunami tidak boleh melebihi 30%, namun hal ini hanya bersifat himbauan.

Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / **Tidak**

Alasan :

Dalam hal ini harus dipahami bahwasanya, pemerintah sifatnya hanya membantu/memfasilitasi MBM dan MBR untuk memiliki Rusunami, pemerintah hanya dapat menghimbau pengembang agar mau membangun tower untuk MBM dan MBR karena kewenangan yang terbatas. Oleh karena itu pemerintah tidak dapat mengatur lebih dalam selain menghimbau pengembang yang sifat dasarnya merupakan industri perumahan. (Undang-Undang Rusun Nomor 16 Tahun 1985 sedang proses revisi).

Memang seharusnya pemerintah turun tangan langsung membangun tower untuk MBM dan MBR di perkotaan, mengingat walaupun tempat tinggal dapat digolongkan sebagai *private good*, namun hal tersebut telah menjadi kebutuhan dasar yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan langsung. Namun kondisi BUMN dan

BUMD yang ada memiliki berbagai keterbatasan, hal ini diakibatkan kenaikan faktor-faktor harga barang tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, Public Service Obligation (PSO) yang dulu pernah dilakukan, sedang diupayakan agar dapat dilakukan kembali.

- 3) Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, batas harga Sarusuna paling banyak setiap kelompok sasaran adalah :

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak
1 (Penghasilan maks 4,5 juta rupiah)	144 Juta rupiah
2 (Penghasilan maks 3,5 juta rupiah)	110 Juta rupiah
3 (Penghasilan maks 2,5 juta rupiah)	75 Juta rupiah

Dari 1893 debitur KPR Sarusunan Bersubsidi ternyata harga Sarusuna berkisar antara 89 juta – 144 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan kelompok sasaran 3 sulit untuk membeli Rusunami dikarenakan batas harga paling banyak sesuai ketentuan sudah tidak didapat di pasaran. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga terbawah rusunami sedangkan harga teratas adalah tetap, oleh sebab itu Rusunami yang ada saat ini dengan fasilitas KPR Sarauna Bersubsidi yang diprogramkan oleh pemerintah hanya dinikmati oleh masyarakat kelompok sasaran 1, Hal ini diperkuat dengan data bahwasanya dari jumlah 1893 debitur KPR Sarasuna Bersubsidi, jumlah masyarakat sasaran 1 adalah 74%, masyarakat sasaran 2 adalah 22%, dan masyarakat sasaran 3 hanya 4%. Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / Tidak

Alasan :

Kondisi ini terkait dengan hukum suplay dan demand, serta kondisi pasar yang ada. Perlu disadari bahwasanya, *nature* Rusunami pada dasarnya merupakan industri perumahan, oleh karena itu, pengembang telah melakukan perhitungan finansial secara keseluruhan, sehingga dalam suatu tower, jumlah unit yang diperuntukkan untuk setiap kelompok sasaran tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dan murni menjadi mekanisme pasar. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya intervensi dari sisi konsumen saja. Kondisi ini harus diakui terjadi akibat pemerintah tidak ada memberikan bantuan dana untuk menutupi kerugian pengembang apabila jumlah unit suatu tower dikhususkan untuk kelompok sasaran tertentu. Tentu saja hal ini akan menyebabkan ada kelompok masyarakat yang tidak dapat membeli rusunami karena tidak ada pilihan selain membeli unit yang ada di dipasaran.

- 4) Suatu skema pemilikan tempat tinggal di dalam berbagai literatur sering disebut sebagai *Housing Finance System*. Semakin baik *Housing Finance System* suatu negara maka akan semakin terjangkau harga tempat tinggal yang tersedia oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Untuk Indonesia saat ini *Housing Finance System* yang ada masih belum maksimal. Walaupun besaran uang muka yang minimal hanya 12,5%, dimana rata-rata di negara dengan *Housing Finance System* yang baik antara 10-20% namun tenor yang ada masih cenderung pendek antara 10-15 tahun, sedangkan di China dan Malaysia menurut *Warnock (2008)* dapat mencapai 20-30 tahun. selain itu suku bunga pasar khusus KPR Sarusuna Bersubsidi masih tinggi, yaitu sesuai ketentuan BI-rate + 4 (Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010) dengan nilai cenderung diatas 10%, sedangkan sebagai pembandingan di China dan Malaysia hanya 5,5-7,5% (*Word Bank (2006)*).

Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :**Ya / Tidak****Alasan :**

Sistem pembiayaan perumahan yang ada saat ini masih belum mantap dan kondisi perbankan yang ada saat ini masih belum efisien. Kondisi ini terjadi karena banyak hal yang mempengaruhinya, salah satunya adalah masih belum ada sumber dana dari masyarakat dengan bunga rendah, seharusnya tersedia sumber-sumber dana murah untuk pembiayaan jangka panjang di masyarakat. Hal lain yang harus difikirkan adalah apakah perbankan yang ada saat ini sudah efisien. Apabila perbankan efisien, maka biaya operasionalnya tentu akan kecil dan margin yang diteruskan kepada masyarakat juga dapat semakin rendah. Apabila kondisi seperti saat ini masih terjadi, maka bunga yang masih tinggi dan tenor kredit yang masih pendek yang diperlakukan kepada masyarakat tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu, selain pemberian PSO untuk masyarakat MBR di perkotaan, juga diperlukan suatu instrumen tabungan perumahan nasional yang dibentuk melalui undang-undang tersendiri dimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serata penggunaan BUMN khusus sebagai pengelola dana jangka panjang untuk perumahan. Dengan adanya hal-hal tersebut, kondisi bunga yang masih tinggi dan tenor kredit yang masih pendek seperti saat ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan skim subsidi dengan bunga dibawah 10% dan tetap sepanjang tenor, yang dikenal dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

- 5) Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, kondisi masa subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka yang kemudian disebut KPR Sarusuna Bersubsidi hanya berlangsung 4-8 tahun, selanjutnya akan mengikuti bunga pasar yang ada, apakah menurut Bapak/Ibu hal ini dapat menjadi hal yang menyebabkan keengganan Lembaga Pemberi Kredit (LPK) untuk menyalurkan kredit terhadap masyarakat kelompok sasaran, sehingga hal

tersebut menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / **Tidak**

Alasan :

Bank merupakan industri tersendiri, dalam berhubungan dengan industri perumahan maka bank akan menerapkan bunga pasar sesuai perkiraan situasi ekonomi ke depan. Program KPR Sarasuna Bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk meringankan masyarakat sasaran dalam jangka waktu tertentu. Sehingga perlu dipahami, bahwasanya tanpa skim yang diprogramkan pemerintahpun, bank tetap melaksanakan bisnisnya terhadap masyarakat sasaran. Walaupun dapat saja terjadi kegagalan konsumen/debitur pada masa setelah subsidi, bank sudah memiliki perhitungan tersendiri. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah selanjutnya, agar kegagalan konsumen khusus masyarakat sasaran dapat diminimalkan, sehingga diperlukan instrumen baru yang dapat menyebabkab kondisi bunga KPR yang dibebankan kepada masyarakat sasaran dapat tetap sepanjang masa tenor. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya kebijakan baru tentang subsidi perumahan yang disebut dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

- 6) Sesuai ketentuan yang ada pada Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPR Sarasuna Bersubsidi, dalam proses verifikasi masyarakat sasaran, terdapat verifikasi administrasi yang harus dilalui, verifikasi ini mengharuskan masyarakat sasaran memenuhi persyaratan :
- a. Maksimum penghasilan
 - b. Maksimum harga rusunami
 - c. Minimum uang muka
 - d. Maksimum kredit pinjaman
 - e. Surat keterangan penghasilan

- f. Surat pernyataan belum memiliki rumah
- g. Surat pernyataan tidak menjual rusun sebelum 5 tahun
- h. Surat perjanjian kredit
- i. Pernyataan pengenaan suku bunga subsidi sesuai tahun
- j. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- k. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- l. Akta Jual Beli (AJB)
- m. Surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi

Dari item persyaratan administratif diatas apakah menurut Bapak/Ibu ada yang merupakan penyebab proses verifikasi administrasi cenderung menjadi lama dan belum terkoordinasi dengan baik antara institusi yang berwenang, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

(Lingkari item persyaratan, apabila ada)

Alasan :

NPWP menjadi masalah dikarenakan masyarakat saat ini masih banyak yang belum memiliki NPWP. Padahal berdasarkan undang-undang, setiap masyarakat harus wajib memiliki NPWP kecuali masyarakat yang tergolong PTKP. Dalam pelaksanaan program KPR Sarasuna Bersubsidi, khusus bagi masyarakat yang NPWP nya masih baru, realisasi KPR subsidi tetap dapat berjalan dengan syarat SPT dapat diserahkan tahun depan sebagai kontrol bahwasanya debitur tepat sasaran.

SPT menjadi masalah dikarenakan adanya standar yang terlalu tinggi yang ditetapkan Kementrian Perumahan Rakyat, dimana setiap SPT yang ada harus disahkan kembali oleh kantor pajak setempat, sedangkan kegiatan pengesahan ini tidak semua kantor panjak mau melakukannya dengan alasan tidak ada tupoksi untuk hal itu. Sebagai solusi untuk hal tersebut, SPT yang ada dapat diproses walaupun belum disahkan oleh kantor pajak setempat. Inilah yang menjadi penyebab meningkatnya realisasi dari 62 debitur pada tahun 2009 menjadi 1838 debitur pada akhir 2010.

- 7) Selain pertanyaan yang telah ditanyakan di atas, Apakah menurut Bapak/Ibu masih ada penyebab yang mendasar lainnya yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Penyebab lain rendahnya jumlah realisasi kredit kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan adalah :

Dari sisi demand, demand yang ada masih rendah diakibatkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya masyarakat untuk tinggal di rumah susun akibat semakin sulitnya lahan untuk tempat tinggal di perkotaan. Selain itu budaya masyarakat kita saat ini, dimana tinggal di rumah susun masih belum memasyarakat.

Dari sisi suplay, hal ini berhubungan dengan skala ekonomis, dan biaya yang dikeluarkan, belum adanya jaminan kepastian demand mengakibatkan suplay akan menunggu kepastian tersebut. Hal ini terkait dengan nature Rusunami tersebut yang merupakan industri perumahan yang tidak bisa berhenti apabila telah berjalan.

Dua kondisi ini tidak terlepas dari kondisi sistem pembiayaan perumahan kita saat ini yang belum mantap dan efisien.

Data Responden Wawancara Terstruktur

Nama Responden : Aisah Dewi S
Nama Perusahaan/Institusi : Kementerian Perumahan Rakyat
Alamat Perusahaan/institusi : Jl. Raden Patah 1 No.01
Jabatan : Kasubag Umum
Pengalaman Kerja : 15 (tahun)
Pendidikan Terakhir : SLTA / D3 / S1 / **(S2)** / S3

Jawaban Wawancara Terstruktur

- 1) Apakah Bapak/Ibu setuju bahwasanya temuan penyerapan Rusunami yang rendah oleh masyarakat sasaran, yaitu hanya 21% dari jumlah unit yang telah melakukan serah terima kunci dari tahun 2007- 2010 merupakan hal yang dapat mengindikasikan bahwasanya program proyek Rusunami yang dicanangkan oleh pemerintah yang seharusnya dikhususkan untuk sasaran masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan mengalami salah sasaran ?

JAWABAN :

Ya / **(Tidak)** (Lingkari sesuai pilihan)

Alasan :

Pemerintah dalam menerapkan kebijakannya membuat suatu instrumen agar Rusunami yang tersedia dapat diserap oleh masyarakat MBM dan MBR serta tepat sasaran. Instrument tersebut dituangkan didalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi. Untuk memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran, pada awalnya proses verifikasi administrasi dan lapangan dilakukan oleh Lembaga Pemberi Kredit (LPK) bersama Kementerian Perumahan Rakyat. Walaupun hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap calon debitur pada umumnya sudah tepat sasaran, namun penyerapan debitur melalui proses verifikasi yang dilakukan belum dapat mengimbangi jumlah Rusunami yang sudah serah kunci di lapangan, sehingga masyarakat yang dapat terlayani masih 21%. Hal ini terjadi akibat adanya salah satu persyaratan yang sulit

dipenuhi oleh masyarakat sasaran, yaitu dokumen format A3 yang harus ditanda tangani kepala kantor cabang pajak setempat. Dokumen ini berisikan keterangan bahwasanya NPWP orang yang bersangkutan adalah benar, dan penghasilan orang yang bersangkutan tidak melebihi 4,5 juta.

- 2) Pemerintah belum memiliki sikap yang tegas dalam mengatur batasan unit Rusunami yang dapat dijual dengan harga komersil oleh developer. Hal ini terlihat dari walaupun pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menpera No 39 Tahun 2008 yang membatasi hunian komersil disuatu Rusunami tidak boleh melebihi 30%, namun hal ini hanya bersifat himbauan.

Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / **Tidak**

Alasan :

Rusunami pada dasarnya merupakan industri perumahan, oleh karena itu, pengembang telah melakukan perhitungan finansial secara keseluruhan, sehingga dalam suatu tower, jumlah unit yang diperuntukkan untuk setiap kelompok sasaran tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dan murni menjadi mekanisme pasar. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya dapat intervensi dari sisi konsumen yang ingin mendapatkan subsidi dan memastikan masyarakat yang mendapatkan subsidi tersebut tepat sasaran.

- 3) Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, batas harga Sarusuna paling banyak setiap kelompok sasaran adalah :

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak
1 (Penghasilan maks 4,5 juta rupiah)	144 Juta rupiah
2 (Penghasilan maks 3,5 juta rupiah)	110 Juta rupiah
3 (Penghasilan maks 2,5 juta rupiah)	75 Juta rupiah

Dari 1893 debitur KPR Sarusunan Bersubsidi ternyata harga Sarusuna berkisar antara 89 juta – 144 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan kelompok sasaran 3 sulit untuk membeli Rusunami dikarenakan batas harga paling banyak sesuai ketentuan sudah tidak didapat di pasaran. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga terbawah rusunami sedangkan harga teratas adalah tetap, oleh sebab itu Rusunami yang ada saat ini dengan fasilitas KPR Sarauna Bersubsidi yang diprogramkan oleh pemerintah hanya dinikmati oleh masyarakat kelompok sasaran 1, Hal ini diperkuat dengan data bahwasanya dari jumlah 1893 debitur KPR Sarasuna Bersubsidi, jumlah masyarakat sasaran 1 adalah 74%, masyarakat sasaran 2 adalah 22%, dan masyarakat sasaran 3 hanya 4%. Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / Tidak

Alasan :

Pengembang tidak menaikkan 144 juta karena mengharapkan bebas PPN sesuai dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, sedangkan harga terbawah sudah tidak bisa mengimbangi kenaikan faktor-faktor harga yang ada. Padahal masyarakat dengan penghasilan antara 2,5-3,5 juta dan dibawah 2,5 juta rupiah dominan di perkotaan, sehingga akibat kondisi ini banyak masyarakat yang tidak mampu membeli Rusunami yang ada di pasaran.

- 4) Suatu skema pemilikan tempat tinggal di dalam berbagai literatur sering disebut sebagai *Housing Finance System*. Semakin baik *Housing Finance System* suatu negara maka akan semakin terjangkau harga tempat tinggal yang

tersedia oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Untuk Indonesia saat ini *Housing Finance System* yang ada masih belum maksimal. Walaupun besaran uang muka yang minimal hanya 12,5%, dimana rata-rata di negara dengan *Housing Finance System* yang baik antara 10-20% namun tenor yang ada masih cenderung pendek antara 10-15 tahun, sedangkan di China dan Malaysia menurut *Warnock (2008)* dapat mencapai 20-30 tahun. selain itu suku bunga pasar khusus KPR Sarusuna Bersubsidi masih tinggi, yaitu sesuai ketentuan BI-rate + 4 (Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010) dengan nilai cenderung diatas 10%, sedangkan sebagai pembandingan di China dan Malaysia hanya 5,5-7,5% (*Word Bank (2006)*).

Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi diatas merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / Tidak

Alasan :

Sistem pembiayaan perumahan yang ada saat ini masih belum maksimal. Kondisi ini terjadi karena masih belum adanya sumber dana dari masyarakat dengan bunga rendah, seharusnya tersedia sumber-sumber dana murah untuk pembiayaan jangka panjang di masyarakat. Dengan adanya hal tersebut KPR yang disalurkanpun akan dapat lebih mengayomi masyarakat sasaran. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru dalam pembiayaan perumahan untuk masyarakat yang tergolong MBM dan MBR. Kebijakan ini menyediakan suku bunga yang tetap dibawah dua digit dan tetap selama masa tenor KPR. Kebijakan ini dinamai pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun untuk saat ini sumber dana murah masih murni dari pemerintah bukan dari masyarakat.

- 5) Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, kondisi masa subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka yang kemudian disebut KPR Sarusuna Bersubsidi hanya berlangsung 4-8 tahun, selanjutnya akan mengikuti bunga pasar yang ada, apakah menurut Bapak/Ibu hal ini dapat menjadi hal yang menyebabkan keengganan Lembaga Pemberi Kredit (LPK) untuk menyalurkan kredit terhadap masyarakat kelompok sasaran, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Ya / **Tidak**

Alasan :

Bank merupakan industri tersendiri dalam berhubungan dengan industri perumahan. Dalam hal ini bank akan menerapkan bunga pasar sesuai perkiraan situasi ekonomi ke depan yang telah terukur. Sebagai sumber pendanaan yang dominan di masyarakat, bank tetap berusaha menyediakan kredit untuk masyarakat sasaran. Program KPR Sarusuna Bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk meringankan masyarakat sasaran dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dengan adanya program KPR Sarusuna Bersubsidi justru lebih meningkatkan gairah LPK untuk menerbitkan KPR bagi masyarakat sasaran MBM dan MBR.

- 6) Sesuai ketentuan yang ada pada Lampiran 3, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPR Sarusuna Bersubsidi, dalam proses verifikasi masyarakat sasaran, terdapat verifikasi administrasi yang harus dilalui, verifikasi ini mengharuskan masyarakat sasaran memenuhi persyaratan :
- a. Maksimum penghasilan
 - b. Maksimum harga rusunami
 - c. Minimum uang muka
 - d. Maksimum kredit pinjaman
 - e. Surat keterangan penghasilan

- f. Surat pernyataan belum memiliki rumah
- g. Surat pernyataan tidak menjual rusun sebelum 5 tahun
- h. Surat perjanjian kredit
- i. Pernyataan pengenaan suku bunga subsidi sesuai tahun
- j. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- k. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- l. Akta Jual Beli (AJB)
- m. Surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi

Dari item persyaratan administratif diatas apakah menurut Bapak/Ibu ada yang merupakan penyebab proses verifikasi administrasi cenderung menjadi lama dan belum terkoordinasi dengan baik antara institusi yang berwenang, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit subsidi kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

(Lingkari item persyaratan, apabila ada)

Alasan :

Adanya dokumen format A3 yang harus ditanda tangani kepala kantor cabang pajak setempat dan debitur merupakan persyaratan yang sulit dipenuhi masyarakat sasaran. Dokumen ini berisikan keterangan bahwasanya NPWP orang yang bersangkutan adalah benar, dan penghasilan orang yang bersangkutan tidak melebihi 4,5 juta. Hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi dan sosialisasi sampai level kepala cabang, maka banyak kantor pajak yang tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut. Selain itu data yang datang dari bank sering tidak lengkap sehingga realisasi tidak bisa dilakukan, adapun item yang sering tidak lengkap tersebut adalah NPWP, BAST, dan SPT.

- 7) Selain pertanyaan yang telah ditanyakan di atas, Apakah menurut Bapak/Ibu masih ada penyebab yang mendasar lainnya yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi kredit kepemilikan Rusunami oleh masyarakat berpenghasilan

menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan ?

JAWABAN :

Harga Rusunami masih tidak terjangkau oleh masyarakat sasaran. Harga menjadi tidak terjangkau diakibatkan masih adanya komponen biaya tambahan yang sangat membebani masyarakat sasaran, yaitu :

- a. Biaya Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan notaries yang sangat masih sangat tinggi.
- b. Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Satuan Rumah Susun.
- c. Biaya Pendaftaran (Balik Nama) sertifikat hak milik atas Satuan Rumah Susun ke atas nama Pihak kedua.
- d. Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- e. Biaya Pengurusan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Bank.
- f. Biaya pemeliharaan.
- g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- h. Biaya menghadap view bagi beberapa unit di masing-masing tower.
- i. Biaya kemahalan, dll.

Biaya-biaya ini jumlahnya bervariasi namun sangat memberatkan masyarakat sasaran.

Selain itu budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di *landed house* di pinggiran kota dan belum terbiasa tinggal di rumah susun, ikut menyebabkan masih rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran MBM dan MBR di perkotaan.



Lampiran 5

Berita Acara Perbaikan Tesis



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
KEKHUSUSAN MANAJEMEN PROYEK
DEPOK
PERNYATAAN PERBAIKAN TESIS

Dengan ini dinyatakan bahwa pada :

Hari : Rabu, 22 Juni 2011
Jam : 12.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.1 Salemba

Telah berlangsung Ujian Tesis Semester Genap 2010/2011 Program Studi Teknik Sipil, Program Pendidikan Magister Bidang Ilmu Manajemen Proyek, Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan peserta :

Nama Mahasiswa : Rahmat Yusmal Andi
No. Mahasiswa : 0906580073
Judul Tesis : Analisa Penyerapan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Oleh Masyarakat Berpenghasilan Menengah Kebawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perkotaan

Dan dinyatakan harus menyelesaikan perbaikan Tesis yang diminta oleh Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing, yaitu :

Dosen Penguji I : M. Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D

No	Pernyataan/Saran	Keterangan/Penjelasan
1	Hasil yang penting dalam penelitian ini.	Dijelaskan di Bab 7, subbab 7.1 tentang kesimpulan penelitian, Hal.158
2	Perbandingan antara jumlah KPR yang diajukan terhadap yang disetujui.	Dijelaskan di Bab 6, subbab 6.2.4 tentang Penyerapan KPR Sarasuna Bersubsidi, Hal.145
3	Alasan 1558 debitur belum mengalami realisasi KPR Sarasuna bersubsidi.	Dijelaskan di Bab 6, subbab 6.2.4 tentang Penyerapan KPR Sarasuna Bersubsidi, Hal.145
4	Porsi MBM, MBR, dan Non subsidi dalam satu tower Rusunami.	Ditambahkan di Bab 4, subbab 4.8 tentang Perencanaan, Pengaturan, dan Pengawasan Pembangunan Proyek Rusunami, Hal.95
5	Apa penyebab penyerapan MBR hanya 4% ?	Dijelaskan di Bab 5, subbab 5.3 tentang Hasil Pengumpulan Data Skunder, Hal.118 dan dipertegas, Hal.122 dan Hal.128
6	Rekomendasi hasil penelitian.	Dijelaskan dan disempurnakan di Bab 7, subbab 7.1 tentang kesimpulan penelitian, Hal.160

Dosen Penguji II : Ir. Eddy Subiyanto, MM. MT

No	Pernyataan/Saran	Keterangan/Penjelasan
1	Laba minimal 20% pada lahan agar investor tertarik.	Ditambahkan di Bab 6, subbab 6.3.2.1 tentang Harga Rusunami Vs Penghasilan Kelompok Sasaran, Hal.148
2	Hubungan harga tanah, luas tanah, dan jumlah lantai.	Ditambahkan di Bab 6, subbab 6.3.2.1 tentang Harga Rusunami Vs Penghasilan Kelompok Sasaran, Hal.148
3	Harus ada pertimbangan dari sisi investor mengenai luas bangunan.	Ditambahkan di Bab 6, subbab 6.3.2.1 tentang Harga Rusunami Vs Penghasilan Kelompok Sasaran, Hal.148
4	Koefisien KDB yang ada pada Rusunami.	Ditambahkan di Bab 6, subbab 6.3.2.1 tentang Harga Rusunami Vs Penghasilan Kelompok Sasaran, Hal.148
5	Pada daerah perkotaan harga tanah sudah tinggi, dari sisi investasi lebih menarik di pinggiran kota.	Dijelaskan di Bab 7, subbab 7.2 tentang Saran Penelitian, Hal.162
6	Harus ada stakeholder analisis agar project financing dapat terintegrasi.	Disempurnakan di Bab 6, subbab 6.3.4 tentang tentang Manfaat Penelitian Bagi Para Stakeholder, Hal.154

Dosen Penguji III : Juanto Sitorus, S,si, MT, PMP

No	Pernyataan/Saran	Keterangan/Penjelasan
1	Penjelasan penyerapan masyarakat sasaran di setiap kota.	Disempurnakan di Bab 2, subbab 2.2.2 tentang Rusunami Sebagai Infrastruktur, Hal.11
2	Penelitian dari sisi stakeholder MBM dan MBR kenapa tidak dilakukan ?	Dijelaskan di Bab 3, subbab 3.3 tentang Proses Penelitian, Hal.55

Dosen Pembimbing II : Prof. Dr. Ir. Yusuf Latief, MT

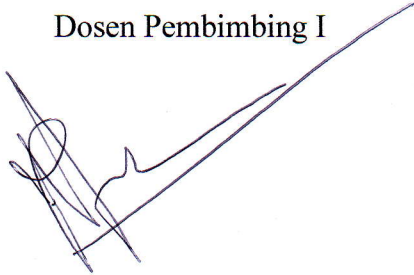
No	Pernyataan/Saran	Keterangan/Penjelasan
1	Kaitan hasil penelitian dengan Manajemen Proyek.	Ditambahkan di Bab 6, subbab 6.3.5 tentang Kaitan Hasil Penelitian dengan Manajemen Proyek, Hal.155

Tesis ini telah selesai diperbaiki sesuai dengan keputusan Sidang Tesis pada tanggal 22 Juni 2011 dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing.

Jakarta, 22 Juni 2011

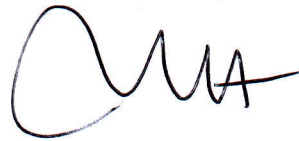
Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



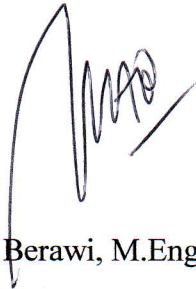
Dr. Ir. Ismeth Abidin

Dosen Pembimbing II



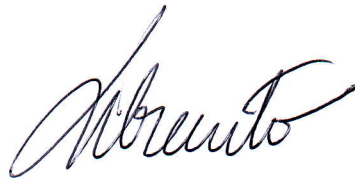
Prof. Dr. Ir. Yusuf Latief, MT

Dosen Penguji I



M. Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D

Dosen Penguji II



Ir. Eddy Subiyanto, MM. MT

Dosen Penguji III



Juanto Sitorus, S,si, MT, PMP